KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

#Investasi Tumbuh Indonesia Maju

# LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

# 2025

# LAPORAN KINERJA 2025

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

# KATA PENGANTAR

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan investasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan bernilai tambah. Peran ini semakin penting di tengah dinamika ekonomi global yang kompetitif dan penuh tantangan.

**Rosan Perkasa Roeslani**

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Sepanjang tahun 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil mencatatkan capaian kinerja yang positif meskipun menghadapi berbagai dinamika dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Nilai realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun atau melampaui target sebesar Rp1.905,6 triliun, dengan pertumbuhan 12,7 persen dibandingkan tahun 2024. Realisasi tersebut turut memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja melalui penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.710.532 orang, meningkat 10,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja organisasi. Dari sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada tahun 2025, lima indikator berhasil melampaui target. Secara keseluruhan, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 89,93 dengan predikat "Baik" dan tingkat efisiensi sebesar 6,28 persen. Hasil ini mencerminkan semakin kuatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi.

Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran negara dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Laporan ini sekaligus menjadi sarana refleksi untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja yang telah dicapai. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang akan terus diupayakan guna mewujudkan tata kelola perencanaan, penganggaran, dan kinerja yang semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Keluarga Besar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan, sinergi, dan kolaborasi yang konstruktif sepanjang tahun 2025. Apresiasi disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia usaha, asosiasi, akademisi, serta seluruh mitra kerja yang telah berkontribusi dalam memperkuat ekosistem investasi dan hilirisasi nasional. Sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan merupakan kunci dalam meningkatkan investasi yang inklusif, berorientasi ekspor, dan merata, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, 27 Februari 2026

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/**
**Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal**

**Rosan Perkasa Roeslani**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat capaian kinerja yang positif pada tahun 2025 dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 89,93 atau berpredikat "Baik".

Dari sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, sebagian besar menunjukkan capaian sangat baik, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Nilai PMA dan PMDN** terealisasi sebesar Rp1.931,2 triliun dari target Rp1.905,6 triliun (101,34 persen), berpredikat **Istimewa**.

2. **Nilai PMA/PMDN sektor sekunder** mencapai Rp780,9 triliun dari target Rp855,9 triliun (91,23 persen), berpredikat **Baik**.

3. **Persentase realisasi PMDN termasuk UMKM** mencapai 53,4 persen dari target 48,3 persen (110,51 persen dan menjadi 110 persen setelah normalisasi), berpredikat **Istimewa**.

4. **Nilai PMA/PMDN di kawasan pusat pertumbuhan** terealisasi sebesar Rp445,8 triliun dari target Rp307,1 triliun (145,16 persen dan menjadi 110 persen setelah normalisasi), berpredikat **Istimewa**.

5. **Nilai PMA berorientasi ekspor** mencapai Rp135,8 triliun dari target Rp171,6 triliun (79,14 persen), berpredikat **Butuh Perbaikan**.

6. **Nilai PMDN berorientasi ekspor** terealisasi sebesar Rp58,3 triliun dari target Rp60,4 triliun (96,52 persen), berpredikat **Baik**.

7. **Kontribusi realisasi investasi luar Jawa** mencapai 51,3 persen dari target 52,1 persen (98,51 persen), berpredikat **Baik**.

8. **Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi** mencapai Rp584,1 triliun dari target Rp521,4 triliun (112,03 persen dan menjadi 110 persen setelah normalisasi), berpredikat **Istimewa**.

9. **Indeks Reformasi Birokrasi** mencapai 78,13 dari target 76,20 (102,53 persen), berpredikat **Istimewa**.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengelola anggaran pada tahun 2025 (setelah pemblokiran) sebesar Rp862.858.544.000 dengan realisasi Rp807.946.726.254 atau tingkat serapan **93,64 persen**. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya mencapai **6,28 persen**, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja mampu melampaui target dengan pemanfaatan anggaran yang relatif optimal, efektif, dan terkendali. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) penyelarasan perencanaan kinerja dan anggaran sejak awal tahun; (2) penguatan fungsi pengendalian dan *monitoring* secara berkala; (3) optimalisasi penggunaan teknologi informasi, termasuk SIMANTAB dan sistem pendukung lainnya; (4) peningkatan kualitas koordinasi internal dan lintas unit kerja; (5) fokus pada *output* dan *outcome* prioritas; serta (6) penerapan prinsip *value for money*.

Sepanjang tahun 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja, antara lain: (1) penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dan Renstra pada masing-masing unit kerja periode 2025–2029; dan (2) penguatan serta peningkatan implementasi tata kelola kinerja melalui Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Berdampak (SIMANTAB).

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menyusun rencana aksi perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang akan dilaksanakan secara terkoordinasi oleh seluruh unit kerja guna memastikan perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas kinerja organisasi.

# DAFTAR ISI


- KATA PENGANTAR ii
- RINGKASAN EKSEKUTIF iv
- DAFTAR ISI vi
- DAFTAR TABEL viii
- DAFTAR GAMBAR xi

## BAB I - PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang 4
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 7
1.3 Maksud dan Tujuan 18
1.4 Aspek Strategis 20
1.5 Isu Strategis 21
1.6 Sistematika Laporan 22


## BAB II - PERENCANAAN KINERJA


2.1 Rencana Strategis 29
2.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan 30
2.1.2 Sasaran Strategis 31
2.1.3 Target Kinerja 32
2.2 Perjanjian Kinerja 35
2.3 Teknik Pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 39

## BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025 44

3.2 Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025 46

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Tahun 2025 48

3.3.1 Tujuan "Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan" 48

3.3.2 Sasaran "Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Tinggi, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata" 61

3.3.3 Sasaran "Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif, serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima" 109

3.4 Capaian Nilai SAKIP terhadap Pencapaian IKU 118

3.5 Capaian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025 Terhadap Indikator RPJMN 2025-2029 120

3.6 Capaian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Terhadap Target Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 124

3.7 Peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional Tahun 2025 126

3.8 Capaian Kinerja Anggaran 133

3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 140

## BAB IV - INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP Tahun 2024 146

4.1.1 Penetapan Renstra Tahun 2025-2029 151

4.1.2 Peningkatan implementasi tata kelola kinerja melalui Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Berdampak (SIMANTAB) 153

4.2 Rencana Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP Tahun 2025 171

## BAB V - PENUTUP

5.1 Kesimpulan 176

5.2 Saran 180

## LAMPIRAN 183

# DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| **Tabel 2.1** | Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029 | **34** |
| **Tabel 2.2** | Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025 | **36** |
| **Tabel 2.3** | Alokasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Tahun 2025 Berdasarkan Program dan Satuan Kerja | **37** |
| **Tabel 2.4** | Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | **40** |
| **Tabel 2.5** | Matriks Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) | **41** |
| **Tabel 2.6** | Predikat PKO | **41** |
| **Tabel 3.1** | Capaian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025 | **45** |
| **Tabel 3.2** | Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025 | **47** |
| **Tabel 3.3** | Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMA dan PMDN | **48** |
| **Tabel 3.4** | Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMA/PMDN Sektor Sekunder | **61** |
| **Tabel 3.5** | Realisasi Investasi Tahun 2025 Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier | **62** |
| **Tabel 3.6** | Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder Per Subsektor (Rp Triliun) Tahun 2025 | **63** |
| **Tabel 3.7** | Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) | **69** |
| **Tabel 3.8** | Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMA/PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan | **76** |
| **Tabel 3.9** | Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMA Berorientasi Ekspor | **80** |
| **Tabel 3.10** | Realisasi Nilai PMA Berorientasi Ekspor | **81** |

# DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| **Tabel 3.11** | Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMA Berorientasi Ekspor | **86** |
| **Tabel 3.12** | Realisasi PMDN Berorientasi Ekspor | **87** |
| **Tabel 3.13** | Capaian Indikator Kinerja Utama Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa | **92** |
| **Tabel 3.14** | Nilai Realisasi Penanaman Modal di Luar Jawa | **93** |
| **Tabel 3.15** | Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi | **98** |
| **Tabel 3.16** | Daftar Perusahaan yang Mendapatkan Fasilitasi Penyelesaian Kendala Investasi Sektor Hilirisasi Tahun 2025 | **101** |
| **Tabel 3.17** | Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | **109** |
| **Tabel 3.18** | Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Tahun 2025 pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi | **110** |
| **Tabel 3.19** | Indeks Kepuasan Layanan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 | **111** |
| **Tabel 3.20** | Perbandingan Nilai SAKIP dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024 dan 2025 | **119** |
| **Tabel 3.21** | Pencapaian Target Indikator RPJMN 2025-2029 yang diampu oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025 | **121** |
| **Tabel 3.22** | Capaian Sasaran Ekonomi Makro Bidang Penanaman Modal pada RKP Tahun 2025 | **124** |
| **Tabel 3.23** | Program/Kegiatan/Proyek Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Target, Realisasi, dan Persentase Capaian terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2025 | **127** |
| **Tabel 3.24** | Pagu Anggaran per Jenis Belanja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM T.A. 2025 | **133** |

# DAFTAR TABEL

| | | |
|---|---|---|
| **Tabel 3.25** | Pagu Anggaran per Program Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2025 | **134** |
| **Tabel 3.26** | Realisasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Program | **136** |
| **Tabel 3.27** | Realisasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Jenis Belanja | **136** |
| **Tabel 3.28** | Pagu dan Realisasi Belanja Setiap Indikator Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2025 | **138** |
| **Tabel 3.29** | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025 | **141** |
| **Tabel 4.1** | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2024 | **148** |

# DAFTAR GAMBAR


| | | |
|---|---|---|
| **Gambar 1.1** | Struktur Organisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | **16** |
| **Gambar 2.1** | Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Unit Kerja Pengampu | **32** |
| **Gambar 3.1** | Nilai Realisasi Investasi Januari-Desember 2025 | **49** |
| **Gambar 3.2** | Realisasi Investasi Nasional Tahun 2021-2025 | **50** |
| **Gambar 3.3** | Lima Besar Lokasi PMA dan PMDN Tahun 2025 | **50** |
| **Gambar 3.4** | Lima Besar Lokasi PMA Tahun 2025 | **51** |
| **Gambar 3.5** | Lima Besar Lokasi PMDN Tahun 2025 | **52** |
| **Gambar 3.6** | Lima Besar Lokasi PMA dan PMDN Tahun 2021-2025 | **53** |
| **Gambar 3.7** | Lima Besar Lokasi PMA Tahun 2021-2025 | **54** |
| **Gambar 3.8** | Lima Besar Lokasi PMDN Tahun 2021-2025 | **55** |
| **Gambar 3.9** | Lima Besar Subsektor PMA dan PMDN Tahun 2025 | **55** |
| **Gambar 3.10** | Lima Besar Subsektor PMA Tahun 2025 | **56** |
| **Gambar 3.11** | Lima Besar Subsektor PMDN Tahun 2025 | **56** |
| **Gambar 3.12** | Lima Besar Sektor Sub Sektor PMA Tahun 2021-2025 | **57** |
| **Gambar 3.13** | Lima Besar Sektor Sub Sektor PMDN Tahun 2021-2025 | **58** |
| **Gambar 3.14** | Lima Besar Negara Asal PMA Tahun 2025 | **59** |
| **Gambar 3.15** | Lima Besar Negara Asal PMA Tahun 2021-2025 | **60** |
| **Gambar 3.16** | Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2021-2025 | **60** |
| **Gambar 3.17** | Kontribusi Nilai PMA/PMDN Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier Tahun 2025 | **62** |

## DAFTAR GAMBAR


| | | |
|---|---|---|
| **Gambar 3.18** | Pelaksanaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 | **65** |
| **Gambar 3.19** | Kegiatan Business Matching antara pelaku Usaha Besar dan UMKM di Cibubur, Jawa Barat | **70** |
| **Gambar 3.20** | Pelaksanaan RIF 2025 di Bandung, Jawa Barat | **73** |
| **Gambar 3.21** | Indonesia Economic and Investment Outlook 2025 | **82** |
| **Gambar 3.22** | World Economic Forum (WEF) Annual Meeting | **83** |
| **Gambar 3.23** | Penyelenggaraan Forum Diskusi: Optimalisasi Hilirisasi Perikanan untuk Percepatan Transformasi Ekonomi | **88** |
| **Gambar 3.24** | Business Talk & Networking between Thailand-Indonesia | **89** |
| **Gambar 3.25** | Fasilitasi Western Australian Chinese Chamber of Commerce (WACCC) | **95** |
| **Gambar 3.26** | Nilai Realisasi Bidang Hilirisasi Tahun 2025 | **98** |
| **Gambar 3.27** | Nilai Investasi Bidang Hilirisasi TW IV 2024-TW IV 2025 | **99** |
| **Gambar 3.28** | Kunjungan Lapangan dan Rapat Koordinasi Renaksi KOALISI | **100** |
| **Gambar 3.29** | Fasilitasi Pelepasan Ekspor Ikan Tilapia PT Regal Spring Indonesia ke Amerika | **102** |
| **Gambar 3.30** | Rapat Koordinasi Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis AGREGASI Tahun 2025 Komoditas Pasir Silika di Provinsi Jawa Barat | **103** |
| **Gambar 3.31** | Pelaksanaan Indonesia Green Mineral Investment Forum (IGMIF) 2025 | **105** |
| **Gambar 3.32** | Assessment Center | **110** |
| **Gambar 3.33** | Grafik Nilai Per Unsur Pelayanan | **112** |
| **Gambar 3.34** | Uji Publik oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) | **113** |
| **Gambar 3.35** | Workshop Penguatan Budaya Kerja bagi CPNS | **114** |

## DAFTAR GAMBAR


| | | |
|---|---|---|
| **Gambar 3.36** | Workshop Induction Program bagi PPPK T.A. 2024 tentang Budaya Kerja BerAKHLAK | **115** |
| **Gambar 3.37** | Pelatihan & Diklat ASN (Pusdiklat BKPM) | **116** |
| **Gambar 3.38** | Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020–2025 | **135** |
| **Gambar 3.39** | Grafik Kinerja Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM per Bulan T.A 2025 | **137** |
| **Gambar 3.40** | Perkembangan Efisiensi Sumber Daya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2021-2025 | **143** |
| **Gambar 4.1** | Desain *Landing Page* | **154** |
| **Gambar 4.2** | Desain submenu publik Perencanaan Kinerja | **155** |
| **Gambar 4.3** | Desain submenu publik Perencanaan Kinerja (Rencana Strategis) | **155** |
| **Gambar 4.4** | Desain submenu publik Perencanaan Kinerja (Perjanjian Kinerja) | **156** |
| **Gambar 4.5** | Desain submenu publik Pengukuran Kinerja | **156** |
| **Gambar 4.6** | Desain submenu publik Pelaporan Kinerja | **157** |
| **Gambar 4.7** | Desain submenu publik Evaluasi Kinerja | **157** |
| **Gambar 4.8** | Tampilan dropdown menu INSPIRASI | **158** |
| **Gambar 4.9** | Contoh Desain INSPIRASI pada Rencana Kerja | **159** |
| **Gambar 4.10** | Desain Penyesuaian Capaian Rencana Aksi | **161** |
| **Gambar 4.11** | Desain Penyesuaian Verifikasi Rencana Aksi | **161** |
| **Gambar 4.12** | Desain Warning Capaian Indikator Kinerja | **162** |
| **Gambar 4.13** | Desain Optimalisasi Verifikasi Indikator Kinerja | **163** |

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 4.14** Desain Menu Penilaian Kinerja Organisasi **164**
**Gambar 4.15** Desain Matriks Penilaian Kinerja Organisasi **165**
**Gambar 4.16** Desain Fitur Menu Rekap Dokumen **165**
**Gambar 4.17** Desain Menu Pohon Kinerja pada Modul Pelaporan Kinerja **166**
**Gambar 4.18** Desain Pemeringkatan Kinerja **166**
**Gambar 4.19** Desain LHE AKIP **167**
**Gambar 4.20** Desain *Input* LHE AKIP **167**
**Gambar 4.21** Desain Verifikasi Rekomendasi LHE **167**
**Gambar 4.22** Desain *Input* Verifikasi Rekomendasi LHE **168**
**Gambar 4.23** Desain Menu Verifikasi Rencana Aksi **168**
**Gambar 4.24** Desain Menu Matriks Efisiensi **169**
**Gambar 4.25** Desain Laporan Matriks Efisiensi **169**
**Gambar 4.26** Desain Menu Kerangka Logis – List Unit Kerja **170**
**Gambar 4.27** Desain Menu Kerangka Logis – Bagan Kerangka Logis (Data Lengkap) **170**

KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

BAB I

# PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- Maksud dan Tujuan
- Aspek Strategis
- Isu Strategis
- Sistematika Laporan

# 1.1 Latar Belakang

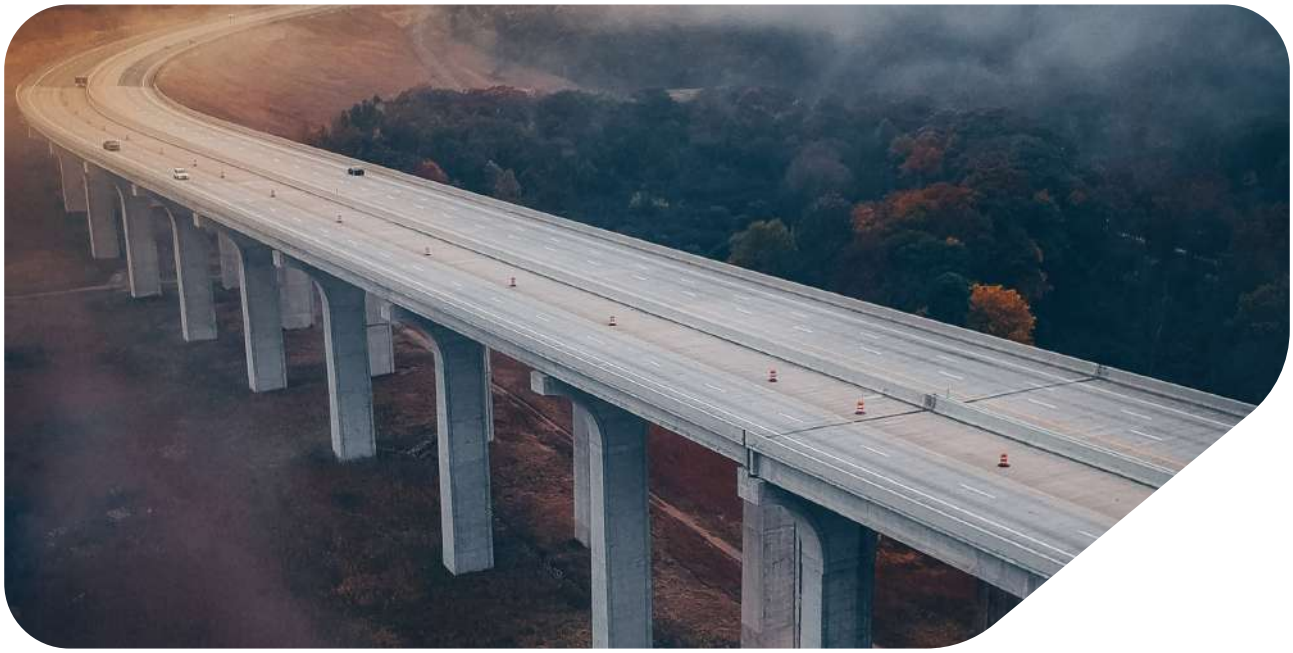

Tahun 2025 merupakan periode awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025–2029. Tahun ini sekaligus menjadi fondasi pencapaian target dan sasaran RPJMN 2025–2029 serta langkah awal menuju visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, capaian kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025 menjadi landasan penting dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra 2025–2029, serta memberikan kontribusi strategis terhadap pencapaian RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat capaian kinerja yang positif sepanjang tahun 2025, meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tantangan utama yang dihadapi antara lain kebijakan efisiensi anggaran belanja sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk mendukung pelaksanaan program dan kinerja di bidang penanaman modal. Kondisi ini menuntut optimalisasi prioritas program, peningkatan efisiensi belanja, serta penguatan efektivitas kebijakan agar target realisasi investasi tetap dapat tercapai secara optimal. Selain itu, dinamika makroekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian perdagangan internasional turut menjadi tantangan eksternal yang signifikan. Kondisi tersebut memengaruhi pertimbangan calon investor dalam menentukan nilai dan lokasi proyek investasi. Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat turut meningkatkan fragmentasi perdagangan global dan risiko stagflasi, yang berpotensi menekan iklim investasi global. Situasi ini pada akhirnya berdampak pada arus masuk investasi asing ke Indonesia.

Dalam kondisi efisiensi anggaran dan dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tetap mampu mencatatkan kinerja yang positif. Nilai realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun, melampaui target tahun 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun (101,3 persen). Capaian tersebut tumbuh 12,7 persen dibandingkan realisasi investasi tahun 2024. Realisasi investasi tahun 2025 tersebut berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 2.710.532 orang, meningkat 10,4 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 2.456.130 orang. Dari total realisasi investasi tahun 2025 sebesar Rp1.931,2 triliun, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berkontribusi sebesar 53,4 persen atau Rp1.030,3 triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar 46,6 persen atau Rp900,9 triliun. Dari sisi sektoral, sektor hilirisasi menunjukkan kontribusi yang semakin signifikan dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp584,1 triliun atau 30,2 persen dari total realisasi investasi nasional tahun 2025. Dari sisi persebaran wilayah, investasi di luar Pulau Jawa mencapai 51,3 persen atau sebesar Rp991,2 triliun, sedangkan investasi di Pulau Jawa sebesar 48,7 persen atau Rp940,0 triliun. Hal ini mencerminkan semakin meratanya distribusi investasi secara geografis. Secara keseluruhan, peningkatan capaian realisasi investasi tersebut menunjukkan kinerja positif Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sepanjang tahun 2025, yang berkontribusi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan kepercayaan investor di tengah dinamika ekonomi global dan nasional.

Kinerja positif sepanjang tahun 2025 menunjukkan komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Selama tahun 2025, Kementerian Investasi dan

**Nilai Realisasi Investasi**
Sepanjang tahun 2025

**Rp1.931,2** triliun ↑ 101,3%

**Penanaman Modal Dalam Negeri**
Sepanjang tahun 2025

**Rp1.030,3** triliun ↑ 53,4%

**Penanaman Modal Asing**
Sepanjang tahun 2025

**Rp900,9** triliun ↑ 46,6%

**Kontribusi Sektor Hilirisasi**
Sepanjang tahun 2025

**Rp584,1** triliun ↑ 30,2%

Hilirisasi/BKPM terus berupaya meningkatkan nilai realisasi penanaman modal sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerjanya. Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain promosi investasi berbasis Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penguatan kebijakan hilirisasi industri bernilai tambah tinggi guna mendorong transformasi ekonomi dan peningkatan daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan iklim investasi, kepastian hukum dan efektivitas kemitraan usaha, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menerbitkan sejumlah peraturan, di antaranya Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah; dan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah ini mengklasifikasikan perizinan berdasarkan tingkat risiko usaha (rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi), serta menjamin proses perizinan yang lebih cepat, transparan, dan berkeadilan guna meningkatkan kepastian hukum dan daya tarik investasi di Indonesia.

Laporan Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini memberikan informasi mengenai capaian kinerja, penggunaan sumber daya, serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025 sebagai dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya, sekaligus sebagai sarana transparansi publik dalam menilai capaian kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang investasi dan hilirisasi.

# 1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi, tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan di bidang hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang investasi dan hilirisasi
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan hilirisasi
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi dibantu oleh:

1. Sekretariat kementerian
2. Staf ahli bidang peningkatan daya saing penanaman modal
3. Staf ahli bidang ekonomi makro
4. Staf ahli bidang hubungan kelembagaan
5. Staf ahli bidang pengembangan sektor investasi prioritas; dan
6. Staf ahli bidang pemerataan dan kemitraan penanaman modal.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, BKPM memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BKPM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
3. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
4. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
5. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
6. Pembuatan peta penanaman modal indonesia;
7. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
8. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
9. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan, dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
10. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
11. Koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah indonesia;

12. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
13. Koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis;
14. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPM;
15. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKPM;
16. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal terdiri dari:

1. Kepala
2. Wakil Kepala
3. Sekretariat Utama
4. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
5. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
6. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
7. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
8. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
9. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
10. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
11. Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

Dalam rangka mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, telah ditetapkan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Menteri/Kepala dalam peraturan tersebut memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.

Wakil Menteri/Wakil Kepala mempunyai tugas, antara lain:

1. Membantu Menteri/Kepala dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian/Badan; dan
2. Membantu Menteri/Kepala dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian/Badan.

## Sekretariat Kementerian/Sekretaris Utama

Sekretariat Kementerian/Sekretaris Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kementerian/Sekretaris Utama menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;

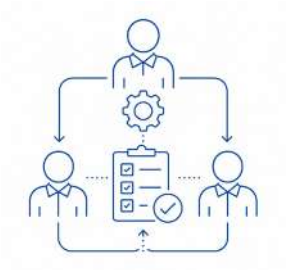

4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
7. Pengelolaan data dan informasi; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala

## Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
3. Pengkajian dan pengusulan perencanaan dan inovasi penanaman modal nasional menurut sektor usaha;
4. Pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
7. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri/kepala.

## Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis;
3. Pengembangan potensi dan peluang bidang hilirisasi investasi strategis;
4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hilirisasi investasi strategis; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri/kepala.

## Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
3. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
4. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;

5. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
7. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
8. Pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri/kepala.

## Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
3. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi penanaman modal;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi penanaman modal;
6. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi penanaman modal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri/kepala.

## Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
3. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
4. Koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama penanaman modal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri/kepala.

## Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
3. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
4. Koordinasi pelaksanaan penempatan perwakilan/pejabat dari sektor terkait dalam pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
5. Koordinasi pemberian pelayanan perizinan, pelayanan berbantuan, dan pelayanan fasilitas penanaman modal;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan penanaman modal;

7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penanaman modal;
8. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan penanaman modal; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri/kepala.

## Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
3. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
4. Fasilitasi persebaran penanaman modal di seluruh indonesia dan penyelesaian permasalahan dan kendala pelaku usaha;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan perizinan berbasis risiko dan pengawasan administratif dan/atau fisik realisasi penanaman modal;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
8. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

## Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang data dan sistem informasi penanaman modal;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang data dan sistem informasi penanaman modal;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi informasi penanaman modal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

## Menteri/Kepala

Menteri/Kepala dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Staf Ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama, yang terdiri dari:

1. Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan peningkatan daya saing penanaman modal.
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan ekonomi makro.
3. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan hubungan kelembagaan dan transformasi digital.
4. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan pengembangan sektor investasi prioritas
5. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan pemerataan dan kemitraan penanaman modal.

## Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian/ Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian/Badan;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri/Kepala;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

## Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis bagi aparatur di bidang penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan meneyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program pendidikan dan pelatihan;
2. Penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
3. Penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan;
4. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional penanaman modal dan non penanaman modal, dan teknis bagi aparatur;
5. Penyusunan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
6. Pelaksanaan administrasi pusat.

## Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal

Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
2. Penyiapan perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, serta pertimbangan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
3. Pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit, serta pemantauan dan evaluasi kinerja Pejabat Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
4. Penyiapan koordinasi dan penyusunan standar kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
5. Pelaksanaan penilaian kompetensi teknis;
6. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dan fasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
7. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan layanan informasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
8. Pelaksanaan pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi;
9. Pelaksanaan evaluasi pengembangan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal; dan
10. Pelaksanaan administrasi pusat.

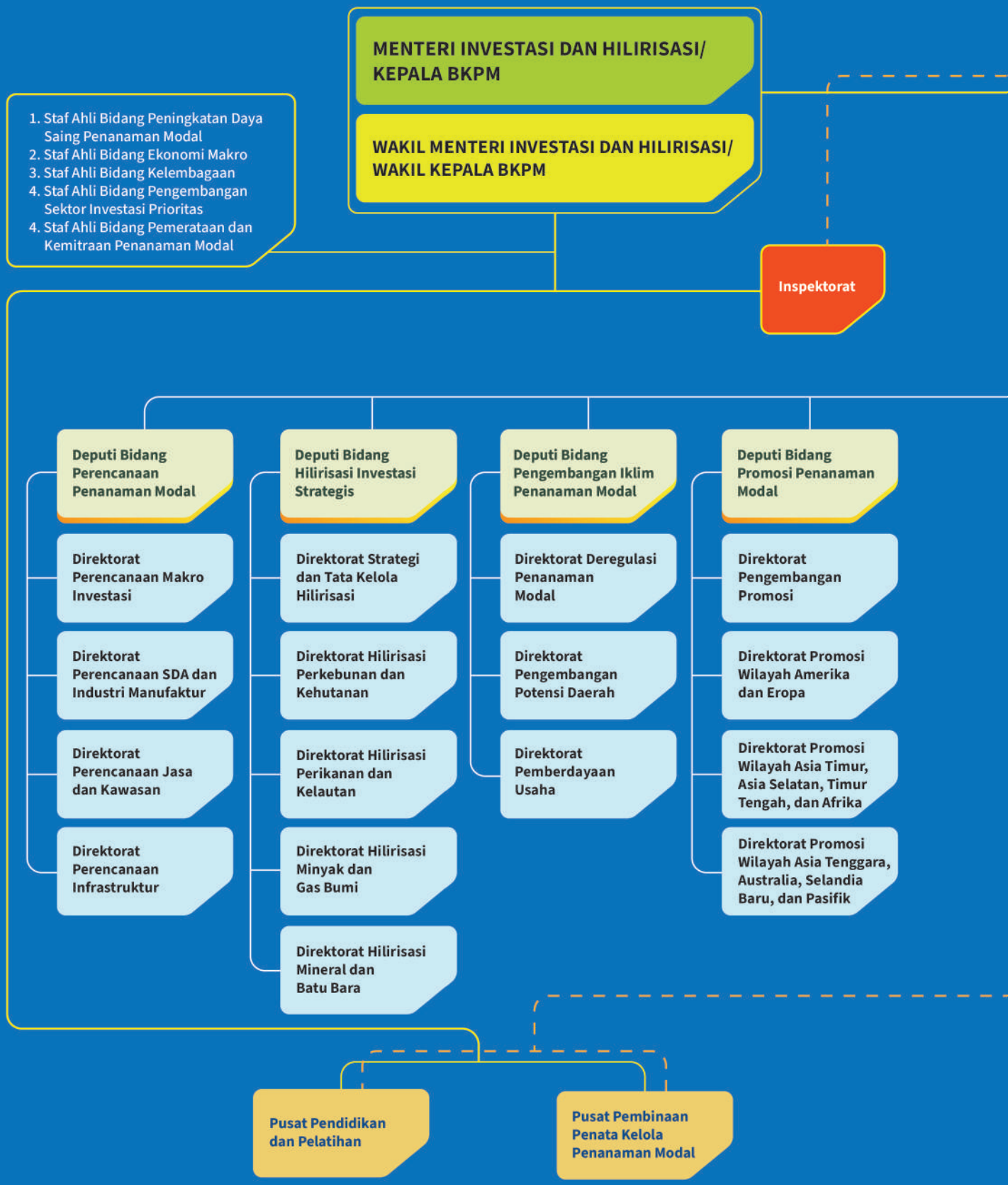
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BKPM
WAKIL MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ WAKIL KEPALA BKPM
1. Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro
3. Staf Ahli Bidang Kelembagaan
4. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas
4. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal
Inspektorat
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
Direktorat Perencanaan Makro Investasi
Direktorat Perencanaan SDA dan Industri Manufaktur
Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan
Direktorat Perencanaan Infrastruktur
Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
Direktorat Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi
Direktorat Hilirisasi Perkebunan dan Kehutanan
Direktorat Hilirisasi Perikanan dan Kelautan
Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi
Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batu Bara
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
Direktorat Pengembangan Potensi Daerah
Direktorat Pemberdayaan Usaha
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
Direktorat Pengembangan Promosi
Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa
Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika
Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal

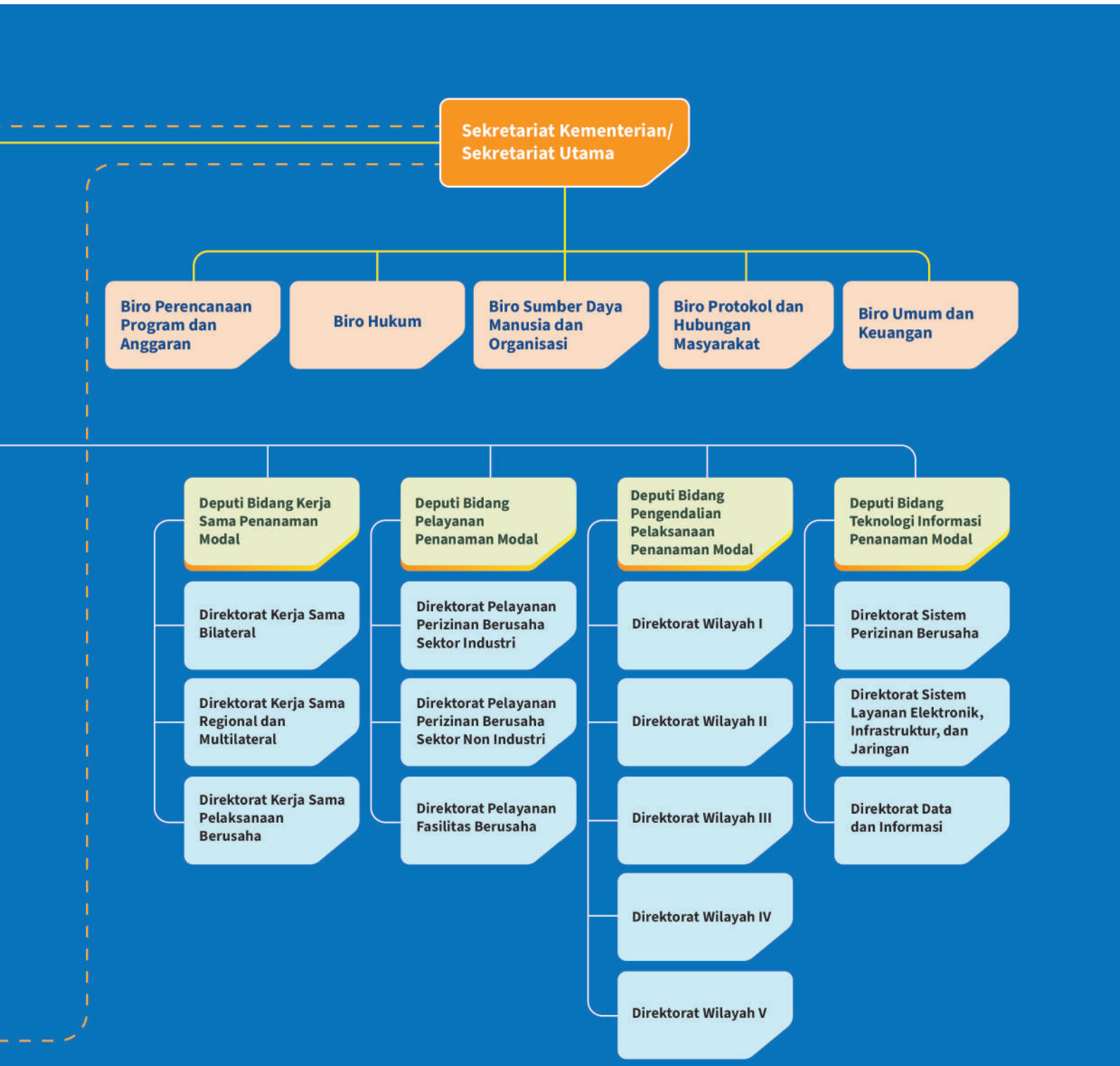


Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Sumber:
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

# 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki peran penting sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah. Laporan ini bukan sekadar bentuk pelaporan administratif, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Terdapat sejumlah maksud utama dalam penyusunan laporan kinerja ini, antara lain:

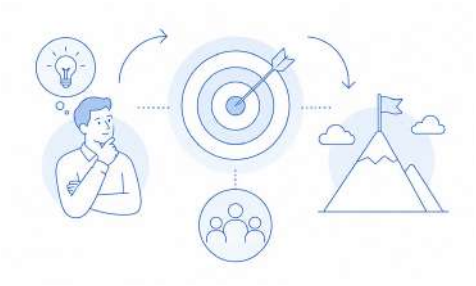

## 1. Evaluasi Kinerja

Menjadi alat evaluatif untuk mengukur sejauh mana target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal. Selain itu, laporan ini turut mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

## 2. Penguatan Akuntabilitas

Laporan kinerja menjadi sarana pertanggungjawaban formal atas penggunaan anggaran, sumber daya manusia, serta kebijakan yang dijalankan. Dengan demikian, laporan ini memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya publik memberikan dampak nyata bagi pencapaian tujuan organisasi.

## 3. Peningkatan Transparansi

Penyusunan laporan kinerja mencerminkan keterbukaan informasi kepada berbagai pemangku kepentingan, baik internal kementerian maupun eksternal seperti lembaga pengawas, instansi pemerintah lain, dan masyarakat umum. Transparansi ini mendukung terbentuknya kepercayaan publik terhadap integritas dan kinerja birokrasi.

## 4. Mendorong Perbaikan Berkelanjutan

Laporan kinerja memberikan dasar yang kuat untuk menelaah proses bisnis, merumuskan umpan balik strategis, dan mengembangkan rencana tindak lanjut untuk penyempurnaan kebijakan, program, maupun manajemen internal secara berkesinambungan.

Sementara itu, tujuan penyusunan laporan kinerja ini secara lebih spesifik dapat dirinci sebagai berikut:

### 1 Monitoring Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Laporan kinerja membantu dalam memantau kemajuan terhadap sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Monitoring ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program ke depan.

### 2 Penilaian Efektivitas dan Efisiensi

Dokumen ini menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Penilaian ini penting sebagai bagian dari proses reflektif organisasi.

### 3 Justifikasi Penggunaan Anggaran

Laporan memberikan pembenaran yang logis dan terukur atas anggaran yang telah dialokasikan dan digunakan. Dengan menampilkan capaian hasil dan dampaknya, laporan ini berkontribusi dalam memperkuat kredibilitas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam pengelolaan anggaran negara.

### 4 Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Penyusunan laporan ini mendukung peningkatan tata kelola organisasi secara menyeluruh, khususnya dalam hal dokumentasi, pengambilan keputusan berbasis data, serta konsistensi pelaksanaan program sesuai rencana yang telah ditetapkan.

### 5 Dasar Pengambilan Keputusan Strategis

Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini menjadi referensi penting dalam menetapkan kebijakan, strategi organisasi, serta pengalokasian sumber daya secara tepat dan efektif.

Dengan memahami maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja secara menyeluruh, diharapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat terus memperkuat akuntabilitas kinerja dan kualitas tata kelola, serta menjadi bagian penting dari ekosistem birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi hasil. Laporan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional.

# 1.4 Aspek Strategis

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki peran strategis sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM merupakan penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tidak hanya bertugas untuk meningkatkan investasi dari dalam maupun luar negeri, tetapi harus memastikan bahwa investasi tersebut berkualitas serta dapat menggerakkan perekonomian Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjadi *focal point* untuk menghubungkan semua sektor investasi dari kementerian teknis. Sebagai penghubung utama antara bisnis dan pemerintah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bertanggung jawab untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. Hal ini menjadikan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki peran untuk dalam penyelenggaraan urusan investasi dan hilirasasi serta pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal.

# 1.5 Isu Strategis

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menghadapi beberapa hambatan strategis dalam mencapai target kinerja yang masih memerlukan perhatian dan penguatan berkelanjutan, yaitu:

1. Tekanan ekonomi global menjadi tantangan utama terhadap capaian investasi Indonesia pada 2025. Namun demikian, realisasi investasi tetap tumbuh positif meski dalam lingkungan yang tidak stabil secara global.

2. Percepatan hilirisasi (*downstreaming*) dengan memastikan kualitas investasi dan nilai tambah domestik. Hilirisasi memberikan kontribusi besar terhadap realisasi investasi dan target nilai tambah, namun diperlukan koordinasi lintas-kementerian, kesiapan rantai pasok, serta jaminan investasi berkelanjutan.

3. Menarik investasi berkelanjutan dan teknologi tinggi. Transisi energi dan permintaan global terhadap praktik berkelanjutan menuntut kebijakan insentif dan kerangka regulasi untuk menarik proyek hijau dan industri teknologi tinggi. Indonesia berada dalam persaingan ketat untuk menarik modal asing terutama di sektor manufaktur dan teknologi, yang menuntut iklim investasi yang kompetitif serta kebijakan yang adaptif

4. Meningkatkan kapabilitas pengawasan dan tata kelola pelaksanaan investasi. Meningkatnya volume proyek investasi, perlu di imbangi dengan sistem pengawasan, pemantauan, dan penegakan aturan yang lebih kuat untuk memastikan komitmen investor terpenuhi.

5. Memperkuat daya saing regulasi dan kemudahan usaha. Perbaikan perizinan terpadu, kepastian lahan, serta penyederhanaan proses tetap menjadi faktor kunci dalam menarik investor jangka panjang.

6. Risiko lingkungan dan tata ruang yang berdampak pada keberlanjutan investasi. Tantangan tata ruang dan isu keberlanjutan kadang masih menghambat kelancaran investasi terutama di proyek yang memerlukan pertimbangan lingkungan yang tinggi.

# 1.6 Sistematika Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh Menteri/ Kepala BKPM.

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berisi ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

## BAB I PENDAHULUAN

**A. Latar Belakang**
Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi.

**B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**
Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi.

**C. Maksud dan Tujuan**
Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja.

**D. Aspek Strategis**
Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam pembangunan nasional.

**E. Isu Strategis**
Sub Bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

**F. Sistematika Laporan**
Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

# BAB II PERENCANAAN KINERJA

**A. Rencana Strategis**

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah (rencana strategis) organisasi mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan sasaran program.

**B. Perjanjian Kinerja**

Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

**C. Teknik Pengukuran Kinerja**

Sub Bab ini menyajikan teknik penilaian kinerja organisasi (NKO) sebagai ukuran yang menggambarkan tingkat capaian kinerja organisasi.

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi dengan formulasi penghitungan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025.

Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan indikator yang diampu pada RPJMN 2025-2029;
5. Informasi kinerja dalam mendukung pencapaian Program Prioritas Nasional (PN) yang diampu sesuai yang termuat dalam RKP tahun 2025;
6. Membandingkan nilai SAKIP dengan pencapaian kinerja; dan
7. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

**B. Capaian Kinerja Anggaran**

Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2025.

**C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sub Bab ini menguraikan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target.

## BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjabarkan tindak lanjut atas evaluasi kinerja tahun 2025 dan berbagai terobosan maupun inovasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja organisasi.

## BAB V PENUTUP

**A. Kesimpulan**

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

**B. Saran**

Sub Bab ini menguraikan rekomendasi perbaikan kinerja di tahun mendatang.

## LAMPIRAN

Bagian ini berisi pernyataan telah direviu, perjanjian kinerja tahun 2025, matrik informasi pencapaian kinerja organisasi, dan daftar penghargaan selama tahun 2025.

KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

- Rencana Strategis
- Perjanjian Kinerja
- Teknik Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses sistematis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam rangka menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja yang terukur sesuai dengan tugas, fungsi, visi, dan misi organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, perencanaan kinerja mencakup serangkaian tahapan yang meliputi penetapan dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan kinerja instansi pemerintah. Proses ini dilaksanakan guna memastikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Selain itu, perencanaan kinerja bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selaras dengan prioritas nasional, serta kebijakan pembangunan jangka menengah, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

# 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM periode 2025–2029 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2025. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja kementerian guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan berjalan secara efektif, terarah, dan selaras dengan visi pembangunan nasional. Rencana strategis ini menjadi kerangka strategis dalam menentukan prioritas program, kegiatan, serta sasaran kinerja yang ingin dicapai selama periode lima tahun. Dalam dokumen ini, visi dan misi kelembagaan dirumuskan secara jelas dan kemudian dielaborasi menjadi tujuan serta sasaran yang lebih spesifik. Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi alat ukur dalam menilai kinerja serta mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan. Sebagai instrumen perencanaan jangka menengah, Rencana Strategis menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

### 2.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029 adalah

> **Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045**

Makna Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah lembaga pemerintah yang menjadi *leading* sektor di bidang penanaman modal di Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Makna Tinggi adalah mendorong pencapaian realisasi penanaman modal yang lebih akseleratif pada periode 2025-2029. Realisasi penanaman modal yang lebih tinggi dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Penanaman modal diharapkan dapat menjadi pendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah melalui keterlibatan swasta terutama pada sektor-sektor yang krusial bagi masyarakat. Kinerja penanaman modal diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Makna Berkualitas adalah penanaman modal yang tidak hanya memfokuskan pada peningkatan secara kuantitas namun juga memastikan bahwa investasi tersebut menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian. Penanaman modal yang berkualitas adalah penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata. Penanaman modal yang berkualitas diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanaman modal dalam menumbuhkan kesejahteraan masyarakat termasuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Presiden RI. Perwujudan penanaman modal yang tinggi beserta peningkatan kualitasnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029, dengan Indonesia Emas 2045 sebagai visi yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029.

Berdasarkan visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 dan dukungan terhadap misi RPJMN 2025-2029, serta tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, maka rumusan misi untuk mewujudkan visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 yaitu:

> **Mengakselerasi Peningkatan Penanaman Modal untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**

Makna mengakselerasi menunjukkan urgensi untuk mempercepat proses peningkatan investasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai lembaga yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan penanaman modal, akan berupaya secara akseleratif untuk meningkatkan penanaman modal yang lebih tinggi. Kinerja penanaman modal yang optimal diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi untuk memperkuat transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Akselerasi perluasan penanaman modal termasuk investasi hilirisasi strategis dilakukan untuk mendorong upaya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, penanaman modal diharapkan dapat mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, menekankan pentingnya pengembangan pasar dalam negeri yang kuat dan terintegrasi. Misi ini juga bertujuan untuk memperluas pasar ke tingkat global, meningkatkan ekspor, dan menarik investasi asing. Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat menjadi bagian dari rantai nilai global yang lebih kompleks, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 adalah: **Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan**. Keberhasilan tujuan diukur melalui **indikator nilai PMA dan PMDN**.

### 2.1.2 Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029, sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM periode 2025-2029 yaitu:

1. **Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata**
   Sasaran strategis pertama yang ingin diwujudkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yaitu penanaman modal yang: (i) Bernilai tambah, ditandai dengan peningkatan capaian nilai realisasi penanaman modal di sektor sekunder serta di bidang hilirisasi; (ii) Inklusif, yaitu penanaman modal yang berdampak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas melalui Fasilitasi kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM termasuk UMKM dengan pelaku usaha disabilitas; (iii) Berorientasi ekspor, yaitu meningkatnya ekspor melalui kegiatan penanaman modal; (iv) Merata, yaitu penanaman modal yang lebih merata melalui peningkatan kontribusi penanaman modal di Kawasan Pusat Pertumbuhan dan di Luar Jawa. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pertama diukur dengan indikator kinerja: (1) **Nilai PMA dan PMDN sektor sekunder**; (2) Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi; (3) **Persentase realisasi PMDN termasuk UMKM**; (4) **Nilai PMA berorientasi ekspor**; (5) **Nilai PMDN berorientasi ekspor**; (6) **Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan**; (7) **Kontribusi realisasi investasi Luar Jawa**.

2. **Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif, serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima**
   Sasaran Strategis kedua yang ingin diwujudkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yaitu (i) Birokrasi yang bersih, yaitu ASN yang berintegritas dan profesional; (ii) Birokrasi yang efektif, yaitu tata kelola penanaman modal yang akuntabel dan transparan; (iii) Pelayanan penanaman modal yang prima, yaitu kualitas pelayanan penanaman modal yang semakin meningkat. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis kedua diukur dengan indikator kinerja **Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM**.

## 2.1.3 Target Kinerja

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bertujuan meningkatkan nilai realisasi penanaman modal secara signifikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Target penanaman modal ditetapkan meningkat setiap tahun, yakni Rp1.905,6 triliun pada tahun 2025; Rp2.175,3 triliun pada tahun 2026; Rp2.567,5 triliun pada tahun 2027; Rp2.969,6 triliun pada tahun 2028; hingga mencapai Rp3.414,8 triliun pada tahun 2029. Peningkatan bertahap ini mencerminkan komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk menarik lebih banyak investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan.

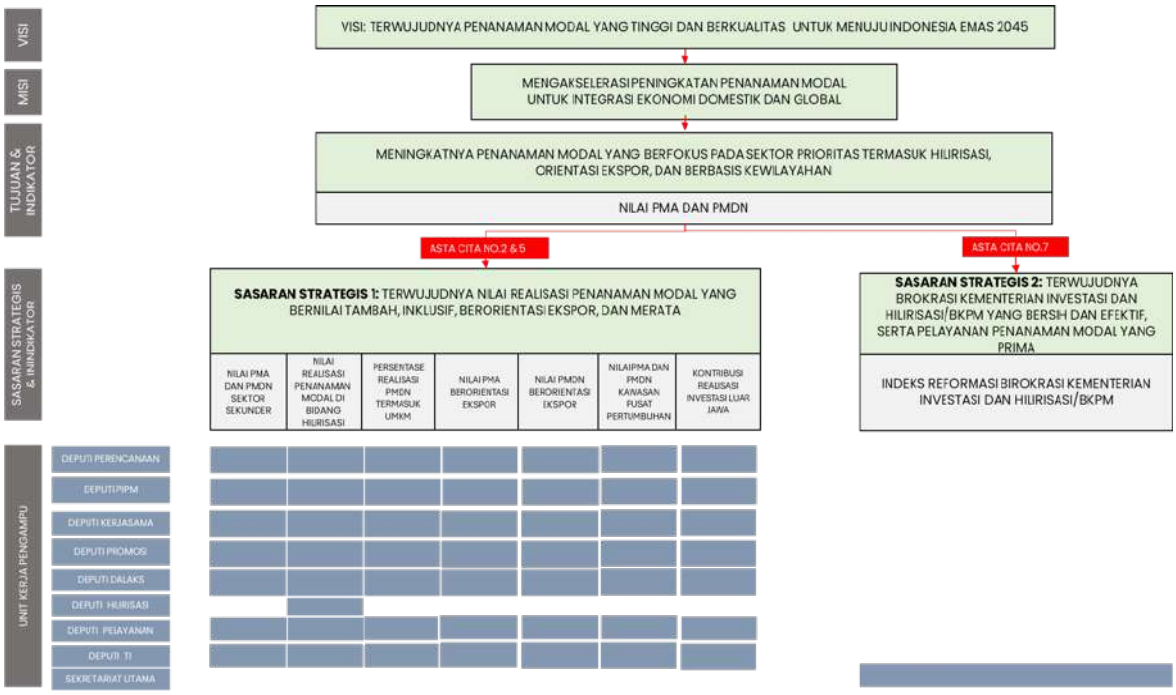


**Gambar 2.1**
Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Unit Kerja Pengampu Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029

Sasaran strategis pertama **(SS-1)** diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja. ***Pertama***, nilai realisasi penanaman modal di sektor sekunder. Hal ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan penanaman modal yang bernilai tambah, memperkuat basis industri nasional, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Target penanaman modal sektor sekunder akan meningkat secara bertahap, yaitu Rp855,9 triliun pada tahun 2025; Rp1.006,5 triliun pada 2026; Rp1.226,2 triliun pada 2027; Rp1.456,9 triliun pada 2028; dan Rp1.718,3 triliun pada tahun 2029. Peningkatan ini diharapkan dapat memperkuat daya saing industri Indonesia di pasar global, mempercepat transformasi ekonomi, dan menciptakan ekonomi yang lebih tangguh.

***Kedua***, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menargetkan penanaman modal bidang hilirisasi yang terus meningkat secara signifikan. Fokus ini mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan penanaman modal yang bernilai tambah, yaitu penanaman modal yang menciptakan nilai tambah dari bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi melalui peningkatan peran penanaman modal di sektor hilirisasi. Target realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi tahun 2025 sebesar Rp521,4 triliun. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya, puncaknya tahun 2029 mencapai Rp901,6 triliun. Investasi bidang hilirisasi diarahkan pada industri hilirisasi komoditas perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan, minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batubara. Penanaman modal di bidang hilirisasi diprioritaskan pada 15 (lima belas) komoditas yaitu: ikan Tuna Cakalang Tongkol (TCT), tilapia, udang, garam, nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, minyak bumi, gas bumi, pasir silika, serta logam dasar besi dan baja.

***Ketiga***, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menargetkan peningkatan kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Target kontribusi PMDN termasuk UMKM ditetapkan terus meningkat, yaitu menjadi 48,3% pada tahun 2025; 48,5% pada tahun 2026; 49,0% pada tahun 2027; 49,3% pada tahun 2028; hingga mencapai 49,7% pada tahun 2029. Fokus ini mencerminkan komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mendorong pertumbuhan investasi domestik yang inklusif.

***Keempat***, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk mendorong daya saing produk Indonesia di pasar internasional dan mendorong diversifikasi ekonomi melalui peningkatan realisasi penanaman modal berorientasi ekspor. Target Penanaman Modal Asing (PMA) berorientasi ekspor terus meningkat secara signifikan, yaitu Rp171,6 triliun pada tahun 2025; Rp205,3 triliun pada tahun 2026; Rp253,6 triliun pada tahun 2027; Rp306,4 triliun pada tahun 2028; hingga mencapai Rp367,4 triliun pada tahun 2029.

***Kelima***, nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berorientasi ekspor juga ditargetkan terus meningkat secara signifikan, yaitu Rp60,4 triliun pada tahun 2025; Rp71,9 triliun pada 2026; Rp88,3 triliun pada 2027; Rp106,0 triliun pada 2028; hingga mencapai Rp126,4 triliun pada 2029. Peningkatan investasi PMA dan PMDN berorientasi ekspor ini diharapkan dapat memperkuat posisi ekonomi nasional.

***Keenam***, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk mendukung kawasan pusat pertumbuhan, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) melalui peningkatan realisasi penanaman modal di wilayah-wilayah strategis. Target investasi di kawasan ini terus meningkat secara signifikan, yaitu Rp307,1 triliun pada tahun 2025; Rp346,8 triliun pada 2026; Rp401,0 triliun pada 2027; Rp452,9 triliun pada 2028; hingga mencapai Rp507,2 triliun pada 2029. Peningkatan investasi ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi regional dan mendorong pemerataan pembangunan.

***Ketujuh***, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menetapkan sasaran strategis untuk memperkuat kontribusi wilayah di luar Jawa dalam realisasi penanaman modal nasional, guna mendorong pemerataan pembangunan nasional. Target realisasi investasi di luar Jawa dipertahankan di atas 50% selama periode 2025 hingga 2029. Fokus ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa, mengoptimalkan sumber daya lokal, dan meningkatkan keseimbangan pembangunan antarwilayah.

Sementara itu, **SS-2** diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola melalui pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi yang semakin meningkat dalam rentang 76,20 - 80,88 sepanjang periode 2025 hingga 2029. Fokus ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dunia usaha. Reformasi birokrasi juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan investor, serta mendukung peningkatan realisasi penanaman modal.

**Tabel 2.1.**
Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis | Satuan | *Baseline* (2024) | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Meningkatnya penanaman modal yang berfokus pada sektor prioritas termasuk hilirisasi, orientasi ekspor, dan berbasis kewilayahan | Nilai PMA dan PMDN | Rp Triliun | 1.418,9* | 1.905,6 | 2.175,3 | 2.567,5 | 2.969,6 | 3.414,8 |
| SS-1: Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata | Nilai PMA dan PMDN sektor sekunder | Rp Triliun | 596,3* | 855,9 | 1.006,5 | 1.226,2 | 1.456,9 | 1.718,3 |
| | Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi | Rp Triliun | 375,4* | 521,4 | 586,6 | 675,6 | 779,3 | 901,6 |
| | Persentase realisasi PMDN termasuk UMKM | Persen | 47,6* | 48,3 | 48,5 | 49,0 | 49,3 | 49,7 |
| | Nilai PMA berorientasi ekspor | Rp Triliun | 115,4* | 171,6 | 205,3 | 253,6 | 306,4 | 367,4 |
| | Nilai PMDN berorientasi ekspor | Rp Triliun | 41,2* | 60,4 | 71,9 | 88,3 | 106,0 | 126,4 |
| | Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan | Rp Triliun | 253,4* | 307,1 | 346,8 | 401,0 | 452,9 | 507,2 |
| | Kontribusi realisasi investasi Luar Jawa | Persen | 51,5* | 52,1 | 52,4 | 52,7 | 52,9 | 53,2 |
| SS-2: Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM | Indeks | 76,12 | 76,20 | 77,34 | 78,50 | 79,68 | 80,88 |

**Keterangan:** *) Baseline tahun 2023

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025 merupakan periode pertama pencapaian target kinerja Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025–2029.

Perjanjian Kinerja bertujuan untuk mewujudkan komitmen nyata antara penerima dan pemberi amanah dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, serta kinerja aparatur; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; menjadi dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta landasan pemberian penghargaan dan sanksi; menjadi acuan bagi pemberi amanah dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah; serta menjadi dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

**Tabel 2.2**
Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025

| Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | | Target |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan | 1 | Nilai PMA dan PMDN (Rp Triliun) | 1.905,60 |
| SS-1: Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang tinggi, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata | 2 | Nilai PMA/PMDN sektor sekunder (Rp Triliun) | 855,95 |
| | 3 | Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (%) | 48,30 |
| | 4 | Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan (Rp Triliun) | 307,10 |
| | 5 | Nilai PMA berorientasi ekspor (Rp Triliun) | 171,60 |
| | 6 | Nilai PMDN berorientasi ekspor (Rp Triliun) | 60,40 |
| | 7 | Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (%) | 52,10 |
| | 8 | Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi (Rp Triliun) | 521,40 |
| SS-2: Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima | 9 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (indeks) | 76,20 |

Dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengalokasikan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp879.611.122.000. Nilai anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.229.295.942.000. Selain itu, pada Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa revisi anggaran yang merubah jumlah anggaran pada level satuan kerja dan merubah pagu anggaran total Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dengan rincian sebagai berikut:

1) Perubahan anggaran akibat adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2) Perubahan anggaran akibat adanya realokasi serta pergeseran anggaran terkait belanja pegawai berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-318/AG/AG.3/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal Surat Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM TA 2025;

3) Perubahan anggaran akibat realokasi dan optimalisasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-481/AG/AG.3/2025 tanggal 2 Juni 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM TA 2025;
4) Penambahan anggaran BA-BUN sebesar Rp197.730.837.000,00 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-553/AG/AG.3/2025 tanggal 25 Juni 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM TA 2025;
5) Perubahan anggaran akibat realokasi dan optimalisasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-632/AG/AG.3/2025 tanggal 28 Juli 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM TA 2025;
6) Perubahan anggaran akibat realokasi dan optimalisasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-766/AG/AG.3/2025 tanggal 3 September 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM TA 2025; dan
7) Perubahan anggaran akibat realokasi dan optimalisasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-960/AG/AG.3/2025 tanggal 11 November 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM TA 2025.

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, masih terdapat blokir anggaran pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sesuai Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-960/AG/AG.3/2025 tanggal 11 November 2025 sebesar Rp16.752.578.000, sehingga Pagu efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp862.858.544.000. Rincian alokasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025 berdasarkan program dan satuan kerja pada tingkat kedeputian disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.3**
Alokasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Tahun Anggaran 2025
Berdasarkan Program dan Satuan Kerja

| No | Program/Satuan Kerja | Pagu Anggaran (Rp) | Pagu Blokir (Rp) | Pagu Akhir (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **DUKUNGAN MANAJEMEN** | **481.027.838.000** | **-** | **481.027.838.000** |
| | Sekretariat Kementerian / Sekretariat Utama | 481.027.838.000 | - | 481.027.838.000 |
| **2** | **PENANAMAN MODAL DAN HILIRISASI** | **398.583.284.000** | **16.752.578.000** | **381.830.070.000** |
| | Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal | 7.494.125.000 | 952.627.000 | 6.541.498.000 |
| | Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis | 54.449.487.000 | 1.668.827.000 | 52.780.660.000 |
| | Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 10.528.946.000 | 2.361.500.000 | 8.167.446.000 |

| No | Program/Satuan Kerja | Pagu Anggaran (Rp) | Pagu Blokir (Rp) | Pagu Akhir (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal | 88.599.322.000 | 24.317.000 | 88.575.005.000 |
| | Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal | 13.256.853.000 | 7.721.032.000 | 5.535.821.000 |
| | Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal | 44.903.153.000 | 4.024.275.000 | 40.878.878.000 |
| | Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 22.236.383.000 | - | 22.236.383.000 |
| | Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal | 157.115.015.000 | - | 157.115.015.000 |
| **Total Pagu Anggaran Tahun 2025** | | **879.611.122.000** | **16.752.578.000** | **862.858.544.000** |

Pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan dua program utama, yaitu **Program Dukungan Manajemen** dan **Program Penanaman Modal dan Hilirisasi**. Program Dukungan Manajemen dialokasikan sebesar Rp481.027.838.000 dan diampu oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Alokasi anggaran ini digunakan untuk mendukung:

1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan,
2) Terwujudnya organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran serta birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional
3) Terwujudnya aparatur sipil negara yang berakhlak dan profesional

Sedangkan Program Penanaman Modal dan Hilirisasi dialokasikan sebesar Rp381.830.070.000 dan diampu oleh unit teknis pada tingkat kedeputian sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangannya masing-masing. Alokasi anggaran pada program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan penanaman modal, percepatan hilirisasi investasi strategis, pengembangan iklim investasi, fasilitasi dan promosi investasi, kerja sama dan pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pengembangan sistem pendukung berbasis teknologi informasi.

Alokasi anggaran pada masing-masing kedeputian mencerminkan fokus kebijakan dan prioritas strategis dalam mendorong peningkatan realisasi investasi nasional, penguatan iklim penanaman modal, serta percepatan hilirisasi investasi strategis. Pendekatan penganggaran ini memastikan keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, sasaran program, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian *outcome* pembangunan di bidang penanaman modal dan hilirisasi serta penguatan akuntabilitas kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

# 2.3 Teknik Pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja, dilakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup pengukuran ketercapaian indikator kinerja, analisis kesesuaian antara target dan realisasi, serta penilaian kualitas tata kelola kinerja.

Salah satu *output* utama dari proses evaluasi tersebut adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO), yang mencerminkan tingkat pencapaian kinerja terhadap target indikator kinerja yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja.

Perhitungan NKO berpedoman pada PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Berdasarkan peraturan tersebut, pengukuran kinerja organisasi tidak hanya mempertimbangkan capaian kuantitatif indikator, tetapi juga memperhitungkan kualitas akuntabilitas kinerja yang tercermin dari predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dengan demikian, NKO berfungsi sebagai ukuran agregat yang mengintegrasikan capaian kinerja substantif dan kualitas tata kelola kinerja.

Secara matematis, penghitungan NKO dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Untuk setiap indikator kinerja ke-$i$, capaian kinerja dihitung sebagai rasio antara realisasi dan target:

$$A_i = \frac{R_i}{T_i} \times 100\%$$

Nilai capaian tersebut kemudian dinormalisasi dengan batas maksimum 110 persen, sesuai ketentuan PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2024:

$$N_i = \min(A_i, 110\%)$$

Selanjutnya, capaian kinerja yang telah dinormalisasi dikoreksi berdasarkan predikat AKIP organisasi melalui faktor koreksi, dengan besaran koreksi ditetapkan sebagai berikut.

**Tabel 2.4**
Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

| Predikat AKIP | Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi |
|---|---|
| AA | 0% |
| A | |
| BB | 10% |
| B | 15% |
| CC | 20% |
| C | 30% |
| D | |

Nilai akhir capaian kinerja per indikator dihitung dengan rumus:

$$F_i = N_i \times (1 - k)$$

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) kemudian diperoleh sebagai rata-rata dari seluruh nilai akhir capaian indikator kinerja:

$$NKO = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left[ \min \left( \frac{R_i}{T_i} \times 100\%, 110\% \right) \times (1-k) \right]$$

dengan:
$R_i$ : realisasi indikator kinerja ke-$i$
$T_i$ : target indikator kinerja ke-$i$
k : faktor koreksi berdasarkan predikat AKIP
n : jumlah indikator kinerja

Adapun matrik perhitungan nilai kinerja organisasi menggunakan format berikut.

**Tabel 2.5**
Matriks Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Normalisasi Capaian PK (1) | Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2) | Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) × (100% – (2)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | **Total Capaian PK (4)** | |
| | | | | | | | **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)** | |
| | | | | | | | **Predikat PKO (6)** | |

Hasil NKO dikelompokkan menjadi lima predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa sebagai berikut.

**Tabel 2.6**
Predikat PKO

| Nilai Kinerja Organisasi (NKO) | Predikat PKO |
|---|---|
| X > 100% | **ISTIMEWA** |
| 80% < X ≤ 100% | **BAIK** |
| 60% < X ≤ 80% | **BUTUH PERBAIKAN** |
| 20% < X ≤ 60% | **KURANG** |
| 0% ≤ X ≤ 20% | **SANGAT KURANG** |

Melalui penerapan pengukuran NKO yang terstandardisasi, transparan, dan berbasis hasil sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berupaya menumbuhkan budaya kerja yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pencapaian *outcome*, sejalan dengan arah reformasi birokrasi dan komitmen membangun organisasi pemerintahan yang modern dan terpercaya.

BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA


- Capaian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025
- Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025
- Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025
- Capaian Nilai SAKIP terhadap Pencapaian IKU
- Capaian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025 terhadap Indikator RPJMN 2025-2029
- Capaian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025 terhadap Target Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
- Peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional Tahun 2025
- Capaian Kinerja Anggaran
- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

# 3.1 Capaian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki satu tujuan dan dua sasaran dengan sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan capaian kinerja tahun 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil memiliki capaian predikat istimewa sebanyak lima Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian predikat baik sebanyak tiga Indikator Kinerja Utama (IKU); dan capaian predikat butuh perbaikan sebanyak satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini merupakan capaian indikator kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025.

**Tabel 3.1**
Capaian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPMTahun 2025

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Capaian | Predikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan | 1 | Nilai PMA dan PMDN (Rp Triliun) | 1.905,6 | 1.931,2 | 101,34% | Istimewa |
| 2 | SS1 Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang tinggi, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata | 2 | Nilai PMA/PMDN sektor sekunder (Rp Triliun) | 855,9 | 780,0 | 91,23% | Baik |
| | | 3 | Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (%) | 48,3 | 53,4 | 110,51% | Istimewa |
| | | 4 | Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan (Rp Triliun) | 307,1 | 445,8 | 145,16% | Istimewa |
| | | 5 | Nilai PMA berorientasi ekspor (Rp Triliun) | 171,6 | 135,8 | 79,14% | **Butuh Perbaikan** |
| | | 6 | Nilai PMDN berorientasi ekspor (Rp Triliun) | 60,4 | 58,3 | 96,56% | Baik |
| | | 7 | Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (%) | 52,1 | 51,3 | 98,51% | Baik |
| | | 8 | Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi (Rp Triliun) | 521,4 | 584,1 | 112,03% | Istimewa |
| 3 | SS 2 Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima | 9 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM (indeks) | 76,20 | 78,13 | 102,53% | Istimewa |

Berdasarkan tabel capaian kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025, berikut ini merupakan uraian capaian kinerja dan predikat pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU):

1) IKU 1 Nilai PMA dan PMDN memiliki target sebesar Rp1.905,6 Triliun dan realisasi sebesar Rp1.931,2 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar **101,34% atau predikat Istimewa**;
2) IKU 2 Nilai PMA/PMDN sektor sekunder memiliki target sebesar Rp855,9 Triliun dan realisasi sebesar Rp780,9 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar **91,23% atau predikat Baik**;
3) IKU 3 Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki target sebesar 48,3 persen dan realisasi 53,4 persen, capaian kinerja tahun 2025 sebesar **110,51% atau predikat Istimewa**;
4) IKU 4 Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan memiliki target sebesar Rp307,1 Triliun dan realisasi sebesar Rp445,8 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar **145,16% atau predikat Istimewa**;

5) IKU 5 Nilai PMA berorientasi ekspor memiliki target sebesar Rp171,6 Triliun dan realisasi Rp135,8 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar **79,14% atau predikat Butuh Perbaikan**;
6) IKU 6 Nilai PMDN berorientasi ekspor memiliki target sebesar Rp60,4 Triliun dan realisasi Rp58,3 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar **96,56% atau predikat Baik**;
7) IKU 7 Konstribusi relaisasi investasi luar Jawa memiliki target sebesar 52,1 persen dan realisasi sebesar 51,3 persen, capaian kinerja tahun 2025 sebesar **98,51% atau predikat Baik**;
8) IKU 8 Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi memiliki target sebesar Rp521,4 Triliun dan realisasi Rp584,1 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar **112,03% atau predikat Istimewa**;
9) IKU 9 Indeks Reformasi Birokrasi memiliki target 76, 20 dan realisasi 78,13, capaian kinerja tahun 2025 sebesar **102,53% atau predikat Istimewa**.

## 3.2 Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 89,93% dan berpredikat Baik. Hasil perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh dari rata-rata nilai akhir capaian PK. Nilai akhir capaian PK diperoleh dari normalisasi capaian PK dan koreksi normalisasi capaian PK berdasarkan predikat AKIP. Predikat baik memiliki intepretasi bahwa tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi. Berikut ini merupakan uraian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025.

**Tabel 3.2**

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Normalisasi Capaian PK | Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP | Nilai Akhir Capaian PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-01 Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan | 1 | Nilai PMA dan PMDN (Rp Triliun) | 1.905,6 | 1.931,2 | 101,34% | 101,34% | 10,00% | 91,21% |
| 2 | SS-01 Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang tinggi, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata | 2 | Nilai PMA/PMDN sektor sekunder (Rp Triliun) | 855,9 | 780,9 | 91,23% | 91,23% | 10,00% | 82,11% |
| | | 3 | Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (%) | 48,3 | 53,4 | 110,51% | 110,00% | 10,00% | 99,00% |
| | | 4 | Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan (Rp Triliun) | 307,1 | 445,8 | 145,16% | 110,00% | 10,00% | 99,00% |
| | | 5 | Nilai PMA berorientasi ekspor (Rp Triliun) | 171,6 | 135,8 | 79,14% | 79,14% | 10,00% | 71,23% |
| | | 6 | Nilai PMDN berorientasi ekspor (Rp Triliun) | 60,4 | 58,3 | 96,52% | 96,52% | 10,00% | 86,87% |
| | | 7 | Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (%) | 52,1 | 51,3 | 98,51% | 98,51% | 10,00% | 88,66% |
| | | 8 | Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi (Rp Triliun) | 521,4 | 584,1 | 112,03% | 110,00% | 10,00% | 99,00% |
| 3 | SS-02 Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima | 9 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM (indeks) | 76,20 | 78,13 | 102,53% | 102,53% | 10,00% | 92,28% |
| | | | | | | | | **Total Capaian PK** | **809,36%** |
| | | | | | | | | **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK** | **89,93%** |
| | | | | | | | | **Predikat PKO** | **BAIK** |

# 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025

## 3.3.1 Tujuan "Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan"

### 3.3.1.1
### IKU 1: Nilai PMA dan PMDN

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja IKU 1 Nilai PMA dan PMDN sebesar 101,34% atau terkategori istimewa pada tahun 2025. Jika dibandingkan capaian tahun 2024, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 12,66% atau terkategori istimewa. Hal ini menujukkan kinerja positif Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam rangka peningkatan nilai realisasi penanaman modal.

**Tabel 3.3**
Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMA dan PMDN

| Tujuan: Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKU-1 Nilai PMA dan PMDN (Rp Triliun) | | | | | | | | |
| 2025 | | Capaian Kinerja 2025 (%) | Normalisasi Capaian PK | Realisasi Tahun 2024 | Capaian Kinerja 2025 terhadap Realisasi 2024 (%) | Target Akhir Renstra 2029 | Capaian Kinerja 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2029 (%) | Kategori Capaian Kinerja Tahun 2025 |
| T | R | | | | | | | |
| 1.905,6 | 1.931,2 | 101,34 | 101,34 | 1.714,2 | 12,66 | 3.414,8 | 56,55 | Istimewa |

Realisasi investasi nasional selama periode Januari hingga Desember tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.931,2 triliun. Nilai tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp1.903,6 triliun dengan capaian sebesar 101,34 persen. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp1.714,2 triliun, realisasi investasi tahun 2025 meningkat 12,7 persen. Selain itu, realisasi tahun 2025 telah mencapai 56,55 persen dari target akhir Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2029 yang ditetapkan sebesar Rp3.414,8 triliun. Nilai investasi pada tahun 2025 terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 53,4 persen atau senilai Rp1.030,3 triliun, serta Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 46,6 persen atau senilai Rp900,9 triliun. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 PMA memiliki proporsi yang lebih tinggi, yaitu 52,5 persen atau senilai Rp900,2 triliun, sedangkan PMDN sebesar 47,5 persen atau senilai Rp814,0 triliun. Capaian nilai PMA dan PMDN pada tahun 2025 telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.710.532 tenaga kerja atau naik sebesar 10,36 persen dibandingkan tahun 2024.

Realisasi investasi nasional selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021, realisasi investasi tercatat sebesar Rp 901,0 triliun. Pada tahun 2022, nilai tersebut meningkat menjadi Rp 1.207,2 triliun atau tumbuh sekitar 34 persen. Peningkatan ini mencerminkan pemulihan ekonomi pascapandemi serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional. Pada tahun 2023, realisasi investasi kembali meningkat menjadi Rp1.418,9 triliun atau tumbuh sebesar 17,5 persen dibandingkan tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2024, realisasi investasi mencapai Rp1.714,2 triliun atau meningkat sebesar 20,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh akselerasi investasi di berbagai sektor strategis, termasuk hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2025, realisasi investasi mencapai Rp 1.931,2 triliun dan mencatat pertumbuhan sekitar 12,7 persen dibandingkan tahun 2024. Secara keseluruhan, realisasi investasi selama lima tahun terakhir meningkat lebih dari dua kali lipat dari Rp 901,0 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 1.931,2 triliun pada tahun 2025.

**Gambar 3.1**
Nilai Realisasi Investasi Januari-Desember 2025

**Gambar 3.2**
Realisasi Investasi Nasional Tahun 2021-2025

Berdasarkan data realisasi penanaman modal tahun 2025, terdapat lima provinsi dengan nilai realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertinggi secara nasional. Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama dengan nilai realisasi sebesar Rp296,8 triliun atau 15,4 persen dari total realisasi nasional. Posisi kedua ditempati oleh Daerah Khusus Jakarta dengan nilai realisasi sebesar Rp270,9 triliun atau setara 14,0 persen. Selanjutnya, Provinsi Jawa Timur berada pada peringkat ketiga dengan realisasi investasi sebesar Rp145,1 triliun atau 7,5 persen. Peringkat keempat ditempati oleh Provinsi Banten dengan nilai realisasi sebesar Rp130,2 triliun atau 6,7 persen. Dari luar Pulau Jawa, Provinsi Sulawesi Tengah menempati posisi kelima dengan realisasi sebesar Rp127,2 triliun atau 6,6 persen dari total nasional.

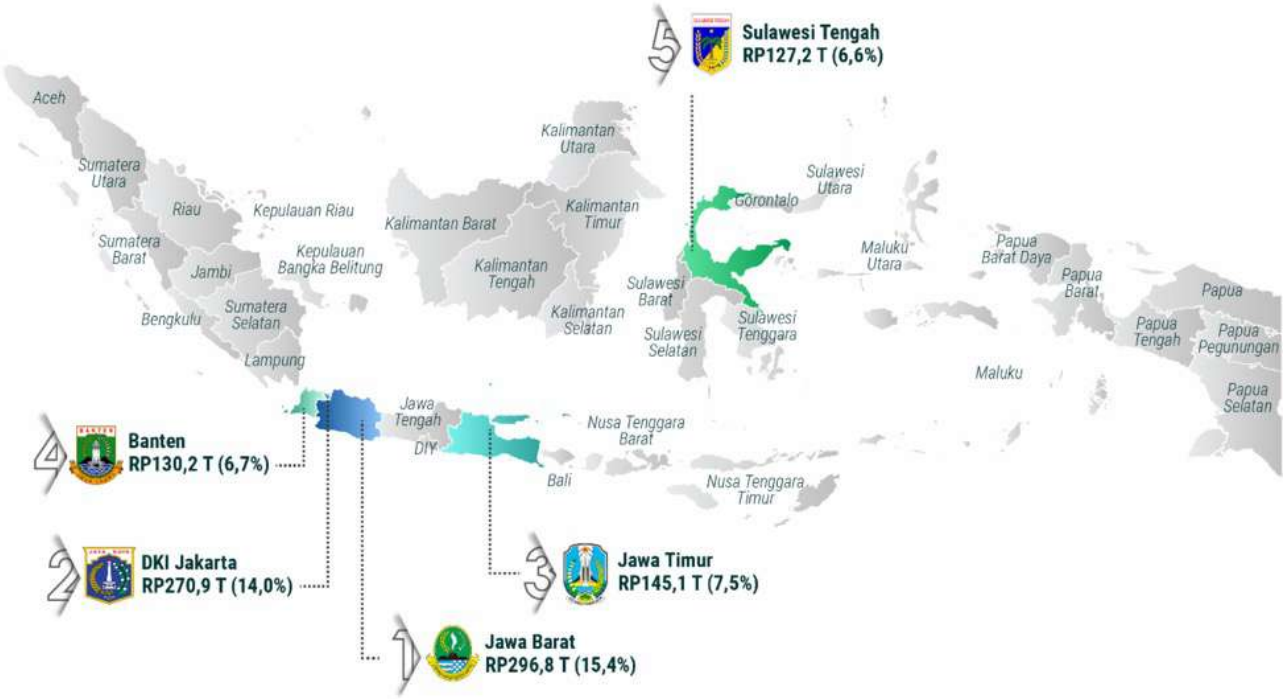


**Gambar 3.3**
Lima Besar Lokasi PMA dan PMDN Tahun 2025

Berdasarkan data realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2025, terdapat lima provinsi dengan nilai realisasi tertinggi. Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama dengan realisasi sebesar USD 9,2 miliar atau 16,3 persen dari total PMA nasional. Posisi kedua ditempati oleh Sulawesi Tengah dengan nilai realisasi sebesar USD 7,4 miliar atau 13,2 persen. DKI Jakarta berada pada peringkat ketiga dengan realisasi sebesar USD 6,0 miliar atau 10,6 persen. Selanjutnya, Maluku Utara mencatat realisasi sebesar USD 5,2 miliar atau 9,2 persen, sementara Banten berada pada posisi kelima dengan nilai sebesar USD 3,6 miliar atau 6,3 persen.

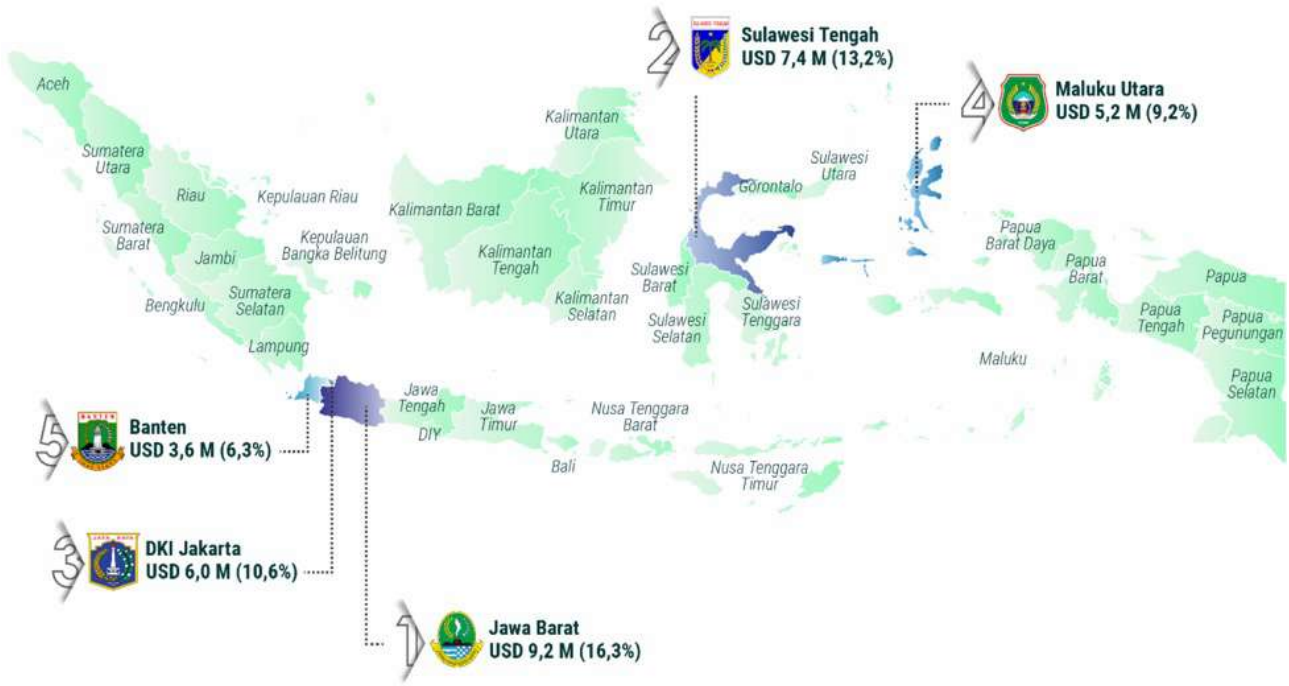


**Gambar 3.4**
Lima Besar Lokasi PMA Tahun 2025

Berdasarkan data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2025, terdapat lima provinsi dengan nilai realisasi tertinggi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total PMDN nasional. Provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan realisasi sebesar Rp175,3 triliun atau 17,0 persen dari total PMDN nasional. Posisi kedua ditempati oleh Jawa Barat dengan nilai realisasi sebesar Rp149,8 triliun atau 14,5 persen. Jawa Timur berada pada peringkat ketiga dengan realisasi sebesar Rp101,8 triliun atau 9,9 persen. Selanjutnya, Banten mencatat realisasi sebesar Rp73,2 triliun atau 7,1 persen, sementara Kalimantan Timur berada pada posisi kelima dengan nilai sebesar Rp70,9 triliun atau 6,9 persen. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi PMDN pada tahun 2025 masih didominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

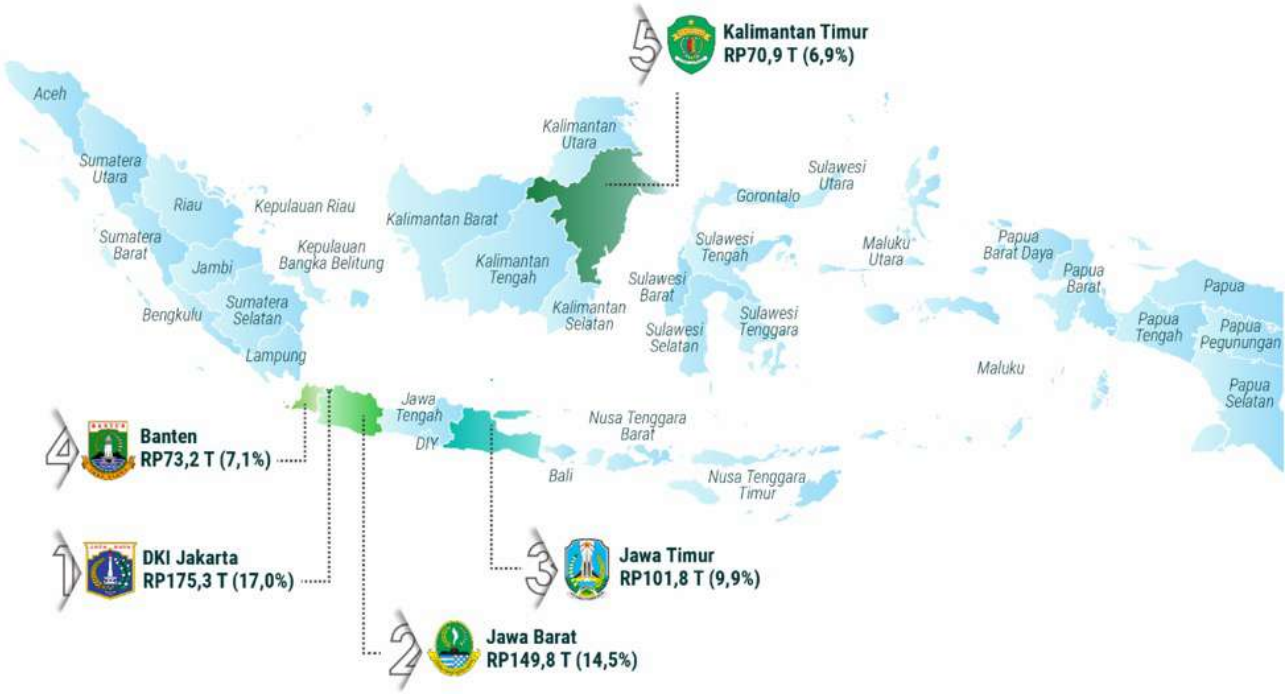


**Gambar 3.5**
Lima Besar Lokasi PMDN Tahun 2025

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan lokasi pada periode 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan nilai investasi di sejumlah provinsi utama terutama di Pulau Jawa dan memiliki kecenderungan pertumbuhan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Provinsi Jawa Barat secara konsisten menempati posisi pertama sebagai tujuan investasi terbesar, dengan nilai realisasi meningkat dari Rp136,1 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp296,8 triliun pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Jawa Barat masih menjadi pusat utama kegiatan industri manufaktur dan kawasan industri nasional yang menarik minat investor domestik maupun asing. Daerah Khusus Jakarta juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan nilai investasi naik dari Rp103,3 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp270,9 triliun pada tahun 2025. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Jakarta tetap berperan sebagai pusat kegiatan jasa, keuangan, dan kantor pusat perusahaan yang mendukung aktivitas investasi nasional. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur mempertahankan posisinya sebagai salah satu lokasi utama investasi, meskipun pertumbuhan nilainya cenderung lebih moderat, yaitu dari Rp79,6 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp145,1 triliun pada tahun 2025. Selain provinsi di Pulau Jawa, beberapa wilayah di luar Jawa juga menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan. Provinsi Sulawesi Tengah mencatat peningkatan investasi yang cukup kuat sejak 2022 hingga 2024, terutama didorong oleh investasi sektor hilirisasi mineral, meskipun pada tahun 2025 nilainya sedikit menurun menjadi Rp127,2 triliun. Di sisi lain, Provinsi Banten menunjukkan tren pertumbuhan investasi yang relatif stabil dalam periode pengamatan, dengan nilai realisasi meningkat dari Rp58,0 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp130,2 triliun pada tahun 2025, yang mencerminkan berkembangnya kawasan industri dan logistik di wilayah tersebut.

**Gambar 3.6**
Lima Besar Lokasi PMA dan PMDN Tahun 2021-2025

Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia terdapat di beberapa wilayah provinsi. Pada tahun 2021, Provinsi Jawa Barat menjadi lokasi utama tujuan PMA dengan nilai investasi mencapai US$5,2 miliar atau berkontribusi sebesar 32,1 persen terhadap total PMA nasional. Posisi berikutnya ditempati oleh Daerah Khusus Jakarta dengan nilai US$3,3 miliar (20,5 persen), Provinsi Maluku Utara US$2,8 miliar (17,3 persen), Povinsi Sulawesi Tengah US$2,7 miliar (16,7 persen), dan Provinsi Banten US$2,2 miliar (13,5 persen). Pada tahun 2022, Provinsi Sulawesi Tengah berhasil menduduki peringkat pertama dengan nilai investasi melonjak menjadi US$7,5 miliar (16,4 persen), menggeser Jawa Barat yang turun ke posisi kedua dengan nilai US$6,5 miliar (14,3 persen). Maluku Utara tetap bertahan di posisi ketiga dengan nilai US$4,5 miliar (9,8 persen), diikuti Jakarta US$3,7 miliar (8,2 persen) dan Banten US$3,4 miliar (7,5 persen). Pada tahun 2023, Provinsi Jawa Barat kembali pada posisi teratas dengan nilai investasi US$8,3 miliar (16,5 persen), disusul Sulawesi Tengah di posisi kedua dengan nilai US$7,2 miliar (14,4 persen). Maluku Utara kembali menempati peringkat ketiga dengan nilai US$5,0 miliar (9,9 persen), sementara Jakarta berada di posisi keempat dengan nilai US$4,8 miliar (9,6 persen). Periode ini juga mencatat masuknya Jawa Timur sebagai pendatang baru di lima besar dengan nilai investasi US$4,7 miliar (9,4 persen). Tren positif berlanjut pada tahun 2024 di mana Jawa Barat mempertahankan posisi puncak dengan nilai investasi menembus US$10,0 miliar (16,6 persen), diikuti Sulawesi Tengah US$9,0 miliar (15,0 persen), Jakarta US$7,6 miliar (12,6 persen), Maluku Utara US$4,4 miliar (7,3 persen), dan Banten US$3,9 miliar (6,4 persen). Pada tahun 2025, komposisi lima besar masih didominasi oleh provinsi yang sama dengan Jawa Barat kembali menempati urutan pertama senilai US$9,2 miliar (16,3 persen), disusul Sulawesi Tengah US$7,4 miliar (13,2 persen), Jakarta US$6,0 miliar (10,6 persen), Maluku Utara US$5,2 miliar (9,2 persen), dan Banten US$3,6 miliar (6,3 persen).

**Gambar 3.7**
Lima Besar Lokasi PMA Tahun 2021-2025

Sepanjang periode tahun 2021 hingga 2025, distribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia terkonsentrasi pada beberapa provinsi di Pulau Jawa, dengan beberapa daerah di luar Jawa yang juga menunjukkan kontribusi. Pada tahun 2021, Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama dengan realisasi PMDN sebesar Rp59,9 triliun atau 26,2 persen. Posisi kedua ditempati oleh DKI Jakarta sebesar Rp54,7 triliun (23,9 persen), diikuti Jawa Timur sebesar Rp52,6 triliun (23,0 persen). Sementara itu, Jawa Tengah berada di posisi keempat dengan Rp31,3 triliun (13,7 persen) dan Kalimantan Timur di posisi kelima dengan Rp30,3 triliun (13,2 persen).
Memasuki tahun 2022, DKI Jakarta naik ke peringkat pertama dengan realisasi sebesar Rp89,2 triliun (16,1 persen), diikuti Jawa Barat sebesar Rp80,8 triliun (14,6 persen) dan Jawa Timur sebesar Rp65,4 triliun (11,8 persen). Provinsi Riau mulai masuk lima besar dengan nilai Rp43,1 triliun (7,8 persen), sedangkan Kalimantan Timur mencatat Rp39,6 triliun (7,2 persen).

Pada tahun 2023, DKI Jakarta masih mempertahankan posisi teratas dengan realisasi Rp95,2 triliun (14,1 persen). Jawa Barat dan Jawa Timur tetap berada pada peringkat kedua dan ketiga dengan nilai masing-masing Rp88,0 triliun (13,0 persen) dan Rp74,9 triliun (11,1 persen). Kalimantan Timur berada di posisi keempat dengan Rp52,2 triliun (7,7 persen), sementara Riau menempati posisi kelima dengan Rp48,2 triliun (7,1 persen).

Pada tahun 2024, DKI Jakarta kembali mencatatkan realisasi PMDN tertinggi sebesar Rp128,4 triliun (15,7 persen), diikuti Jawa Barat sebesar Rp101,5 triliun (12,4 persen) dan Jawa Timur sebesar Rp92,4 triliun (11,3 persen). Riau berada di posisi keempat dengan Rp61,1 triliun (7,5 persen), sedangkan Kalimantan Timur mencatat Rp55,1 triliun (6,7 persen).

Selanjutnya pada tahun 2025, DKI Jakarta masih menjadi lokasi dengan realisasi PMDN terbesar yaitu Rp175,3 triliun (17,0 persen). Jawa Barat berada di posisi kedua dengan Rp149,8 triliun (14,5 persen), diikuti Jawa Timur sebesar Rp101,8 triliun (9,9 persen). Banten masuk dalam lima besar dengan realisasi Rp73,2 triliun (7,1 persen), sementara Kalimantan Timur mencatat Rp70,9 triliun (6,9 persen).

Secara umum, selama periode 2021–2025 terlihat bahwa DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur secara konsisten menjadi tiga provinsi dengan realisasi PMDN terbesar. Di sisi lain, beberapa provinsi di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan Timur dan Riau juga menunjukkan peran penting sebagai tujuan investasi domestik, sementara Banten mulai masuk dalam lima besar pada tahun 2025.

**Gambar 3.8**
Lima Besar Lokasi PMDN Tahun 2021-2025

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) periode Januari–Desember 2025 menunjukkan kontribusi investasi terbesar tersebar pada beberapa subsektor utama. Di antara lima subsektor terbesar, Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya mencatatkan kontribusi tertinggi dengan nilai realisasi Rp262,0 triliun atau 13,6 persen dari total investasi. Selanjutnya, Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi menempati posisi kedua dengan realisasi Rp211,0 triliun atau 10,9 persen. Subsektor Pertambangan berada pada posisi berikutnya dengan nilai investasi Rp199,6 triliun atau 10,3 persen. Subsektor Jasa Lainnya mencatat realisasi Rp170,5 triliun atau 8,8 persen. Sementera itu, subsektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran memberikan kontribusi sebesar Rp140,4 triliun atau 7,3 persen. Secara keseluruhan, struktur investasi tahun 2025 memperlihatkan bahwa sektor industri pengolahan berbasis logam, infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, serta sektor pertambangan masih menjadi motor utama realisasi investasi nasional, sementara kontribusi subsektor lainnya tetap mendominasi sebagai penopang diversifikasi investasi. Pola ini menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi dan penguatan infrastruktur masih berperan strategis dalam mendorong peningkatan realisasi PMA dan PMDN nasional.

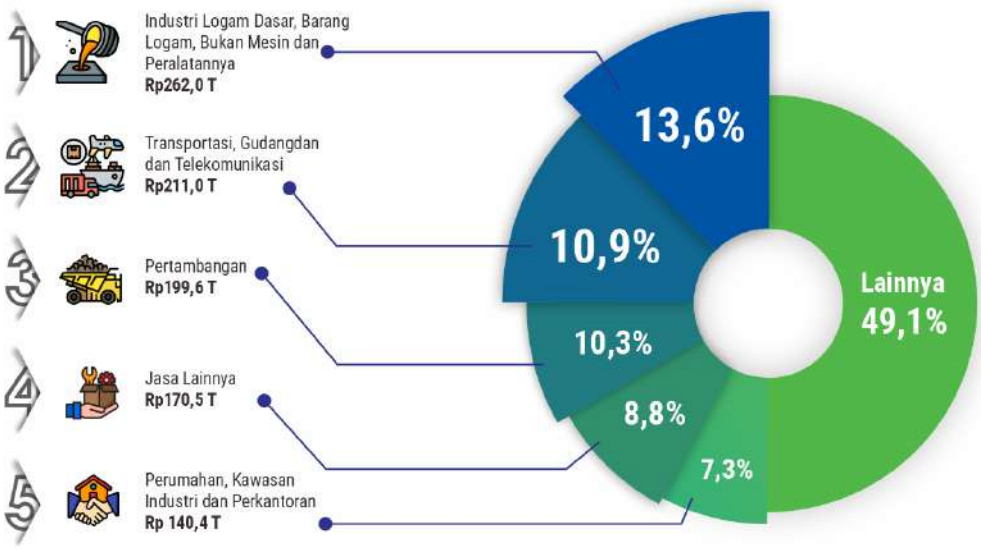


**Gambar 3.9**
Lima Besar Subsektor PMA dan PMDN Tahun 2025

Berdasarkan data realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2025, terdapat lima subsektor dengan nilai realisasi tertinggi. Subsektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya menempati posisi pertama dengan realisasi sebesar USD 14,6 miliar atau 26,0 persen dari total PMA nasional. Posisi kedua ditempati oleh subsektor Pertambangan dengan nilai realisasi sebesar USD 4,7 miliar atau 8,4 persen. Subsektor Jasa Lainnya berada pada peringkat ketiga dengan realisasi sebesar USD 4,5 miliar atau 8,0 persen. Selanjutnya, subsektor Industri Kimia dan Farmasi mencatat realisasi sebesar USD 3,8 miliar atau 6,8 persen, sementara subsektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi berada pada posisi kelima dengan nilai sebesar USD 3,3 miliar atau 5,8 persen.

**Gambar 3.10**
Lima Besar Subsektor PMA Tahun 2025

Berdasarkan data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2025, terdapat lima subsektor dengan nilai realisasi tertinggi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total PMDN nasional. Subsektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi menempati posisi pertama dengan realisasi sebesar Rp158,6 triliun atau 15,4 persen dari total PMDN nasional. Posisi kedua ditempati oleh subsektor Pertambangan dengan nilai realisasi sebesar Rp123,8 triliun atau 12,0 persen. Subsektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran berada pada peringkat ketiga dengan realisasi sebesar Rp99,6 triliun atau 9,7 persen. Selanjutnya, subsektor Jasa Lainnya mencatat realisasi sebesar Rp98,6 triliun atau 9,6 persen, sementara subsektor Perdagangan dan Reparasi berada pada posisi kelima dengan nilai sebesar Rp92,9 triliun atau 9,0 persen.

**Gambar 3.11**
Lima Besar Subsektor PMDN Tahun 2025

Berdasarkan perkembangan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) selama periode 2021–2025, sektor Industri Pengolahan (*manufacturing*) secara konsisten menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap total PMA nasional. Pada tahun 2021, sektor Industri Pengolahan mencatat realisasi sebesar US$15,8 miliar atau 50,8 persen, diikuti oleh Infrastruktur dan Jasa sebesar US$10,5 miliar atau 33,7 persen. Sektor Pertambangan menyumbang US$3,8 miliar atau 12,3 persen, sementara Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan serta subsektor lainnya memberikan kontribusi yang relatif kecil.

Tahun 2022 menunjukkan peningkatan kontribusi Industri Pengolahan menjadi US$24,7 miliar atau 54,1 persen, dengan Infrastruktur dan Jasa sebesar US$13,9 miliar atau 30,4 persen. Pertambangan tetap berada pada posisi ketiga dengan kontribusi sebesar US$5,1 miliar atau 11,3 persen. Pada tahun 2023, Industri Pengolahan kembali mendominasi dengan realisasi sebesar US$28,7 miliar atau 57,1 persen. Infrastruktur dan Jasa mencatat US$14,8 miliar atau 29,4 persen, sedangkan sektor lainnya berada pada porsi di bawah 10 persen. Tahun 2024 memperlihatkan peningkatan lebih lanjut pada Industri Pengolahan yang mencapai US$35,1 miliar atau 58,5 persen. Infrastruktur dan Jasa tercatat sebesar US$17,6 miliar atau 29,3 persen. Memasuki tahun 2025, Industri Pengolahan tetap menjadi sektor terbesar dengan realisasi sebesar US$33,8 miliar atau 60,1 persen. Infrastruktur dan Jasa mencatat US$16,5 miliar atau 29,3 persen, sementara sektor Pertambangan dan Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan berada pada kisaran kontribusi di bawah 10 persen. Secara umum, selama periode 2021–2025, struktur PMA menunjukkan dominasi sektor Industri Pengolahan yang relatif stabil dan meningkat proporsinya, dengan dukungan sektor Infrastruktur dan Jasa sebagai kontributor kedua terbesar.

**Gambar 3.12**
Lima Besar Sektor Sub Sektor PMA Tahun 2021-2025

Berdasarkan perkembangan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama periode 2021–2025, sektor Infrastruktur dan Jasa secara konsisten menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap total PMDN nasional. Pada tahun 2021, sektor Infrastruktur dan Jasa mencatat realisasi sebesar Rp289,6 triliun atau 64,8 persen, diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar Rp94,7 triliun atau 21,2 persen. Sektor lainnya seperti Tanaman Pangan, Pertambangan, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi yang lebih kecil. Pada tahun 2022, Infrastruktur dan Jasa tetap mendominasi dengan nilai Rp298,0 triliun atau 53,9 persen, sementara Industri Pengolahan meningkat menjadi Rp143,6 triliun atau 26,0 persen. Tahun 2023 menunjukkan realisasi Infrastruktur dan Jasa sebesar Rp348,1 triliun atau 51,6 persen, dengan Industri Pengolahan sebesar Rp171,7 triliun atau 25,4 persen. Pertambangan berada pada posisi berikutnya dengan kontribusi sebesar 12,8 persen.

Pada tahun 2024, Infrastruktur dan Jasa kembali menjadi sektor terbesar dengan realisasi Rp432,1 triliun atau 53,1 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar Rp194,3 triliun atau 23,9 persen. Memasuki tahun 2025, kontribusi Infrastruktur dan Jasa meningkat menjadi Rp596,7 triliun atau 57,9 persen. Industri Pengolahan mencatat Rp239,7 triliun atau 23,3 persen, sedangkan sektor Pertambangan, Tanaman Pangan, Kehutanan, dan Perikanan tetap memberikan kontribusi di bawah 15 persen. Secara umum, tren PMDN selama periode 2021–2025 menunjukkan dominasi sektor Infrastruktur dan Jasa, dengan Industri Pengolahan sebagai sektor kedua terbesar yang konsisten memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi investasi domestik.

**Gambar 3.13**
Lima Besar Sektor Sub Sektor PMDN Tahun 2021-2025

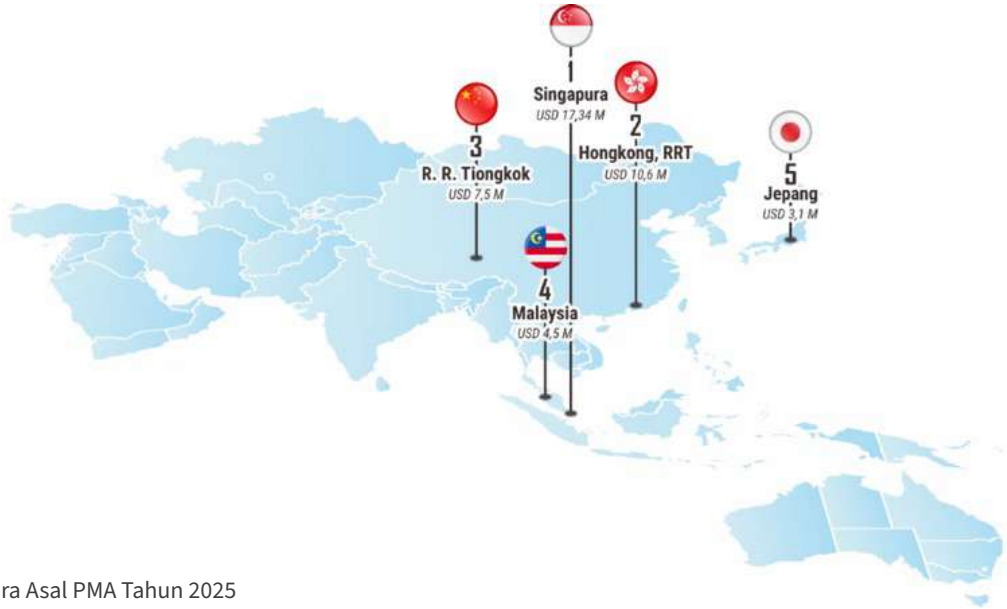


**Gambar 3.14**
Lima Besar Negara Asal PMA Tahun 2025

Berdasarkan data realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2025, terdapat lima negara asal investasi dengan nilai realisasi tertinggi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total PMA nasional. Singapura menempati posisi pertama sebagai negara asal PMA terbesar dengan realisasi sebesar USD 17,4 miliar. Posisi kedua ditempati oleh Hongkong, RRT dengan nilai realisasi sebesar USD 10,6 miliar. Selanjutnya, Republik Rakyat Tiongkok berada pada peringkat ketiga dengan realisasi sebesar USD 7,5 miliar. Malaysia mencatat realisasi sebesar USD 4,5 miliar dan berada pada posisi keempat, sementara Jepang berada pada posisi kelima dengan nilai realisasi sebesar USD 3,1 miliar. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi PMA tahun 2025 masih didominasi oleh negara-negara di kawasan Asia, yang memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan yang erat dengan Indonesia.

Sepanjang tahun 2021 hingga 2025, komposisi negara asal Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia menunjukkan dominasi yang konsisten dari negara-negara kawasan Asia, dengan Singapura menempati posisi teratas setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Singapura menjadi negara asal PMA terbesar dengan nilai investasi mencapai US$9,4 miliar atau berkontribusi sebesar 30,2 persen terhadap total PMA nasional. Posisi berikutnya ditempati oleh Hongkong (RRT) dengan nilai US$4,6 miliar (14,8 persen), Republik Rakyat Tiongkok (RRT) US$3,2 miliar (10,2 persen), Amerika Serikat US$2,5 miliar (8,2 persen), dan Jepang US$2,3 miliar (7,3 persen). Memasuki tahun 2022, Singapura kembali mempertahankan posisi teratas dengan nilai investasi meningkat menjadi US$13,3 miliar (29,1 persen). Tiongkok naik ke peringkat kedua dengan nilai US$8,2 miliar (18,0 persen), diikuti Hongkong US$5,5 miliar (12,1 persen), Jepang US$3,6 miliar (7,8 persen), dan Malaysia yang masuk sebagai pendatang baru di posisi kelima dengan nilai US$3,3 miliar (7,3 persen). Pada tahun 2023, Singapura tetap memimpin dengan nilai investasi US$15,4 miliar (30,5 persen), disusul Tiongkok US$7,4 miliar (14,8 persen), Hongkong US$6,5 miliar (12,9 persen), Jepang US$4,6 miliar (9,2 persen), dan Malaysia US$4,1 miliar (8,1 persen). Tahun 2024 mencatat peningkatan signifikan investasi Singapura menjadi US$20,1 miliar (33,5 persen), diikuti Hongkong US$8,2 miliar (13,6 persen), Tiongkok US$8,1 miliar (13,5 persen), Malaysia US$4,2 miliar (7,1 persen), dan Amerika Serikat yang kembali masuk lima besar dengan nilai US$3,7 miliar (6,2 persen). Memasuki tahun 2025, Singapura tetap menjadi yang teratas dengan nilai US$17,4 miliar (30,9 persen), disusul Hongkong US$10,6 miliar (18,9 persen), Tiongkok US$7,5 miliar (13,3 persen), Malaysia US$4,5 miliar (7,9 persen), dan Jepang US$3,1 miliar (5,6 persen).

**Gambar 3.15**
Lima Besar Negara Asal PMA Tahun 2021-2025

Berdasarkan data penyerapan tenaga kerja dari realisasi PMA dan PMDN selama periode 2021–2025, jumlah tenaga kerja yang terserap menunjukkan tren peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2021, total penyerapan tenaga kerja mencapai 1.207.893 orang, yang terdiri dari 626.663 tenaga kerja dari PMDN dan 581.230 tenaga kerja dari PMA. Pada tahun 2022, total penyerapan tenaga kerja meningkat menjadi 1.305.001 orang, dengan kontribusi PMDN sebesar 759.738 orang dan PMA sebesar 545.263 orang. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 1.823.543 orang, terdiri atas 1.176.374 orang dari PMDN dan 647.169 orang dari PMA. Pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja yang terserap meningkat menjadi 2.456.130 orang, dengan kontribusi PMDN sebesar 1.473.909 orang dan PMA sebesar 982.221 orang. Memasuki tahun 2025, total penyerapan tenaga kerja mencapai 2.710.532 orang, yang terdiri atas 1.618.276 orang dari PMDN dan 1.092.256 orang dari PMA. Secara umum, selama periode 2021–2025, penyerapan tenaga kerja menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dengan kontribusi terbesar berasal dari realisasi PMDN. Hal ini menunjukkan bahwa investasi domestik dan asing memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

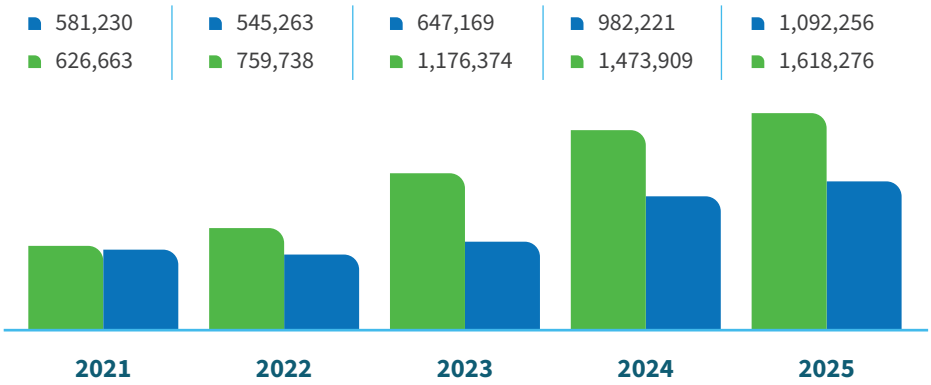


**Gambar 3.16**
Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2021-2025 (Orang)

## 3.3.2 Sasaran "Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Tinggi, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata"

### 3.3.2.1
### IKU 2: Nilai PMA/PMDN Sektor Sekunder

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja IKU 2 Nilai PMA/PMDN sektor sekunder sebesar 91,23% atau terkategori baik. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 8,26 persen. Hal ini menujukkan komitmen dan kinerja positif dalam Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam rangka peningkatan nilai PMA/PMDN sektor sekunder.

**Tabel 3.4**
Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMA/PMDN Sektor Sekunder

| SS-1: Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKU-2: Nilai PMA/PMDN Sektor Sekunder (Rp Triliun) | | | | | | | | |
| 2025 | | Capaian Kinerja 2025 (%) | Normalisasi Capaian PK | Realisasi Tahun 2024 | Capaian Kinerja 2025 terhadap Realisasi 2024 (%) | Target Akhir Renstra 2029 | Capaian Kinerja 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2029 (%) | Kategori Capaian Kinerja Tahun 2025 |
| T | R | | | | | | | |
| 855,9 | 780,9 | **91,23** | 91,23 | 721,3 | 8,26 | 1.718,3 | 45,44 | **Baik** |

Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder merupakan nilai yang berasal dari seluruh aktivitas investasi pada sektor sekunder, baik yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Nilai tersebut tidak mencakup sektor migas, perbankan, lembaga keuangan nonbank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, serta usaha mikro dan usaha kecil. Cakupan penanaman modal pada sektor sekunder meliputi: 1) Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya; 2) Industri kimia dan farmasi; 3) Industri makanan; 4) Industri kertas dan percetakan; 5) Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain; 6) Industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam; 7) Industri tekstil; 8) Industri karet dan plastik; 9) Industri mineral nonlogam; 10) Industri barang dari kulit dan alas kaki; 11) Industri lainnya; dan 12) Industri kayu.

Realisasi nilai PMA/PMDN sektor sekunder pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp780,8 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp855,9 triliun, atau memiliki capaian 91,23 persen, sehingga target tahun 2025 belum sepenuhnya tercapai. Meskipun demikian, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp721,3 triliun, nilai PMA/PMDN sektor sekunder pada tahun 2025 tumbuh 8,26 persen. Secara kumulatif, realisasi tahun 2025 telah mencapai 45,44 persen dari target akhir Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2029 yang ditetapkan sebesar Rp1.718,3 triliun.

**Tabel 3.5**
Realisasi Investasi Tahun 2025 Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier

| Sektor | PMDN | | PMA | | Total PMDN & PMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | % | 2025 | % | 2025 | % |
| Primer | 193,9 | 18,8 | 95,5 | 10,6 | 289,4 | 15 |
| Sekunder | 239,7 | 23,3 | 541,2 | 60,1 | 780,9 | 40,4 |
| Tersier | 596,7 | 57,9 | 264,2 | 29,3 | 860,9 | 44,6 |
| **Total** | **1.030,3** | **100** | **900,9** | **100** | **1.931,2** | **100** |

Pada tahun 2025, nilai PMA dan PMDN sektor sekunder berkontribusi sebesar 40,4 persen terhadap total realisasi investasi. Sektor dengan kontribusi tertinggi adalah sektor tersier, yaitu sebesar 44,6 persen dari total investasi, sedangkan sektor primer berkontribusi sebesar 15 persen. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa struktur investasi nasional pada tahun 2025 masih didominasi oleh sektor tersier, dengan sektor sekunder sebagai kontributor utama kedua.

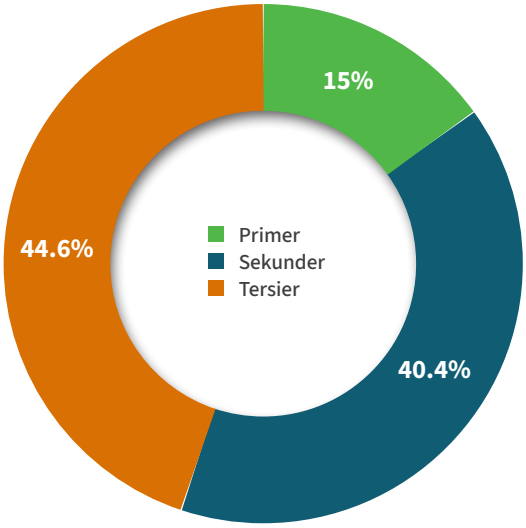


**Gambar 3.17**
Kontribusi Nilai PMA/PMDN Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier Tahun 2025

Berdasarkan realisasi investasi PMA dan PMDN sektor sekunder tahun 2025, subsektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya menjadi kontributor terbesar dengan nilai investasi sebesar Rp262,04 triliun atau 33,56 persen dari total investasi sektor sekunder. Kontributor terbesar berikutnya berasal dari Industri Kimia dan Farmasi sebesar Rp114,87 triliun (14,71 persen) serta Industri Makanan sebesar Rp110,04 triliun (14,09 persen). Subsektor lain yang turut memberikan kontribusi cukup besar adalah Industri Kertas dan Percetakan sebesar Rp71,97 triliun (9,22 persen) dan Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain sebesar Rp51,73 triliun (6,62 persen). Selain itu, Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam juga memberikan kontribusi sebesar Rp43,59 triliun (5,58 persen).

Subsektor lainnya seperti Industri Karet dan Plastik, Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Mineral Nonlogam, Industri Tekstil, Industri Lainnya, dan Industri Kayu masing-masing memberikan kontribusi di bawah 5 persen terhadap total investasi sektor sekunder. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa investasi sektor sekunder pada tahun 2025 masih terkonsentrasi pada subsektor industri berbasis logam, kimia, dan pangan, yang berperan penting dalam memperkuat struktur industri nasional serta mendukung agenda hilirisasi.

**Tabel 3.6**
Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder Per Subsektor (Rp Triliun) Tahun 2025

| No | Subsektor | PMA | PMDN | Jumlah | Kontribusi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya | 234,40 | 27,64 | 262,04 | 33,56 |
| 2 | Industri Kimia Dan Farmasi | 61,58 | 53,29 | 114,87 | 14,71 |
| 3 | Industri Makanan | 36,38 | 73,66 | 110,04 | 14,09 |
| 4 | Industri Kertas dan Percetakan | 49,79 | 22,18 | 71,97 | 9,22 |
| 5 | Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | 36,13 | 15,60 | 51,73 | 6,62 |
| 6 | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam | 36,46 | 7,13 | 43,59 | 5,58 |
| 7 | Industri Karet dan Plastik | 20,63 | 11,80 | 32,43 | 4,15 |
| 8 | Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 24,19 | 1,65 | 25,83 | 3,31 |
| 9 | Industri Mineral Nonlogam | 15,97 | 9,05 | 25,02 | 3,20 |
| 10 | Industri Tekstil | 11,02 | 9,21 | 20,23 | 2,59 |
| 11 | Industri Lainnya | 11,85 | 4,86 | 16,71 | 2,14 |
| 12 | Industri Kayu | 2,79 | 3,61 | 6,40 | 0,82 |
| **Total** | | **541,20** | **239,67** | **780,87** | **100,00** |

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan berbagai upaya melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian IKU 2 Nilai PMA/PMDN sektor sekunder. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan penyusunan dokumen **perencanaan kebijakan penanaman modal dan investasi berkelanjutan** terdiri dari:

a) Kajian "*Supply Chain Integration of Battery Value Chain for Energy Transition in Indonesia*" yang disusun oleh Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur. Kajian ini dihasilkan melalui kerja sama dengan UNOPS *Energy Transition Partnership*;

b) Kajian dengan judul "*Kajian Pengembangan Investasi Sektor Kesehatan Pada KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten & KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam TA 2025*" yang disusun oleh Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan;

c) Kajian dengan judul "*Peningkatan Kualitas Investasi Sektor Agrobisnis Sapi Potong Terintegrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur*" yang disusun oleh Direktorat Perencanaan Makro Investasi.

Dalam rangka peningkatan nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga melakukan kegiatan yang berkelanjutan dalam rangka promosi potensi investasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga terus melakukan kegiatan **promosi penanaman modal melalui beberapa kegiatan** di antaranya:

a. Pemanfaatan *market intelligence* dalam kegiatan promosi penanaman modal yang mencakup pemetaan sektor prioritas, analisis negara target dan negara pesaing, serta profil calon investor potensial. Hal ini meningkatkan relevansi peluang investasi yang ditawarkan dan mendorong rencana penanaman modal.

b. Penyediaan materi promosi berbasis proyek investasi siap ditawarkan menjadi faktor penting dalam mendorong investor melakukan penjajakan bisnis secara lebih konkret. Ketersediaan informasi proyek yang komprehensif mempermudah investor dalam menyusun rencana penanaman modal sebagai tindak lanjut kegiatan promosi.

c. Kegiatan promosi investasi yang dilakukan secara fokus dan terarah (*targeted*) berdasarkan wilayah dan sektor prioritas yaitu berupa penjajakan aktif secara *door-to-door*. Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan forum investasi tingkat nasional dan internasional serta fasilitasi investor baru maupun investor yang akan melakukan perluasan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai rencana penanaman modal yang tercatat dalam sistem OSS dalam rangka mendukung tercapainya target nilai realisasi penanaman modal yang sudah ditetapkan.

d. Pengawalan minat investasi baru maupun perluasan, termasuk investasi skala besar dan prioritas, dilakukan secara fokus dan berkesinambungan melalui pertemuan-pertemuan, *focus group discussion,* dan *workshop* dengan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, mitra lokal potensial, dan lembaga perbankan. Pengawalan ini meningkatkan keyakinan investor potensial dalam mendalami peluang investasi di Indonesia dan mempercepat pencatatan nilai rencana penanaman modal di sistem OSS.

e. Kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pemerintah daerah, asosiasi bisnis dalam dan luar negeri, dan lembaga perbankan memperkuat kualitas pelaksanaan promosi beserta tindak lanjutnya, sehingga meningkatkan peluang investor potensial untuk menyampaikan nilai rencana penanaman modal di sistem OSS.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga telah menyelenggarakan kegiatan Indonesia ***International Sustainability Forum (ISF) 2025***. ISF merupakan forum tahunan berskala internasional yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional dalam pembangunan berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi hijau. Pada edisi ketiga ini (ISF 2025) dilaksanakan di JICC Jakarta, bertemakan "*Investing for a Resilient, Sustainable, and Prosperous World*" mempertegas komitmen Indonesia terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta peran aktif dalam forum global terkait iklim, energi, dan lingkungan. ISF menjadi wadah kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan mitra internasional untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan investasi hijau. Forum ini diselenggarakan selama dua hari, melibatkan lebih dari 60 pembicara internasional dan nasional, dihadiri oleh sekitar 10.000 peserta terdiri atas kementerian/lembaga, BUMN, perusahaan nasional & global, akademisi, serta organisasi internasional seperti IFC, WBCSD, dan UNESCAP, dan disiarkan secara daring melalui berbagai platform media.

Rangkaian main event ISF 2025 meliputi sesi *plenary* dengan 10 topik utama berupa *keynote* dan diskusi panel bersama pemimpin sektor publik dan swasta, serta 15 sesi tematik yang membahas isu keberlanjutan secara mendalam dan difasilitasi oleh *knowledge partners*. Selain itu, terdapat sesi *high level dialogue* yang bersifat tertutup untuk para tamu tingkat tinggi guna mendiskusikan tantangan dan peluang

**Gambar 3.18**
Pelaksanaan Indonesia *International Sustainability Forum* (ISF) 2025

strategis di bidang keberlanjutan. Sebagai bagian dari penyelenggaraan, ISF 2025 menghadirkan pameran dan *science corner* yang diikuti oleh 30 peserta, menampilkan inovasi edukatif dari perguruan tinggi dan sektor swasta. ISF 2025 juga diselenggarakan dengan komitmen *green event* melalui penggunaan material ramah lingkungan dan daur ulang serta pengelolaan sampah berkelanjutan, sebagai wujud nyata penerapan prinsip keberlanjutan dalam acara internasional.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan kegiatan **perbaikan iklim penanaman modal**. Keberhasilan Indonesia dalam memperbaiki iklim investasi dinilai berdasarkan jumlah prosedur dan kecepatan memulai usaha (*starting a business*) dalam kerangka penilaian *Ease of Doing Business* (EoDB) yang menjadi indikator nasional dalam Renstra BKPM dan RPJMN 2020–2024. Melalui implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS), Indonesia berhasil menurunkan waktu penyelesaian perizinan memulai usaha **menjadi 2,5 hari dan menyederhanakan menjadi hanya 2 prosedur**. Capaian tersebut dikategorikan sangat baik dan menjadi fondasi awal bagi transformasi sistemik menuju pengukuran iklim investasi yang lebih komprehensif. Bank Dunia secara resmi memperkenalkan metodologi baru bernama *Business Ready* (*B-Ready*) yang menggantikan EoDB. Berbeda dengan EoDB yang lebih berfokus pada prosedur formal untuk memulai usaha, metode *B-Ready* menilai seluruh aspek regulasi dan layanan pemerintah yang memengaruhi perkembangan sektor usaha secara keseluruhan. Penilaian *B-Ready* didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu Pilar I: *Regulatory Framework*, Pilar II: *Public Services*, dan Pilar III: *Operational Efficiency*, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam sepuluh topik penilaian, meliputi *business entry*, *business location*, *utility services*, labor, *financial services, international trade, taxation, dispute resolution, market competition*, dan *business insolvency*. Pengumpulan data dilaksanakan melalui dua mekanisme: konsultasi ahli (*Expert Consultation*) yang diperbarui setiap tahun, serta survei tingkat perusahaan (*Enterprise Survey*) yang diperbarui per siklus tiga tahunan. Siklus penilaian ini menempatkan *B-Ready* sebagai instrumen evaluasi ekosistem investasi yang lebih dinamis, lebih luas cakupan topiknya, serta lebih realistis dalam menggambarkan pengalaman dunia usaha.

Hasil Survei *B-Ready* Tahap Kedua dirilis pada akhir tahun 2025 dan menempatkan Indonesia pada skor 62 dari 100. Pada tahun tersebut, capaian peningkatan kualitas iklim penanaman modal oleh Direktorat direfleksikan melalui indikator persentase rekomendasi perbaikan kebijakan/regulasi, yaitu delapan rekomendasi kebijakan yang berhasil diselesaikan (kategori sangat baik), meningkat dari empat rekomendasi pada tahun 2023, yang juga tercermin dalam peningkatan skor pilar *regulatory framework* dari 64 menjadi 66. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas fungsi advokasi kebijakan Direktorat dalam memperkuat ekosistem investasi berbasis regulasi dan pelayanan publik. Memasuki tahun 2025, arah kebijakan pemerintah lebih difokuskan pada harmonisasi kebijakan, penyatuan visi target investasi nasional, keberlanjutan hilirisasi SDA berorientasi ekspor, penataan perizinan berusaha yang ideal, serta reformasi birokrasi yang semakin adaptif. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menghasilan enam rekomendasi strategis yaitu:

1. Penyusunan Rencana Aksi *B-Ready* 2025;
2. Penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR)
3. Masukan terhadap perubahan Perpres 10/2021 jo. 49/2021;
4. Penerbitan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM No 5 Tahun 2025
5. Masukan revisi PMK 69/2024 (*Tax Holiday*), serta
6. rekomendasi terkait Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah dan Iklim Usaha.

Rekomendasi lainnya masih terus dikembangkan, termasuk masukan dalam perundingan perdagangan internasional (ACAFTA, IA-CEPA), bahan analisis KPPI mengenai BMTP, kebijakan tarif AS, isu non-tarif USTR, serta dokumen lintas sektor lainnya.

## Faktor Pendorong

Faktor pendorong pencapaian kinerja nilai realisasi PMA/PMDN sektor sekunder Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025 di antaranya:

1. Adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung melalui penyederhanaan perizinan berusaha, pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor sekunder;
2. Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai, termasuk kawasan industri, energi, transportasi, serta sarana logistik yang menunjang kegiatan hilirisasi dan manufaktur;
3. Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan dan sektor hilirisasi berbasis teknologi dan nilai tambah;
4. Akses pasar yang luas dan orientasi ekspor yang kuat, didukung oleh perjanjian perdagangan internasional, promosi investasi, dan integrasi dengan pasar global;
5. Konektivitas dan integrasi rantai pasok yang efektif, baik antarwilayah maupun antara hulu–hilir, sehingga meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi;
6. Dukungan pembiayaan dan investasi yang kondusif, melalui kemudahan akses pembiayaan, kemitraan investasi, serta stabilitas iklim usaha;
7. Komitmen terhadap inklusivitas dan pemerataan investasi, dengan mendorong penyebaran investasi sektor sekunder ke berbagai daerah, termasuk kawasan di luar pusat pertumbuhan ekonomi.

## Faktor Penghambat

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menghadapi berbagai faktor penghambat dalam pencapaian kinerja nilai PMA/PMDN sektor sekunder, meskipun realisasi tahun 2025 terkategori baik. Beberapa faktor penghambat tersebut di antaranya:

1. Kondisi geopolitik global yang tidak stabil serta fluktuasi ekonomi makro, termasuk ancaman resesi global dan perlambatan ekonomi nasional berdampak pada menurunnya minat investor (PMA dan PMDN) untuk merealisasikan investasi di sektor sekunder. Hal ini berdampak langsung pada pencapaian target nilai realisasi.
2. Daya saing investasi yang rendah dibandingkan negara kompetitor. Indonesia menghadapi tantangan dalam menarik investasi PMDN dan PMA di sektor sekunder karena persaingan investasi dari negara kompetitor. Negara-negara kompetitor menawarkan insentif investasi yang lebih menarik atau kondisi pasar yang lebih menguntungkan, sehingga mengurangi preferensi investor untuk menanamkan modal ke sektor sekunder di Indonesia dan menghambat pencapaian target realisasi.
3. Keterbatasan ketersediaan lahan investasi yang siap dan jelas. Kurangnya ketersediaan lahan investasi yang berstatus "*clean and clear*" menjadi hambatan bagi pengembangan proyek-proyek di sektor sekunder. Keterbatasan ini memperlambat proses realisasi investasi dan membatasi potensi pertumbuhan di sektor tersebut.
4. Pemanfaatan potensi investasi sektor sekunder yang belum optimal.
   Hal ini mengindikasikan adanya celah antara peluang yang tersedia dengan kemampuan untuk menarik dan merealisasikan investasi secara efektif, sehingga target indikator kinerja nilai realisasi belum tercapai maksimal.
5. Implementasi regulasi baru secara langsung memengaruhi capaian realisasi investasi sektor sekunder. Terbitnya beberapa regulasi baru seperti kebijakan Moratorium Nikel dan peraturan terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), secara langsung mempengaruhi capaian realisasi investasi di sektor sekunder. Dampak regulasi ini menciptakan ketidakpastian dan berpotensi menghambat proyek-proyek investasi, sehingga menurunkan nilai realisasi yang diharapkan di sektor tersebut.

## Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkomitmen untuk melakukan peningkatan capaian kinerja nilai PMA/PMDN sektor sekunder secara berkelanjutan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi akan melakukan beberapa rencana tindak lanjut ke depan di antaranya:

1. Penguatan koordiasi dan sinergi antar instansi terkait di tingkat pusat dan daerah. Upaya ini dilaksanakan melalui peningkatan frekuensi dan kualitas pertemuan koordinasi yang lebih efektif dan intensif dengan instansi teknis terkait. Langkah tersebut penting mengingat optimalisasi berbagai program dan kegiatan penanaman modal sektor sekunder sangat memerlukan keterlibatan terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan koordinasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan penanaman modal sektor sekunder dapat berjalan lebih optimal sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.
2. Penguatan sistem pemantauan realisasi investasi melalui optimalisasi LKPM berbasis risiko. Sosialisasi dan edukasi secara masif dan intensif kepada seluruh penanam modal mengenai pentingnya dan tata cara pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berbasis Risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Program ini akan fokus pada pemahaman periode pelaporan, ketepatan data, dan validasi informasi. Selain itu, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap setiap pelanggaran kewajiban pelaporan LKPM menjadi krusial untuk menumbuhkan disiplin dan akuntabilitas di kalangan investor, sekaligus memastikan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
3. Peningkatan kapasitas pembinaan inklusif bagi penanam modal dan aparatur daerah. Perancangan dan pelaksanaan program pembinaan yang berkesinambungan bagi penanam modal, khususnya di sektor sekunder, serta aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam pelayanan investasi. Program ini akan mencakup bimbingan teknis mengenai regulasi investasi, standar operasional, dan penyelesaian masalah di lapangan. Pembinaan juga akan memfasilitasi identifikasi dini indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui analisis mendalam terhadap LKPM, hasil pemantauan langsung, serta respons cepat terhadap informasi atau pengaduan dari investor dan asosiasi pengusaha. Tujuannya adalah untuk meminimalkan hambatan investasi dan mengoptimalkan kontribusi investasi terhadap perekonomian nasional.
4. Implementasi sistem pengawasan berbasis risiko yang terintegrasi dan koordinatif. Hal ini melibatkan kolaborasi aktif antara kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) melalui subsistem Pengawasan pada sistem OSS. Pengawasan ini akan berfokus pada pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan penanaman modal, identifikasi potensi risiko, dan pengambilan kesimpulan serta rekomendasi yang komprehensif dan efektif berdasarkan hasil pengawasan di lapangan. Upaya ini akan menghasilkan rekomendasi yang tepat guna untuk peningkatan iklim investasi dan kepastian hukum.

### 3.3.2.2
### IKU 3: Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja persentase realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 110,56% atau terkategori istimewa pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 12,42 persen. Hal ini menujukkan adanya upaya dan kinerja positif Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mewujudkan penanaman modal secara inklusif.

**Tabel 3.7**
Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

| SS-1: Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKU-3: Persentase Realisasi PMDN termasuk UMKM (%) | | | | | | | | |
| 2025 | | Capaian Kinerja 2025 (%) | Normalisasi Capaian PK | Realisasi Tahun 2024 | Capaian Kinerja 2025 terhadap Realisasi 2024 (%) | Target Akhir Renstra 2029 | Capaian Kinerja 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2029 (%) | Kategori Capaian Kinerja Tahun 2025 |
| T | R | | | | | | | |
| 48,3 | 53,4 | **110,56** | 110,56 | 47,5 | 12,42 | 49,70 | 107,44 | **Istimewa** |

PMDN merupakan salah satu fondasi penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena berperan dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan daya saing produk domestik, serta mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah. UMKM memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik mengingat perannya yang besar dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Indikator kinerja ini dirancang untuk menilai sejauh mana investasi dalam negeri, baik yang berasal dari pelaku usaha skala besar maupun UMKM, mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta penciptaan peluang usaha yang inklusif. Melalui penguatan investasi domestik tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berupaya memastikan bahwa perekonomian nasional semakin berkembang secara mandiri, berkelanjutan, serta memiliki daya saing yang kuat di tingkat global.

**Gambar 3.19**
Kegiatan *Business Matching* antara pelaku Usaha Besar dan UMKM di Cibubur, Jawa Barat

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan kegiatan dan subkegiatan yang mendukung capaian kinerja persentase realisasi PMDN termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menerbitkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sekaligus Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 220 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha baik Usaha Besar maupun UMKM dalam merealisasikan kemitraan, sehingga diharapkan realisasi kesepakatan kemitraan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Dalam peraturan menteri dan keputusan menteri ini telah diatur di antaranya mengenai kepastian pelaksanaan monitoring dan evaluasi kemitraan. Usaha Besar yang wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku harus menyampaikan laporan realisasi kemitraan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala setiap triwulan. Kewajiban ini diiringi juga dengan pengenaan sanksi yang tegas bagi Usaha Besar yang tidak atau belum sepenuhnya merealisasikan kewajiban kemitraan.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus mendorong penguatan iklim investasi nasional melalui berbagai program strategis, salah satunya adalah akselerasi kemitraan antara usaha besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penguatan ekosistem hilirisasi. Pada 20 November 2025, BKPM menyelenggarakan kegiatan business matching yang mempertemukan enam perusahaan besar dengan lebih dari 90 UMKM di Bekasi, Jawa Barat, membuka peluang kemitraan senilai sekitar Rp37 miliar serta mendorong UMKM agar dapat terintegrasi ke dalam rantai pasok industri besar. Inisiatif ini menyoroti peran penting integrasi UMKM dalam mendorong pemerataan manfaat investasi sekaligus memperkuat daya saing usaha lokal di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional. Upaya tersebut tidak hanya memperkuat hubungan antara pelaku usaha besar dan UMKM, tetapi juga merupakan bagian dari strategi BKPM untuk meningkatkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 2025 dengan menciptakan ekosistem investasi yang inklusif dan produktif. Melalui penguatan *database* UMKM dan fasilitasi kemitraan yang tepat sasaran, pemerintah berharap pelaku usaha domestik dapat memperluas kapasitas produksi dan keterlibatan dalam proyek investasi besar, sehingga kontribusi PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional semakin optimal di tahun 2025.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan **kurasi atas produk UMKM unggulan disesuaikan dengan minat pasar dan standar produk negara tujuan ekspor**. Kurasi sangat penting untuk memastikan produk yang dihasilkan dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan konsumen. Kurasi tidak hanya berfungsi sebagai proses seleksi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk:

1. Memastikan UMKM dengan produk berkualitas dan sesuai standar pasar. Produk yang konsisten dalam kualitas lebih dipercaya oleh konsumen dan memiliki potensi loyalitas pasar;
2. Memenuhi standar tertentu terkait kualitas, keamanan, dan estetika produk;
3. UMKM memiliki kapasitas produksi yang dapat memenuhi permintaan pasar yang lebih luas dan memiliki potensi untuk berkembang, baik secara geografis maupun segmentasi pasar, dan UMKM memiliki produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tren konsumen.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga melakukan ***showcasing* produk UMKM unggulan di pameran internasional negara tujuan ekspor**. Hal ini bertujuan untuk:

1. Membuka akses pasar internasional bagi UMKM dengan bertemu langsung calon buyer luar negeri;
2. Membangun kemitraan bisnis yang berkelanjutan melalui kontrak dagang, kerja sama distribusi, dan skema kemitraan jangka panjang;
3. Meningkatkan kesiapan ekspor UMKM karena harus menyesuaikan produk dengan standar global/negara tujuan ekspor;
4. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk UMKM karena UMKM harus meningkatkan mutu, konsistensi produksi dan *branding* produk.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga melakukan **diseminasi kebijakan kemitraan usaha nasional dalam rangka penanaman modal**. Kegiatan sosialisasi tentang kebijakan terkini kemitraan usaha nasional dan fitur kemitraan di Sistem OSS bagi UMKM di daerah yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman UMKM terhadap kebijakan kemitraan dan pemanfaatan fitur kemitraan di sistem OSS;
2. Mendorong keterlibatan UMKM dalam perannya sebagai pemasok, mitra produksi, distributor, maupun penyedia jasa pendukung bagi Usaha Besar;
3. Diseminasi mendorong agar kemitraan berbasis transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan akses pasar bagi UMKM;
4. Meningkatkan daya saing kualitas dan standar produk serta usaha UMKM;
5. Memperkuat keberlanjutan dan ketahanan usaha UMKM melalui materi sosialisasi tentang manajemen, keuangan, digitalisasi, dan akses pembiayaan.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan **pendataan realisasi komitmen kemitraan usaha besar dengan UMKM**. Dalam rangka *monitoring* dan evaluasi realisasi komitmen kemitraan Usaha Besar dengan UMKM khususnya bagi Usaha Besar yang memiliki kewajiban bermitra dengan UMKM dalam rangka permohonan Fasilitas Penanaman Modal, maka diperlukan adanya tools monitoring di antaranya: 1) Klarifikasi kepada Usaha Besar terkait realisasi kemitraan terhadap komitmen yang sudah diberikan; 2) Pengisian laporan realisasi kemitraan oleh Usaha Besar melalui fitur Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada Sistem OSS; 3) Penyampaian dokumen pendukung realisasi kemitraan, berupa Kontrak Kemitraan, Invoice, Bukti Pembinaan kepada UMKM,

dll. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga telah melakukan ***monitoring* dan evaluasi terhadap realisasi komitmen kemitraan terhadap usaha besar** yang bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa komitmen kemitraan yang telah disepakati oleh Usaha Besar benar-benar dapat dilaksanakan;
2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan Usaha Besar terhadap kewajiban kemitraan;
3. Menyediakan basis data kemitraan usaha yang dapat digunakan sebagai perumusan kebijakan, evaluasi program dan penentuan kebijakan lanjutan.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga melakukan **koordinasi dengan *stakeholder*/ instansi terkait dan pendampingan penguatan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam rangka mendukung pemenuhan rantai pasok industri nasional**. Tujuannya adalah agar UMKM tidak hanya menjadi pelaku usaha lokal tetapi juga menjadi bagian dari rantai nilai industri yang lebih besar, baik sebagai pemasok bahan baku, komponen, atau jasa pendukung bagi perusahaan besar (industri hulu) dan perusahaan manufaktur nasional. Namun demikian, atas kegiatan yang telah terlaksana dirasakan belum optimal karena baru sebatas melakukan rapat dan forum diskusi terarah dengan para pelaku usaha baik Usaha Besar dan UMKM, Pemerintah Pusat dan Daerah maupun asosiasi usaha, untuk memahami kebutuhan Usaha Besar pada industri terpilih yang dapat dipenuhi oleh UMKM. Oleh karena itu, diusulkan perlu dilakukan optimalisasi dalam hal:

1. Meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM melalui pendampingan dan pelatihan teknis manajerial;
2. Mendorong terjalinnya kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar, sehingga UMKM dapat masuk ke dalam ekosistem industri;
3. Memperkuat keberlanjutan ekonomi daerah melalui optimalisasi peran UMKM lokal;
4. Mengidentifikasi dan memetakan UMKM potensial.

Kegiatan promosi penanaman modal juga dilakukan melalui pelaksanaan ***Regional Investment Forum*** (RIF) Tahun 2025. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM telah menyelenggarakan kegiatan *Regional Investment Forum Series*: Forum Investasi Nasional 2025 bertempat di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan promosi ini sebagai wadah bagi pemerintah daerah untuk mempromosikan potensi dan peluang penanaman modal dari daerah masing-masing, dan bagi pemerintah pusat untuk menyampaikan kebijakan terkini yang mendukung peningkatan iklim dan realisasi investasi. Bagi para pelaku usaha/ calon investor kegiatan ini dimanfaatkan untuk memperoleh informasi tentang peluang investasi yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya dan jalur konsultasi tentang kebijakan penanaman modal, serta berinteraksi dengan pemangku kepentingan terkait. Forum Investasi Nasional 2025 mengusung tema "Kerja Sama Pemerintah, Dunia Usaha dan Akademisi Dalam Meningkatkan Investasi Bernilai Tambah dan Ekonomi Hijau". Dengan tema tersebut kegiatan forum investasi menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi informasi dan pengalaman yang berguna bagi tumbuhnya investasi sehingga dapat memotivasi para pelaku usaha untuk menanamkan kembali modalnya di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk seminar, paparan peluang proyek investasi, *networking, mini exhibition, dan one-on-one meeting* antara pelaku usaha dengan tim Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM maupun dengan Pemerintah Daerah.

Forum Investasi Nasional 2025 turut menghadir-kan sekitar 600 orang, yang terdiri dari perwakilan Kedutaan Besar Malaysia dan Jepang, DPMPTSP dan Dinas Teknis Daerah, Bank Indonesia, Para Akademisi, serta para Pelaku Usaha dan Calon Investor. Forum ini diselenggarakan melalui serangkaian kegiatan strate-gis meliputi:

**Gambar 3.20**
Pelaksanaan RIF 2025 di Bandung, Jawa Barat

a. Paparan Peluang Investasi Daerah dan Tayangan Katalog Peluang Proyek Investasi yang menampilkan proyek potensi unggulan dari 5 Pemerintah Daerah dan Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur;
b. Seminar dan Diskusi Panel yang menghadirkan berbagai narasumber lintas sektor yang mewakili Pemerintah, Dunia Usaha, serta Akademisi untuk membahas arah kebijakan hilirisasi dan investasi hijau di Indonesia;
c. Katalog Peluang Proyek Investasi dan Mini Exhibition (*Promotion Desk*) yang menawarkan 22 peluang proyek investasi Pemerintah Daerah di sektor industri hilirisasi dan ekonomi hijau;
d. Konsultasi (*One-on-One*) bersama Tim Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Direktorat Regional Bank Indonesia, sebagai wadah bagi calon investor untuk berdiskusi langsung mengenai peluang dan rencana investasi, perizinan berusaha, promosi, dan mekanisme investasi di daerah.

## Faktor Pendorong

Faktor pendorong pencapaian kinerja persentase realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025 di antaranya:

1. Akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau, sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas usaha dan realisasi investasi domestik;
2. Kebijakan dan regulasi yang mendukung UMKM, termasuk kemudahan perizinan berusaha, perlindungan usaha, serta insentif bagi pelaku usaha kecil dan menengah;
3. Program pendampingan dan peningkatan kapasitas UMKM yang berkelanjutan, guna memperkuat manajemen usaha, kualitas produk, dan kesiapan investasi;
4. Ketersediaan infrastruktur dan akses pasar yang mendukung, termasuk sarana produksi, distribusi, pemasaran, dan platform digital bagi UMKM;

5. Konektivitas dan integrasi UMKM dalam rantai nilai (*value chain*), melalui kemitraan dengan usaha besar dan keterhubungan dengan sektor hulu-hilir;
6. Meningkatnya kesadaran dan motivasi pelaku UMKM untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha, seiring dengan sosialisasi kebijakan dan peluang pasar;
7. Dukungan pemerintah daerah dan lembaga pendukung UMKM, melalui fasilitasi perizinan, pembinaan, serta kemitraan usaha di daerah;
8. Peningkatan jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disertai dengan kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), sehingga memperkuat basis data dan pelaporan realisasi PMDN UMKM.

## Faktor Penghambat

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menghadapi berbagai faktor penghambat dalam pencapaian kinerja persentase realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meskipun realisasi tahun 2025 terkategori istimewa. Beberapa faktor penghambat tersebut di antaranya:

1. Keterbatasan akses pembiayaan yang terjangkau, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, menjadi kendala utama bagi pelaku PMDN termasuk UMKM untuk memulai atau mengembangkan usaha. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam perolehan modal investasi, ekspansi bisnis, dan modernisasi peralatan, yang pada akhirnya membatasi peningkatan nilai realisasi penanaman modal dalam negeri, termasuk kontribusi dari UMKM.

2. Proses perizinan yang kompleks, memerlukan waktu yang cukup lama, dan birokrasi yang rigid menjadi hambatan bagi calon investor. Ketidakjelasan prosedur, persyaratan yang berubah-ubah, serta potensi pungutan liar dapat mengurangi minat investor, menunda inisiasi proyek, dan menghambat pertumbuhan usaha, sehingga berdampak negatif pada capaian target realisasi PMDN termasuk UMKM.

3. Keterbatasan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia. Keterbatasan kapasitas manajerial, teknis, serta kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih menghambat kemampuan untuk bersaing dan mengembangkan inovasi. Kekurangan ini mempengaruhi efisiensi operasional, kualitas produk, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar, yang secara langsung berdampak pada potensi peningkatan nilai investasi dan keberlanjutan usaha.

4. Ketersediaan infrastruktur dasar yang tidak memadai, seperti akses listrik, air bersih, sanitasi, jalan, dan telekomunikasi, terutama di daerah-daerah terpencil atau sentra produksi, menjadi kendala bagi calon investor. Kondisi ini meningkatkan biaya logistik, menghambat distribusi produk, mengurangi daya saing, dan secara tidak langsung menekan minat investasi serta ekspansi usaha kecil menengah.

5. Terbatasnya akses pasar dan jaringan distribusi. Calon investor menghadapi keterbatasan dalam mengakses pasar yang lebih luas, baik di tingkat domestik maupun internasional, serta terbatasnya jaringan distribusi yang efektif. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan penjualan, skala produksi, dan jangkauan pasar, yang pada akhirnya membatasi potensi pertumbuhan investasi dan nilai realisasi penanaman modal mereka.

6. Kurangnya integrasi dalam rantai nilai industri yang lebih besar, baik sebagai pemasok bahan baku, komponen, maupun penyedia jasa, membuat mereka sulit untuk meningkatkan skala ekonomi dan daya saing. Keterbatasan ini membatasi peluang kolaborasi, transfer teknologi, dan peningkatan efisiensi, sehingga menghambat pertumbuhan investasi dan kontribusi mereka terhadap total realisasi PMDN.

7. Ketidakpastian ekonomi dan regulasi menciptakan risiko tinggi. Fluktuasi kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, serta ketidakpastian regulasi yang berpotensi berdampak langsung pada iklim usaha menciptakan risiko tinggi bagi PMDN dan UMKM. Lingkungan yang tidak stabil ini dapat menyebabkan investor menunda atau membatalkan rencana investasi, mengurangi kepercayaan pasar, dan menghambat pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya berdampak negatif pada pencapaian target realisasi PMDN termasuk di sektor UMKM.

## Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkomitmen untuk melakukan peningkatan capaian kinerja persentase realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara berkelanjutan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi akan melakukan beberapa rencana tindak lanjut ke depan adalah melakukan peningkatan dan optimalisasi faktor pendorong melalui sinergi antar kementerian. Melakukan identifikasi mendalam terhadap faktor-faktor pendorong PMDN termasuk UMKM yang telah berhasil seperti insentif pajak, kemudahan investasi di sektor tertentu, program pemberdayaan UMKM dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan serta mengoptimalkan implementasinya. Hal ini melalui kolaborasi dan peningkatan kerja sama kementerian seperi Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyelaraskan kebijakan, program, dan anggaran agar tercipta ekosistem investasi yang lebih kondusif dan terintegrasi.

### 3.3.2.3
### IKU 4: Nilai PMA/PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan pada tahun 2025 sebesar 145,16 persen atau terkategori istimewa. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, kinerja tahun 2025 memiliki capaian sebesar 28,32 persen. Hal ini menunjukkan komitmen dan kinerja positif Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam rangka pencapaian realiasi investasi di kawasan pusat pertumbuhan.

**Tabel 3.8**
Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMA/PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan

**SS-1:**
**Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata**

| IKU-4: Nilai PMA/PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan (Rp Triliun) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | | Capaian Kinerja 2025 (%) | Normalisasi Capaian PK | Realisasi Tahun 2024 | Capaian Kinerja 2025 terhadap Realisasi 2024 (%) | Target Akhir Renstra 2029 | Capaian Kinerja 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2029 (%) | Kategori Capaian Kinerja Tahun 2025 |
| T | R | | | | | | | |
| 307,1 | 445,8 | **145,16** | 110,00 | 347,4 | 28,32 | 507,20 | 87,89 | **Istimewa** |

Kerja sama penanaman modal dapat menjadi instrumen strategis dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai PMA dan PMDN pada kawasan pusat pertumbuhan. Sebagai contoh pada tahun 2025, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta Nota Kesepahaman dengan Himpunan Kawasan Industri, yang difokuskan pada penguatan koordinasi, pertukaran informasi peluang investasi, fasilitasi investor, dan dukungan promosi investasi di kawasan. Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kawasan pusat pertumbuhan, memperkuat kepercayaan investor, serta mendorong peningkatan realisasi PMA dan PMDN, sehingga berkontribusi terhadap pencapaian target investasi nasional.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga telah melakukan kajian Pengembangan Investasi Sektor Kesehatan pada KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten dan KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam. Kajian ini bertujuan untuk: 1) Menghasilkan rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan investasi sektor kesehatan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan investasi di Indonesia; 2) Tersedianya data dan informasi terkait peluang investasi sektor Kesehatan di Indonesia.

Pelaksanaan program *Quick Wins* yang dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM atas 2 dari 20 kawasan industri yang telah terfasilitasi melalui program KLIK (Kemudahan Langsung Konstruksi). Kegiatan fasilitasi jasa dan kawasan yang dilakukan pada dua badan usaha sesuai target rencana kinerja mencakup sebagai berikut:

1. Fasilitasi Proyek Kawasan Industri PT. Horizon Agro Industry di Kabupaten Way Kanan, Lampung.
2. Fasilitasi Rencana Investasi Klinik Kecantikan asal Korea Selatan, ATOP Plastic Surgery di Banten.

Kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan Kawasan Industri melalui KLIK dilakukan melalui penetapan Kawasan Industri yang mendapat fasilitas KLIK melalui diterbitkannya Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 286 Tahun 2025 tentang Penetapan Kawasan Industri Untuk Kemudahan Langsung Konstruksi. Terdapat sebanyak 32 Kawasan Industri yang ditetapakan di atas target yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Kawasan Industri Tembesi
2. Batamindo Industrial Park
3. Bintang Industrial Park
4. Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK)
5. Kawasan Industri Tunas Prima
6. Kawasan Industri Terpadu Wilmar
7. Millenium Industrial Estate
8. Krakatau Industrial Estate Cilegon
9. Kawasan Industri Jababeka
10. Karawang New Industrial City
11. Kawasan Industri Artha Industrial Hill
12. Taman Niaga Karawang Prima/GT Tech Park
13. Karawang International Industrial City
14. Kertajati Industrial Estate Majalengka
15. Kawasan Industri Indotaisei (Kota Bukit Indah)
16. Kota Bukit Indah Industrial City
17. Kawasan Industri Jatiluhur Industrial Smart City
18. Suryacipta Subang Smartpolitan
19. Batang Industrial Park
20. i-Sentra@Lamongan
21. Kawasan Industri Safe N Lock*
22. Kawasan Industri SiRIE
23. Kawasan Industri Tuban
24. Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)
25. KI Jorong
26. Kawasan Industri Stardust
27. Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)
28. Kawasan Industri Konawe
29. Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP)
30. Kawasan Industri Weda Bay
31. Purwakarta Integrated Industrial Park (PIIP)
32. Kawasan Industri Losarang

Kegiatan fasilitasi badan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan terhadap dua badan usaha sebagai berikut:

1. Fasilitasi Perubahan Izin Usaha dan KKPR PT. Surya Inter Wisesa.
2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perencanaan Penanaman Modal PT. Bangun Sulawesi Tengah di KEK Palu

Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga telah melakukan fasilitasi terhadap KEK Edukasi Teknologi dan Kesehatan Internasional Banten dan KEK Palu. Untuk kawasan KEK Edukasi Teknologi dan Kesehatan Internasional Banten, fasilitasi yang dilakukan meliputi:

1. Percepatan proses pelepasan Kawasan Hutan (SLA 138 hr) oleh Kementerian LHK;
2. Penetapan titik/lokus dan gambar areal kawasan hutan yang akan dimanfaatkan dan diajukan menjadi KEK
3. Penyusunan dokumen masterplan dan KLHS.
4. Penyiapan BU pemrakarsa/pengusul KEK, perlu disiapkan Pepres penugasan oleh Kemenko Perekonomian dan Kementerian BUMN
5. Dukungan perizinan berusaha untuk fokus area 1 *piloting* dan promosi

Untuk kawasan KEK Palu telah dilakukan beberapa tindak lanjut sebagai berikut:

1. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM agar melakukan koordinasi dan pembahasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fiktif positif atas perizinan berusaha dan pemenuhan persyaratan pada pelaku usaha di dalam Kawasan.
2. DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah agar berkoordinasi dalam rangka tindak lanjut penyelesaian permasalahan perusahaan dengan perizinan yang terkendala.

Pihak pengelola dan tenant dari KEK Palu agar menyampaikan surat permohonan fasilitasi kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta instansi terkait, untuk dikawal dan ditindaklanjuti lebih lanjut proses penyelesaian permasalahannya.

## Faktor Pendorong

Faktor pendorong pencapaian kinerja nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025 di antaranya:

1. Efektivitas kebijakan hilirisasi industri, yang tercermin dari fokus pemerintah dalam mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam di kawasan pusat pertumbuhan, khususnya di luar Pulau Jawa, sehingga meningkatkan daya tarik dan realisasi investasi PMA/PMDN di wilayah tersebut.
2. Integrasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) yang semakin optimal, sehingga mempercepat proses perizinan dan eksekusi investasi di kawasan pusat pertumbuhan serta meningkatkan kemudahan berusaha bagi investor.

## Faktor Penghambat

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menghadapi berbagai faktor penghambat dalam pencapaian kinerja nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan, meskipun capaian kinerja pada tahun 2025 telah berpredikat istimewa di antaranya:

1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar yang belum memadai menghambat daya tarik investasi di kawasan pusat pertumbuhan. Kawasan pusat pertumbuhan diidentifikasi sebagai lokasi strategis untuk investasi. Namun, ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti transportasi, pasokan air bersih, energi yang stabil, telekomunikasi yang andal, dan fasilitas pendukung bisnis yang kurang memadai menjadi kendala. Kondisi ini secara langsung meningkatkan biaya operasional bagi investor, mengurangi efisiensi logistik, dan pada akhirnya menurunkan daya saing kawasan tersebut dalam menarik serta mempertahankan investasi PMA/PMDN. Akibatnya, realisasi investasi dapat terhambat atau bahkan beralih ke lokasi lain yang menawarkan infrastruktur lebih siap.
2. Ketidakpastian dan inkonsistensi kebijakan pemerintah memudarkan kepercayaan investor di kawasan pusat pertumbuhan. Perubahan kebijakan yang sering terjadi atau tidak konsisten, baik di tingkat pusat maupun daerah, menciptakan lingkungan investasi yang tidak stabil. Hal ini mencakup perubahan fokus atau prioritas pemerintah terhadap pengembangan kawasan pusat pertumbuhan, yang dapat memengaruhi kesinambungan dukungan terhadap investasi. Ketidakpastian regulasi, prosedur perizinan yang berubah-ubah, atau insentif yang tidak pasti, menimbulkan keragu-raguan dan risiko tambahan bagi investor. Akibatnya, investor menjadi '*wait and see*', menunda keputusan investasi, atau bahkan menarik diri dari kawasan pusat pertumbuhan, yang berdampak negatif pada pencapaian target nilai realisasi investasi.

## Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkomitmen untuk melakukan peningkatan capaian kinerja nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan secara berkelanjutan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi akan melakukan beberapa rencana tindak lanjut ke depan di antaranya:

1. Penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam penyelesaian kendala kawasan secara intensif lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan kendala lahan dan infrastruktur pendukung di sekitar kawasan pusat pertumbuhan yang realisasi penanaman modalnya belum optimal. Langkah ini diarahkan untuk mempercepat kesiapan kawasan dan meningkatkan kepastian investasi bagi PMA maupun PMDN.
2. Penajaman perencanaan pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan baru berbasis data pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan baru dengan memanfaatkan data realisasi penanaman modal terkini, potensi sektor unggulan, serta kesiapan infrastruktur dan lahan. Perencanaan yang lebih berbasis data diharapkan mampu meningkatkan daya tarik kawasan terhadap investasi berkualitas tinggi serta mendorong peningkatan realisasi PMA/PMDN pada pusat-pusat pertumbuhan.

### 3.3.2.4
### IKU 5: Nilai PMA Berorientasi Ekspor

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja nilai PMA berorientasi ekspor sebesar 79,14% atau terkategori butuh perbaikan pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp164,6 triliun, maka capaian kinerja realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 17,50 persen. Hal ini menujukkan adanya komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk terus melakukan evaluasi, penguatan strategi, dan perbaikan berkelanjutan guna memastikan pencapaian target PMA berorientasi ekspor secara lebih optimal di periode mendatang.

**Tabel 3.9**
Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMA Berorientasi Ekspor

| SS-1: Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKU-5: Nilai PMA Berorientasi Ekspor (Rp Triliun) | | | | | | | | |
| 2025 | | Capaian Kinerja 2025 (%) | Normalisasi Capaian PK | Realisasi Tahun 2024 | Capaian Kinerja 2025 terhadap Realisasi 2024 (%) | Target Akhir Renstra 2029 | Capaian Kinerja 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2029 (%) | Kategori Capaian Kinerja Tahun 2025 |
| T | R | | | | | | | |
| 171,6 | 135,8 | **79,14** | 79,1 | 164,6 | -17,50 | 367,40 | 36,96 | **Butuh Perbaikan** |

Nilai PMA berorientasi ekspor berdasarkan subsektor menunjukkan bahwa kontribusi terbesar berasal dari: (1) Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya sebesar 30,13 persen atau senilai Rp40,91 triliun; (2) Industri Kimia dan Farmasi sebesar 12,12 persen atau senilai Rp16,47 triliun; (3) Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki sebesar 10,04 persen atau senilai Rp13,64 triliun; (4) Industri Kertas dan Percetakan sebesar 9,66 persen atau senilai Rp13,12 triliun; (5) Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain sebesar 9,21 persen atau senilai Rp12,50 triliun. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa PMA berorientasi ekspor pada tahun 2025 masih didominasi oleh subsektor industri manufaktur berbasis logam, kimia, dan produk bernilai tambah, yang berperan penting dalam mendukung penguatan daya saing ekspor industri pengolahan nasional serta pengembangan rantai pasok global.

**Tabel 3.10**
Realisasi Nilai PMA Berorientasi Ekspor

| No | Subsektor | Realisasi Investasi (Juta Rp) | Kontribusi (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hotel dan Restoran | 729.356,407 | 0,54 |
| 2 | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam | 11.171.715,449 | 8,23 |
| 3 | Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 13.640.442,461 | 10,04 |
| 4 | Industri Karet dan Plastik | 4.431.779,509 | 3,26 |
| 5 | Industri Kayu | 655.349,136 | 0,48 |
| 6 | Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | 12.503.438,201 | 9,21 |
| 7 | Industri Kertas dan Percetakan | 13.122.940,085 | 9,66 |
| 8 | Industri Kimia Dan Farmasi | 16.465.032,818 | 12,12 |
| 9 | Industri Lainnya | 3.777.493,613 | 2,78 |
| 10 | Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya | 40.913.510,360 | 30,13 |
| 11 | Industri Makanan | 6.878.591,604 | 5,07 |
| 12 | Industri Mineral Nonlogam | 2.451.422,870 | 1,81 |
| 13 | Industri Tekstil | 3.958.136,108 | 2,91 |
| 14 | Jasa Lainnya | 462.128,030 | 0,34 |
| 15 | Kehutanan | 510,251 | 0,00 |
| 16 | Konstruksi | 38.557,474 | 0,03 |
| 17 | Listrik, Gas dan Air | 85.423,057 | 0,06 |
| 18 | Perdagangan dan Reparasi | 914.443,233 | 0,67 |
| 19 | Perikanan | 42.217,763 | 0,03 |
| 20 | Pertambangan | 2.714.081,196 | 2,00 |
| 21 | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | 32.672,678 | 0,02 |
| 22 | Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan | 375.855,541 | 0,28 |
| 23 | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | 439.709,125 | 0,32 |
| **Total** | | **135.804.806,966** | |

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan berbagai upaya melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rangka pencapaian target nilai PMA berorientasi ekspor. Sebagai bagian dari upaya tersebut, **Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bekerja sama dengan Indonesia *Investment Promotion Centre* (IIPC) New York dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York**, serta mendapat dukungan dari Atase Perdagangan Washington DC dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di New York, dalam penyelenggaraan kegiatan "*Indonesia Economic and Investment Outlook* 2025" di Kantor KJRI New York. Pada acara ini, Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM, Rudy Salahuddin, memberikan sambutan dan menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kebijakan investasi dan sektor-sektor prioritas, termasuk berbagai kemudahan berusaha dan perizinan, kepada pelaku usaha, asosiasi bisnis, perwakilan negara mitra, dan kalangan akademisi.

**Gambar 3.21**
*Indonesia Economic and Investment Outlook* 2025

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melaksanakan kegiatan promosi strategis dalam rangkaian kegiatan ***World Economic Forum*** (WEF) Annual Meeting yang merupakan forum tahunan berskala global yang mempertemukan para pemimpin negara, pelaku usaha, organisasi internasional, akademisi, dan pemangku kepentingan strategis untuk membahas tantangan serta arah kebijakan ekonomi dunia. WEF *Annual Meeting* 2025 diselenggarakan di Davos, Swiss, pada 20–23 Januari 2025, dan menjadi momentum penting untuk memperkuat dialog global mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta responsif terhadap dinamika geopolitik dan transformasi teknologi. Partisipasi Indonesia dalam forum ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam percaturan ekonomi global serta komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045. WEF *Annual Meeting* 2025 dihadiri oleh ribuan peserta dari berbagai negara, termasuk kepala negara dan pemerintahan, menteri, pimpinan korporasi global, investor, serta perwakilan organisasi internasional. Dalam forum ini, Indonesia berpartisipasi aktif melalui kehadiran Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sebagai pembicara dalam sejumlah sesi strategis, serta melalui penyelenggaraan Indonesia *Pavilion* yang berfungsi sebagai *platform country branding* dan promosi peluang investasi Indonesia. Kehadiran Indonesia juga dimanfaatkan untuk menyampaikan pembaruan arah kebijakan pemerintahan baru, prioritas investasi, serta strategi pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan utama WEF *Annual Meeting* 2025 mencakup sesi plenary dan panel diskusi tingkat tinggi yang membahas isu-isu strategis seperti klaster industri sebagai pionir transisi energi, pertumbuhan ekonomi di tengah ketegangan geopolitik global, hilirisasi sumber daya alam, transisi energi, digitalisasi, serta pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Dalam sesi *Country Strategy Dialogue on* Indonesia, Indonesia menegaskan komitmen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun melalui peningkatan kualitas investasi, penguatan industri bernilai tambah, dan kolaborasi global yang saling menguntungkan.

Sebagai bagian integral dari partisipasi Indonesia, Indonesia Pavilion 2025 mengusung tema "*Bridging Sustainability and Prosperity: Indonesia's New Leadership in Global Inclusive Growth*" dan menjadi wadah diskusi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional. Pavilion ini menyelenggarakan berbagai panel tematik dan diskusi strategis yang menyoroti peluang investasi di sektor energi bersih, mineral kritis, ekonomi digital, ketahanan pangan, serta pembiayaan inovatif. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan forum ini untuk memperkuat jejaring global melalui pertemuan bilateral, pertemuan tertutup dengan perusahaan global, serta kegiatan Indonesia Night yang menampilkan budaya dan kuliner Indonesia sebagai sarana diplomasi ekonomi dan promosi nasional. Secara keseluruhan, partisipasi Indonesia dalam *World Economic Forum Annual Meeting* 2025 memberikan nilai strategis dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi global, meningkatkan kepercayaan investor, serta membuka peluang kerja sama konkret di berbagai sektor prioritas. Forum ini juga menjadi sarana penting untuk menyerap pandangan global, memperluas kolaborasi internasional, dan mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Pada tahun 2025, Indonesia menjadi proponent pada Perjanjian *Investment Facilitation for Development* (IFD) yang dibentuk di *World Trade Organization* (WTO). Perjanjian IFD adalah inisiatif plurilateral di bawah kerangka WTO yang bertujuan mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan transparansi proses investasi, terutama untuk mendukung pembangunan di negara berkembang dan LDCs. Perjanjian ini berfokus untuk mempermudah arus investasi asing langsung melalui transparansi, penyederhanaan prosedur perizinan, dan kerja sama internasional. Akan tetapi, Perjanjian IFD ini tidak mencakup akses pasar,

**Gambar 3.22**
*World Economic Forum* (WEF) *Annual Meeting*

perlindungan investasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (ISDS), sehingga tidak mengurangi kedaulatan regulasi nasional. Jumlah negara yang bergabung ke dalam Perjanjian IFD berjumlah 128 anggota WTO, terdiri dari 91 negara berkembang dan 27 di antaranya adalah negara kurang berkembang (LDC). Bergabungnya Indonesia ke dalam Perjanjian IFD ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi Indonesia di mata investor global dengan kepastian hukum, predictability prosedural, dan transparansi kebijakan. Selain itu, Perjanjian IFD ini juga memacu pemerintah untuk melakukan Reformasi birokrasi investasi yang lebih transparan dan *predictable*. Pada akhirnya bergabungnya Indonesia ke Perjanjian IFD ini akan memberikan dampak besar bagi masuknya investasi asing ke Indonesia, khususnya pada konteks hilirisasi mineral, transisi energi, dan *green industry* yang membutuhkan kepastian administratif dan perizinan.

## Faktor Pendorong

Faktor pendorong pencapaian kinerja nilai PMA berorientasi ekspor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025 di antaranya:

1. Kebijakan hilirisasi dan industrialisasi berorientasi ekspor yang konsisten, sehingga meningkatkan investasi asing pada sektor pengolahan bernilai tambah dan berbasis komoditas unggulan nasional;
2. Perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha, melalui penyederhanaan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA), pemberian insentif fiskal/nonfiskal, serta kepastian hukum bagi investor asing berorientasi ekspor;
3. Pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi berorientasi ekspor, khususnya di pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah berbasis sumber daya, yang menyediakan infrastruktur, utilitas, dan layanan logistik terintegrasi;
4. Akses pasar global yang semakin terbuka, didukung oleh perjanjian perdagangan internasional, fasilitas ekspor, serta promosi investasi sektor manufaktur dan hilirisasi di pasar potensial;
5. Konektivitas logistik dan rantai pasok ekspor yang semakin efisien, termasuk penguatan pelabuhan, transportasi multimoda, dan integrasi hulu-hilir industri berorientasi ekspor;
6. Ketersediaan sumber daya manusia industri yang kompeten dan adaptif, sesuai kebutuhan investor asing pada sektor manufaktur dan industri pengolahan berorientasi ekspor
7. Sinergi pemerintah pusat dan daerah serta dukungan kelembagaan investasi, dalam fasilitasi proyek PMA berorientasi ekspor, penyelesaian hambatan investasi, serta percepatan realisasi proyek strategis;
8. Promosi investasi luar negeri yang lebih terarah pada sektor dan negara target ekspor, sehingga meningkatkan minat dan realisasi PMA pada industri yang menghasilkan produk ekspor.

## Faktor Penghambat

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menghadapi berbagai faktor penghambat dalam pencapaian kinerja nilai PMA berorientasi ekspor di antaranya:

1. Ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar yang membuat beberapa investor bersikap *wait and see* untuk ekspansi;
2. Belum optimalnya penyediaan informasi yang terfokus dan sesuai kebutuhan masing-masing investor, sehingga minat awal yang telah terbangun belum dapat dikonversi menjadi komitmen investasi yang lebih pasti;
3. Tagging rencana ekspor yang belum terimplementasi di Sistem OSS dalam proses pengajuan Nomor Induk Berusaha;
4. Adanya pergantian/transisi pemerintahan sehingga diperlukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan; dan
5. Adanya efisiensi anggaran di awal tahun dan refocusing anggaran di akhir tahun sehingga diperlukan konsolidasi dan koordinasi program/kegiatan guna percepatan target-target program.

## Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkomitmen untuk melakukan peningkatan capaian kinerja nilai PMA beroreintasi secara berkelanjutan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi akan melakukan beberapa rencana tindak lanjut ke depan di antaranya:

1. Pelaksanaan *market sounding* yang bertujuan untuk meminta masukan dari para investor atas dokumen pra studi kelayakan yang telah disusun. Proses ini untuk memastikan informasi mengenai proyek, mulai dari aspek teknis, aspek ekonomi, hingga kebutuhan infrastruktur pendukung, sesuai dengan ekspektasi dan standar yang dibutuhkan oleh investor. Masukan yang diperoleh pada tahap ini memungkinkan penyempurnaan dokumen dan penyesuaian strategi penawaran proyek sehingga lebih realistis, menarik, dan siap dipromosikan kepada calon penanam modal;
2. Melakukan *clustering* calon investor berdasarkan bidang usaha. Hal ini merupakan langkah penting untuk mengelompokkan investor sesuai sektor minat, pengalaman, dan kapasitas investasinya. Pengelompokkan ini untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan dan spesifik terhadap kebutuhan masing-masing kelompok. Pendekatan segmentasi ini juga memperbesar peluang konversi minat menjadi komitmen karena materi yang disampaikan telah disesuaikan dengan karakteristik dan preferensi tiap kelompok investor;
3. Penyelenggaraan forum diskusi rutin dengan calon investor dan investor. Forum ini memberi ruang bagi investor untuk menyampaikan kendala, peluang, dan kebutuhan informasi tambahan yang mungkin belum tercakup dalam dokumen formal. Interaksi yang konsisten tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor, tetapi juga membantu pemerintah mengidentifikasi isu strategis secara dini sehingga dapat dilakukan intervensi atau perbaikan sebelum menjadi hambatan yang lebih besar;
4. Pengembangan *user interface* (UI) di *website* PIR peta peluang investasi untuk memudahkan akses Peta Peluang Investasi dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan informasi bagi para investor.

### 3.3.2.5
### IKU 6: Nilai PMDN Berorientasi Ekspor

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja nilai PMDN beroreintasi eskpor sebesar 96,52% atau terkategori baik pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 56,22 Triliun, maka capaian kinerja realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 3,74 persen. Hal ini menjadi komitmen dan kinerja positif Kementerian Investasi dan Hilirisasi dalam rangka pencapaian kinerja nilai PMDN berorientasi ekspor.

**Tabel 3.11**
Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMA Berorientasi Ekspor

| SS-1: Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKU-6: Nilai PMDN Berorientasi Ekspor (Rp Triliun) | | | | | | | | |
| 2025 | | Capaian Kinerja 2025 (%) | Normalisasi Capaian PK | Realisasi Tahun 2024 | Capaian Kinerja 2025 terhadap Realisasi 2024 (%) | Target Akhir Renstra 2029 | Capaian Kinerja 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2029 (%) | Kategori Capaian Kinerja Tahun 2025 |
| T | R | | | | | | | |
| 60,4 | 58,3 | **96,52** | 96,52 | 56,2 | 3,74 | 126,40 | 46,14 | **Baik** |

Nilai realisasi PMDN berorientasi ekspor pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp58,32 triliun, belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp60,40 triliun, dengan capaian 96,56 persen. Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 56,22 Triliun, maka capaian kinerja realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 3,74%. Nilai realisasi PMDN berorientasi ekspor pada tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 46,14 persen dari target akhir Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2029 yang ditetapkan sebesar Rp126,4 triliun. Nilai PMDN berorientasi ekspor berdasarkan subsektor menunjukkan bahwa kontribusi terbesar berasal dari: (1) Pertambangan sebesar 19,32 persen atau senilai Rp11,27 triliun; (2) Industri Kimia dan Farmasi sebesar 16,18 persen atau senilai Rp9,44 triliun; (3) Industri Kertas dan Percetakan sebesar 15,44 persen atau senilai Rp9,00 triliun; (4) Industri makanan sebesar 7,31 persen atau senilai Rp4,26 triliun; (5) Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain sebesar 4,99 persen atau senilai Rp2,91 triliun. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa PMDN berorientasi ekspor masih didominasi oleh subsektor berbasis sumber daya alam dan industri pengolahan utama, yang mencerminkan peran investasi domestik dalam mendukung peningkatan nilai tambah komoditas serta penguatan kapasitas produksi untuk pasar ekspor.

**Tabel 3.12**
Realisasi PMDN Berorientasi Ekspor

| No | Sektor | Realisasi Investasi (Juta Rp) | Kontribusi (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hotel dan Restoran | 174.793,140 | 0,30 |
| 2 | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam | 777.242,721 | 1,33 |
| 3 | Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 917.395,207 | 1,57 |
| 4 | Industri Karet dan Plastik | 2.268.869,243 | 3,89 |
| 5 | Industri Kayu | 1.721.615,345 | 2,95 |
| 6 | Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | 2.911.384,859 | 4,99 |
| 7 | Industri Kertas dan Percetakan | 9.004.275,257 | 15,44 |
| 8 | Industri Kimia Dan Farmasi | 9.438.503,411 | 16,18 |
| 9 | Industri Lainnya | 775.070,412 | 1,33 |
| 10 | Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya | 3.468.932,242 | 5,95 |
| 11 | Industri Makanan | 4.264.577,172 | 7,31 |
| 12 | Industri Mineral Nonlogam | 712.562,426 | 1,22 |
| 13 | Industri Tekstil | 2.827.447,996 | 4,85 |
| 14 | Jasa Lainnya | 963.823,393 | 1,65 |
| 15 | Kehutanan | 6.160,880 | 0,01 |
| 16 | Konstruksi | 59.758,864 | 0,10 |
| 17 | Listrik, Gas dan Air | 887.626,408 | 1,52 |
| 18 | Perdagangan dan Reparasi | 1.228.126,862 | 2,11 |
| 19 | Perikanan | 32.801,068 | 0,06 |
| 20 | Pertambangan | 11.268.005,062 | 19,32 |
| 21 | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | 573.174,718 | 0,98 |
| 22 | Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan | 292.646,080 | 0,50 |
| 23 | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | 3.744.349,987 | 6,42 |
| **Total** | | **58.319.142,755** | |

**Gambar 3.23**
Penyelenggaraan Forum Diskusi: Optimalisasi Hilirisasi Perikanan untuk Percepatan Transformasi Ekonomi

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian nilai PMDN berorientasi ekspor salah satunya melalui **Penyelenggaraan Forum Diskusi: Optimalisasi Hilirisasi Perikanan untuk Percepatan Transformasi Ekonomi**. Forum ini bertujuan untuk mengakselerasi program hilirisasi di sektor kelautan dan perikanan, sebagai salah satu pilar utama dalam transformasi ekonomi nasional. Pembahasan difokuskan pada upaya peningkatan nilai tambah komoditas perikanan, penguatan daya saing produk olahan melalui ekspor ke pasar global, serta identifikasi peluang dan penanganan tantangan struktural yang dihadapi sektor tersebut.

Forum tersebut dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta yang terdiri atas asosiasi pelaku usaha sektor perikanan, pelaku usaha PMDN, serta pelaku usaha PMA. Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan Kementerian/Lembaga terkait sebagai narasumber, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perindustrian.

Forum ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi mengenai peluang investasi sektor perikanan di Indonesia, tetapi juga menjadi wadah penguatan jejaring (*networking*) antara pelaku usaha PMDN dan PMA. Melalui rangkaian sesi diskusi dan pertemuan yang melibatkan pelaku usaha maupun asosiasi, terjalin komunikasi yang konstruktif serta pertukaran informasi terkait minat investasi, potensi kebutuhan rantai pasok, serta peluang kemitraan dan pengembangan bisnis yang dapat dilakukan secara bersama.

Kegiatan lain dalam rangka mendukung pencapaian nilai PMDN berorientasi ekspor adalah Kegiatan ***Business Talk & Networking between Thailand-Indonesia.*** Kegiatan *Business Talk and Networking between* Thailand-Indonesia merupakan kolaborasi antara *Board of Investment* Thailand dan *Royal Thai Embassy* di Jakarta. Kegiatan ini mempertemukan delegasi investor dan kamar dagang Thailand dengan pelaku bisnis serta KADIN di Indonesia. Kegiatan dilaksanakan sebagai rangkaian sesi untuk memberikan informasi praktis dan strategis mengenai iklim investasi di Indonesia serta pertemuan perusahaan, investor, atau pengusaha Indonesia dan Thailan yang tertarik menjalin potensi kolaborasi bisnis. Beberapa perusahaan asal Thailand yang hadir di antaranya IMCO Food Pack, Srimek Corporation Company Limited, Super Solar Energy, R.J London Chemical Industries dan TFP Industrial. Adapun pihak Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga turut mengundang beberapa PMDN di antaranya PT. Mubarok Martadikara Putra, PT. PGN Tbk dan PT. ABM Investama. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi mengenai peluang dan prosedur investasi di Indonesia, tetapi juga menjadi wadah penguatan jejaring (*networking*) antara perusahaan dan investor asal Thailand dan Indonesia. Melalui rangkaian sesi diskusi dan pertemuan, para pelaku usaha dari kedua negara membangun komunikasi dan saling bertukar informasi mengenai minat, kebutuhan, serta peluang bisnis yang dapat dikembangkan bersama. Jejaring yang telah terjalin ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi potensi kerja sama konkret di masa depan, baik dalam bentuk investasi, kemitraan strategis, maupun kolaborasi usaha lintas sektor.

**Gambar 3.24**
*Business Talk & Networking between* Thailand-Indonesia

## Faktor Pendorong

Faktor pendorong pencapaian kinerja nilai PMDN berorientasi ekspor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025 di antaranya:

1. Kebijakan hilirisasi dan industrialisasi nasional yang mendorong pelaku usaha domestik berorientasi ekspor, sehingga meningkatkan investasi dalam negeri pada sektor pengolahan bernilai tambah dan produk ekspor;
2. Kemudahan perizinan berusaha dan kepastian regulasi bagi investor dalam negeri, melalui optimalisasi perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) dan penyederhanaan prosedur investasi berorientasi ekspor;
3. Pengembangan kawasan industri dan sentra produksi berorientasi ekspor, termasuk kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan klaster industri berbasis komoditas unggulan daerah;
4. Peningkatan akses pembiayaan dan insentif bagi pelaku usaha domestik berorientasi ekspor, melalui fasilitas pembiayaan investasi, insentif fiskal/nonfiskal, serta dukungan lembaga pembiayaan nasional;
5. Penguatan daya saing produk dalam negeri di pasar global, melalui standardisasi, sertifikasi, peningkatan kualitas produk, dan fasilitasi ekspor bagi industri nasional;
6. Konektivitas logistik dan integrasi rantai pasok ekspor yang semakin efisien, termasuk dukungan infrastruktur transportasi, pelabuhan, dan sistem distribusi yang terhubung dengan pasar ekspor;
7. Peningkatan kapasitas dan kesiapan pelaku usaha domestik untuk ekspor, melalui pendampingan, promosi, kemitraan usaha, dan integrasi dalam rantai nilai global;
8. Sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan investasi domestik berorientasi ekspor, termasuk fasilitasi proyek PMDN ekspor, penyelesaian hambatan usaha, dan promosi investasi daerah.

## Faktor Penghambat

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menghadapi berbagai faktor penghambat dalam pencapaian kinerja nilai PMDN berorientasi ekspor di antaranya:

1. Dinamika permintaan pasar global dan kebijakan proteksionisme. Perubahan permintaan di pasar ekspor, meningkatnya proteksionisme, perang dagang, serta penurunan daya beli negara tujuan ekspor menimbulkan ketidakpastian prospek pasar bagi produk berorientasi ekspor. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha dalam negeri cenderung menahan ekspansi dan realisasi investasi, sehingga berdampak pada belum optimalnya capaian nilai PMDN berorientasi ekspor.
2. Perubahan regulasi dan kebijakan perdagangan internasional seperti tarif, kuota, dan standar teknis yang diberlakukan negara tujuan ekspor, menjadi hambatan bagi kepastian akses pasar. Ketidakpastian regulasi ini meningkatkan risiko usaha dan biaya kepatuhan, sehingga mempengaruhi minat serta realisasi penanaman modal dalam negeri yang berorientasi ekspor.
3. Keterbatasan infrastruktur pelabuhan, logistik, dan transportasi seperti fasilitas pelabuhan, sistem logistik, dan jaringan transportasi yang belum memadai menghambat kelancaran distribusi produk ekspor. Inefisiensi rantai pasok meningkatkan biaya dan waktu pengiriman, menurunkan daya saing produk, serta mengurangi daya tarik investasi PMDN pada sektor berorientasi ekspor.
4. Tuntutan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Isu lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam proses produksi dan ekspor menimbulkan tekanan dari konsumen dan regulator di pasar global. Persyaratan keberlanjutan yang semakin ketat memerlukan penyesuaian proses produksi dan investasi tambahan, yang bagi sebagian pelaku usaha domestik menjadi kendala dalam merealisasikan investasi berorientasi ekspor.
5. Sistem OSS belum efektif dalam mendorong investasi berorientasi ekspor. Proses pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem OSS belum secara sistematis menangkap atau mengkategorikan rencana ekspor dari calon investor PMDN. Tidak adanya fitur 'tagging' atau penandaan khusus untuk proyek-proyek yang memiliki orientasi ekspor menyebabkan hilangnya kesempatan untuk memberikan insentif atau fasilitasi khusus bagi investor yang berkomitmen untuk mengekspor produknya. Hal ini menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan kontribusi PMDN berorientasi ekspor terhadap neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta tidak selaras dengan peluang yang ada, seperti meningkatnya Global Production Network dan Global Value Chain.

## Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk melakukan peningkatan capaian kinerja nilai PMDN berorientasi secara berkelanjutan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi akan melakukan beberapa rencana tindak lanjut ke depan di antaranya:

1. Penguatan koordinasi lintas unit kerja akan dilakukan untuk mengintegrasikan pendataan rencana ekspor ke dalam proses pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada Sistem OSS. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan data pelaku usaha berorientasi ekspor sejak tahap perizinan berusaha, sehingga potensi penanaman modal dalam negeri (PMDN) berorientasi ekspor dapat teridentifikasi dan dimonitor secara lebih akurat. Integrasi pendataan rencana ekspor dalam OSS diharapkan meningkatkan kualitas basis data investasi, mempermudah pemetaan sektor dan pelaku usaha berorientasi ekspor, serta mendukung perumusan kebijakan dan fasilitasi yang lebih tepat sasaran. Dengan koordinasi yang lebih terstruktur dan sistem pendataan yang terintegrasi, realisasi PMDN berorientasi ekspor dapat dipantau dan didorong secara lebih efektif sehingga target indikator kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.
2. Peningkatan sinkronisasi dan integrasi dengan *stakeholder* terkait. Memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku usaha sebagai bahan penyusunan rencana pengembangan penanaman modal berorientasi ekspor pada periode berikutnya. Upaya ini bertujuan menghasilkan perencanaan yang lebih komprehensif, berbasis kebutuhan pasar ekspor, dan selaras lintas sektor.
3. Penguatan monitoring dan evaluasi program perencanaan penanaman modal berorientasi ekspor. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan penanaman modal, khususnya pada sektor SDA dan industri manufaktur berorientasi ekspor, guna memastikan kesesuaian dengan target indikator kinerja dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan percepatan realisasi PMDN berorientasi ekspor.
4. Penguatan pemantauan tindak lanjut *stakeholder* atas hasil perencanaan. Memperkuat mekanisme pemantauan terhadap tindak lanjut yang dilakukan *stakeholder* atas kegiatan perencanaan yang telah disusun, melalui forum koordinasi dan pelaporan berkala. Langkah ini penting untuk memastikan rekomendasi dan rencana pengembangan penanaman modal berorientasi ekspor dapat diimplementasikan secara efektif oleh pihak terkait, sehingga kontribusinya terhadap capaian PMDN berorientasi ekspor dapat optimal.

### 3.3.2.6
### IKU 7: Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja kontribusi realisasi investasi luar Jawa sebesar 98,46% atau terkategori baik pada tahun 2025. Jika dibandingkan realisasi tahun 2024, capaian kinerja tahun 2025 memiliki penurunan sebesar 1,72 persen. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus menunjukkan komitmen dalam rangka peningkatan kontribusi realisasi investasi luar jawa sepanjang tahun 2025.

**Tabel 3.13**
Capaian Indikator Kinerja Utama Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa

| SS-1: Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKU-7: Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa (%) | | | | | | | | |
| 2025 | | Capaian Kinerja 2025 (%) | Normalisasi Capaian PK | Realisasi Tahun 2024 | Capaian Kinerja 2025 terhadap Realisasi 2024 (%) | Target Akhir Renstra 2029 | Capaian Kinerja 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2029 (%) | Kategori Capaian Kinerja Tahun 2025 |
| T | R | | | | | | | |
| 52,1 | 51,3 | **98,46** | 98,5 | 52,2 | -1,72 | 53,20 | 96,43 | **Baik** |

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus berkomitmen untuk mewujudkan investasi yang merata, termasuk realisasi investasi di luar pulau Jawa. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara wilayah, serta memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di daerah Jawa, melainkan juga menjangkau daerah-daerah lain yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menargetkan kontribusi realisasi investasi luar jawa mencapai 52,10 persen. Pada tahun 2025 realisasasi investasi luar Jawa sebesar Rp991,2 triliun atau 51,3 persen. Lima provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di luar Pulau Jawa di antaranya: 1) Sulawesi Tengah dengan realisasi investasi sebesar 127,2 triliun; 2) Maluku Utara dengan realisasi investasi sebesar 90,7 triliun; 3) Kalimantan Timur dengan realisasi investasi sebesar 87,8 trilium; 4) Riau dengan realisasi investasi sebesar 69, 5 triliun; dan 5) Kepulauan Riau dengan realisasi investasi sebesar 64,7 triliun.

**Tabel 3.14**
Nilai Realisasi Penanaman Modal di Luar Jawa

| No | Provinsi | Realisasi Investasi (Juta Rp) | Kontribusi (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sulawesi Tengah | 127,18 | 12,83 |
| 2 | Maluku Utara | 90,70 | 9,15 |
| 3 | Kalimantan Timur | 87,79 | 8,86 |
| 4 | Riau | 69,47 | 7,01 |
| 5 | Kepulauan Riau | 64,68 | 6,52 |
| 6 | Sumatera Selatan | 62,67 | 6,32 |
| 7 | Nusa Tenggara Barat | 59,19 | 5,97 |
| 8 | Sumatera Utara | 58,53 | 5,91 |
| 9 | Kalimantan Barat | 51,04 | 5,15 |
| 10 | Bali | 42,82 | 4,32 |
| 11 | Kalimantan Selatan | 32,86 | 3,31 |
| 12 | Sulawesi Tenggara | 28,97 | 2,92 |
| 13 | Papua Tengah | 28,46 | 2,87 |
| 14 | Kalimantan Utara | 27,43 | 2,77 |
| 15 | Kalimantan Tengah | 23,97 | 2,42 |
| 16 | Sulawesi Selatan | 19,54 | 1,97 |
| 17 | Jambi | 17,27 | 1,74 |
| 18 | Sumatera Barat | 16,81 | 1,70 |
| 19 | Lampung | 15,20 | 1,53 |
| 20 | Kepulauan Bangka Belitung | 10,33 | 1,04 |
| 21 | Sulawesi Utara | 10,13 | 1,02 |
| 22 | Papua Selatan | 9,38 | 0,95 |
| 23 | Aceh | 9,00 | 0,91 |
| 24 | Papua Barat | 7,08 | 0,71 |
| 25 | Gorontalo | 5,21 | 0,53 |

| No | Provinsi | Realisasi Investasi (Juta Rp) | Kontribusi (%) |
|---|---|---|---|
| 26 | Nusa Tenggara Timur | 4,86 | 0,49 |
| 27 | Papua Barat Daya | 3,54 | 0,36 |
| 28 | Bengkulu | 3,03 | 0,31 |
| 29 | Sulawesi Barat | 1,67 | 0,17 |
| 30 | Papua | 1,26 | 0,13 |
| 31 | Maluku | 1,13 | 0,11 |
| 32 | Papua Pegunungan | 0,01 | 0,00 |
| **Jumlah** | | **991,20** | **100,00** |

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan kegiatan **Penerapan layanan fasilitasi promosi penanaman modal secara *end to end***, artinya unit Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal memberikan layanan promosi tentang peluang investasi di Indonesia kepada calon-calon investor, memberikan layanan konsultasi, pendampingan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sebelum memutuskan untuk berinvestasi sampai dengan layanan bimbingan kepada calon investor untuk mendapatkan perizinan NIB dan/atau NKU. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga telah melakukan **koordinasi dengan Unit lain di lingkup Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM**, baik unit Deputi Bidang Perencanaan dalam mengupdate potensi dan peluang investasi di Indonesia, Unit Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal agar iklim investasi ramah bagi investor, dan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal terkait fasilitasi perizinan berusaha maupun terkait insentif penanaman modal. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga telah melakukan koordinasi yang terjaga antara Unit Deputi **Bidang Promosi Penanaman Modal dengan kantor IIPC dan KDEI** dalam mengawal masuknya rencana investasi baru.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rekomendasi Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai tindak lanjut atas hasil rekomendasi Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemerintah Daerah Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan terhadap 38 provinsi di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan percepatan pelaksanaan berusaha di daerah melalui inventarisasi tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian kinerja, memetakan capaian perbaikan kinerja pemerintah daerah, serta mengidentifikasi kendala implementasi kebijakan perizinan berusaha di daerah. Kegiatan dilakukan secara bertahap mulai dari sosialisasi, inventarisasi hasil rekomendasi, pendampingan teknis melalui *coaching clinic*, hingga penyampaian hasil Monev. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa secara umum kinerja pemerintah daerah mengalami peningkatan, namun masih terdapat beberapa daerah yang memerlukan pembinaan lanjutan terutama pada aspek kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko, koordinasi lintas perangkat

daerah, serta dukungan sarana dan prasarana pelayanan. Melalui kegiatan ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memberikan rekomendasi perbaikan serta apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen dalam peningkatan kinerja pelayanan investasi, sehingga diharapkan dapat memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendorong peningkatan realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga telah melakukan kegiatan ***Fasilitasi Western Australian Chinese Chamber of Commerce*** (WACCC). *Western Australian Chinese Chamber of Commerce* (WACCC) merupakan organisasi non-profit yang menghubungkan pengusaha-pengusaha Australia Barat dengan Tiongkok melalui *networking*, seminar bisnis, dan *business matching.* Kunjungan dari delegasi WACCC dalam rangka ASEAN Business Mission ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjajaki peluang investasi di Indonesia dan memahami lingkungan bisnis serta kebijakan pemerintah yang mendukung investasi di Indonesia. Pada pertemuan ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyampaikan program-program pemerintah yang memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia kepada delegasi. Selain itu pada pertemuan ini juga diadakan sesi diskusi antara perwakilan delegasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Dalam sesi ini, delegasi menanyakan berbagai hal terkait ketentuan investasi di Indonesia, mulai dari perpanjangan visa investor, persyaratan kemitraan dengan perusahaan lokal, kebijakan kontrol mata uang, hingga peluang investasi dan batas minimum investasi.

**Gambar 3.25**
Fasilitasi *Western Australian Chinese Chamber of Commerce* (WACCC)

## Faktor Pendorong

Faktor pendorong pencapaian kinerja kontribusi realisasi investasi luar Jawa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025 diantaranya:

1. Kebijakan pemerintah yang mendukung investasi di luar Jawa seperti misalnya Insentif fiskal dan non-fiskal seperti *tax holiday, tax allowance*, dan pembebasan biaya lahan di kawasan industri luar Jawa meningkatkan daya tarik investasi. Selain itu juga adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
2. Ketersediaan Kawasan industri dan infrastruktur pendukung melalui pengembangan kawasan industri, zona ekonomi khusus, dan pelabuhan/ logistik memudahkan investor menanamkan modal di luar jawa. infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi yang memadai menjadi faktor utama percepatan realisasi investasi.
3. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal dimana daerah luar Jawa memiliki potensi SDA yang melimpah untuk sektor industri, pertambangan, dan manufaktur berbasis lokal. Ketersediaan tenaga kerja lokal yang cukup dan program pelatihan meningkatkan kemampuan SDM untuk mendukung investasi.
4. Dukungan Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Layanan Satu Pintu, seperti misalnya koordinasi dengan instansi pusat mempercepat penyelesaian hambatan administratif dan teknis bagi investor.
5. Upaya pemerataan investasi dan relokasi industri melalui program relokasi industri dari Jawa ke luar Jawa untuk mengurangi kepadatan dan pemerataan pembangunan mendorong kontribusi investasi di luar Jawa.
6. Dukungan Jaringan Pasar dan Akses Ekspor.
7. Stabilitas Sosial dan Keamanan Daerah

## Faktor Penghambat

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menghadapi berbagai faktor penghambat dalam pencapaian kinerja kontribusi realisasi investasi luar Jawa, meskipun capaian kinerja pada tahun 2025 telah berpredikat baik diantaranya:

1. Keterbatasan infrastruktur dan sistem logistik. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta jaringan logistik di luar Pulau Jawa masih belum merata, sehingga meningkatkan biaya distribusi dan waktu tempuh. Kondisi ini menurunkan efisiensi usaha dan daya tarik investasi, yang berdampak pada belum optimalnya realisasi penanaman modal di daerah.
2. Tingginya biaya operasional dan produksi. Biaya energi, transportasi, bahan baku, serta pengadaan sarana produksi di luar Pulau Jawa relatif lebih tinggi dibanding wilayah Jawa. Struktur biaya yang kurang kompetitif ini mempengaruhi kelayakan finansial proyek investasi dan menahan keputusan realisasi penanaman modal.
3. Keterbatasan sumber daya manusia terampil. Ketersediaan tenaga kerja terampil dan kompeten sesuai kebutuhan sektor usaha masih terbatas di banyak daerah luar Jawa. Kesenjangan kompetensi ini mengurangi produktivitas dan meningkatkan biaya pelatihan bagi investor, sehingga mempengaruhi minat dan realisasi investasi.
4. Proses perizinan dan regulasi yang masih kompleks. Proses perizinan berusaha dan implementasi regulasi di daerah masih menghadapi kendala koordinasi, kepastian waktu layanan, dan harmonisasi kebijakan pusat–daerah. Kompleksitas ini menambah risiko usaha dan memperlambat realisasi penanaman modal di luar Pulau Jawa.

5. Keterbatasan akses pasar dan jaringan bisnis. Akses terhadap pasar, rantai pasok, serta jejaring kemitraan usaha di luar Pulau Jawa belum berkembang optimal. Keterbatasan konektivitas pasar ini mengurangi skala ekonomi dan prospek pengembangan usaha, sehingga berdampak pada rendahnya realisasi investasi.
6. Ketidakpastian kondisi ekonomi dan sosial daerah. Variasi kondisi ekonomi, stabilitas sosial, serta kesiapan ekosistem usaha di sejumlah wilayah luar Jawa masih menjadi pertimbangan risiko bagi investor. Persepsi risiko yang lebih tinggi menyebabkan investor cenderung menunda atau mengalihkan investasi ke wilayah yang lebih siap.
7. Kurangnya promosi dan fasilitasi investasi daerah. Upaya promosi peluang investasi serta fasilitasi proyek di luar Pulau Jawa masih terbatas dan belum terintegrasi. Informasi potensi daerah yang belum tersampaikan secara luas serta minimnya pendampingan proyek menyebabkan peluang investasi belum sepenuhnya terealisasi, sehingga target nilai realisasi penanaman modal di luar Pulau Jawa belum tercapai optimal.

## Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk melakukan peningkatan capaian kinerja kontribusi realisasi investasi luar Jawa. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan melakukan beberapa rencana tindak lanjut ke depan diantaranya:

1. Penguatan infrastruktur pendukung investasi. Mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, energi, dan logistik melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya usaha.
2. Peningkatan kualitas dan ketersediaan SDM. Mengembangkan program peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan sektor unggulan daerah melalui sinergi dengan instansi terkait, dunia usaha, dan lembaga pendidikan/pelatihan.
3. Penyederhanaan dan harmonisasi regulasi. Melakukan evaluasi serta harmonisasi regulasi pusat dan daerah untuk menciptakan kepastian hukum, mempercepat proses perizinan, dan mengurangi hambatan administratif bagi investor.
4. Peningkatan kemudahan berusaha dan layanan investasi. Memperkuat kualitas layanan perizinan dan fasilitasi investasi, termasuk pendampingan proyek strategis di luar Pulau Jawa, guna meningkatkan kepercayaan investor dan mempercepat realisasi penanaman modal.
5. Koordinasi dan pengawalan implementasi kebijakan. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan tindak lanjut di daerah untuk memastikan efektivitas upaya yang dilakukan dalam mendorong peningkatan realisasi penanaman modal.

### 3.3.2.7
### IKU 8: Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi sebesar 112,02% atau terkategori istimewa pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 43,23 persen. Hal ini menujukkan komitmen dan kinerja postif Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam penigkatan nilai realisasi investasi di bidang hilirisasi sepanjang tahun 2025.

**Tabel 3.15**
Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi

**SS-1:**
**Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata**

| IKU-8: Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi (Rp Triliun) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | | Capaian Kinerja 2025 (%) | Normalisasi Capaian PK | Realisasi Tahun 2024 | Capaian Kinerja 2025 terhadap Realisasi 2024 (%) | Target Akhir Renstra 2029 | Capaian Kinerja 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2029 (%) | Kategori Capaian Kinerja Tahun 2025 |
| T | R | | | | | | | |
| 521,4 | 584,1 | **112,02** | 110,00 | 407,8 | 43,23 | 901,6 | 64,78 | **Istimewa** |

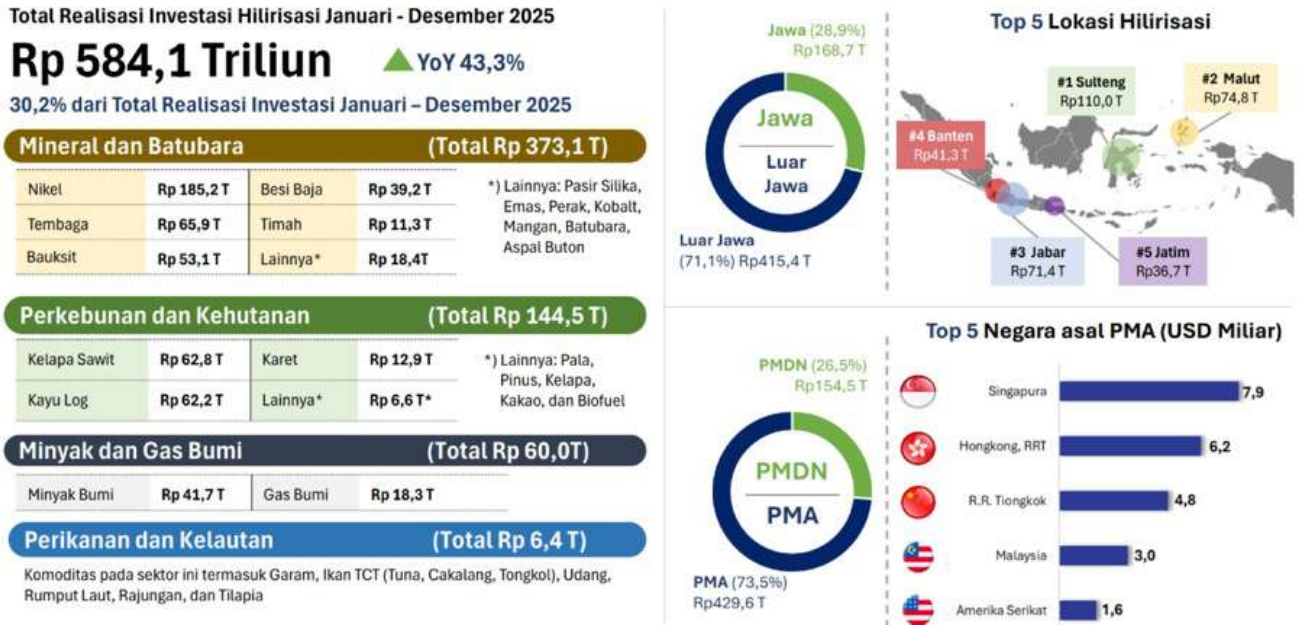


**Gambar 3.26**
Nilai Realisasi Bidang Hilirisasi Tahun 2025

Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp584,1 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp521,4 triliun, atau mencapai 112,02 persen. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp407,8 triliun, nilai investasi hilirisasi pada tahun 2025 tumbuh signifikan sebesar 143,23 persen. Secara kumulatif, realisasi investasi hilirisasi tahun 2025 telah mencapai 64,78 persen dari target akhir Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2029 yang ditetapkan sebesar Rp901,6 triliun.

Berdasarkan sektor komoditas, investasi hilirisasi pada tahun 2025 masih didominasi oleh sektor mineral dan batubara dengan nilai Rp373,1 triliun, terutama berasal dari komoditas nikel (Rp185,2 triliun), tembaga (Rp65,9 triliun), dan bauksit (Rp53,1 triliun). Sektor perkebunan dan kehutanan sebesar berkontribusi senilai Rp144,5 triliun, yang didominasi oleh komoditas kelapa sawit (Rp62,8 triliun) dan kayu log (Rp62,2 triliun). Sementara itu, sektor minyak dan gas bumi mencatatkan investasi sebesar Rp60,0 triliun, serta sektor perikanan dan kelautan sebesar Rp6,4 triliun. Dari sisi wilayah, investasi hilirisasi masih terkonsentrasi di luar Pulau Jawa dengan porsi 71,1 persen (Rp415,4 triliun), sedangkan Pulau Jawa menyumbang 28,9 persen (Rp168,7 triliun). Lima lokasi utama investasi hilirisasi berada di Sulawesi Tengah (Rp110,0 triliun), Maluku Utara (Rp74,8 triliun), Jawa Barat (Rp71,4triliun), Banten (Rp41,3 triliun), dan Jawa Timur (Rp36,7 triliun), mencerminkan keterkaitan investasi hilirisasi dengan lokasi sumber daya alam dan kawasan industri pengolahan. Berdasarkan asal negara, investasi PMA pada sektor hilirisasi didominasi oleh Singapura, Hong Kong (RRT), Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia, dan Amerika Serikat, yang menunjukkan kuatnya peran investor kawasan Asia dalam mendorong pengembangan industri hilirisasi di Indonesia.

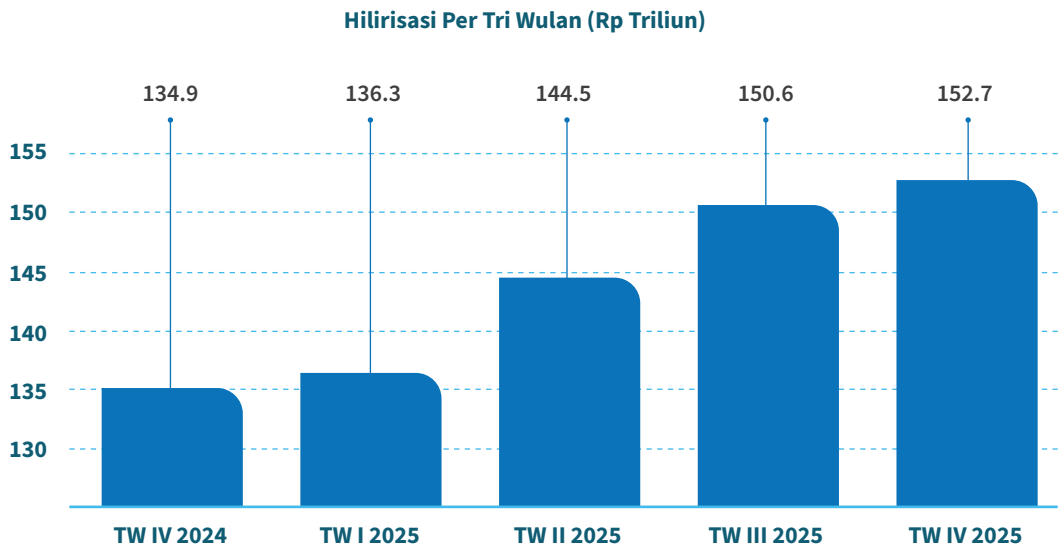


**Gambar 3.27**
Nilai Investasi Bidang Hilirisasi TW IV 2024-TW IV 2025

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian target nilai investasi di bidang hilirisasi pada tahun 2025. Kementerian

Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan sejumlah kegiatan penyusunan Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis: Kolaborasi Aksi untuk Akselerasi Hilirisasi (KOALISI); Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis; Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis: Aksi Sinergi Rekonsiliasi Akselerasi Hilirisasi (AGREGASI); Penyusunan Proposal Bisnis Hilirisasi Investasi Strategis; dan Rencana Aksi Strategi dan Tata Kelola di Bidang Hilirisasi.

**Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis: Kolaborasi Aksi untuk Akselerasi Hilirisasi (KOALISI)** dilaksanakan sebagai mekanisme koordinasi terpadu dalam rangka percepatan realisasi proyek hilirisasi prioritas nasional. KOALISI mengintegrasikan sinergi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan, meliputi hilirisasi mineral, batubara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan. Pada tahun 2025, pengawalan dilakukan terhadap 43 perusahaan yang tersebar di tujuh provinsi strategis dengan total rencana investasi sebesar Rp134,57 triliun.

Melalui koordinasi teknis, kunjungan lapangan, identifikasi dan fasilitasi penyelesaian isu, serta penyelarasan kebijakan lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, realisasi investasi kumulatif sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 pada proyek yang dikawal mencapai Rp83,64 triliun. Selain itu, berdasarkan hasil pengawalan dan validasi lapangan, teridentifikasi tambahan potensi realisasi investasi sebesar Rp22,66 triliun. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas peran Kedeputian Hilirisasi Investasi Strategis dalam mempercepat progres proyek dari tahap konstruksi menuju produksi/komersial, serta mendukung peningkatan investasi hilirisasi yang bernilai tambah dan berorientasi pada penguatan struktur industri nasional.

**Gambar 3.28**
Kunjungan Lapangan dan Rapat Koordinasi Renaksi KOALISI

Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi dan pendampingan kepada investor terkait kebijakan, perizinan investasi serta isu lain terkait investasi yang dihadapi investor sebelum merealisasiskan investasinya di sektor hilirisasi. Beberapa pelaku usaha yang telah dilakukan fasilitasi dalam hal pengawalan kendala dalam pelaksanaan realisasi investasinya di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.16**

Daftar Perusahaan yang Mendapatkan Fasilitasi Penyelesaian Kendala Investasi Sektor Hilirisasi Tahun 2025

| No | Perusahaan | Jenis Industri |
|---|---|---|
| 1 | PT Kalimantan Alumina Nusantara | Smelter |
| 2 | PT Bintan Elektrolitik Aluminium | Smelter |
| 3 | PT Batam Timah Sinergi | Industri Kimia |
| 4 | PT. Pupuk Sriwidjaja | Industri Pupuk |
| 5 | PT Butonas Petrochemical Indonesia | Industri Petrokimia |
| 6 | PT Taikun Petro Chemical | Industri Petrokimia |
| 7 | PT. Sasi and Sons Indonesia | Industri Kelapa |
| 8 | PT. Freenov Food Industri (PT FFI) | Industri Kelapa |
| 9 | PT. Green Power Palembang | Industri Kelapa |
| 10 | PT Tamron Akuatik Produk Industri | Pengolahan udang |
| 11 | PT Keloa Biotech Internasional | Pengolahan ikan |
| 12 | PT Aquafarm Nusantara | Pengolahan ikan |
| 13 | LONGi | Industri panel surya |
| 14 | PT CATL | Industri Baterai EV |
| 15 | PT Infineon Technologies Batam | Industri semikonduktor (ATP) |

Total rencana investasi 15 perusahaan yang telah di fasilitasi mencapai Rp133,68 triliun. Beberapa kendala yang telah berhasil di identifikasi dan diselesaikan melalui kegiatan fasilitasi tahun 2025 diantaranya terkait (i) perizinan: Proses penerbitan izin yang yang cukup lama; dan Kerumitan prosedur (contoh: Pelepasan Kawasan hutan; AMDAL); (ii) Sumber Daya Manusia: Keterbatasan jumlah SDM terampil; (iii) Bahan baku: Kelangkaan bahan baku; (iv) Sistem OSS: Sistem bermasalah; dan (v) Regulasi: Belum ada regulasi yang mengatur.

**Gambar 3.29**
Fasilitasi Pelepasan Ekspor Ikan Tilapia PT Regal Spring Indonesia ke Amerika

Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis: Aksi Sinergi Rekonsiliasi dan Pengawalan Akselerasi Hilirisasi (AGREGASI) Tahun 2025 adalah melakukan aksi terpadu antara unit-unit di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Aksi sinergi ini bertujuan untuk mengakselerasi realisasi proyek-proyek hilirisasi yang tercantum dalam Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis, khususnya yang memasuki fase implementasi (2025-2029) di sektor mineral dan batu bara, perkebunan, kehutanan, minyak dan gas bumi, serta perikanan dan kelautan. Adapun tujuan utama dari kegiatan ini dirumuskan ke dalam 2 (dua) pilar aksi sebagai berikut:

1. Pengawalan proyek hilirisasi investasi strategis
   a. Analisis mendalam terhadap tantangan, hambatan dan peluang dalam ekosistem hilirisasi di komoditas pasir silika, kelapa dan kelapa sawit yang meliputi aspek rantai pasok, infrastruktur, teknologi, sumber daya manusia (SDM), dan kerangka regulasi.
   b. Fasilitasi dialog dan koordinasi antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya melalui serangkaian *one-on-one meeting* dan/atau kunjungan lapangan di berbagai lokasi strategis.
   c. Perumusan dokumen Rencana Aksi yang konkret, spesifik, dan dapat ditindaklanjuti (*actionable*) untuk setiap komoditas. Dokumen ini akan menjadi panduan untuk mempercepat realisasi investasi.
2. Rekonsiliasi data hilirisasi investasi strategis
   a. Penyempurnaan dan pemutakhiran data proyek hilirisasi berdasarkan pelaporan LKPM triwulan IV dan triwulan I & II 2025 yang mencakup jenis produk dan kapasitas produksi yang seragam dengan menggunakan satuan (ton).
   b. Penyempurnaan *database roadmap* hilirisasi yang akurat dan mutakhir.
   c. Penyediaan data yang siap diimplementasikan ke dalam *dashboard* hilirisasi, sehingga data terkait ekosistem industri dapat disajikan secara terintegrasi dan mudah diakses untuk mendukung proses evaluasi dan pengambilan keputusan strategis.

Total jumlah data perusahaan (NKU) yang direkonsiliasi yaitu 16.572 NKU dengan rincian masing-masing sektor adalah sebagai berikut: (i). Sektor Mineral dan Batu Bara sebanyak 3.349 NKU, (ii) Sektor Minyak dan Gas Bumi sebanyak 4.997 NKU, (iii) Sektor Perkebunan dan Kehutanan sebanyak 4.077, dan (iv) Sektor Perikanan dan Kelautan sebanyak 4.149 NKU.

**Gambar 3.30**
Rapat Koordinasi Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis AGREGASI Tahun 2025 Komoditas Pasir Silika di Provinsi Jawa Barat

Pelaksanaan kegiatan **Rencana Aksi Strategi dan Tata Kelola di Bidang Hilirisasi** melalui dua kegiatan utama, yaitu **analisis isu permasalahan tata kelola hilirisasi serta pengawalan isu pengembangan proyek ekosistem hilirisasi**. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap rekomendasi tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi ditransformasikan menjadi langkah operasional yang terukur dan berdampak.

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 10 (sepuluh) isu strategis yang mencakup penguatan landasan regulasi melalui penyusunan Perpres Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis, penanganan moratorium smelter nikel, percepatan ekosistem bauksit dan *Smelter Grade Alumina* (SGA), serta penguatan daya saing komoditas kelapa sawit di tengah tantangan kebijakan global seperti *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Selain itu, isu hilirisasi rumput laut dan udang menyoroti pentingnya transformasi dari ekspor bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi, sementara sektor minyak bumi memerlukan kebijakan yang lebih progresif untuk mendorong investasi kilang berorientasi petrokimia. Seluruh isu tersebut dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar permasalahan, kebutuhan kebijakan, serta skema koordinasi lintas kementerian/lembaga.

Dari keseluruhan isu di atas, telah tersusun position paper atas 3 (tiga) prioritas isu, yakni pengembangan *Battery Energy Storage System* (BESS), pengembangan industri semikonduktor berbasis pasir silika, serta penguatan ekosistem baterai EV berbasis nikel (NMC) di tengah dominasi baterai LFP. Ketiga isu ini dipilih karena relevan dengan tren global transisi energi dan transformasi industri, sekaligus sejalan dengan keunggulan komparatif Indonesia pada sumber daya mineral kritis. Dokumen position paper memuat analisis strategis dan rekomendasi kebijakan untuk mempercepat realisasi investasi.

Pelaksanaan **Kegiatan Penyusunan Proposal Bisnis di 15 (lima belas) Komoditas Strategis tahun anggaran 2025** merupakan upaya strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui hilirisasi yang memberikan nilai tambah, memperkuat struktur industri nasional, dan mendorong investasi baru. Penyusunan proposal bisnis dilakukan dengan pendekatan berbasis data melalui pemetaan aspek pasar yang mencakup analisis *supply-demand*, tren harga global, struktur kompetisi, serta daya saing Indonesia pada setiap komoditas. Contohnya,

komoditas nikel dan tembaga dianalisis dengan mempertimbangkan posisi Indonesia sebagai produsen bijih nikel terbesar dunia dan salah satu produsen tembaga signifikan, yang relevan dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik dan kabel tembaga terintegrasi.

Dalam penyusunannya, proposal bisnis dikaji melalui tujuh aspek yaitu aspek pasar, aspek lokasi, aspek teknis dan ekonomi, aspek pembiayaan, aspek hukum, aspek ESG dan aspek risiko. Aspek pasar menitikberatkan pada analisis kebutuhan pasar atas produk hilirisasi. Pada aspek lokasi, mengkaji wilayah potensial untuk dijadikan basis proyek. Untuk aspek teknis dan ekonomi, proposal bisnis memasukkan indikator kapasitas produksi optimal, CAPEX-OPEX, teknologi yang digunakan, plot plan pabrik, serta estimasi indikator kelayakan ekonomi seperti IRR, NPV, dan payback period. Aspek pembiayaan yaitu pemetaan opsi model bisnis, potensi skema investasi, serta daftar investor potensial baik domestik maupun global. Aspek hukum, tim menyusun pemetaan perizinan dari pusat hingga daerah, termasuk SLA, insentif fiskal dan nonfiskal, serta dukungan kebijakan hilirisasi di masing-masing sektor. Regulasi lingkungan dan tata kelola ESG juga dipetakan untuk memastikan proyek hilirisasi yang dirumuskan memenuhi kaidah keberlanjutan. Terakhir, aspek risiko mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi serta mitigasi yang harus diambil.

Sebagai bagian dari validasi lapangan, dilakukan Kunjungan Lapangan ke 15 lokasi komoditas, seperti Sulawesi Utara untuk kelapa dan ikan TCT, Jawa Timur untuk udang, garam, dan tembaga, Kalimantan Barat untuk bauksit, dan lokasi-lokasi lain yang ditetapkan berdasarkan potensi investasi. Kunjungan lapangan bertujuan memperkuat data teknis, memastikan kesiapan lahan, infrastruktur, *feedstock*, serta ekosistem industri di daerah. Kegiatan berikutnya adalah Market Outreach, yaitu forum dialog dengan pelaku usaha, asosiasi industri, investor potensial, dan para ahli sektor. *Market outreach* penting untuk memvalidasi asumsi-asumsi pasar, memahami minat pelaku industri, serta mendapatkan insight strategis atas tantangan dan peluang hilirisasi di tiap komoditas. Kegiatan ini dilakukan untuk seluruh 15 komoditas secara terpisah sesuai ketentuan KAK.

Dokumen akhir probis ini berupa *Executive Summary* dan Info Memo untuk masing-masing komoditas yang dirancang untuk kebutuhan promosi investasi, presentasi kepada investor, serta bahan koordinasi antar-Kementerian / Lembaga dan rencana implementasi lengkap dengan *key milestones* dan daftar investor utama. Rangkaian kegiatan terakhir penyusunan yaitu Ekspose Proposal Bisnis Hilirisasi Investasi Strategis, di mana konsultan mempresentasikan 15 proposal bisnis di hadapan para pemangku kepentingan. Pada tahapan ini, konsultan menyajikan analisis final, rekomendasi kebijakan, serta strategi percepatan realisasi investasi yang disusun berdasarkan data empiris, masukan pelaku industri, dan arah kebijakan hilirisasi nasional. Dokumen Proposal Bisnis yang telah disusun secara kumulatif menyajikan total potensi investasi sebesar USD13,75 Miliar dan penyerapan 22.000 tenaga kerja langsung melalui empat sektor strategis. Sektor Mineral menjadi sektor dengan potensi investasi terbesar (USD6.537 juta) dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebesar 6.775 orang. Nilai ini merupakan potensi investasi dari dari 6 (enam) komoditas utama yaitu nikel, tembaga, bauksit, timah, besi baja dan pasir silika. Sektor ini mengandalkan proyek flagship Industri Aluminium Terintegrasi senilai USD 4.500 Juta. Sektor Minyak dan Gas Bumi mencatatkan potensi nilai investasi sebesar USD 6.598 Juta (1.657 tenaga kerja) dengan fokus utama pada Industri Soda Ash. Sementara itu, Sektor Perkebunan mencatatkan potensi investasi USD 121 Juta (578 tenaga kerja)

dengan keunggulan pada proyek hilirisasi Kelapa senilai USD82,4 Juta. Sektor Perikanan dan Kelautan merupakan sektor dengan potensi penyerapan tenaga kerja terbanyak sebesar 12.956 tenaga kerja dari investasi USD 493 Juta, di mana proyek hilirisasi ikan Tilapia dan Garam Industri menjadi pilar utama. Secara keseluruhan, kegiatan penyusunan Proposal Bisnis Hilirisasi Investasi Strategis 15 komoditas prioritas ini memberikan fondasi komprehensif bagi percepatan investasi hilirisasi nasional. Dengan landasan analisis yang kuat, validasi lapangan, konsultasi pasar, dan rekomendasi kebijakan yang terukur, dokumen ini menjadi instrumen penting bagi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mengawal investasi bernilai tambah tinggi demi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama dengan WRI Indonesia menyelenggarakan *Indonesia Green Mineral Investment Forum* (IGMIF) pada tanggal 2 Oktober 2025 di Ruang Nusantara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta. Sebagai bagian dari rangkaian menuju Indonesia *Sustainability Forum* (ISF) 2025, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat dan menegaskan komitmen Indonesia dalam agenda hilirisasi mineral, transisi energi bersih, serta penciptaan iklim investasi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan. Forum ini mempertemukan pembuat kebijakan, investor global, pelaku industri, penyedia teknologi bersih, akademisi dan mitra pembangunan untuk memperkuat ekosistem investasi hijau di sektor mineral serta menegaskan posisi Indonesia sebagai bagian penting dari rantai pasok global yang berkelanjutan.

**Gambar 3.31**
Pelaksanaan Indonesia Green Mineral Investment Forum (IGMIF) 2025

## Faktor Pendorong

Faktor pendorong pencapaian kinerja nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025 diantaranya:

1. Konsistensi kebijakan nasional hilirisasi sumber daya alam, yang mendorong peningkatan investasi pada industri pengolahan dan pemurnian berbasis komoditas unggulan nasional;
2. Penyempurnaan regulasi dan kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA), sehingga mempercepat proses perizinan dan realisasi proyek investasi hilirisasi;
3. Pengembangan kawasan industri hilirisasi dan smelter terintegrasi, khususnya di wilayah berbasis sumber daya, yang menyediakan infrastruktur, utilitas, dan layanan pendukung industri pengolahan;
4. Ketersediaan bahan baku domestik dan jaminan pasokan hulu-hilir, sehingga meningkatkan kepastian usaha bagi investor di sektor hilirisasi;
5. Dukungan infrastruktur energi dan logistik bagi industri pengolahan, termasuk listrik, gas, pelabuhan, dan transportasi bahan baku serta produk hilir;
6. Pemberian insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi hilirisasi, seperti *tax holiday, tax allowance*, serta fasilitas kepabeanan untuk industri pengolahan bernilai tambah;
7. Sinergi kebijakan dan fasilitasi proyek hilirisasi oleh pemerintah pusat dan daerah, termasuk percepatan penyelesaian hambatan investasi dan dukungan implementasi proyek strategis;
8. Meningkatnya minat investor PMA dan PMDN pada sektor hilirisasi prioritas, seiring dengan prospek pasar global produk olahan dan komitmen pemerintah terhadap industrialisasi berbasis nilai tambah.
9. Komitmen kuat Pemerintah dalam percepatan transformasi ekonomi berbasis nilai tambah dan industrialisasi, keunggulan komparatif Indonesia pada sumber daya mineral dan komoditas strategis serta kebutuhan penguatan koordinasi lintas K/L/D dan pelaku usaha untuk mengatasi fragmentasi kebijakan dan dukungan analisis kebijakan berbasis data dan penyusunan Position Paper sebagai dasar pengambilan keputusan.

## Faktor Penghambat

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menghadapi berbagai faktor penghambat dalam pencapaian niali realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi, meskipun capaian kinerja pada tahun 2025 telah berpredikat istimewa diantaranya:

1. Kondisi geopolitik global yang mendorong sikap *wait and see* investor. Kondisi geopolitik global yang belum stabil menyebabkan meningkatnya ketidakpastian iklim investasi, khususnya pada sektor hilirisasi yang umumnya memerlukan nilai investasi besar, teknologi tinggi, dan kepastian rantai pasok jangka panjang. Situasi tersebut mendorong sebagian investor untuk bersikap wait and see dengan menunda keputusan investasi maupun pelaksanaan *ground breaking* proyek yang telah direncanakan. Penundaan realisasi investasi ini berdampak langsung pada belum optimalnya capaian target kinerja nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi. Meskipun minat investasi dan komitmen awal telah terbentuk, faktor eksternal seperti dinamika politik dan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, serta risiko rantai pasok menyebabkan investor menahan ekspansi dan menunggu kondisi yang lebih kondusif. Akibatnya, konversi dari komitmen menjadi realisasi investasi berjalan lebih lambat dari yang ditargetkan.
2. Ketidakpastian regulasi dan kebijakan industri hilirisasi menghambat keputusan investasi yang sering berubah atau tumpang tindih dalam industri hilirisasi menimbulkan keragu-raguan signifikan bagi investor. Hal ini menyebabkan mereka menunda pengambilan keputusan investasi dan pelaksanaan proyek, secara langsung menghambat peningkatan nilai realisasi penanaman modal di sektor hilirisasi.
3. Tekanan masyarakat/organisasi masyarakat serta tekanan internasional terhadap kelestarian lingkungan hidup yang berpotensi menekan program hilirisasi. Tekanan yang meningkat dari masyarakat, organisasi non-pemerintah, serta komunitas internasional terkait kelestarian lingkungan hidup, berpotensi memberikan beban tambahan pada program hilirisasi. Regulasi lingkungan yang semakin ketat dan tuntutan akuntabilitas sosial dapat menekan margin keuntungan, meningkatkan biaya investasi, dan memperlambat proses perizinan, sehingga mengurangi minat dan realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi.
4. Ketersediaan infrastruktur dasar yang belum memadai menghambat inisiatif investasi hilirisasi seperti pasokan listrik yang stabil, akses jalan yang memadai, dan jaringan telekomunikasi yang handal, masih belum memenuhi standar yang dibutuhkan untuk mendukung skala besar penanaman modal di bidang hilirisasi. Kondisi ini secara signifikan menekan minat investor karena tingginya biaya logistik dan operasional, serta terbatasnya efisiensi produksi, yang pada akhirnya menghambat realisasi dan pertumbuhan investasi sektor hilirisasi
5. Fragmentasi kebijakan pada isu permasalahan tata kelola, terdapat keterbatasan dari beberapa aspek antara lain belum optimalnya sinkronisasi regulasi lintas K/L/D dan ketidakpastian regulasi global (EUDR, standar lingkungan, hambatan non-tarif) yang memengaruhi akses pasar ekspor, keterbatasan akses pembiayaan dan skema pendanaan inovatif untuk proyek hilirisasi berisiko tinggi, terbatasnya insentif fiskal dan nonfiskal yang kompetitif dibandingkan negara pesaing, proses perizinan dan pemenuhan persyaratan lingkungan (AMDAL, IUPM, dll.) yang masih memerlukan penyederhanaan dan percepatan, serta kesiapan SDM industri berteknologi tinggi yang masih perlu ditingkatkan.

## Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkomitmen untuk melakukan peningkatan capaian kinerja peningkatan nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi akan melakukan beberapa rencana tindak lanjut ke depan diantaranya:

1. Akselerasi groundbreaking proyek investasi eksisting tahun 2025. Melaksanakan program terpadu untuk mengidentifikasi dan memfasilitasi percepatan groundbreaking proyek-proyek investasi yang telah direncanakan namun belum terlaksana pada tahun 2025. Program ini mencakup penyelesaian isu perizinan yang terhambat, penyediaan insentif yang lebih menarik (misalnya, kemudahan akses lahan, keringanan pajak awal), serta pembentukan satuan tugas khusus untuk mendampingi investor dalam mengatasi hambatan awal proyek. Tujuannya adalah untuk memastikan proyek yang berada di tahap pra-konstruksi dapat segera memulai kegiatan pembangunan fisik.
2. Strategi komprehensif mendorong proyek investasi baru bidang hilirisasi. Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pemasaran investasi yang agresif dan terarah, dengan fokus pada menarik investasi baru di bidang hilirisasi. Mengingat sebagian besar proyek eksisting telah memasuki fase produksi, diperlukan upaya proaktif untuk mengidentifikasi potensi investasi baru, terutama pada sektor-sektor hilirisasi yang memiliki nilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor. Ini termasuk melakukan promosi investasi global, partisipasi dalam forum investasi internasional, serta menawarkan paket kebijakan yang kompetitif untuk calon investor baru yang tertarik pada sektor hilirisasi Indonesia.
3. Peningkatan alokasi anggaran untuk pencapaian target realisasi investasi hilirisasi. Melakukan evaluasi ulang dan realokasi anggaran pemerintah secara strategis untuk mendukung pencapaian target realisasi investasi bidang hilirisasi. Anggaran ini dapat dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur penunjang seperti kawasan industri khusus hilirisasi, akses energi terjangkau, program insentif investasi yang lebih menarik, dukungan riset dan pengembangan (R&D) untuk teknologi hilirisasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang relevan. Alokasi anggaran yang tepat sasaran akan menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif bagi pertumbuhan hilirisasi.
4. Penyusunan dan pemutakhiran tata kelola terukur untuk isu prioritas termasuk milestone, indikator, PIC lintas sektor, intensifikasi koordinasi lintas K/L/BUMN dan asosiasi industri guna memastikan rekomendasi menjadi kebijakan yang implementatif. Lebih lanjut, penguatan fungsi pengawalan proyek strategis dilakukan melalui monitoring berkala dan fasilitasi penyelesaian hambatan perizinan/investasi, penyusunan kerangka regulasi dan insentif (fiskal dan nonfiskal) untuk mendukung pengembangan ekosistem hilirisasi terintegrasi, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data untuk mengukur dampak terhadap nilai tambah, substitusi impor, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kemitraan internasional dan transfer teknologi guna mendukung pengembangan industri berteknologi tinggi.

## 3.3.3 Sasaran "Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif, serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima"

### 3.3.3.1
### IKU 9: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja indeks reformasi birokrasi sebesar 102,53 atau terkategori istimewa pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 2,64 persen. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi serta pemberian pelayanan penanaman modal yang prima.

**Tabel 3.17**
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

**SS-2:**
**Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima**

| IKU-9: Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | | Capaian Kinerja 2025 (%) | Normalisasi Capaian PK | Realisasi Tahun 2024 | Capaian Kinerja 2025 terhadap Realisasi 2024 (%) | Target Akhir Renstra 2029 | Capaian Kinerja 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2029 (%) | Kategori Capaian Kinerja Tahun 2025 |
| T | R | | | | | | | |
| 76,20 | 78,13 | **102,53** | 102,53 | 76,12 | 2,64 | 80,88 | 96,60 | **Istimewa** |

Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan, di mana capaian sebesar 83,13 berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 75,71, dengan tingkat pencapaian mencapai 109,8 persen, sehingga menunjukkan peningkatan nilai IP ASN yang melampaui target yang telah ditetapkan. Peningkatan Indeks Profesionalitas (IP) ASN tahun 2025 menjadi 83,13 atau 109,8% dari target (75,71) merupakan indikator pendukung capaian Sasaran Strategis 2: "Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima." Capaian ini merefleksikan keberhasilan penguatan kapasitas, kompetensi, dan integritas aparatur sebagai fondasi utama birokrasi yang efektif.

**Tabel 3.18**
Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Tahun 2025 pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

| Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|
| Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN (nilai) | 75,71 | 83,13 | 109,8 |

Penguatan profesionalitas ASN yang terdiri atas aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin telah dilaksanakan salah satunya melalui pembangunan manajemen talenta. Sampai dengan Desember tahun 2025, pelaksanaan kegiatan terkait manajemen talenta diantaranya:

1. Koordinasi dengan Direktorat Pengembangan Talenta dan Karier ASN BKN tentang mekanisme pembangunan manajemen talenta.
2. Kegiatan pemetaan Pro-ASN di Badan Kepegawaian Negara untuk pemetaan talenta pegawai struktural eselon II, III, dan IV sebanyak total 56 orang sebagai berikut :
   a. Tahap I (11 Desember 2025)
   b. Tahap II (12 Desember 2025)
   c. Tahap III (24 Desember 2025)
3. Kegiatan pemetaan *Computer Assisted Competency Test* (CACT) untuk pemetaan talenta pegawai telah dilaksanakan kepada 271 pegawai di tanggal 22-23 Desember 2025.

Selain pembangunan manajemen talenta, penguatan profesionalitas ASN juga telah dilaksanakan melalui Seleksi JPT Madya di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi dan penataan organisasi. Seleksi JPT Madya di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bekerja sama dengan Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) Badan Kepegawaian Negara untuk tahap *Assessment Center* pada bulan Desember 2025.

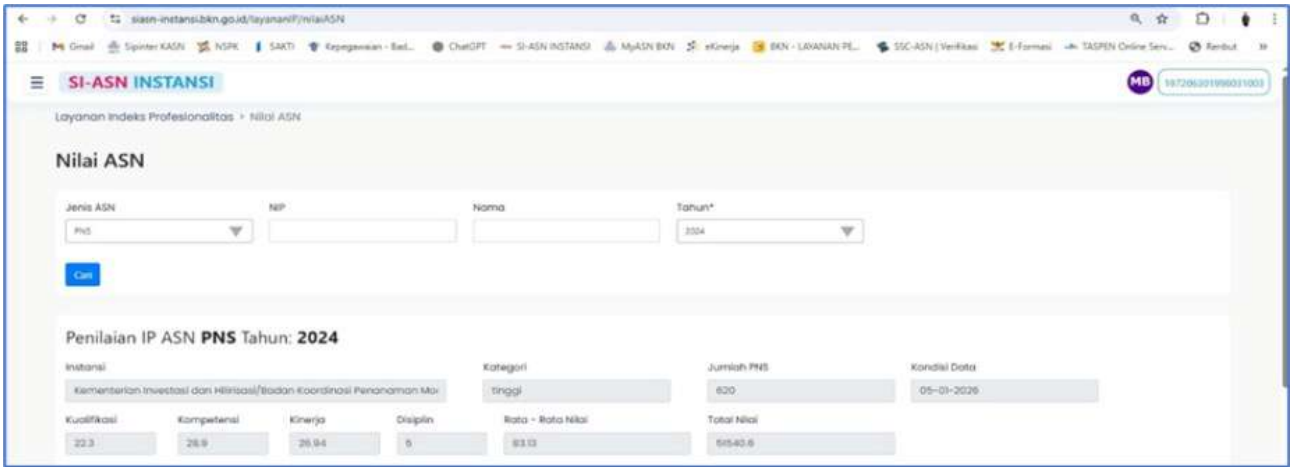


**Gambar 3.32**
*Assessment Center*

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dirilis pada November 2025, capaian Indeks Kepuasan Layanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Nilai yang diperoleh sebesar 3,7 atau setara dengan 92,01 dalam konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,5. Hal ini merepresentasikan tingkat realisasi sebesar 105,7 persen, yang mencerminkan peningkatan kualitas layanan serta kepuasan pemangku kepentingan. Capaian ini secara langsung mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian, khususnya Sasaran Strategis 2, yaitu "Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima." Tingginya tingkat kepuasan terhadap layanan internal SDM dan organisasi menjadi indikator penting yang merefleksikan efektivitas tata kelola internal serta kualitas dukungan sumber daya aparatur. Kepuasan pemangku kepentingan internal ini merupakan fondasi yang essential dalam membangun budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi layanan, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penciptaan iklim investasi yang lebih terpercaya. Dengan demikian, hasil survei ini tidak hanya menegaskan perbaikan sistem layanan internal, tetapi juga memperkuat fondasi kelembagaan untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan pelayanan yang unggul.

**Tabel 3.19**
Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Tahun 2025 pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

| Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|
| Indeks kepuasan layanan sumber daya manusia dan organisasi (indeks) | 3,5 | 3,7 | 105,7 |

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat 9 (sembilan) unsur layanan. Dari 9 (sembilan) unsur layanan, terdapat 3 (tiga) unsur layanan yang mendapatkan penilaian dengan indeks tertinggi dari responden yaitu:

1. Unsur Biaya/Tarif dengan indeks sebesar 3,97 atau konversi IKM sebesar 99,22.
2. Unsur Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan dengan indeks sebesar 3,94 atau konversi IKM sebesar 98,52.
3. Unsur Perilaku Pelaksana memiliki indeks yang sama dengan Unsur Sarana dan Prasarana yaitu sebesar 3,64 atau konversi IKM sebesar 91,07.

Pemenuhan kepuasan layanan sumber daya manusia dan organisasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna layanan (pegawai Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM) diantaranya melalui kegiatan *Employee Assistance Program* (EAP) yang terdiri dari 3 (tiga) jenis layanan kesehatan mental yaitu:

1. Penyelenggaraan layanan Mental Health Check Up (MHCU) untuk 60 pegawai;
2. Pelaksanaan sesi konseling secara individu bersama Psikolog untuk 60 pegawai; serta
3. Penyelenggaraan seminar atau sesi edukatif terkait kesehatan mental dan pengembangan diri sebanyak 2 sesi.

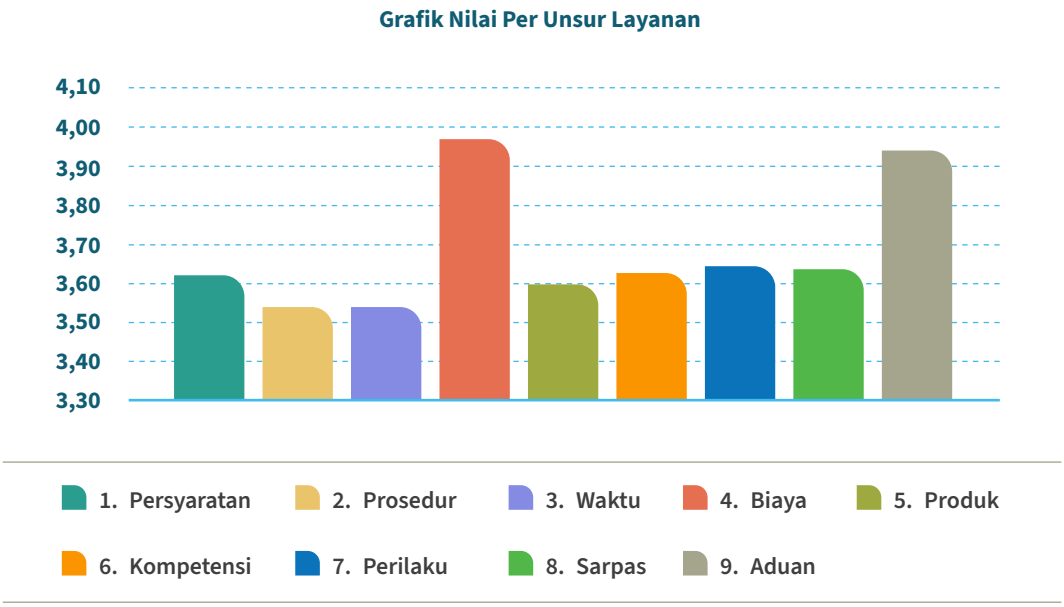


**Gambar 3.33**
Grafik Nilai Per Unsur Pelayanan

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Kegiatan **Uji Publik oleh Komisi Informasi Pusat (KIP)**. Kegiatan ini dilakukan sebagai pendukung yang strategis dalam mencapai sasaran "Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima." Dalam rangka memastikan akuntabilitas dan transparansi kelembagaan, Kementerian telah mengikuti seluruh tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KIP, termasuk penyelenggaraan Uji Publik pada 19 November 2025. Pada forum tersebut, Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama selaku Penanggung Jawab Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyampaikan paparan komprehensif mengenai implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian. Proses uji publik ini berfungsi sebagai mekanisme verifikasi independen dan konfirmasi publik terhadap kualitas layanan informasi, kelengkapan dokumen, serta kesesuaian pelaksanaan dengan mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Hasil penilaian resmi dari KIP, yang tertuang dalam Keputusan Ketua KIP Nomor 11/KEP/KIP/XII/2025, menetapkan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperoleh skor 84,41 dan dikategorikan sebagai "Menuju Informatif". Capaian ini merefleksikan komitmen dan upaya sistematis Kementerian dalam membangun tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, dan memenuhi standar layanan publik. Dengan demikian, partisipasi aktif dan capaian dalam evaluasi KIP ini tidak hanya menjadi indikator pemenuhan kewajiban hukum, tetapi lebih jauh berkontribusi langsung terhadap penguatan aspek tata kelola, akuntabilitas, dan citra birokrasi yang bersih merupakan elemen kunci dalam mewujudkan lingkungan investasi yang terpercaya dan pelayanan penanaman modal yang prima sebagaimana dituangkan dalam Sasaran Strategis Renstra 2025–2029.

**Gambar 3.34**
Uji Publik oleh Komisi Informasi Pusat (KIP)

Kegiatan ***Workshop* Penguatan Budaya Kerja bagi CPNS T.A. 2024** melalui Internalisasi *Core Values* ASN BerAKHLAK merupakan salah satu kegiatan pendukung yang strategis dalam mencapai sasaran "Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima." *Workshop* yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi berkolaborasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada tanggal 1 Juli 2025 di Ruang Nusantara ini dirancang untuk membentuk fondasi karakter dan integritas aparatur sejak dini, dengan fokus pada penanaman nilai-nilai inti ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Kegiatan ini secara khusus bertujuan untuk membekali Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 dengan pemahaman, sikap, dan perilaku kerja yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada hasil dan pelayanan publik. Melalui pendalaman nilai-nilai tersebut, diharapkan tercipta kultur organisasi yang mendukung tata kelola birokrasi yang bersih, efektif, dan responsif. Narasumber ahli, Prof. Dr. Rose Mini Agoes Salim, M.Psi., Psikolog, hadir untuk memberikan perspektif psikologis dan praktis dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam budaya kerja sehari-hari. Dengan demikian, *workshop* ini tidak hanya berperan sebagai bagian dari proses pembinaan awal CPNS, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada penguatan kapasitas dan karakter sumber daya manusia aparatur dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, profesional, dan mampu memberikan pelayanan penanaman modal yang prima sesuai dengan visi dan sasaran strategis Kementerian.

**Gambar 3.35**
Workshop Penguatan Budaya Kerja bagi CPNS

Kegiatan ***Workshop* Induction Program bagi PPPK T.A. 2024** tentang Budaya Kerja BerAKHLAK merupakan salah satu kegiatan pendukung yang strategis dalam mencapai sasaran "Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima." *Workshop* ini diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen Kementerian untuk membangun fondasi budaya kerja yang kuat dan berintegritas sejak awal bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini selaras dengan kerangka kebijakan nasional terkini, khususnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, yang mengintegrasikan nilai-nilai BerAKHLAK ke dalam aspek Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi. Meskipun Indeks BerAKHLAK diproyeksikan tidak lagi menjadi penilaian terpisah mulai tahun 2026, internalisasi nilai-nilai inti ASN (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) tetaplah menjadi elemen krusial dalam Sistem Merit untuk membentuk aparatur yang profesional dan berkarakter. Oleh karena itu, *workshop* ini tidak hanya berfungsi sebagai orientasi, tetapi juga sebagai langkah proaktif untuk memastikan kesiapan dan keselarasan sumber daya manusia dengan evolusi kebijakan manajemen ASN, sekaligus menanamkan dasar-dasar perilaku aparatur yang mendukung terciptanya tata kelola yang bersih, efektif, dan pelayanan yang unggul bagi para pemangku kepentingan penanaman modal.

**Gambar 3.36**
Workshop Induction Program bagi PPPK T.A. 2024 tentang Budaya Kerja BerAKHLAK

Kegiatan Pelatihan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (PKPM) Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya yang diikuti oleh 332 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM merupakan salah satu kegiatan penunjang utama dalam pencapaian sasaran strategis kelembagaan. Pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Juni s.d. Agustus 2025 dengan metode *blended learning* ini secara langsung dirancang untuk membangun kapasitas teknis dan kompetensi profesional aparatur di bidang penanaman modal dan hilirisasi. Kegiatan ini secara strategis mendukung pencapaian kedua sasaran strategis Kementerian. Pertama, pelatihan yang fokus pada penguasaan materi kebijakan, promosi, hilirisasi, pelayanan, pengendalian, dan teknologi informasi penanaman modal ini langsung berkontribusi pada terwujudnya Sasaran Strategis 1, yaitu "Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata". Aparatur yang kompeten dan adaptif merupakan ujung tombak dalam mengakselerasi investasi berkualitas, mengawal proyek hilirisasi strategis, serta memberikan pelayanan dan pengendalian yang efektif kepada investor. Kedua, komitmen untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN melalui pelatihan sistematis ini merupakan pilar penting dalam mewujudkan Sasaran Strategis 2, yaitu "Birokrasi yang Bersih dan Efektif serta Pelayanan yang Prima". Investasi pada pengembangan sumber daya manusia menjamin tersedianya aparatur yang bukan hanya berintegritas, tetapi juga memiliki keahlian teknis yang mumpuni untuk memberikan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat, dan akuntabel. Pelatihan ini berfungsi sebagai instrumen katalitik yang menghubungkan penguatan kapasitas individu dengan peningkatan kinerja kelembagaan secara keseluruhan. *Output* yang dihasilkan, yaitu tersertifikasinya Aparatur Penata Kelola Penanaman Modal sesuai jenjang. Hal tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi sumber daya manusia di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam menjalankan mandatnya, khususnya dalam mengakselerasi investasi yang berkualitas serta menciptakan iklim berusaha yang kondusif.

## Faktor Pendorong

Faktor pendorong pencapaian kinerja nilai indeks reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025 diantaranya:

1. Komitmen pimpinan dan penguatan tata kelola reformasi birokrasi yang berkelanjutan, melalui penetapan kebijakan, rencana aksi, dan pengendalian pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten;
2. Penyederhanaan proses bisnis dan transformasi layanan berbasis digital, termasuk optimalisasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) dan integrasi layanan investasi;
3. Penguatan manajemen kinerja dan akuntabilitas organisasi, melalui penyelarasan perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi capaian kinerja yang terintegrasi;
4. Penataan organisasi dan tata laksana yang adaptif dan efektif, sesuai mandat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik;
5. Penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur (SDM), meliputi perencanaan kebutuhan, pengembangan kompetensi, manajemen talenta, dan penilaian kinerja berbasis merit;
6. Peningkatan kualitas pengawasan internal dan pengendalian gratifikasi/korupsi, melalui penguatan peran APIP, implementasi zona integritas, serta manajemen risiko organisasi;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik sektor investasi, melalui standar pelayanan, inovasi layanan, serta mekanisme pengaduan dan kepuasan pemangku kepentingan;
8. Pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data kelembagaan, guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data, transparansi, dan efisiensi administrasi birokrasi.

**Gambar 3.37**
Pelatihan & Diklat ASN (Pusdiklat BKPM)

## Faktor Penghambat

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menghadapi berbagai faktor penghambat dalam pencapaian nilai indeks reformasi birokrasi, meskipun capaian kinerja pada tahun 2025 telah berpredikat istimewa diantaranya:

1. Keterbatasan kompetensi asn dalam adopsi tata kelola modern dan teknologi. Sebagian pegawai belum memiliki kompetensi yang memadai dalam pemanfaatan teknologi, penerapan tata kelola modern, serta manajemen perubahan. Kondisi ini memperlambat transformasi proses kerja dan inovasi layanan, yang berdampak pada belum optimalnya capaian indikator reformasi birokrasi
2. Belum optimalnya mekanisme monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas program reformasi birokrasi belum jelas dan terstruktur menyebabkan pelaksanaan program tidak terpantau secara efektif. Hal ini berisiko menimbulkan deviasi dari rencana dan tujuan reformasi, sehingga capaian indikator kinerja nilai indeks reformasi birokrasi belum optimal.
3. Belum optimalnya implementasi manajemen talenta dan rencana suksesi yang belum sepenuhnya berbasis pemetaan kompetensi dan kinerja secara komprehensif. Pemanfaatan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan promosi dan pengembangan karier belum konsisten, sehingga prinsip "*the right man on the right place*" belum sepenuhnya berjalan secara sistemik. Di sisi lain, integrasi hasil assessment kompetensi ke dalam sistem informasi kepegawaian juga masih terbatas, serta analisis kesenjangan kinerja belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perencanaan pengembangan ASN, sehingga membatasi pendalaman kualitas penerapan sistem merit secara menyeluruh.

## Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk melakukan peningkatan capaian kinerja peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan melakukan beberapa rencana tindak lanjut ke depan diantaranya:

1. Penguatan manajemen talenta berbasis tingkat kematangan, melalui penyusunan dan penerapan instrumen pemetaan talenta yang terstandar (indikator kinerja dan kompetensi), pengisian *talent pool* secara menyeluruh untuk seluruh jenjang jabatan, serta integrasi hasil assessment ke dalam sistem informasi kepegawaian, sehingga tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan dalam promosi, mutasi, dan pengembangan karier.
2. Optimalisasi pemanfaatan data kinerja dan kompetensi melalui Human *Capital Development Plan* (HCDP) dan *Individual Development Plan* (IDP), dengan melakukan analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi secara berkala, menyusun dan mengimplementasikan HCDP sebagai kerangka pengembangan organisasi serta IDP sebagai rencana pengembangan setiap pegawai, yang keduanya berbasis hasil assessment dan penilaian kinerja, sehingga pengembangan ASN lebih terarah, personal, dan berdampak nyata.
3. Penguatan budaya kerja dan kepemimpinan berbasis merit, melalui internalisasi nilai dasar ASN secara konsisten, penguatan peran pimpinan sebagai role model dalam penerapan prinsip meritokrasi, serta pengembangan mekanisme penghargaan dan pengakuan berbasis kinerja dan kompetensi, sehingga tercipta iklim organisasi yang mendorong kinerja tinggi, objektivitas, dan profesionalisme secara berkelanjutan.

# 3.4 Capaian Nilai SAKIP terhadap Pencapaian IKU

Peningkatan capaian nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki korelasi positif terhadap pencapaian kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdampak pada semakin efektifnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Capaian nilai AKIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025 memiliki pertumbuhan sebesar 0,42 persen. Pertumbuhan tersebut diikuti oleh peningkatan capaian tujuh dari sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencerminkan adanya perbaikan serta penguatan integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja di lingkungan kementerian Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Perbaikan pada perencanaan kinerja yang lebih terukur dan selaras dengan sasaran strategis mendorong efektivitas pelaksanaan program prioritas investasi dan hilirisasi. Penguatan pengukuran kinerja berbasis *outcome* meningkatkan ketepatan penilaian terhadap keberhasilan program dan kegiatan. Optimalisasi pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala memungkinkan identifikasi capaian secara tepat dan menetapkan langkah korektif secara tepat. Dengan indikator kinerja yang terukur dan jelas, setiap unit kerja dapat bersinergi secara optimal sehingga pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien. Melalui penguatan sistem manajemen kinerja tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diharapkan mampu mempertahankan capaian kinerja yang telah baik serta terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan terarah terhadap berbagai kelemahan yang masih dihadapi.

**Tabel 3.20**
Perbandingan Nilai SAKIP dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024 dan 2025

| No | Indikator | Capaian Kinerja | | Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | |
| **I** | **Akuntabilitas Kinerja** | | | |
| | Nilai AKIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | 76,78 | 77,10 | 0,42 |
| **II** | **Indikator Kinerja Utama** | | | |
| 1 | Nilai PMA dan PMDN (Rp Triliun) | 1.714,2 | 1.931,2 | 12,66 |
| 2 | Nilai PMA/PMDN sektor sekunder (Rp Triliun) | 721,3 | 780,9 | 8,26 |
| 3 | Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Persen) | 47,5 | 53,38 | 12,38 |
| 4 | Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan (Rp Triliun) | 253,4 | 445,8 | 75,93 |
| 5 | Nilai PMA berorientasi ekspor (Rp Triliun) | 164,63 | 135,8 | -17,51 |
| 6 | Nilai PMDN berorientasi ekspor (Rp Triliun) | 56,22 | 58,3 | 3,74 |
| 7 | Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (Persen) | 52,2 | 51,3 | -1,67 |
| 8 | Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi (Rp Triliun) | 375,4 | 584,1 | 55,59 |
| 9 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (indeks) | 71,9 | 78,13 | 8,65 |

# 3.5 Capaian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025 terhadap Indikator RPJMN 2025-2029

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki peran strategis dalam mengawal pencapaian target pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Dalam kerangka pelaksanaan RPJMN tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkontribusi terhadap Prioritas Nasional Kelima, yaitu **Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan realisasi penanaman modal, penguatan hilirisasi industri, serta pemerataan investasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional.

Pada tahun 2025, yang merupakan fase awal pelaksanaan RPJMN 2025–2029, capaian kinerja kementerian menjadi penting sebagai baseline dalam mengukur progres pencapaian target pembangunan pada periode selanjutnya. Realisasi investasi yang dicapai tidak hanya mencerminkan kinerja tahunan, tetapi juga menunjukkan kontribusi awal terhadap target kumulatif yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029. Rincian capaian indikator RPJMN yang didukung oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025 disajikan pada tabel 3.21.

**Tabel 3.21**
Pencapaian Target Indikator RPJMN 2025-2029 yang diampu oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025

| Indikator | | Satuan | Capaian 2025 | | | Capaian Realisasi 2025 terhadap Target RPJMN 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | % |
| PP 05.04 | Nilai PMA dan PMDN | Rp Triliun | 1.905,60 | 1.931,20 | 101,34 | 3.414,80 | 56,55 |
| KP 05.04.01 | Nilai PMA/PMDN sektor sekunder | Rp Triliun | 855,9 | 780,87 | 91,23 | 1.718,30 | 45,44 |
| KP 05.04.01 | Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) | Persen | 48,3 | 53,4 | 110,56 | 49,7 | 107,44 |
| KP 05.04.01 | Nilai PMA dan PMDN kawasan pusat pertumbuhan | Rp Triliun | 307,1 | 445,8 | 145,16 | 507,2 | 87,89 |
| KP 05.04.01 | Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi | Rp Triliun | 521,4 | 584,1 | 112,03 | 779,3 | 74,95 |
| KP 05.04.02 | Nilai PMA berorientasi ekspor | Rp Triliun | 171,6 | 135,8 | 79,14 | 367,4 | 36,96 |
| KP 05.04.02 | Nilai PMDN berorientasi ekspor | Rp Triliun | 60,4 | 58,32 | 96,56 | 126,4 | 46,14 |
| KP 05.04.03 | Kontribusi realisasi investasi luar Jawa | Persen | 52,1 | 51,3 | 98,46 | 53,2 | 96,43 |
| KP 05.01.05 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Kelapa Sawit | Rp Triliun | 1,49 | 62,76 | 4.212,08 | 2,30 | 2728,70 |
| KP 05.01.06 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Kelapa | Rp Triliun | 0,39 | 1,77 | 453,85 | 0,71 | 249,30 |
| KP 05.01.07 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Rumput Laut | Rp Triliun | 0,51 | 0,32 | 62,75 | 0,61 | 52,46 |
| KP 02.22.04 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Garam | Rp Triliun | 7,38 | 3,82 | 51,76 | 13,77 | 27,74 |
| KP 02.22.03 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Ikan TCT | Rp Triliun | 0,60 | 1,86 | 310,00 | 0,63 | 295,24 |
| KP 02.22.03 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Tilapia | Rp Triliun | 0,45 | 0,03 | 6,21 | 0,83 | 3,61 |
| KP 02.22.03 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Udang | Rp Triliun | 0,40 | 0,31 | 77,50 | 0,70 | 44,29 |
| KP 05.01.09 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Minyak Bumi | Rp Triliun | 34,45 | 41,70 | 121,04 | 56,01 | 74,45 |
| KP 05.01.09 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Gas Bumi | Rp Triliun | 20,23 | 18,30 | 90,46 | 32,89 | 55,64 |

| Indikator | | Satuan | Capaian 2025 | | | Capaian Realisasi 2025 terhadap Target RPJMN 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | % |
| KP 05.01.01 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Nikel | Rp Triliun | 44,1 | 185,32 | 420,23 | 108,21 | 171,26 |
| KP 05.01.03 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Bauksit | Rp Triliun | 11,78 | 53,14 | 451,10 | 16,75 | 317,25 |
| KP 05.01.02 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Tembaga | Rp Triliun | 45,93 | 65,80 | 143,26 | 55,13 | 119,35 |
| KP 05.01.04 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Timah | Rp Triliun | 0,51 | 11,23 | 2.201,96 | 0,55 | 2041,82 |
| KP 05.01.18 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Industri Logam Dasar Besi dan Baja | Rp Triliun | 10,17 | 39,21 | 385,55 | 12,78 | 306,81 |
| KP 05.01.10 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Pasir Silika | Rp Triliun | 1,42 | 4,86 | 342,25 | 2,08 | 233,65 |

Berdasarkan Tabel 3.21, secara umum kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mendukung pencapaian target RPJMN Tahun 2025–2029 menunjukkan hasil yang positif. Sebagian besar indikator utama investasi berhasil mencapai bahkan melampaui target tahun 2025, sekaligus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target akhir RPJMN tahun 2029.

Indikator utama Nilai PMA dan PMDN pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.931,2 triliun atau 101,34% dari target tahunan sebesar Rp1.905,6 triliun. Realisasi tersebut telah mencapai 56,55% dari target RPJMN tahun 2029 sebesar Rp3.414,8 triliun, yang menunjukkan bahwa capaian investasi nasional telah berada pada jalur yang cukup baik menuju target jangka menengah.

Pada indikator Nilai PMA/PMDN sektor sekunder, realisasi mencapai Rp780,9 triliun atau 91,23% dari target tahun 2025 sebesar Rp855,9 triliun. Capaian ini setara dengan 45,44% dari target RPJMN tahun 2029 sebesar Rp1.718,3 triliun. Meskipun belum mencapai target tahunan, sektor sekunder tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap struktur investasi nasional, meskipun masih memerlukan penguatan terutama pada investasi industri manufaktur.

Indikator Persentase realisasi PMDN termasuk UMKM menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebesar 53,4%, melampaui target tahun 2025 sebesar 48,3% atau mencapai 110,56%. Bahkan, capaian tersebut telah melebihi target RPJMN tahun 2029 sebesar 49,7% dengan tingkat pencapaian 107,44%. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya peran investasi domestik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Indikator Nilai PMA dan PMDN kawasan pusat pertumbuhan juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi dengan realisasi sebesar Rp445,8 triliun atau 145,16% dari target tahun 2025 sebesar Rp307,1 triliun. Realisasi tersebut telah mencapai 87,89% dari target RPJMN tahun 2029 sebesar Rp507,2 triliun, yang mengindikasikan percepatan investasi di wilayah pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya, indikator Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau 112,03% dari target tahun 2025 sebesar Rp521,4 triliun dan telah mencapai 74,95% dari target RPJMN tahun 2029 sebesar Rp779,3 triliun. Capaian ini mencerminkan keberhasilan kebijakan hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam serta memperkuat struktur industri nasional.

Di sisi lain, beberapa indikator masih menunjukkan capaian yang relatif lebih rendah. Indikator Nilai PMA berorientasi ekspor terealisasi sebesar Rp135,8 triliun atau 79,14% dari target tahun 2025 sebesar Rp171,6 triliun dan baru mencapai 36,96% dari target RPJMN tahun 2029 sebesar Rp367,4 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang berorientasi ekspor masih memerlukan dorongan kebijakan dan peningkatan daya saing industri nasional. Sementara itu, indikator Nilai PMDN berorientasi ekspor mencapai Rp58,3 triliun atau 96,52% dari target tahunan dan telah mencapai 46,14% dari target RPJMN.

Indikator Kontribusi realisasi investasi luar Jawa mencapai 51,3% atau 98,46% dari target tahun 2025 sebesar 52,1% dan telah mencapai 96,43% dari target RPJMN tahun 2029 sebesar 53,2%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerataan investasi antarwilayah sudah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan daya tarik investasi di luar Pulau Jawa.

Pada kelompok indikator hilirisasi komoditas prioritas, sebagian besar menunjukkan capaian yang sangat tinggi dibandingkan target tahun 2025. Investasi hilirisasi komoditas mineral seperti nikel, bauksit, tembaga, dan timah menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Realisasi investasi hilirisasi nikel mencapai Rp185,32 triliun atau 420,23% dari target tahun 2025 dan telah mencapai 171,26% dari target RPJMN 2029. Demikian pula hilirisasi bauksit mencapai 451,10% dari target tahunan dan hilirisasi timah mencapai lebih dari dua puluh kali lipat target tahunan. Hal ini menunjukkan percepatan investasi pada industri pengolahan mineral sebagai dampak kebijakan hilirisasi sumber daya alam.

Selain sektor mineral, beberapa komoditas juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi seperti hilirisasi kelapa sawit, ikan TCT, industri logam dasar besi dan baja, serta pasir silika yang seluruhnya melampaui target tahun 2025 secara signifikan. Sebaliknya, beberapa indikator hilirisasi masih menunjukkan capaian yang relatif rendah, seperti hilirisasi rumput laut, garam, udang, serta tilapia yang realisasinya masih jauh di bawah target RPJMN tahun 2029. Khusus hilirisasi tilapia, realisasi baru mencapai 6,21% dari target tahunan dan 3,61% dari target RPJMN sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan ekosistem industrinya.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator RPJMN Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong peningkatan realisasi investasi nasional dan pengembangan hilirisasi industri. Mayoritas indikator telah menunjukkan tren positif dan berada pada jalur pencapaian target RPJMN 2025–2029, meskipun beberapa indikator tertentu masih memerlukan penguatan kebijakan dan strategi implementasi agar target jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

# 3.6 Capaian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Terhadap Target Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 pedoman pelaksanaan pembangunan nasional pada tahun 2025. Dalam kerangka tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki peran strategis dalam mendorong pencapaian sasaran ekonomi makro di bidang penanaman modal melalui dua indikator, yaitu Nilai Realisasi PMA dan PMDN dan Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder. Rincian capaian sasaran ekonomi makro bidang penanaman modal pada RKP 2025 disajikan pada tabel 3.21.

**Tabel 3.22**
Capaian Sasaran Ekonomi Makro Bidang Penanaman Modal pada RKP Tahun 2025

| Indikator | Sasaran | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|
| Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) | 1.865,23-1.905,60 | 1.931,20 | 101,34 |
| Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rupiah) | 805,5-842,2 | 780,87 | 91,23 |

Pada tahun 2025, realisasi penanaman modal menunjukkan kinerja yang positif dan melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Meskipun capaian realisasi PMA dan PMDN telah melampaui target yang ditetapkan, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi untuk menjaga keberlanjutan kinerja investasi ke depan. Dinamika perekonomian global, potensi fluktuasi nilai tukar, serta perubahan arah kebijakan ekonomi di berbagai negara dapat memengaruhi keputusan dan kecepatan realisasi investasi. Selain itu, struktur realisasi investasi yang masih cukup dipengaruhi oleh proyek-proyek berskala besar menjadikan capaian investasi relatif sensitif terhadap perubahan kondisi pasar maupun penyesuaian jadwal proyek. Di sisi lain, aspek kualitas investasi juga menjadi perhatian penting. Pemerataan investasi antarwilayah serta penguatan investasi pada sektor-sektor bernilai tambah masih perlu terus ditingkatkan agar pertumbuhan investasi tidak hanya tinggi secara nominal, tetapi juga mampu mendorong transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya peningkatan promosi investasi yang lebih terarah, penguatan ekosistem industri, serta percepatan pengembangan kawasan investasi di luar wilayah yang telah berkembang menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan investasi nasional.

Pada sektor penanaman modal di sektor sekunder, realisasi investasi masih berada di bawah kisaran target yang ditetapkan. Belum tercapainya target investasi pada sektor sekunder dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat teknis maupun struktural. Penyesuaian jadwal realisasi sejumlah proyek industri berskala besar, termasuk keterlambatan pada tahap konstruksi maupun *commissioning*, turut memengaruhi waktu pencatatan realisasi investasi. Selain itu, dinamika permintaan pasar global terhadap produk industri tertentu juga berdampak pada keputusan ekspansi maupun percepatan investasi oleh pelaku usaha. Faktor lain yang turut memengaruhi optimalisasi investasi di sektor sekunder adalah ketersediaan bahan baku, efisiensi biaya logistik, serta kesiapan infrastruktur pendukung di beberapa wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan sektor industri tidak hanya bergantung pada masuknya investasi, tetapi juga memerlukan dukungan ekosistem industri yang memadai, termasuk konektivitas infrastruktur, kepastian pasokan bahan baku, serta integrasi rantai pasok domestik. Dengan demikian, penguatan koordinasi lintas sektor dan percepatan pembangunan infrastruktur industri menjadi langkah penting untuk mendorong peningkatan investasi pada sektor sekunder di masa mendatang.

# 3.7 Peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional Tahun 2025

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berperan dalam mengakselerasi Program Prioritas Nasional Kelima, yaitu "Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri". Melalui mandat tersebut, pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai investasi, tetapi juga mendorong terbentuknya fondasi industrialisasi bernilai tambah tinggi yang terintegrasi antarwilayah. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat daya saing global yang kompetitif, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi, baik di level regional maupun nasional.

Dalam mendukung prioritas nasional tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025 melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Secara keseluruhan terdapat 28 program dan 57 kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Dari total kegiatan tersebut, sebagian di antaranya menunjukkan capaian yang telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan komitmen dan konsistensi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mendorong percepatan hilirisasi serta pengembangan industri berbasis sumber daya alam sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Rincian program, kegiatan, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM disajikan pada tabel 3.23.

**Tabel 3.23**
Program/Kegiatan/Proyek Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Target, Realisasi, dan Persentase Capaian terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2025

| PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|
| **Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri** | | | |
| **DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | | | |
| **Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal** | | | |
| Peningkatan Daya Saing Investasi (Rekomendasi Kebijakan) | 1 | 1 | 100% |
| Harmonisasi Regulasi Terkait Perizinan Berusaha di Tingkat Pusat dan Daerah (Rekomendasi Kebijakan) | 1 | 1 | 100% |
| Sinkronisasi Kebijakan Investasi (Rekomendasi Kebijakan) | 1 | 1 | 100% |
| **Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah** | | | |
| Pengemasan Potensi Investasi di Daerah Realisasi Investasi Rendah (SP SABA) (Daerah (Prov/Kab/Kota)) | 3 | 3 | 100% |
| **Pemberdayaan Usaha Nasional** | | | |
| Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam Rantai Pasok (UMKM) | 500 | 519 | 104% |
| **DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL** | | | |
| **Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal** | | | |
| Analisis Negara Target dan Negara Pesaing (Rekomendasi Kebijakan) | 1 | 1 | 100% |
| IIPC (*Indonesian Investment Promotion Center*) (Promosi) | 110 | 310 | 282% |
| IIPC (*Indonesian Investment Promotion Center*) (SP SABA) (Promosi) | 34 | 34 | 100% |
| **Promosi Wilayah Amerika dan Eropa** | | | |
| Promosi penanaman modal dalam forum internasional di Wilayah Amerika dan Eropa (Kegiatan) | 1 | 1 | 100% |
| Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Amerika dan Eropa (Promosi) | 1 | 1 | 100% |

| PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|
| **Promosi Wilayah Asia Timur Asia Selatan Timur Tengah dan Afrika** | | | |
| Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (Promosi) | 1 | 1 | 100% |
| **Promosi Wilayah Asia Tenggara Australia Selandia Baru dan Pasifik** | | | |
| Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (Promosi) | 1 | 1 | 100% |
| Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (Promosi) | 1 | 1 | 100% |
| **DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | | | |
| **Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha** | | | |
| Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah (SP SABA) (Laporan) | 1 | 1 | 100% |
| **Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri** | | | |
| Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha Sektor Industri (Badan Usaha) | 900 | 1.583 | 176% |
| Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha Sektor Industri (SP SABA) (Badan Usaha) | 1.013 | 1.461 | 144% |
| **DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | | | |
| **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I** | | | |
| Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah I (Badan Usaha) | 16 | 18 | 113% |
| Fasilitasi dan Evaluasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek PSN (Badan Usaha) | 2 | 2 | 100% |
| Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi (SP SABA) (Badan Usaha) | 3 | 3 | 100% |

| PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|
| **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II** | | | |
| Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah II (Badan Usaha) | 26 | 26 | 100% |
| Pengembangan Realisasi Investasi di Wilayah-Wilayah Tertentu (SP SABA) (Pemerintah Daerah) | 5 | 5 | 100% |
| **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III** | | | |
| Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah III (Badan Usaha) | 21 | 25 | 119% |
| Eksekusi Proyek Wilayah Barat yang Terkendala Untuk Percepatan Realisasi Investasi (SP SABA) (Badan Usaha) | 1 | 1 | 100% |
| **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV** | | | |
| Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah IV (Badan Usaha) | 21 | 21 | 100% |
| **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V** | | | |
| Satuan Tugas Percepatan Investasi (Layanan) | 3 | 4 | 133% |
| Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah V (Badan Usaha) | 6 | 6 | 100% |
| **DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL** | | | |
| **Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sumber Daya Alam** | | | |
| Percepatan Rencana Proyek di bidang industri Sumber Daya Alam (Badan Usaha) | 3 | 5 | 167% |
| **Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur** | | | |
| Percepatan Rencana Proyek di bidang industri manufaktur (Badan Usaha) | 3 | 4 | 133% |
| **Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan** | | | |
| *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) Bidang Jasa dan Kawasan (Rekomendasi Kebijakan) | 1 | 1 | 100% |
| Percepatan Rencana Proyek di Bidang Jasa dan Kawasan (Badan Usaha) | 2 | 2 | 100% |

| PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|
| **Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)** | | | |
| Percepatan Penyelesaian Masalah Strategis di KEK (Badan Usaha) | 2 | 2 | 100% |
| **Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta** | | | |
| Percepatan Rencana Penanaman Modal Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (Badan Usaha) | 3 | 3 | 100% |
| **Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur** | | | |
| Percepatan rencana proyek penanaman modal di bidang infrastruktur (Badan Usaha) | 3 | 3 | 100% |
| Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Infrastruktur (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) | 1 | 1 | 100% |
| **DEPUTI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN MODAL** | | | |
| **Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal** | | | |
| Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga (Lembaga) | 38 | 38 | 100% |
| **Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal** | | | |
| Hasil perundingan kerja sama penanaman modal bilateral (Kesepakatan) | 19 | 19 | 100% |
| Kerja sama penanaman modal dengan dunia usaha dalam dan luar negeri (Kesepakatan) | 6 | 6 | 100% |
| **Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal** | | | |
| Penyelenggaraan *Forum Fasilitasi Outward Investment* (Forum) | 1 | 2 | 200% |
| Hasil perundingan kerja sama penanaman modal regional dan multilateral (Kesepakatan) | 21 | 21 | 100% |
| Konsultasi publik bahan posisi pertemuan kerja sama regional dan multilateral (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) | 14 | 14 | 100% |

| PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|
| Penguatan Kesepakatan dan Implementasi Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) | 1 | 1 | 100% |
| **DEPUTI BIDANG HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS** | | | |
| **Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Perkebunan dan Kehutanan** | | | |
| Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan (Rekomendasi Kebijakan) | 1 | 1 | 100% |
| Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Minyak dan Gas Bumi (Rekomendasi Kebijakan) | 1 | 1 | 100% |
| Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Mineral dan Batubara (Rekomendasi Kebijakan) | 1 | 1 | 100% |
| Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan (Badan Usaha) | 5 | 5 | 100% |
| Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi (Badan Usaha) | 5 | 5 | 100% |
| Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara (Badan Usaha) | 5 | 5 | 100% |
| Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Perkebunan dan Kehutanan (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) | 1 | 1 | 100% |
| **Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi** | | | |
| Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Sektor Minyak dan Gas Bumi (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) | 1 | 1 | 100% |
| **Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Mineral dan Batubara** | | | |
| Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Bidang Mineral dan Batubara (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) | 1 | 1 | 100% |
| **Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Perikanan dan Kelautan** | | | |
| Rencana Aksi Nasional Hilirisasi di Bidang Perikanan dan Kelautan (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) | | | |

| PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|
| **DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PENANAMAN MODAL** | | | |
| **Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik** | | | |
| Pemeliharaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) (Sistem Informasi) | 1 | 1 | 100% |
| Pemeliharaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) (SP SABA) (Sistem Informasi) | 1 | 1 | 100% |
| **Pengelolaan Layanan Elektronik Infrastruktur dan Jaringan** | | | |
| Website Penanaman Modal (Layanan) | 1 | 1 | 100% |
| Pemeliharaan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS (Sistem Informasi) | 1 | 1 | 100% |
| Pemeliharaan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS (SP SABA) (Sistem Informasi) | 1 | 1 | 100% |

# 3.8 Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2025 pada awalnya ditetapkan sebesar Rp681.880.285.000, kemudian mengalami penyesuaian menjadi Rp879.611.122.000. Selanjutnya, setelah dilakukan pemblokiran anggaran, pagu efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp862.858.544.000. Perubahan pagu tersebut mencerminkan adanya penyesuaian kebutuhan pendanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan serta kebijakan pengendalian anggaran yang berlaku.

Secara keseluruhan, komposisi anggaran Tahun 2025 menunjukkan bahwa alokasi terbesar masih berada pada Belanja Barang sebagai penopang utama pelaksanaan program dan kegiatan kementerian, diikuti oleh Belanja Pegawai dan Belanja Modal. Struktur anggaran tersebut menggambarkan fokus Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam menjaga keseimbangan antara dukungan operasional, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan sarana pendukung pelayanan investasi. Rincian pagu anggaran berdasarkan jenis belanja disajikan pada tabel 3.24 sebagai berikut.

**Tabel 3.24**
per Jenis Belanja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM T.A. 2025

| Uraian Jenis Belanja | T.A. 2025 (Rp) | | |
|---|---|---|---|
| | Pagu Awal | Pagu Perubahan | Pagu Setelah Blokir |
| Belanja Pegawai | 252.291.969.000 | 302.166.254.000 | 302.166.254.000 |
| Belanja Barang | 393.355.135.000 | 435.325.216.000 | 418.572.638.000 |
| Belanja Modal | 36.223.181.000 | 142.119.652.000 | 142.119.652.000 |
| **Jumlah** | **681.880.285.000** | **879.611.122.000** | **862,858,544,000** |

Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan program, pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2025 dialokasikan ke dalam dua program utama, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penanaman Modal dan Hilirisasi. Pada pagu awal, total anggaran ditetapkan sebesar Rp681.880.285.000, kemudian mengalami penyesuaian menjadi Rp879.611.122.000. Setelah dilakukan pemblokiran anggaran, pagu efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp862.858.544.000.

Program Dukungan Manajemen memperoleh alokasi sebesar Rp409.241.612.000 pada pagu awal dan meningkat menjadi Rp481.027.838.000 pada pagu perubahan. Pagu program ini tidak mengalami pemblokiran sehingga tetap sebesar Rp481.027.838.000, yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi manajemen organisasi, termasuk perencanaan, keuangan, kepegawaian, pengawasan, serta layanan administrasi lainnya.

Sementara itu, Program Penanaman Modal dan Hilirisasi dialokasikan sebesar Rp272.638.673.000 pada pagu awal dan meningkat menjadi Rp398.583.284.000 pada pagu perubahan. Setelah dilakukan pemblokiran anggaran, pagu efektif program ini menjadi Rp381.830.706.000. Alokasi anggaran pada program ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program prioritas di bidang penanaman modal dan hilirisasi, termasuk perencanaan investasi, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pengembangan sistem pendukung investasi.

Secara keseluruhan, komposisi anggaran Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan pada Program Dukungan Manajemen sebagai penopang utama operasional organisasi, sementara Program Penanaman Modal dan Hilirisasi difokuskan pada pencapaian target kinerja utama kementerian di bidang investasi dan hilirisasi. Struktur ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara dukungan tata kelola organisasi dan pelaksanaan program substantif kementerian.

**Tabel 3.25**

Pagu Anggaran per Program Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2025

| Uraian Jenis Belanja | T.A. 2025 (Rp) | | |
|---|---|---|---|
| | Pagu Awal | Pagu Perubahan | Pagu Setelah Blokir |
| Dukungan Manajemen | 409.241.612.000 | 481.027.838.000 | 481,027,838,000 |
| Penanaman Modal dan Hilirisasi | 272.638.673.000 | 398.583.284.000 | 381,830,706,000 |
| **Jumlah** | **681.880.285.000** | **879.611.122.000** | **862,858,544,000** |

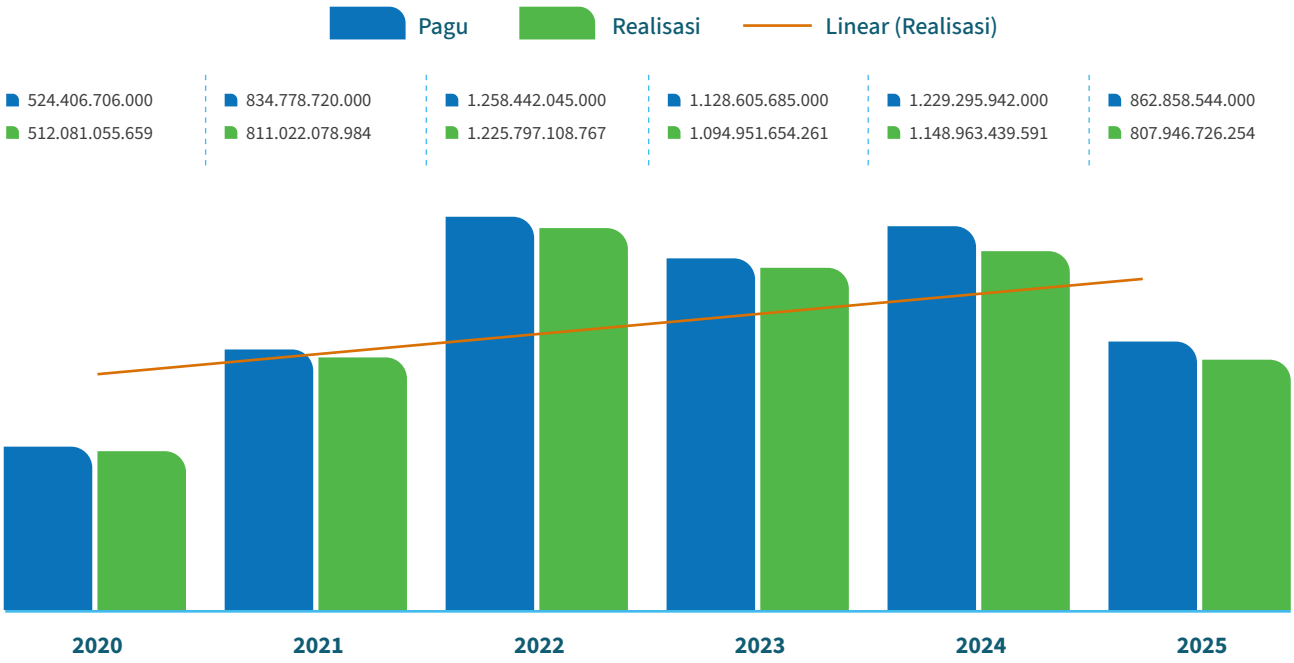


**Gambar 3.38**
Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020–2025

Berdasarkan gambar 3.38, terlihat bahwa alokasi pagu anggaran dan realisasi anggaran mengalami dinamika dari tahun ke tahun dengan kecenderungan peningkatan hingga tahun 2022, kemudian relatif stabil hingga tahun 2024, dan menurun pada tahun 2025. Pada tahun 2020, pagu anggaran tercatat sebesar Rp524.406.706.000 dengan realisasi Rp512.081.055.659 atau sekitar 97,65%. Pada tahun 2021 pagu meningkat menjadi Rp834.778.720.000 dengan realisasi Rp811.022.078.984 atau sekitar 97,15%. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan pagu sebesar Rp1.258.442.045.000 dan realisasi mencapai Rp1.225.797.108.767 atau sekitar 97,41%, yang merupakan salah satu realisasi tertinggi selama periode tersebut.

Pada tahun 2023 pagu anggaran sedikit menurun menjadi Rp1.128.605.685.000 dengan realisasi sebesar Rp1.094.951.654.261 atau sekitar 97,02%. Selanjutnya pada tahun 2024 pagu kembali meningkat menjadi Rp1.229.295.942.000 dengan realisasi sebesar Rp1.148.963.439.591 atau sekitar 93,47%. Pada tahun 2025 pagu anggaran menurun menjadi Rp862.858.544.000 dengan realisasi sebesar Rp807.946.726.254 atau sekitar 93,63%.

Secara umum, tingkat realisasi anggaran selama periode 2020–2025 menunjukkan kinerja penyerapan yang relatif baik dan konsisten, dengan rata-rata realisasi berada di atas 93% dari pagu yang ditetapkan. Tren garis realisasi juga menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam jangka menengah, meskipun terjadi penyesuaian pagu anggaran pada tahun-tahun terakhir. Hal ini mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola anggaran secara efektif dan menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Komposisi anggaran dan realisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2025 berdasarkan program dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.26**
Realisasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2025
Berdasarkan Program

| No | Program | Pagu Akhir (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukungan Manajemen | 481,027,838,000 | 469,135,289,601 | 97,53 |
| 2 | Penanaman Modal dan Hilirisasi | 381,830,706,000 | 338,811,436,653 | 88,73 |
| **Jumlah** | | **862,858,544,000** | **807,946,726,254** | **93,64** |

Berdasarkan Tabel 3.26, realisasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp807.946.726.254 atau sebesar 93,64% dari total pagu akhir sebesar Rp862.858.544.000. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran secara umum telah berjalan dengan baik dan mencerminkan tingkat penyerapan anggaran yang optimal dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan kementerian. Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran Tahun 2025 mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran yang cukup efektif dan efisien, dengan tingkat penyerapan yang tinggi serta tetap berorientasi pada pencapaian target kinerja organisasi. Sementara itu, realisasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2025 berdasarkan jenis belanja secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.27**
Realisasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2025
Berdasarkan Jenis Belanja

| No | Program | Pagu Akhir (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Pegawai | 302.166.254.000 | 296.057.257.935 | 97,98 |
| 2 | Belanja Barang | 418.572.638.000 | 400.672.701.167 | 95,72 |
| 3 | Belanja Modal | 142.119.652.000 | 111.216.767.152 | 78,26 |
| **Jumlah** | | **862,858,544,000** | **807,946,726,254** | **93,64** |

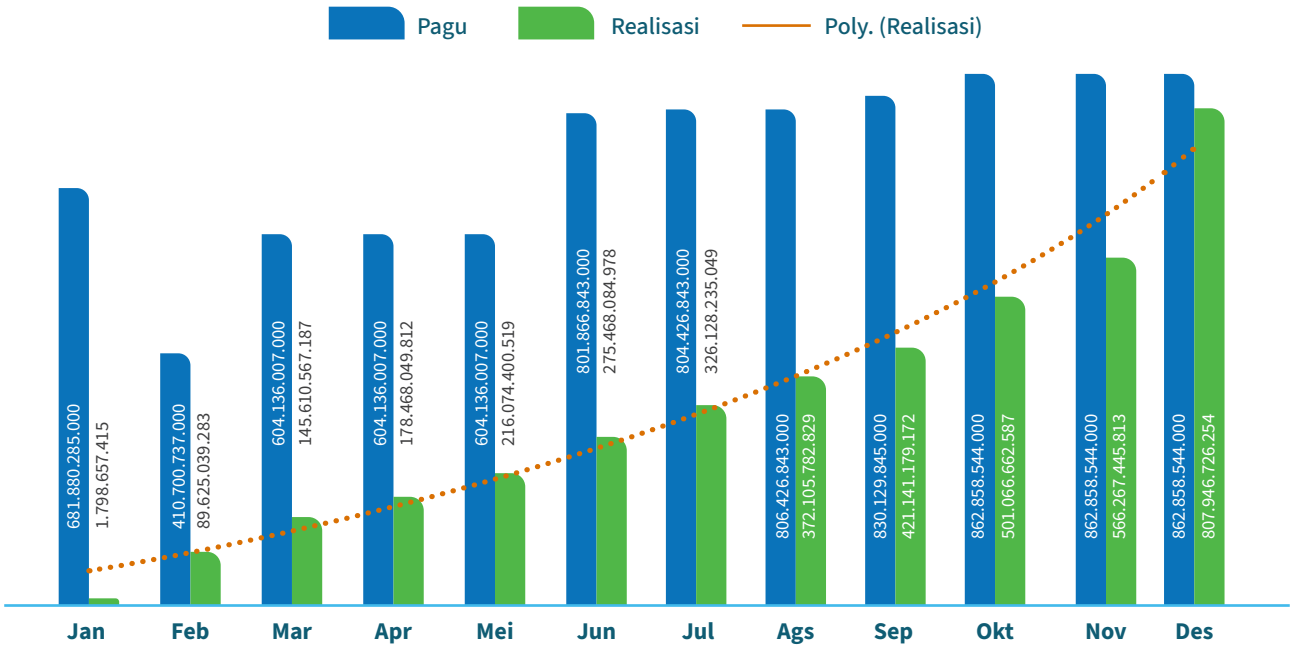


**Gambar 3.39**
Grafik Kinerja Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM per Bulan T.A 2025

Berdasarkan gambar 3.39, perkembangan pagu dan realisasi anggaran menunjukkan pola yang dinamis sepanjang tahun anggaran. Pagu anggaran mengalami penyesuaian secara bertahap hingga mencapai pagu akhir sebesar Rp862.858.544.000, sedangkan realisasi anggaran meningkat secara kumulatif hingga mencapai Rp807.946.726.254 atau sebesar 93,64% dari pagu akhir.

Pada awal tahun anggaran, pagu yang tersedia masih relatif lebih kecil dibandingkan pagu akhir, yaitu sekitar Rp528.651.000.000 pada bulan Januari dengan realisasi sebesar Rp11.798.657.415. Selanjutnya pada bulan Februari pagu meningkat menjadi sekitar Rp470.737.000.000 dengan realisasi mencapai Rp89.625.039.283. Pagu kemudian kembali meningkat menjadi sekitar Rp604.136.007.000 pada bulan Maret dan relatif stabil hingga bulan Mei, sementara realisasi anggaran meningkat bertahap hingga mencapai Rp216.074.400.519 pada bulan Mei.

Memasuki bulan Juni terjadi peningkatan pagu yang cukup signifikan menjadi sekitar Rp801.866.843.000, kemudian kembali mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp806.426.843.000 pada bulan Juli dan Agustus, serta meningkat menjadi Rp830.129.845.000 pada bulan September. Pada periode ini realisasi anggaran meningkat secara konsisten dari Rp275.468.084.978 pada bulan Juni menjadi Rp421.141.179.172 pada bulan September.

Pada triwulan IV, pagu anggaran mencapai nilai akhirnya sebesar Rp862.858.544.000 dan relatif stabil hingga akhir tahun. Realisasi anggaran pada periode ini mengalami percepatan, yaitu mencapai Rp501.066.662.587 pada bulan Oktober dan Rp566.267.445.813 pada bulan November, hingga akhirnya mencapai Rp807.946.726.254 pada bulan Desember.

Secara umum, perbandingan antara pagu dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa penyerapan anggaran berlangsung secara bertahap mengikuti peningkatan pagu yang tersedia. Kesenjangan antara pagu dan realisasi semakin mengecil menjelang akhir tahun anggaran, yang mencerminkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran. Tren tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan hingga mencapai tingkat penyerapan yang cukup tinggi pada akhir tahun anggaran.

**Tabel 3.28**
Pagu dan Realisasi Belanja Setiap Indikator Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
Tahun Anggaran 2025

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | | Anggaran (Rp) | | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pagu | Realisasi | |
| 1 | Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan | 1 | Nilai PMA dan PMDN (Rp Triliun) | 1.812.310.000 | 1.621.910.710 | 89,49 |
| 2 | Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang tinggi, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata | 2 | Nilai PMA/PMDN sektor sekunder (Rp Triliun) | 273.467.849.300 | 237.527.586.799 | 86,86 |
| | | 3 | Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (%) | 21.493.452.839 | 20.312.762.025 | 94,51 |
| | | 4 | Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan (Rp Triliun) | 1.000.000.000 | 859.259.110 | 85,93 |
| | | 5 | Nilai PMA berorientasi ekspor (Rp Triliun) | 2.698.188.000 | 2.412.095.135 | 89,40 |
| | | 6 | Nilai PMDN berorientasi ekspor (Rp Triliun) | 900.000.000 | 800.587.560 | 88,95 |
| | | 7 | Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (%) | 19.605.050.161 | 19.523.373.064 | 99,58 |
| | | 8 | Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi (Rp Triliun) | 51.442.071.988 | 47.514.391.075 | 92,36 |
| 3 | Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima | 9 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM (indeks) | 490.439.621.712 | 477.374.760.776 | 97,34 |
| **Jumlah** | | | | **862.858.544.000** | **807.946.726.254** | **93,64** |

Berdasarkan Tabel 3.28, alokasi dan realisasi anggaran telah mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian yang meliputi peningkatan penanaman modal pada sektor prioritas, peningkatan kualitas realisasi investasi yang inklusif dan merata, serta penguatan birokrasi yang bersih dan efektif. Secara keseluruhan, dari total pagu anggaran sebesar Rp862.858.544.000, telah terealisasi sebesar Rp807.946.726.254 atau 93,64%, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang baik dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Pada Sasaran 1 yaitu meningkatnya penanaman modal yang berfokus pada sektor prioritas termasuk hilirisasi, orientasi ekspor, dan berbasis kewilayahan, indikator Nilai PMA dan PMDN didukung oleh anggaran sebesar Rp1.812.310.000 dengan realisasi sebesar Rp1.621.910.710 atau 89,49%. Realisasi tersebut mencerminkan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan promosi investasi yang cukup optimal dalam mendukung peningkatan nilai investasi.

Pada Sasaran 2 yaitu terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang tinggi, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk indikator Nilai PMA/PMDN sektor sekunder, yaitu sebesar Rp273.467.849.300 dengan realisasi sebesar Rp237.527.586.799 atau 86,86%, yang merupakan porsi terbesar dalam mendukung pencapaian sasaran investasi produktif. Selain itu, indikator Persentase realisasi PMDN termasuk UMKM memiliki tingkat penyerapan sebesar 94,51%, sedangkan indikator Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan terealisasi sebesar 85,93%.

Indikator yang berkaitan dengan investasi berorientasi ekspor juga menunjukkan kinerja penyerapan yang baik, yaitu Nilai PMA berorientasi ekspor sebesar 89,40% dan Nilai PMDN berorientasi ekspor sebesar 88,95%. Sementara itu, indikator Kontribusi realisasi investasi luar Jawa memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu sebesar 99,58%, yang menunjukkan optimalnya dukungan kegiatan dalam mendorong pemerataan investasi antarwilayah. Indikator Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi juga menunjukkan capaian yang cukup baik dengan realisasi sebesar 92,36%.

Pada Sasaran 3 yaitu terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif serta pelayanan penanaman modal yang prima, indikator Indeks Reformasi Birokrasi didukung oleh anggaran sebesar Rp490.439.621.712 dengan realisasi sebesar Rp477.374.760.776 atau 97,34%, yang menunjukkan komitmen kuat dalam peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, realisasi belanja pada setiap indikator kinerja menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian. Tingkat penyerapan anggaran yang relatif tinggi pada sebagian besar indikator kinerja mencerminkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program serta kontribusinya terhadap pencapaian target kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2025.

# 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mencapai target yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan alokasi anggaran secara optimal. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara pengeluaran yang direncanakan dan pengeluaran yang terealisasi dalam mencapai target kinerja. Pengeluaran yang direncanakan merupakan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mencapai target yang telah ditentukan, sedangkan pengeluaran yang terealisasi merupakan jumlah anggaran yang benar-benar digunakan untuk mencapai target tersebut. Efisiensi anggaran tercapai ketika penggunaan sumber daya mampu menghasilkan keluaran kinerja secara optimal. Sebaliknya, efisiensi dinilai rendah apabila penggunaan sumber daya lebih besar dibandingkan capaian kinerja yang dihasilkan. Apabila capaian kinerja dapat diraih dengan penggunaan sumber daya yang lebih kecil dari yang direncanakan, maka tingkat efisiensi anggaran menjadi lebih tinggi.

Rincian perhitungan efisiensi sumber daya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025 disajikan pada tabel 3.29.

**Tabel 3.29**
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | | Anggaran (Rp) | | Capaian (%) | Capaian IK (%) | Efisiensi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pagu | Realisasi | | | |
| 1 | Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan | 1 | Nilai PMA dan PMDN (Rp Triliun) | 1.812.310.000 | 1.621.910.710 | 89,49 | 101,34 | 11,85 |
| 2 | Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang tinggi, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata | 2 | Nilai PMA/PMDN sektor sekunder (Rp Triliun) | 273.467.849.300 | 237.527.586.799 | 86,86 | 91,23 | 4,37 |
| | | 3 | Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (%) | 21.493.452.839 | 20.312.762.025 | 94,51 | 110,00 | 15,49 |
| | | 4 | Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan (Rp Triliun) | 1.000.000.000 | 859.259.110 | 85,93 | 110,00 | 24,07 |
| | | 5 | Nilai PMA berorientasi ekspor (Rp Triliun) | 2.698.188.000 | 2.412.095.135 | 89,40 | 79,14 | -10,26 |
| | | 6 | Nilai PMDN berorientasi ekspor (Rp Triliun) | 900.000.000 | 800.587.560 | 88,95 | 96,52 | 7,57 |
| | | 7 | Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (%) | 19.605.050.161 | 19.523.373.064 | 99,58 | 98,51 | -1,07 |
| | | 8 | Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi (Rp Triliun) | 51.442.071.988 | 47.514.391.075 | 92,36 | 110,00 | 17,64 |
| 3 | Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima | 9 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (indeks) | 490.439.621.712 | 477.374.760.776 | 97,34 | 102,53 | 5,19 |
| **Jumlah** | | | | **862.858.544.000** | **807.946.726.254** | **93,64** | **99,92** | **6,28** |

Hasil perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025 mampu mencapai efisiensi anggaran sebesar 6,28 persen. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

### 1 Penyelarasan Perencanaan Kinerja dan Anggaran Sejak Awal Tahun

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memastikan bahwa penyusunan rencana kerja, target kinerja, dan alokasi anggaran dilakukan secara selaras dan berbasis prioritas. Penyelarasan ini mencegah terjadinya kegiatan yang kurang relevan dengan sasaran strategis serta meminimalkan revisi anggaran yang tidak diperlukan.

### 2 Penguatan Fungsi Pengendalian dan Monitoring Berkala

Monitoring pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran secara berkala melalui mekanisme evaluasi triwulanan dan penggunaan sistem pemantauan kinerja. Dengan pengendalian yang konsisten, potensi deviasi antara rencana dan realisasi dapat segera diidentifikasi dan dilakukan penyesuaian secara cepat.

### 3 Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi (SIMANTAB dan Sistem Pendukung Lainnya)

Pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja dan anggaran membantu meningkatkan akurasi perencanaan, pelaporan, serta evaluasi capaian. Sistem yang terintegrasi memudahkan pengambilan keputusan berbasis data sehingga pelaksanaan program lebih efektif dan efisien.

### 4 Peningkatan Kualitas Koordinasi Internal dan Lintas Unit Kerja

Koordinasi yang intensif dengan unit kerja lingkup sekretariat kementerian memastikan keselarasan kebutuhan anggaran dengan target kinerja. Hal ini mencegah duplikasi kegiatan, meningkatkan sinergi pelaksanaan program, serta memastikan penggunaan sumber daya secara tepat sasaran.

### 5 Fokus pada *Output* dan *Outcome* Prioritas

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada program yang memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama. Dengan pendekatan berbasis hasil (*result oriented*), alokasi anggaran dapat diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja organisasi.

## 6 Penerapan Prinsip *Value for Money*

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerapkan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran. Belanja dilakukan secara selektif dan proporsional, sehingga capaian kinerja yang tinggi tetap dapat diraih tanpa harus meningkatkan penggunaan anggaran secara signifikan.

Perkembangan efisiensi penggunaan sumber daya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang relatif baik. Penyesuaian alokasi anggaran, *refocusing* program, serta penguatan prioritas belanja pemerintah turut memengaruhi pola pemanfaatan anggaran di berbagai instansi, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Meskipun demikian, tingkat efisiensi yang tetap terjaga, disertai dengan peningkatan nilai SAKIP serta capaian kinerja yang sebagian besar telah memenuhi target, menunjukkan bahwa penerapan SAKIP di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sumber daya. Kondisi ini menggambarkan kemampuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, bahkan di tengah keterbatasan fiskal dan penyesuaian kebijakan anggaran.

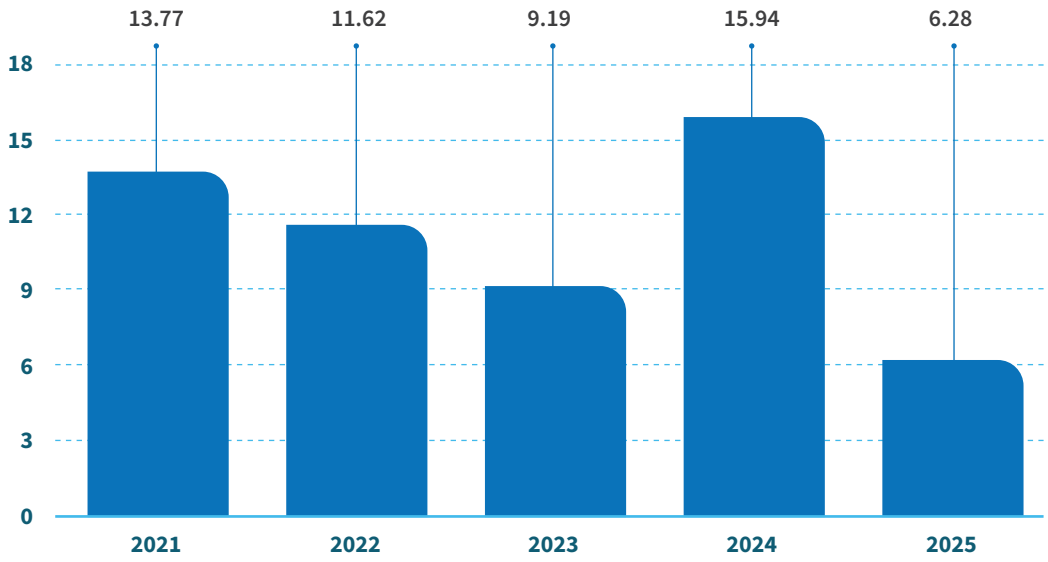


**Gambar 3.40**
Perkembangan Efisiensi Sumber Daya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
Tahun 2021-2025

BAB IV

# INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Tindak lanjut atas evaluasi kinerja dan berbagai terobosan maupun inovasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

# 4.1 Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus melakukan berbagai upaya perbaikan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja, baik pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, maupun evaluasi kinerja. Upaya perbaikan tersebut mengacu pada rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/646/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024.

Dalam surat tersebut disampaikan beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, antara lain:

1. Memperbaiki kualitas sasaran strategis unit kerja agar lebih spesifik menggambarkan kinerja/kondisi yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan peran yang dimiliki. Selain itu, gunakan indikator kinerja yang relevan, spesifik dan cukup untuk mengukur ketercapaian setiap sasaran/kinerja yang diampu;
2. Mereviu dan memperbaiki target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) baik level kementerian/lembaga hingga unit kerja terkecil untuk memastikan penetapan target setiap indikator lebih baik/lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya;
3. Memperbaiki kualitas pohon kinerja menyesuaikan dengan kaidah Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja lnstansi Pemerintah, terutama pada level kinerja taktikal sampai operasional. Setiap level/jenjang kinerja diharapkan memenuhi prinsip hubungan logis sebab-akibat yang tepat, serta lebih eksploratif dalam mengidentifikasi faktor-faktor/kinerja-kinerja yang efektif dapat mendorong tercapainya *ultimate outcome* secara lebih optimal. Dalam proses penyusunan pohon kinerja diharapkan tidak mengacu kepada struktur organisasi yang sudah ada;
4. Meningkatkan upaya monitoring penyampaian data capaian kinerja berkala pada aplikasi SIMANTAB untuk memastikan setiap unit kerja lebih bertanggung jawab dan disiplin menyampaikan data sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan;
5. Mendorong pihak yang bertanggungjawab melakukan verifikasi data untuk melaksanakan tugasnya secara lebih konsisten, sehingga data capaian kinerja berkala yang disampaikan pada aplikasi SIMANTAB dapat dipastikan valid;
6. Mendorong setiap unit kerja untuk melakukan *breakdown* target per triwulan khususnya terhadap indikator kinerja kegiatan dan level perencanaan kinerja di bawahnya. Kondisi ini akan membuat proses monitoring capaian kinerja berkala menjadi lebih jelas, dalam rangka memastikan/mengawal capaian target kinerja tahunan;
7. Memperbaiki beberapa rumus perhitungan pada IKU level unit kerja agar lebih relevan menggambarkan substansi indikator yang dikawal;
8. Memperbaiki kualitas laporan kinerja unit kerja yaitu dengan menyajikan identifikasi atau penjelasan faktor-faktor pendorong/penghambat tercapainya target setiap indikator kinerja. Faktor-faktor pendorong/penghambat yang telah teridentifikasi dapat menjadi dasar perbaikan perencanaan serta strategi dalam mencapai target kinerja kedepannya;
9. Menyajikan informasi langkah/strategi yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja secara optimal namun dengan penggunaan sumber daya secara efisien;
10. Mendorong proses evaluasi AKIP internal dilakukan lebih mendalam untuk memotret kualitas implementasi SAKIP unit kerja secara lebih riil khususnya pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja. Selain itu, LHE AKIP internal diharapkan tidak hanya menyajikan catatan yang sifatnya pemenuhan, melainkan juga terkait dengan sub komponen kualitas dan pemanfaatan;
11. Memperbaiki kualitas rekomendasi pada LHE AKIP internal agar memberikan solusi yang lebih relevan atas setiap catatan yang disampaikan dan juga memastikan tim evaluator internal agar lebih tepat/relevan menempatkan catatan hasil evaluasi pada komponen SAKIP yang sesuai;

12. Mendorong *monitoring* dan evaluasi dilakukan lebih konsisten untuk memastikan unit kerja menindaklanjuti. setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan pada LHE AKIP internal, sehingga kualitas implementasi SAKIP setiap unit kerja dapat meningkat secara optimal;
13. Menerapkan mekanisme pemberian *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal yang diperoleh untuk meningkatkan motivasi unit kerja terus meningkatkan kualitas implementasi SAKIP.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 melalui serangkaian langkah perbaikan yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akip 2024

| No. | Rekomendasi KemenPANRB | Rencana Aksi Tindak Lanjut | Penanggung Jawab | *Output* | *Progress* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perbaikan perencanaan kinerja berorientasi *outcome* dan IKU SMART | Melakukan reviu dan penajaman sasaran strategis dan IKU kementerian dan unit kerja agar berorientasi *outcome* dan memenuhi kriteria SMART | Sesmen melalui Biro Perencanaan Program dan Anggaran | Dokumen Renstra dan IKU yang diperbaiki | • Telah disusun Renstra Kementerian 2025-2029 yang disahkan melalui Permeninveshil No. 6 Tahun 2025<br>• IKU Kementerian dan IKK Unit Kerja telah menyesuaikan dengan Indikator RPJMN 2025-2029<br>• Telah disusun pula Renstra Eselon I yang disahkan melalui Surat Keputusan masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Madya<br>• Telah dilakukan Revisi PK 2025 |
| 2 | Reviu dan perbaikan target PK | Melakukan *benchmarking* realisasi tahun sebelumnya dan penyesuaian target PK kementerian hingga unit kerja | Sesmen dan seluruh Eselon I | PK yang direviu dan ditetapkan ulang | Telah dilakukan Revisi PK 2025 |
| 3 | Perbaikan kualitas pohon kinerja | Menyusun ulang pohon kinerja kementerian dan unit kerja sesuai PermenPANRB 89/2021 dengan logika sebab-akibat, tidak berbasis struktur | Biro Perencanaan Program dan Anggaran | Pohon kinerja kementerian dan unit | Belum disusun karena proses penyempurnaan pohon kinerja masih memerlukan harmonisasi dengan dokumen perencanaan strategis periode 2025–2029, termasuk penyelarasan dengan Rencana Strategis kementerian dan satuan kerja serta penyesuaian terhadap rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang baru. |

| No. | Rekomendasi KemenPANRB | Rencana Aksi Tindak Lanjut | Penanggung Jawab | *Output* | *Progress* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Selain itu, penyusunan pohon kinerja dilakukan secara bertahap melalui koordinasi lintas unit kerja untuk memastikan hubungan sebab–akibat antarlevel kinerja tersusun secara logis dan komprehensif sesuai ketentuan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 |
| 4 | Peningkatan *monitoring* data kinerja SIMANTAB | Penguatan SOP, penjadwalan monitoring berkala, dan reminder penyampaian data capaian kinerja | Biro Perencanaan Program dan Anggaran | Kepatuhan pengisian SIMANTAB | Sudah ada fitur penetapan batas waktu pengisian data capaian kinerja pada SIMANTAB |
| 5 | Konsistensi verifikasi data capaian | Penegasan peran verifikator data kinerja dan penguatan mekanisme validasi sebelum finalisasi | Inspektorat | Data kinerja tervalidasi | • Terdapat pembagian peran yang jelas, dimana verifikasi data capaian kinerja dilakukan oleh APIP<br>• Terdapat fitur verifikasi pada SIMANTAB baik untuk capaian indikator kinerja maupun capaian rencana aksi |
| 6 | *Breakdown* target per triwulan | Mewajibkan pemecahan target tahunan menjadi target triwulanan pada IK kegiatan dan sub-kegiatan | Seluruh unit kerja | Target triwulan terdokumentasi | Penetapan *breakdown* target per triwulan akan dilaksanaknpada saat penyusunan PK 2026, tahun 2025 belum dapat dilaksanakan mengingat sebagian besar indikator kinerja bersifat tahunan |
| 7 | Perbaikan rumus IKU unit kerja | Reviu dan penyederhanaan rumus IKU agar relevan dengan substansi indikator | Biro Perencanaan Program dan Anggaran | Rumus IKU yang disempurnakan | Telah memperbaiki beberapa rumus perhitungan yang tercantum dalam Manual Indikator Kinerja |
| 8 | Peningkatan kualitas laporan kinerja | Penyajian analisis faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja pada setiap indikator | Seluruh unit kerja | Laporan Kinerja Unit Kerja | Akan didorong untuk penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 |
| 9 | Penyajian strategi efisiensi pencapaian kinerja | Menambahkan narasi strategi, inovasi, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam laporan kinerja | Seluruh unit kerja | Laporan Kinerja Unit Kerja | Akan didorong untuk penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 |

| No. | Rekomendasi KemenPANRB | Rencana Aksi Tindak Lanjut | Penanggung Jawab | *Output* | *Progress* |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Pendalaman evaluasi AKIP internal | Penguatan metodologi evaluasi AKIP internal terutama pada perencanaan dan pengukuran kinerja | Inspektorat | LHE AKIP internal yang lebih substantif | Setiap tahun telah dilakukan evaluasi AKIP internal oleh APIP sesuai Keputusan Menteri Investasi/ Kepala BKPM Nomor 217 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal |
| 11 | Peningkatan kualitas rekomendasi LHE AKIP internal | Penyusunan rekomendasi yang solutif, spesifik, dan tepat pada komponen SAKIP | Inspektorat | Rekomendasi AKIP berkualitas | Koordinasi dengan Inspektorat akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas APIP melalui pelatihan dan pendampingan dalam evaluasi AKIP internal sesuai standar Kementerian PANRB |
| 12 | Monitoring tindak lanjut LHE AKIP internal | Monitoring berkala atas tindak lanjut rekomendasi AKIP internal oleh unit kerja | Inspektorat dan Sesmen | Persentase TL rekomendasi meningkat | Telah disusun konsep Pedoman SAKIP di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai upaya peningkatan implementasi AKIP yang berkualitas, agar semua pihak dapat memedomani dan melaksanakannya dengan penuh komitmen, namun masih dalam proses pembahasan dan persetujuan pimpinan |
| 13 | Penerapan *reward and punishment* | Penyusunan dan penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi berbasis hasil evaluasi AKIP internal | Sesmen | Kebijakan *reward dan punishment* | • Sedang dikembangkan fitur di dalam SIMANTAB yang terintegrasi dengan SIMPEG terkait *reward dan punishment*, dengan memperhitungkan variabel penilaian kinerja individu dari SKP, presensi, hukuman disiplin, dan ekspektasi pimpinan, dengan capaian kinerja organisasi<br>• Untuk mendukung mekanisme *reward dan punishment* sedang dikembangkan juga fitur Kalkulator Kinerja di dalam SIMANTAB yang mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) |

### 4.1.1 Penetapan Renstra Tahun 2025-2029

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menetapkan dokumen Renstra tahun 2025-2029 melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2025-2029. Rencana Strategis 2025-2029 merupakan pondasi penting dan momentum dalam mengatasi berbagai kelemahan AKIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama ini, diantaranya: (i) indikator kinerja memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound* (SMART); (ii) penyempurnaan penjenjangan kinerja; (iii) kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU); dan (iv) hubungan logis pencapaian kinerja secara berjenjang.

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025–2029 merupakan pedoman perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, serta kerangka pendanaan kementerian selama periode 2025–2029. Dokumen ini disusun sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal serta sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan.

Visi yang diusung adalah terwujudnya penanaman modal yang tinggi dan berkualitas untuk menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada peningkatan investasi yang tidak hanya besar secara nominal tetapi juga bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, serta merata secara kewilayahan. Investasi diposisikan sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan.

Tujuan utama Renstra adalah meningkatkan penanaman modal yang berfokus pada sektor prioritas, hilirisasi, orientasi ekspor, dan pengembangan wilayah. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator utama nilai Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang didukung oleh sasaran strategis berupa peningkatan investasi bernilai tambah serta terwujudnya birokrasi yang bersih dan efektif dengan pelayanan penanaman modal yang prima.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan tiga arah kebijakan utama yaitu percepatan peningkatan investasi pada sektor prioritas dan hilirisasi strategis, peningkatan kualitas iklim investasi dan kerja sama penanaman modal, serta penguatan tata kelola investasi melalui reformasi birokrasi. Pelaksanaan kebijakan ini memerlukan sinergi lintas sektor guna memastikan peningkatan investasi yang berkelanjutan dan berkualitas.

Selain itu, Renstra juga memuat target kinerja investasi nasional hingga tahun 2029, pengembangan kawasan pusat pertumbuhan, peningkatan investasi berorientasi ekspor, pemerataan investasi luar Jawa, serta penguatan reformasi birokrasi. Kerangka pendanaan disusun secara bertahap dengan kecenderungan peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan kementerian.

Secara keseluruhan, Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025–2029 menjadi dokumen strategis yang mengarahkan kebijakan dan program investasi nasional agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, transformasi struktural melalui hilirisasi, serta peningkatan daya saing dan pemerataan pembangunan.

Selain penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah tingkat kementerian, seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga telah menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja masing-masing. Renstra satuan kerja tersebut disusun sebagai penjabaran operasional dari Renstra Kementerian sekaligus menjadi pedoman dalam perencanaan program dan kegiatan pada tingkat satuan kerja dan unit kerja agar selaras dengan sasaran strategis kementerian. Renstra satuan kerja yang telah ditetapkan meliputi:

1. Keputusan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2025–2029;
2. Keputusan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2025–2029;
3. Keputusan Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Tahun 2025–2029;
4. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2025–2029;
5. Keputusan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Tahun 2025–2029;
6. Keputusan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2025–2029;
7. Keputusan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2025–2029;
8. Keputusan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2025–2029; dan
9. Keputusan Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2025–2029.

Dengan telah ditetapkannya Renstra pada tingkat kementerian dan seluruh satuan kerja tersebut, diharapkan tercipta keterpaduan perencanaan yang kuat antara sasaran strategis kementerian dengan program dan kegiatan unit kerja. Keterpaduan ini menjadi landasan penting dalam memastikan implementasi strategi organisasi berjalan secara konsisten, terukur, dan berorientasi pada hasil, sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama periode 2025–2029.

### 4.1.2 Peningkatan implementasi tata kelola kinerja melalui Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Berdampak (SIMANTAB)

SIMANTAB merupakan sebuah instrumen manajemen kinerja yang memuat rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mendukung proses penetapan dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja unit kerja. Implementasi SIMANTAB berperan penting dalam mendukung proses manajemen akuntabilitas kinerja secara terintegrasi sehingga tujuan strategis organisasi dapat dicapai secara efektif dan terukur.

Pada tahun 2025 telah dilakukan pengembangan dan penyempurnaan beberapa menu dan fitur pada SIMANTAB guna meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja dan kemudahan penggunaan sistem. Pengembangan tersebut antara lain meliputi:

**a Penyesuaian Tampilan Menu Publik dan *Landing Page* Awal (redesain)**

Penyesuaian desain Menu Publik dan *Landing Page* Awal pada aplikasi SIMANTAB (Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Berdampak) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, daya tarik visual, dan menyesuaikan kebutuhan unit pemilik proses bisnis. Dengan harapan aplikasi dapat digunakan secara lebih optimal, meningkatkan kepuasan pengguna, serta mendukung pencapaian tujuan pemilik proses bisnis.

*Landing page* merupakan halaman utama yang berfungsi sebagai pintu masuk pengguna dalam mengenal layanan maupun produk yang ditawarkan. Desain lama yang sudah tidak relevan dapat menimbulkan kesan kurang modern dan menyulitkan navigasi. Oleh karena itu, dilakukan proses penyesuaian tampilan *landing page* dan menu publik dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan menyesuaikan konten dengan strategi proses bisnis yang sedang dijalankan. Dalam hal ini mencakup penyesuaian tampilan desain: Desain *landing page* awal; Desain Menu Publik submenu publik Perencanaan Kinerja; Desain Menu Publik submenu publik Pengukuran Kinerja; Desain Menu Publik submenu publik Pelaporan Kinerja; dan Desain Menu Publik submenu publik Evaluasi Kinerja.

**1** **Penyesuaian tampilan *Landing Page* Awal dengan menambahkan grafik nilai AKIP**

**Gambar 4.1**
Desain *Landing Page*

## 2 Penyesuaian tampilan Menu Publik submenu publik Perencanaan Kinerja

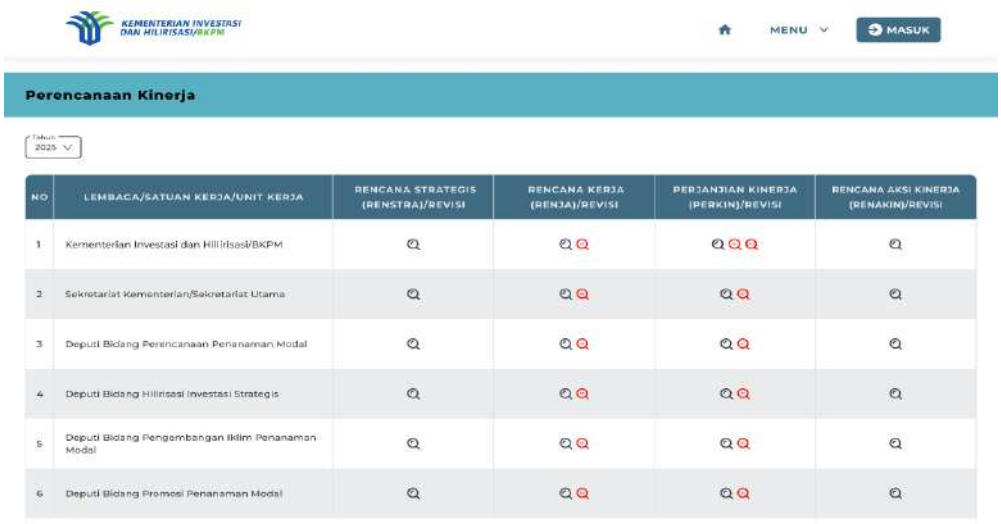


| NO | LEMBAGA/SATUAN KERJA/UNIT KERJA | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)/REVISI | RENCANA KERJA (RENJA)/REVISI | PERJANJIAN KINERJA (PERKIN)/REVISI | RENCANA AKSI KINERJA (RENAKIN)/REVISI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | | | | |
| 2 | Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | | | | |
| 3 | Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal | | | | |
| 4 | Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis | | | | |
| 5 | Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal | | | | |
| 6 | Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal | | | | |

**Gambar 4.2**
Desain submenu publik Perencanaan Kinerja

### a. Rencana Strategis

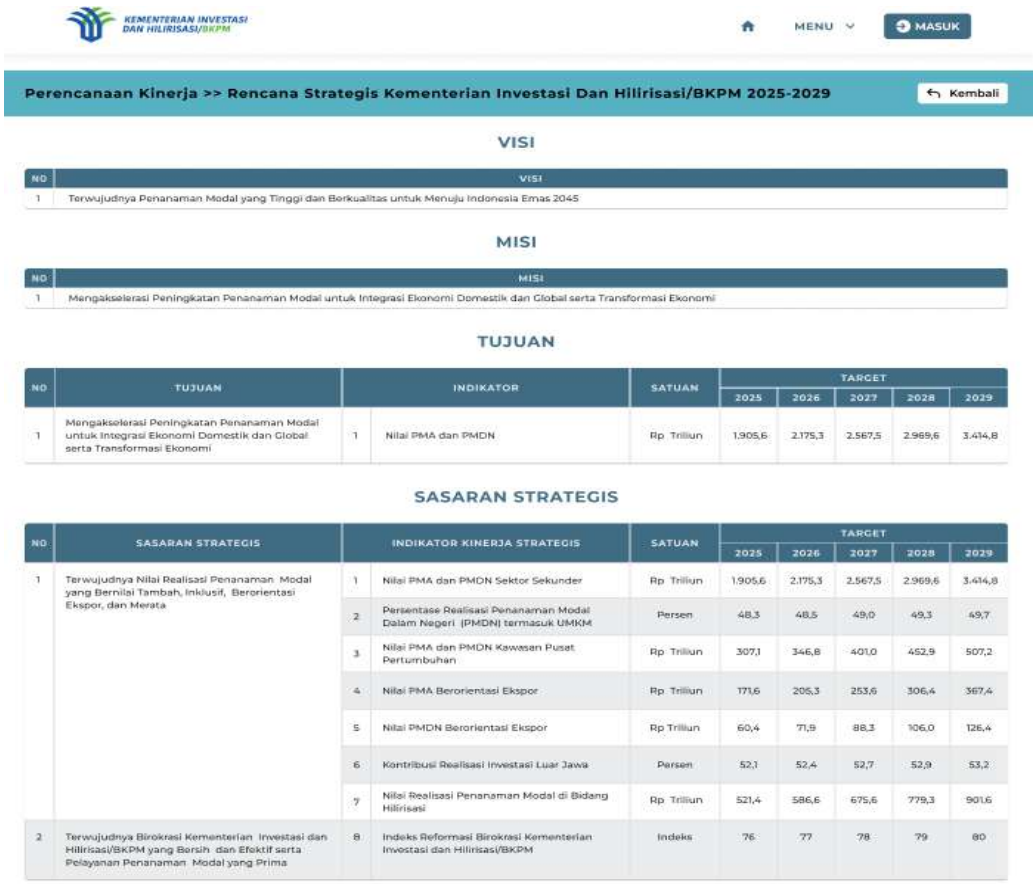


VISI

| NO | VISI |
|---|---|
| 1 | Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045 |

MISI

| NO | MISI |
|---|---|
| 1 | Mengakselerasi Peningkatan Penanaman Modal untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global serta Transformasi Ekonomi |

TUJUAN

| NO | TUJUAN | | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Mengakselerasi Peningkatan Penanaman Modal untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global serta Transformasi Ekonomi | 1 | Nilai PMA dan PMDN | Rp Triliun | 1.905,6 | 2.175,3 | 2.567,5 | 2.969,6 | 3.414,8 |

SASARAN STRATEGIS

| NO | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA STRATEGIS | SATUAN | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata | 1 | Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder | Rp Triliun | 1.905,6 | 2.175,3 | 2.567,5 | 2.969,6 | 3.414,8 |
| | | 2 | Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM | Persen | 48,3 | 48,5 | 49,0 | 49,3 | 49,7 |
| | | 3 | Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan | Rp Triliun | 307,1 | 346,8 | 401,0 | 452,9 | 507,2 |
| | | 4 | Nilai PMA Berorientasi Ekspor | Rp Triliun | 171,6 | 205,3 | 253,6 | 306,4 | 367,4 |
| | | 5 | Nilai PMDN Berorientasi Ekspor | Rp Triliun | 60,4 | 71,9 | 88,3 | 106,0 | 126,4 |
| | | 6 | Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa | Persen | 52,1 | 52,4 | 52,7 | 52,9 | 53,2 |
| | | 7 | Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi | Rp Triliun | 521,4 | 586,6 | 675,6 | 779,3 | 901,6 |
| 2 | Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima | 8 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | Indeks | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |

**Gambar 4.3**
Desain submenu publik Perencanaan Kinerja (Rencana Strategis)

## b. Perjanjian Kinerja

| NO | SASARAN STRATEGIS | NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang tinggi, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata | 1 | Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (%) | Nilai | 52.1 |
| | | 2 | Nilai PMA berorientasi ekspor (Rp Triliun) | Rp Triliun | 171.6 |
| | | 3 | Nilai PMA dan PMDN (Rp Triliun) | Rp Triliun | 1905.6 |
| | | 4 | Nilai PMDN berorientasi ekspor (Rp Triliun) | Rp Triliun | 60.4 |
| | | 5 | Nilai PMA/PMDN sektor sekunder (Rp Triliun) | Rp Triliun | 855.95 |
| | | 6 | Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (%) | % | 48.3 |
| | | 7 | Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan (Rp Triliun) | Rp Triliun | 307.1 |
| 2 | Terwujudnya realisasi penanaman modal bidang hilirisasi untuk mendukung nilai tambah sumber daya alam | 8 | Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi (Rp Triliun) | Rp Triliun | 521.4 |

**Gambar 4.4**
Desain submenu publik Perencanaan Kinerja (Perjanjian Kinerja)

## 3 Penyesuaian tampilan Menu Publik submenu publik Pengukuran Kinerja

| LEMBAGA/SATUAN KERJA/UNIT KERJA | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TAHUNAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM | | | | | NKO : 66 |
| Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | | | | | NKO : 96.75 |
| Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal | | | | | NKO : 104.1 |
| Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis | | | | | NKO : 98.67 |
| Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal | | | | | NKO : 96.46 |

**Gambar 4.5**
Desain submenu publik Pengukuran Kinerja

## 4 Penyesuaian tampilan Menu Publik submenu publik Pelaporan Kinerja

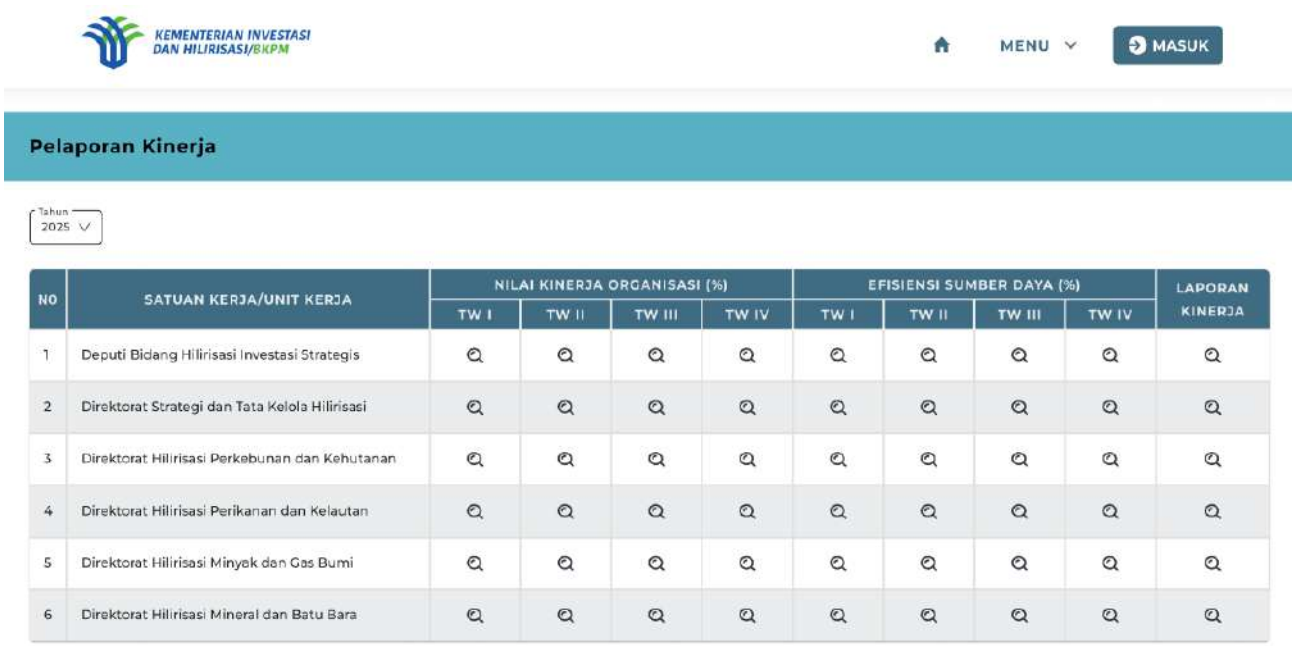


| NO | SATUAN KERJA/UNIT KERJA | NILAI KINERJA ORGANISASI (%) | | | | EFISIENSI SUMBER DAYA (%) | | | | LAPORAN KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TW I | TW II | TW III | TW IV | TW I | TW II | TW III | TW IV | |
| 1 | Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis | | | | | | | | | |
| 2 | Direktorat Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi | | | | | | | | | |
| 3 | Direktorat Hilirisasi Perkebunan dan Kehutanan | | | | | | | | | |
| 4 | Direktorat Hilirisasi Perikanan dan Kelautan | | | | | | | | | |
| 5 | Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi | | | | | | | | | |
| 6 | Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batu Bara | | | | | | | | | |

**Gambar 4.6**
Desain submenu publik Pelaporan Kinerja

## 5 Penyesuaian tampilan Menu Publik submenu publik Evaluasi Kinerja

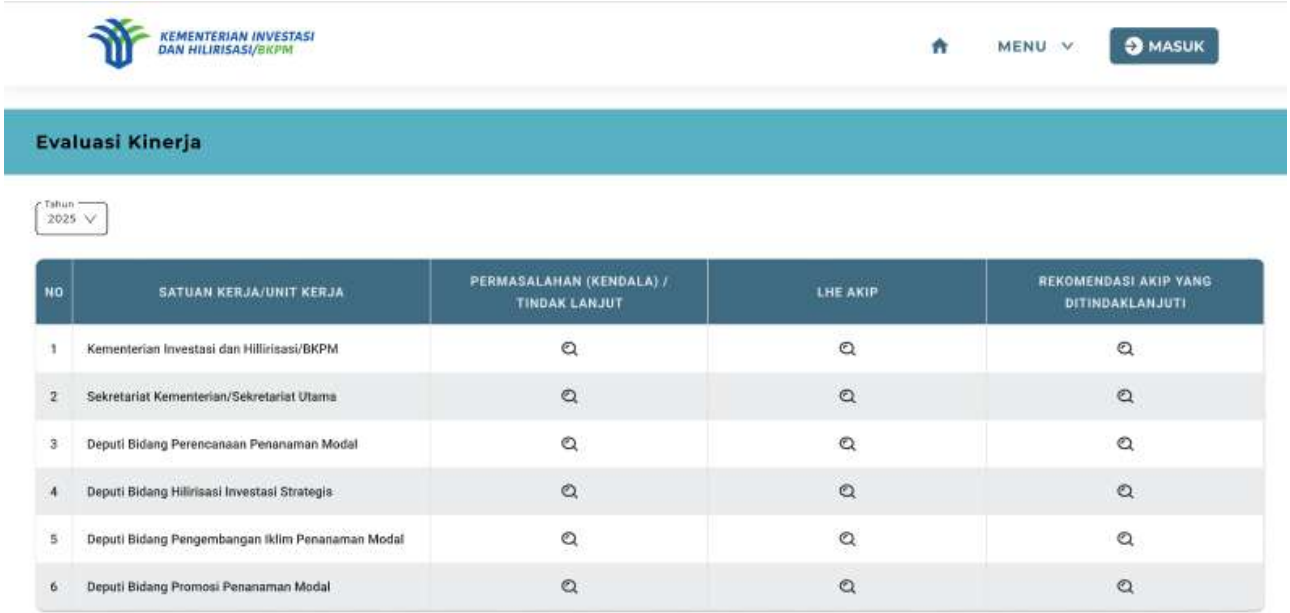


| NO | SATUAN KERJA/UNIT KERJA | PERMASALAHAN (KENDALA) / TINDAK LANJUT | LHE AKIP | REKOMENDASI AKIP YANG DITINDAKLANJUTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kementerian Investasi dan Hillirisasi/BKPM | | | |
| 2 | Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | | | |
| 3 | Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal | | | |
| 4 | Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis | | | |
| 5 | Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal | | | |
| 6 | Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal | | | |

**Gambar 4.7**
Desain submenu publik Evaluasi Kinerja

## b Penyesuaian Modul Informasi Seputar Kinerja Organisasi (INSPIRASI)

Penyesuaian tampilan Modul INSPIRASI dan Penambahan Menu Admin pada Aplikasi Layanan Akuntabilitas Kinerja Lembaga (SIMANTAB) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dalam pencarian informasi seputar kinerja organisasi dengan visual yang lebih modern dan responsif. Modul INSPIRASI berfungsi sebagai sarana penyampaian data dan informasi terkait capaian kinerja, indikator, serta aktivitas organisasi kepada publik maupun internal.

INSPIRASI merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan informasi seputar kinerja organisasi. Pada desain lama tampilan terlihat terlalu sederhana dan informasi yang ditampilkan kurang lengkap. Penyesuaian tampilan INSPIRASI disertai juga penambahan menu Admin Inspirasi bertujuan agar lebih mudah dan fleksibel dalam pengaturan tampilan INSPIRASI. Pada Menu Admin Inspirasi terdapat fitur untuk pengaturan tampilan *layout* beruba warna font, warna tema serta banner. Selain itu, terdapat juga fitur untuk pengelolaan informasi pada slideshow, pengelolaan dokumen dan pengelolaan tautan terkait. Pengaturan tersebut nantinya dapat dilihat pada tampilan INSPIRASI per masing-masing tipe (SAKIP, RENJA, RKA, DIPA, RENAKSI, dan MONEV).

**Gambar 4.8**
Tampilan *dropdown* menu INSPIRASI

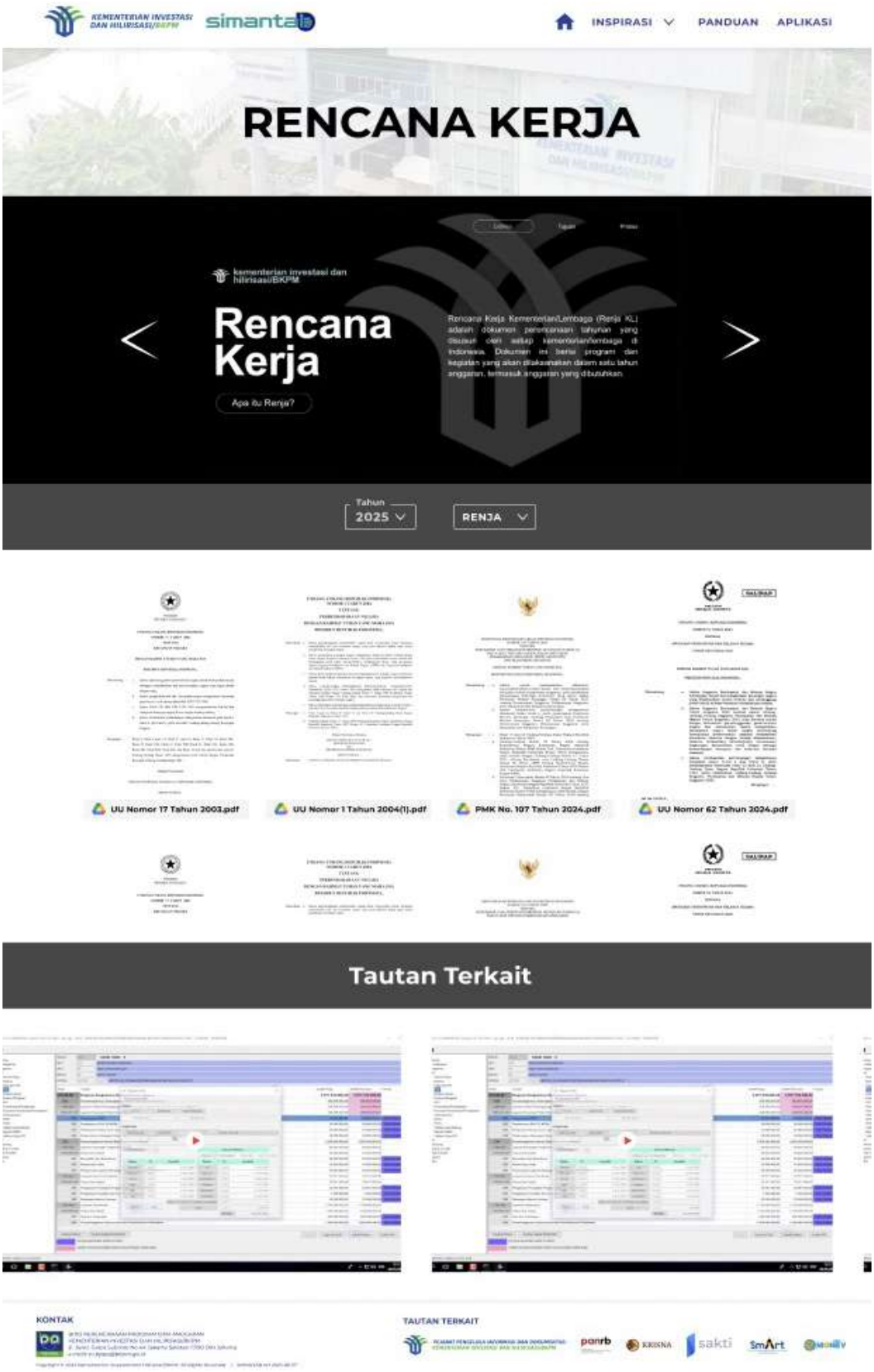


**Gambar 4.9**
Contoh Desain INSPIRASI pada Rencana Kerja

## c Penyesuaian Modul Pengukuran Kinerja, *Dashboard* Pegawai dan Verifikator serta Perbaikan Notifikasi terhadap Menu Capaian dan Verifikasi Rencana Aksi dan Indikator Kinerja

Penyesuaian menu Capaian dan Verifikasi Rencana Aksi serta Indikator Kinerja pada Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Berdampak (SIMANTAB) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan proses bisnis pengguna mengacu pada peraturan terbaru, serta meningkatkan efektivitas dalam proses penginputan data. Selain itu, penyesuaian *dashboard* pegawai dan verifikator serta perbaikan fitur notifikasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas tampilan antarmuka dan optimalisasi fungsi sistem.

Salah satu kebutuhan yang diidentifikasi adalah penyesuaian menu Capaian dan Verifikasi Rencana Aksi serta Indikator Kinerja. Saat ini, metode penginputan data dimulai dari daftar Kegiatan/KRO/RO/Komponen yang kemudian dipetakan ke Indikator Kinerja yang mendukungnya. Namun, seiring dengan perubahan konsep penginputan, diperlukan penyesuaian pada menu-menu tersebut. Pada metode penginputan yang baru, proses dimulai dari daftar Indikator Kinerja yang selanjutnya dipetakan ke KRO/RO yang menjadi pendukungnya.

### 1 Penyesuaian Capaian Rencana Aksi

Penyesuaian tampilan Capaian Rencana Aksi telah disesuaikan dengan permintaan unit pemilik proses bisnis yaitu penambahan *pop up* notifikasi untuk melengkapi data pagu untuk tahun 2024 ke bawah dan penyesuaian metode penginputan capaian dari daftar Indikator Kinerja ke KRO / RO dan Target RO untuk tahun 2025 ke atas.

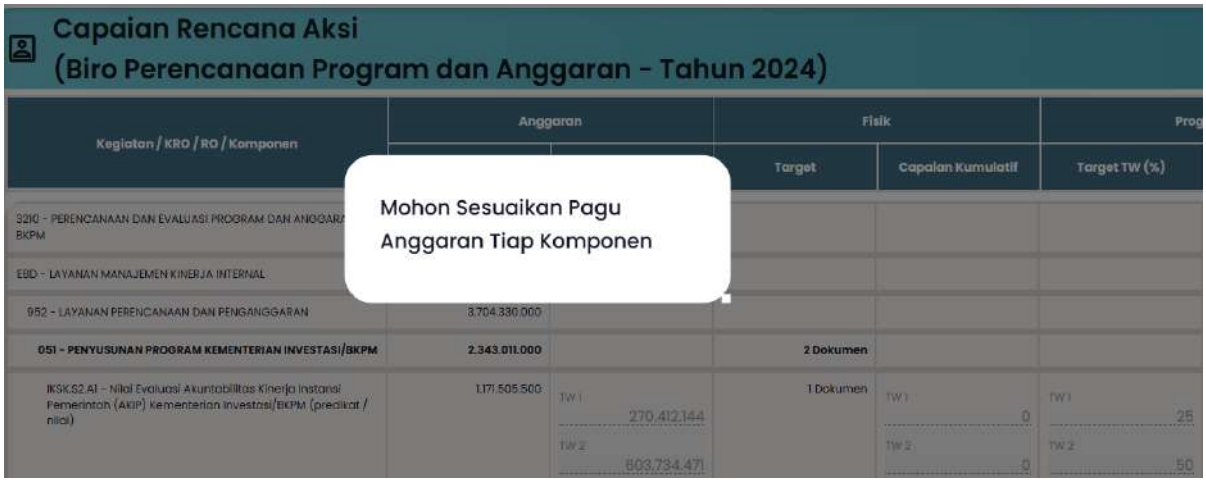

**Gambar 4.10**
Desain Penyesuaian Capaian Rencana Aksi

## 2 Penyesuaian Verifikasi Rencana Aksi

Penyesuaian tampilan Verifikasi Rencana Aksi telah disesuaikan dengan permintaan unit pemilik proses yaitu dengan metode penginputan verifikasi dari daftar Indikator Kinerja ke KRO / RO dan Target RO per bulan.

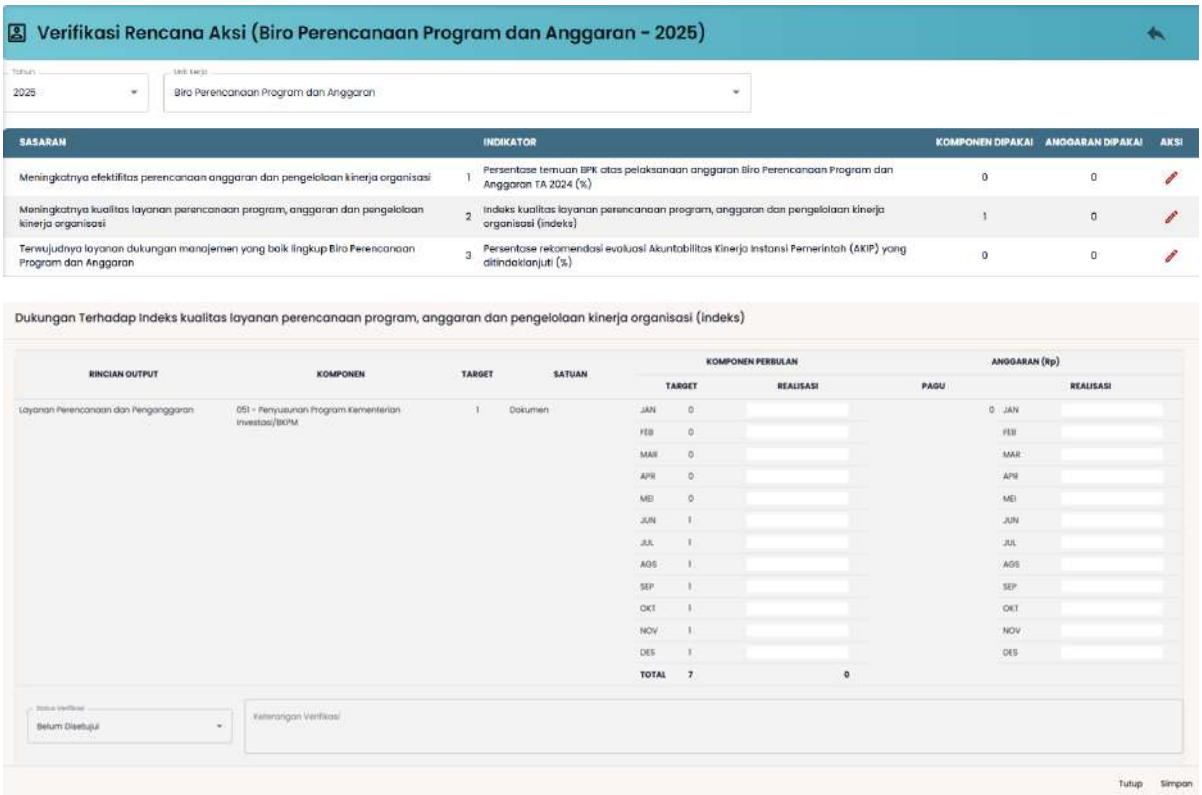


**Gambar 4.11**
Desain Penyesuaian Verifikasi Rencana Aksi

## 3 Optimalisasi Capaian Indikator Kinerja

Penambahan *warning* pada kolom "Keterangan, Permasalahan, dan Tindak Lanjut" agar wajib diisi minimal 5 kata. Penambahan warning pada kolom-kolom tersebut dimaksudkan agar data yang dikumpulkan menjadi lebih lengkap dan infomatif.

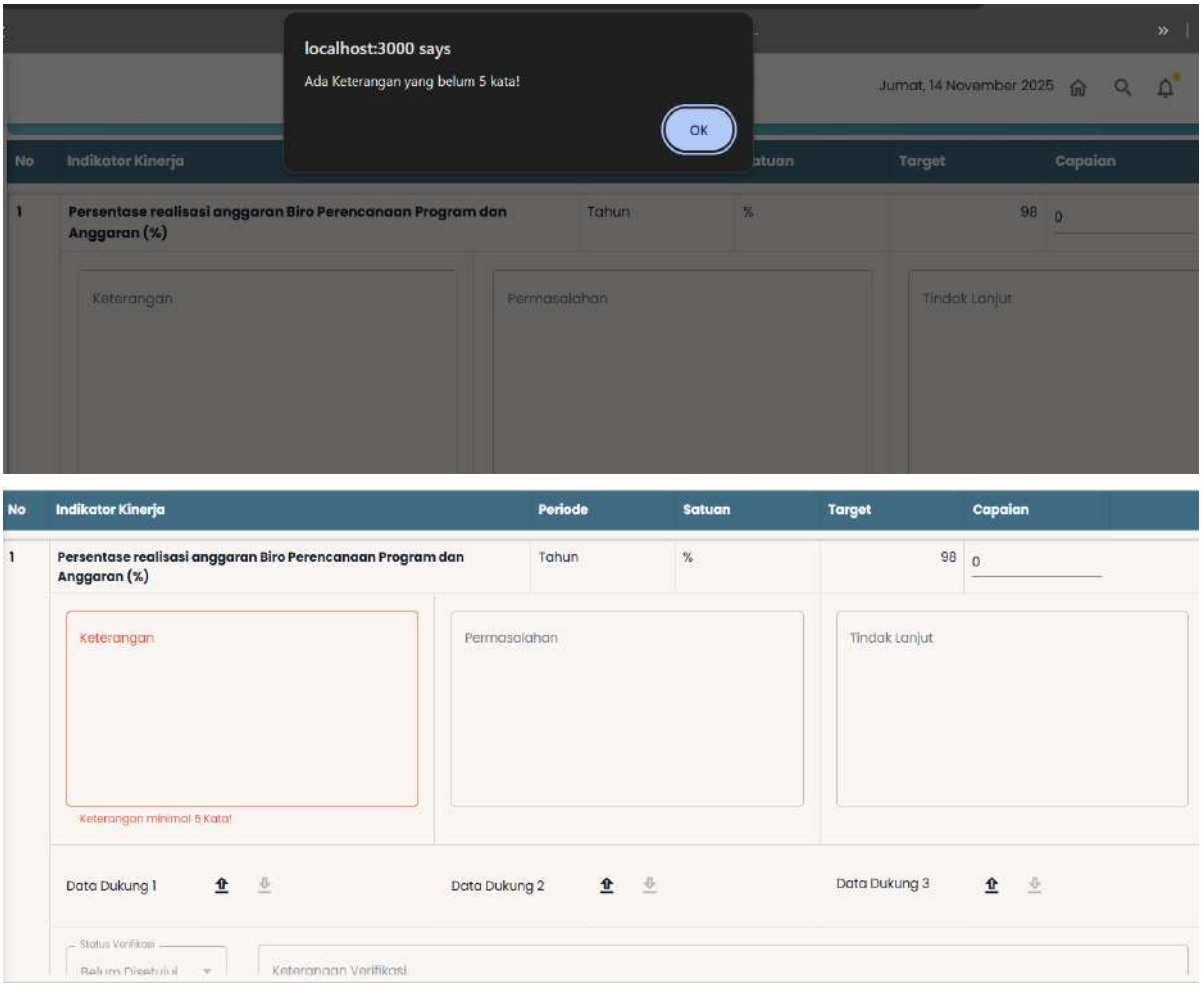


**Gambar 4.12**
Desain *Warning* Capaian Indikator Kinerja

## 4 Optimalisasi Verifikasi Indikator Kinerja

Penambahan *warning* pada kolom "Keterangan, Permasalahan, dan Tindak Lanjut" agar wajib diisi minimal 5 kata. Penambahan *warning* pada kolom-kolom tersebut dimaksudkan agar data yang dikumpulkan menjadi lebih lengkap dan infomatif. Selain itu, adanya fitur 'Pilih Semua' saat melakukan verifikasi data juga ditambahkan pada Menu Verifikasi Indikator Kinerja.

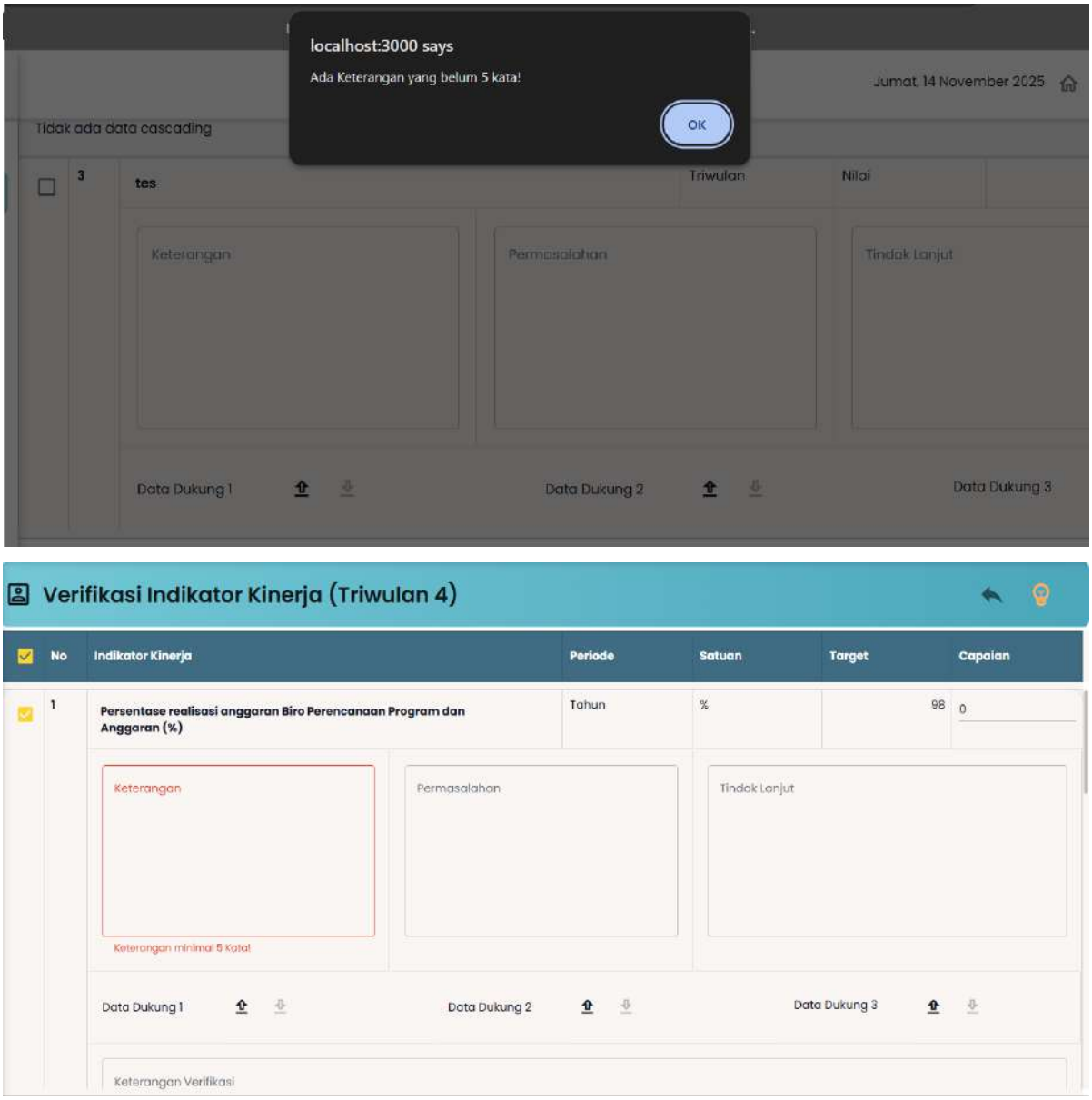


**Gambar 4.13**
Desain Optimalisasi Verifikasi Indikator Kinerja

## d Penyesuaian Modul Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Pohon Kinerja dan Pemeringkatan Kinerja

Dalam Modul Pelaporan Kinerja, diperlukan pengembangan fitur untuk menyesuaikan format NKO menjadi PKO mulai sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 22 tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi serta mengunduh rekap dokumen secara langsung sehingga proses penyusunan laporan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Optimalisasi pada menu Pemeringkatan Kinerja serta penambahan menu Rekomendasi dan LHE AKIP diperlukan untuk menyediakan data evaluasi kinerja yang lebih komprehensif serta mendukung kebutuhan analisis yang lebih mendalam.

Pemindahan menu Pohon Kinerja menjadi bagian dari Modul Pelaporan Kinerja dilakukan untuk menyesuaikan fungsi menu dengan alur penyusunan dan pelaporan kinerja. Selain itu, penambahan fitur autentikasi (*login*) pada saat pengguna mengakses Laporan Kinerja melalui menu Pelaporan Kinerja (publik) bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang ditampilkan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing pengguna, sehingga keamanan dan akurasi data tetap terjaga.

### 1 Penyesuaian Pelaporan Kinerja

Penambahan fitur unduh rekapan dokumen Manual IKU dan Perjanjian Kinerja.

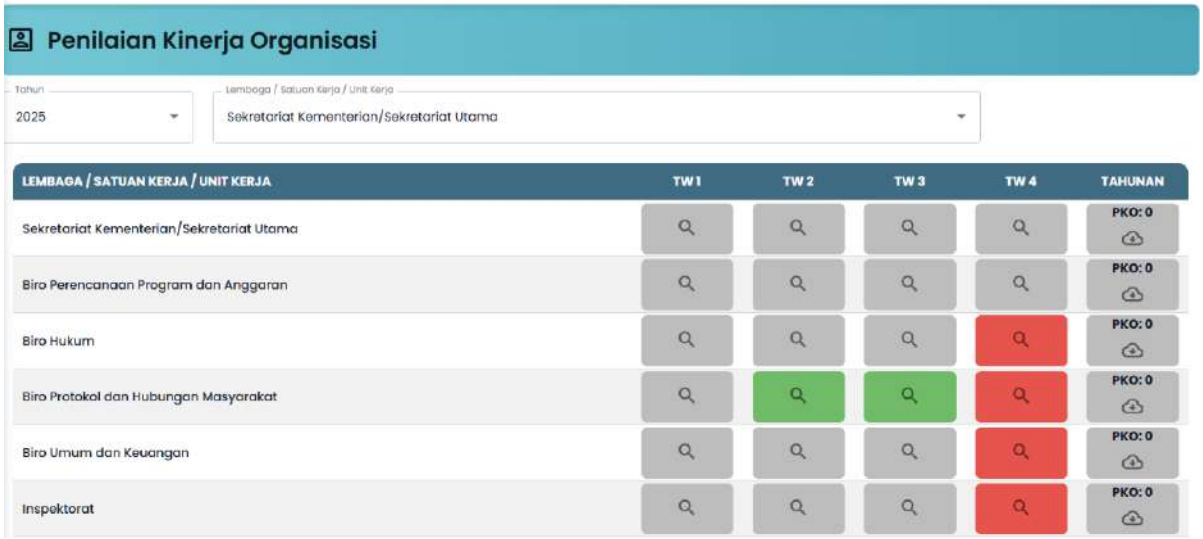


**Gambar 4.14**
Desain Menu Penilaian Kinerja Organisasi

**MATRIKS PENILAIAN KINERJA ORGANISASI (PKO)**
**TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Unit Kerja : K/L: Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM
Nilai AKIP Kementerian (2025): 76,78
Predikat AKIP Kementerian (2025): BB

| No | Sasaran | | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Normalisasi Capaian PK | Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat | Nilai Akhir Capaian PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang tinggi, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata | 1 | Nilai PMA dan PMDN (Rp Triliun) | 1.905,60 | 400 | 20,99% | 20,99% | 10% | 18,89% |
| | | 2 | Nilai PMA/PMDN sektor sekunder (Rp Triliun) | 855,95 | 566 | 66,13% | 66,13% | 10% | 59,52% |
| | | 3 | Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (%) | 48,30 | 11,50 | 23,81% | 23,81% | 10% | 21,43% |
| | | 4 | Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan (Rp Triliun) | 307,10 | 100 | 120% | 110% | 10% | 99% |
| | | 5 | Nilai PMA berorientasi ekspor (Rp Triliun) | 171,60 | 0 | 120% | 110% | 10% | 99% |
| | | 6 | Nilai PMDN berorientasi ekspor (Rp Triliun) | 60,40 | 0 | 0% | 0% | 10% | 0% |
| | | 7 | Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (%) | 52,10 | 0 | 0% | 0% | 10% | 0% |
| 2 | Terwujudnya realisasi penanaman modal bidang hilirisasi untuk mendukung nilai tambah sumber daya alam | 8 | Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi (Rp Triliun) | 521,40 | 0 | 0% | 0% | 10% | 0% |
| 3 | Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman | 24 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (indeks) | 80 | 0 | 0% | 0% | 10% | 0% |
| | | | | | | | Total Capaian PK | | 0% |
| | | | | | | | Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata | | 0% |
| | | | | | | | Predikat PKO | | Sangat Kurang |

| NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) | PREDIKAT PKO |
|---|---|
| X > 100% | ISTIMEWA |
| 80% < X ≤ 100% | BAIK |
| 60% < X ≤ 80% | BUTUH PERBAIKAN |
| 20% < X ≤ 60% | KURANG |
| 0% < X ≤ 20% | SANGAT KURANG |

**Gambar 4.15**
Desain Matriks Penilaian Kinerja Organisasi

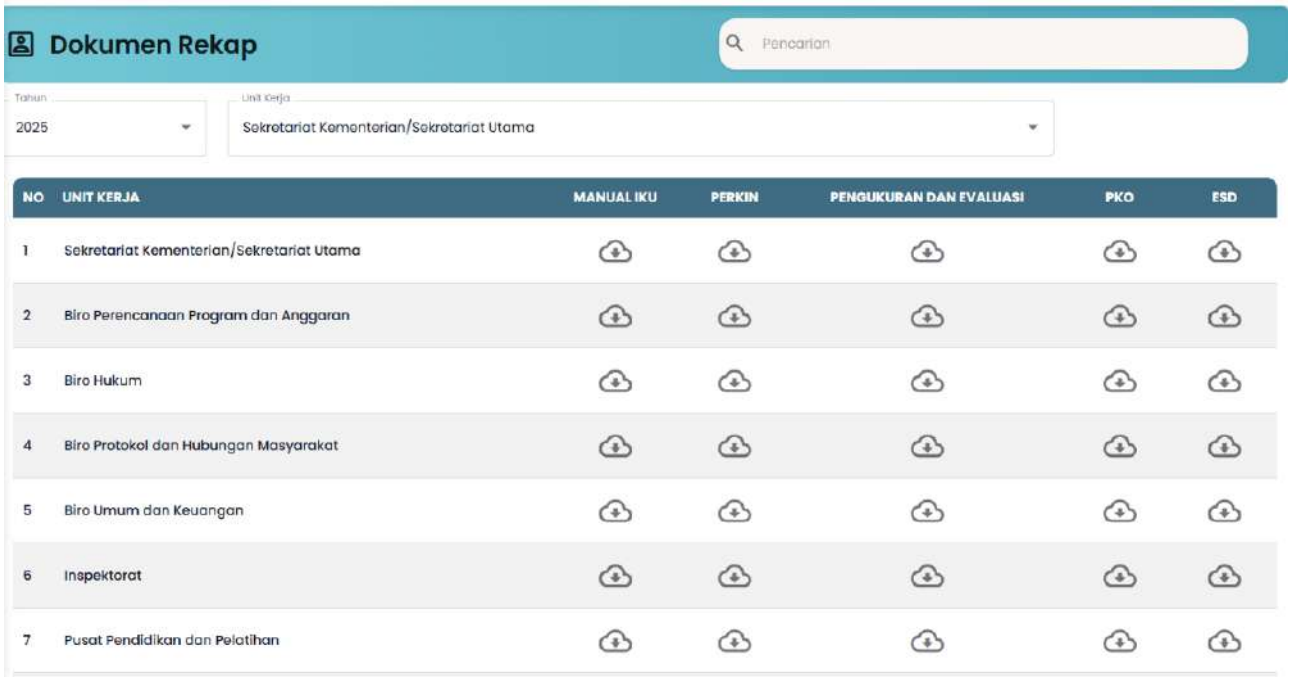


**Gambar 4.16**
Desain Fitur Menu Rekap Dokumen

## 2 Penyesuaian Pohon Kinerja

Pemindahan menu Pohon Kinerja menjadi bagian dari modul Pelaporan Kinerja.

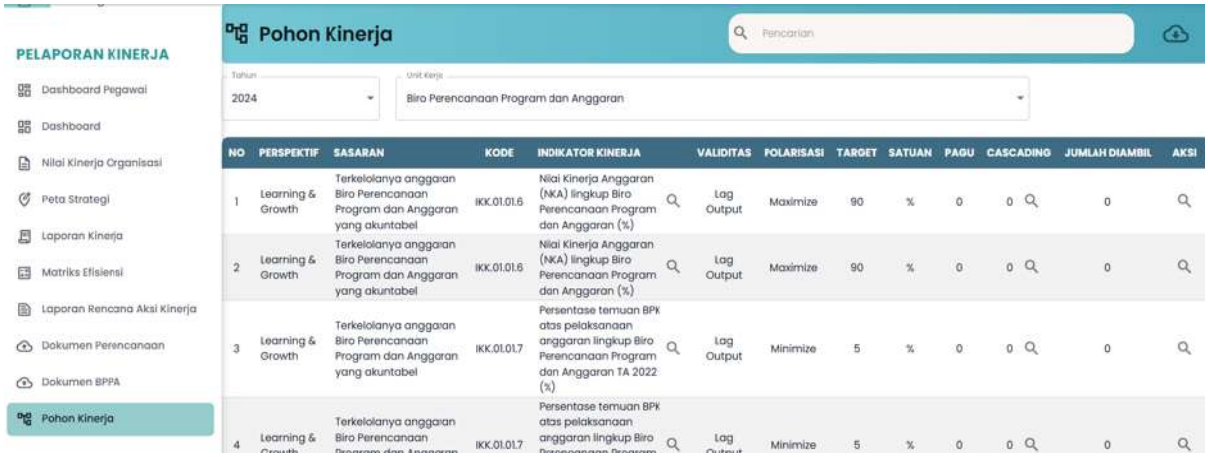


**Gambar 4.17**
Desain Menu Pohon Kinerja pada Modul Pelaporan Kinerja

## 3 Penyesuaian Evaluasi Kinerja

Penyesuaian Evaluasi telah disesuaikan dengan permintaan unit pemilik proses yaitu: penambahan fitur pemeringkatan kinerja berdasarkan capaian NKO, Anggaran dan ESD, penambahan fitur *input* LHE AKIP, penambahan fitur *input* Rekomendasi serta status tidaklanjutnya.

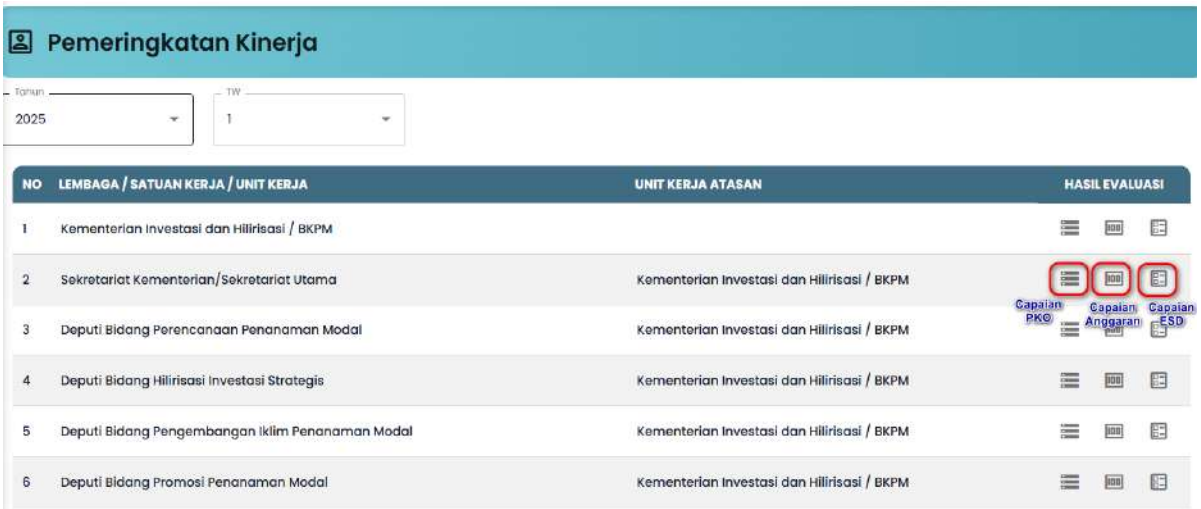


**Gambar 4.18**
Desain Pemeringkatan Kinerja

| SATUAN KERJA | PERENCANAAN KINERJA | PENGUKURAN KINERJA | PELAPORAN KINERJA | EVALUASI KINERJA INTERNAL | TOTAL NILAI | PREDIKAT | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | 28 | 27 | 16.58 | 21.31 | | | |
| Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal | 10 | 27 | 0 | 0 | | | |
| Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis | 29 | 0 | 0 | 0 | | | |

**Gambar 4.19**
Desain LHE AKIP

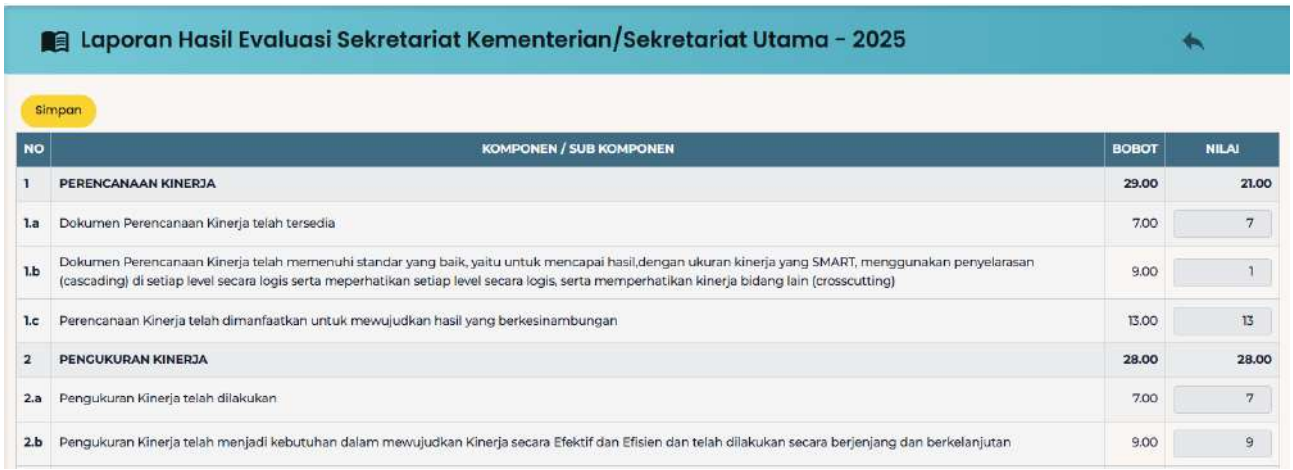


| NO | KOMPONEN / SUB KOMPONEN | BOBOT | NILAI |
|---|---|---|---|
| 1 | **PERENCANAAN KINERJA** | **29.00** | **21.00** |
| 1.a | Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia | 7.00 | 7 |
| 1.b | Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil,dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis serta meperhatikan setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) | 9.00 | 1 |
| 1.c | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan | 13.00 | 13 |
| 2 | **PENGUKURAN KINERJA** | **28.00** | **28.00** |
| 2.a | Pengukuran Kinerja telah dilakukan | 7.00 | 7 |
| 2.b | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan | 9.00 | 9 |

**Gambar 4.20**
Desain *Input* LHE AKIP

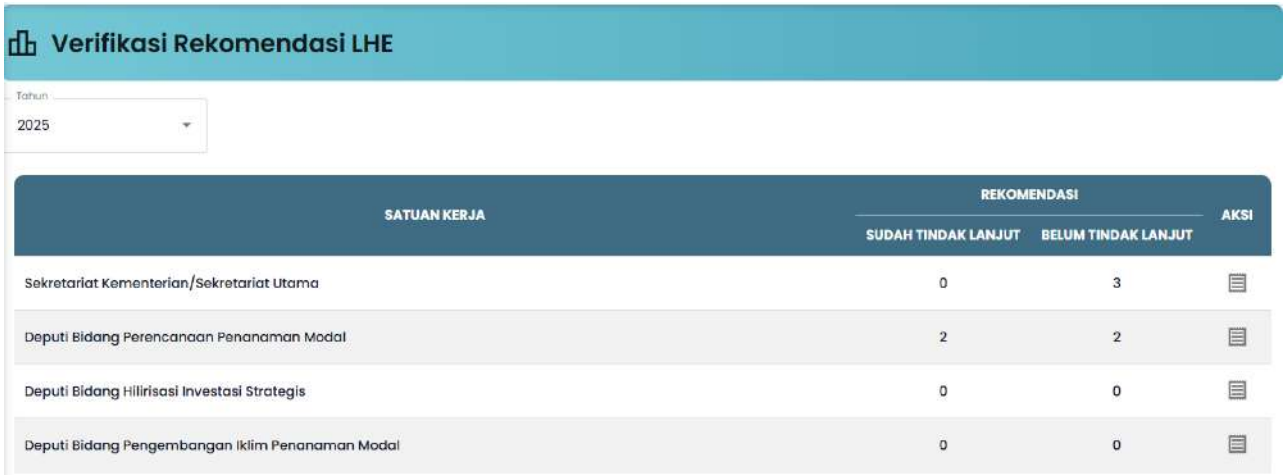


| SATUAN KERJA | REKOMENDASI | | AKSI |
|---|---|---|---|
| | SUDAH TINDAK LANJUT | BELUM TINDAK LANJUT | |
| Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | 0 | 3 | |
| Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal | 2 | 2 | |
| Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis | 0 | 0 | |
| Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 0 | 0 | |

**Gambar 4.21**
Desain Verifikasi Rekomendasi LHE

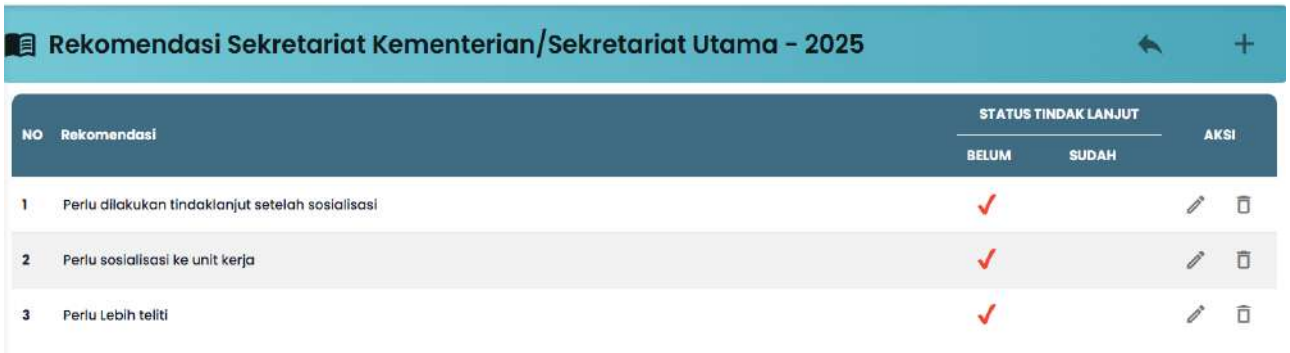


**Gambar 4.22**
Desain *Input* Verifikasi Rekomendasi LHE

## e Penyesuaian Verifikasi Rencana Aksi dan Matriks Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menu Verifikasi Rencana Aksi dalam SIMANTAB digunakan oleh Biro Perencanaan Program dan Anggaran (BPPA) untuk melakukan verifikasi terhadap data target dan capaian rencana aksi yang telah diinput oleh unit kerja. Menu ini memiliki peran penting dalam memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Namun, dalam pelaksanaannya, proses verifikasi yang dilakukan secara satu per satu berpotensi menimbulkan inefisiensi waktu verifikasi. Selain itu, pada Menu Matriks Efisiensi, untuk menjamin keakuratan dan keterlacakan data, informasi anggaran pada Matriks Efisiensi perlu dipastikan berasal dari hasil *tagging* data atasan, bukan dari aplikasi Monsakti. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian sistem guna meningkatkan efisiensi proses verifikasi serta memastikan validitas data kinerja dan efisiensi sumber daya dalam SIMANTAB Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

### 1 Penyesuaian Menu Verifikasi Rencana Aksi

Penambahan fitur “Pilih Semua’ untuk melakukan verifikasi (*approval*).

**Gambar 4.23**
Desain Menu Verifikasi Rencana Aksi

## 2 Penyesuaian Menu Matriks Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Data Anggaran pada Matriks Efisiensi didapat dari *tagging* data atasan.

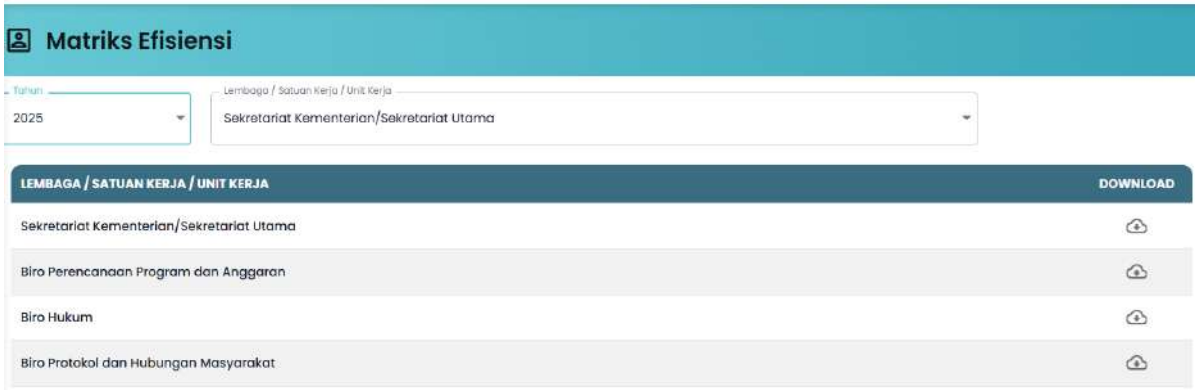


**Gambar 4.24**
Desain Menu Matriks Efisiensi

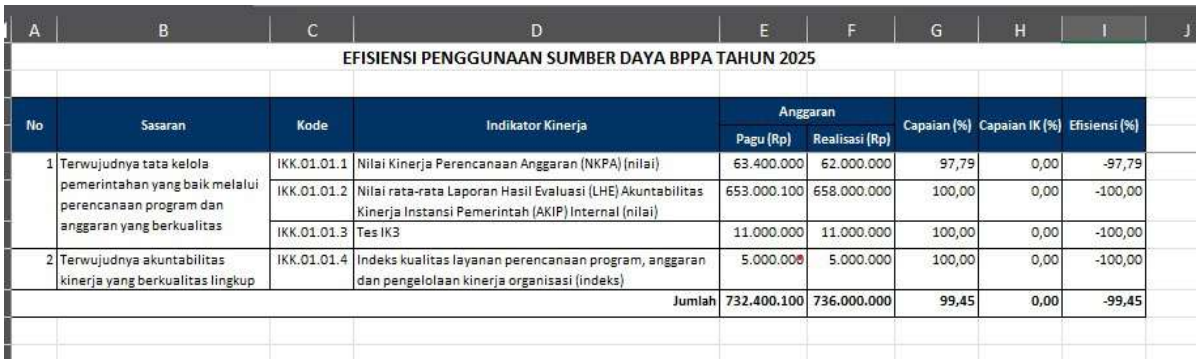

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA BPPA TAHUN 2025

| No | Sasaran | Kode | Indikator Kinerja | Anggaran | | Capaian (%) | Capaian IK (%) | Efisiensi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | | | |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui perencanaan program dan anggaran yang berkualitas | IKK.01.01.1 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) (nilai) | 63.400.000 | 62.000.000 | 97,79 | 0,00 | -97,79 |
| | | IKK.01.01.2 | Nilai rata-rata Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal (nilai) | 653.000.100 | 658.000.000 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | IKK.01.01.3 | Tes IK3 | 11.000.000 | 11.000.000 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 2 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup | IKK.01.01.4 | Indeks kualitas layanan perencanaan program, anggaran dan pengelolaan kinerja organisasi (indeks) | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | | Jumlah | 732.400.100 | 736.000.000 | 99,45 | 0,00 | -99,45 |

**Gambar 4.25**
Desain Laporan Matriks Efisiensi

## f Penambahan Menu Kerangka Logis

Penambahan Menu Kerangka Logis pada Sistem Layanan Akuntabilitas Kinerja Berdampak (SIMANTAB) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bertujuan untuk menampilkan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja strategis, sasaran program, indikator program, sasaran kegiatan, indikator kegiatan serta RO. Dalam rangka mendukung perencanaan program dan anggaran yang efektif serta selaras dengan sasaran strategis organisasi, diperlukan suatu mekanisme yang mampu menampilkan keterkaitan antara sasaran program, indikator program, sasaran kegiatan, indikator kegiatan, serta Rincian *Output* (RO) yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Keterkaitan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran program.

Oleh karena itu, Menu Kerangka Logis pada sistem diperlukan sebagai sarana untuk menyajikan hubungan yang terstruktur dan terintegrasi antar komponen perencanaan tersebut. Menu ini diharapkan dapat mendukung proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja secara lebih sistematis, transparan, dan akuntabel, serta memudahkan pengambilan keputusan berbasis kinerja.

**Gambar 4.26**
Desain Menu Kerangka Logis – List Unit Kerja

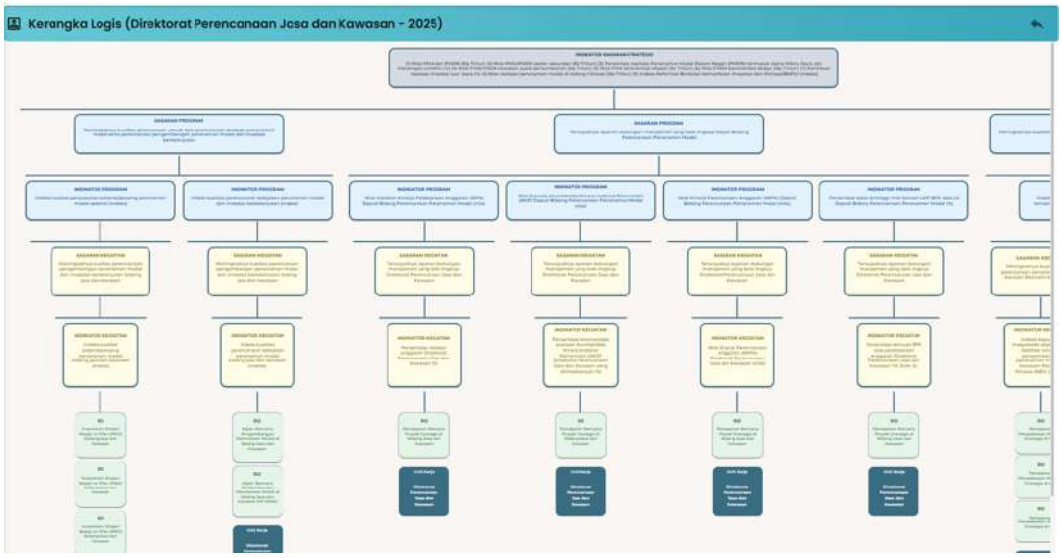


**Gambar 4.27**
Desain Menu Kerangka Logis – Bagan Kerangka Logis (Data Lengkap)

# 4.2 Rencana Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP Tahun 2025

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk terus melakukan berbagai inisiatif dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas dan pencapaian kinerja secara optimal dan berkelanjutan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang secara berkala telah melakukan evaluasi serta memberikan masukan konstruktif terhadap implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Berdasarkan Surat Plh. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/362/AA.05/2025 tanggal 29 Desember 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, antara lain:

1. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan mempertimbangkan capaian historis serta dinamika kondisi aktual sehingga target yang ditetapkan lebih berbasis bukti dan mencerminkan ambisi peningkatan kinerja instansi secara berkelanjutan.
2. Meninjau kembali indikator kinerja pada setiap unit kerja eselon I maupun level di bawahnya untuk memastikan indikator yang digunakan telah relevan, spesifik, dan memadai dalam mengukur ketercapaian kinerja, serta dilengkapi dengan target yang ideal sesuai capaian sebelumnya dan ketersediaan sumber daya.
3. Menyusun dan merumuskan kerangka logis kinerja atau pohon kinerja sesuai dengan kaidah Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, guna memastikan keselarasan kinerja antarjenjang organisasi serta kontribusi optimal terhadap pencapaian kinerja kementerian.
4. Menetapkan Penanggung Jawab (PIC) secara eksplisit untuk setiap indikator kinerja, lengkap dengan tugas, kewenangan, dan mekanisme pelaporan, sehingga pengukuran indikator kinerja hanya dapat diterima apabila dilaporkan oleh PIC yang ditetapkan secara formal.
5. Mendorong percepatan pengembangan fitur aplikasi SIMANTAB agar dapat mendukung pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari level kementerian hingga unit kerja.
6. Mendorong unit kerja eselon I untuk menyusun dokumen laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja kepada pimpinan, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas dokumen laporan kinerja dengan tidak hanya menyajikan faktor penghambat, tetapi juga faktor-faktor pendorong pencapaian target kinerja secara lebih rinci dan mendalam sebagai dasar perbaikan strategi kinerja pada tahun berikutnya.
8. Melaksanakan evaluasi AKIP internal yang lebih menitikberatkan pada penilaian kualitas implementasi SAKIP terkini pada unit kerja, sehingga catatan dan rekomendasi yang dihasilkan tetap relevan untuk ditindaklanjuti.
9. Mengintensifkan monitoring dan evaluasi terhadap progres tindak lanjut hasil evaluasi AKIP internal guna memastikan seluruh unit kerja secara konsisten melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menyusun rencana aksi perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh seluruh unit kerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

### 1 Penyesuaian Target Kinerja Berbasis Capaian Historis

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan reviu terhadap target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja mulai dari level kementerian hingga unit kerja dengan mempertimbangkan capaian historis, proyeksi kinerja, serta dinamika kondisi aktual. Penyesuaian target dilakukan agar target kinerja lebih realistis namun tetap mencerminkan upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

### 2 Penyempurnaan Indikator Kinerja

Setiap unit kerja melakukan peninjauan kembali terhadap indikator kinerja yang digunakan untuk memastikan indikator telah relevan, spesifik, terukur, dan cukup dalam menggambarkan pencapaian kinerja. Selain itu dilakukan penyempurnaan definisi operasional indikator, metode perhitungan, serta penetapan target yang selaras dengan kapasitas sumber daya yang tersedia.

### 3 Penyusunan Pohon Kinerja Sesuai PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyusun kerangka logis kinerja atau pohon kinerja kementerian dan unit kerja dengan menerapkan prinsip hubungan sebab-akibat yang logis serta tidak berbasis struktur organisasi. Pohon kinerja tersebut menjadi dasar dalam memastikan keselarasan antara kinerja kementerian, unit kerja, hingga individu.

### 4 Penetapan Penanggung Jawab (PIC) Indikator Kinerja

Penetapan PIC indikator kinerja dilakukan secara eksplisit dengan mengacu pada Surat Keputusan Tim Pengelola SAKIP pada masing-masing unit kerja. Nama-nama pejabat dan pelaksana yang tercantum dalam SK Tim Pengelola SAKIP ditetapkan sebagai PIC indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja masing-masing, termasuk kewajiban penyampaian data dan pelaporan kinerja secara berkala.

## 5 Pengembangan Aplikasi SIMANTAB

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus melakukan pengembangan aplikasi SIMANTAB untuk mendukung pengukuran kinerja berjenjang mulai dari level kementerian hingga unit kerja. Pengembangan tersebut antara lain meliputi penyempurnaan fitur penjenjangan kinerja, pengelolaan indikator kinerja, verifikasi capaian kinerja, serta monitoring penyampaian data kinerja secara berkala.

## 6 Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I

Unit kerja eselon I didorong untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja kepada pimpinan dan pemangku kepentingan. Penyusunan laporan kinerja dilakukan secara sistematis dan mengacu pada pedoman penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah.

## 7 Peningkatan Kualitas Analisis Kinerja

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meningkatkan kualitas analisis dalam dokumen laporan kinerja dengan menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pencapaian target indikator kinerja secara lebih komprehensif. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

## 8 Penguatan Evaluasi AKIP Internal

Evaluasi AKIP internal dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih mendalam untuk menilai kualitas implementasi SAKIP pada unit kerja. Evaluasi tidak hanya menilai aspek pemenuhan dokumen, tetapi juga kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan pemanfaatan informasi kinerja.

## 9 Penguatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meningkatkan intensitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP internal maupun eksternal. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh unit kerja melaksanakan tindak lanjut secara konsisten dan tepat waktu.

BAB V

# PENUTUP

- Kesimpulan
- Saran

# 5.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dalam mendorong peningkatan nilai realisasi investasi dan hilirisasi industri, serta perbaikan tata kelola birokrasi serta pelayanan penanaman modal yang prima. Laporan ini menyajikan capaian kinerja kementerian berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari 9 indikator kinerja utama (IKU) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan capaian kinerja yang baik dan progresif. Sebagian besar indikator kinerja utama dapat direalisasikan sesuai atau melampaui target yang ditetapkan.

1. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 89,93 persen atau berpredikat baik. Predikat baik memiliki interpretasi bahwa tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.

2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut.

   a. IKU 1 Nilai PMA dan PMDN memiliki target sebesar Rp1.905,60 Triliun dan realisasi sebesar Rp1.931,20 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 101,34 persen atau predikat Istimewa;
   b. IKU 2 Nilai PMA/PMDN sektor sekunder memiliki target sebesar Rp855,95 Triliun dan realisasi sebesar Rp780,90 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 91,23 persen atau predikat Baik;
   c. IKU 3 Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki target sebesar 48,30 persen dan realisasi 53,38 persen, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 110,51 persen dan menjadi 110 persen setelah dinormalisasi atau predikat Istimewa;
   d. IKU 4 Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan memiliki target sebesar Rp307,10 Triliun dan realisasi sebesar Rp445,78 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 145,16 persen dan menjadi 110 persen setelah dinormalisasi atau predikat Istimewa;
   e. IKU 5 Nilai PMA berorientasi ekspor memiliki target sebesar Rp171,60 Triliun dan realisasi Rp135,80 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 79,14 persen atau predikat Butuh Perbaikan;
   f. IKU 6 Nilai PMDN berorientasi ekspor memiliki target sebesar Rp60,40 Triliun dan realisasi Rp58,32 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 96,56 persen atau predikat Baik;

g. IKU 7 Kontribusi realisasi investasi luar Jawa memiliki target sebesar 52,10 persen dan realisasi sebesar 51,33 persen, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 98,51 persen atau predikat Baik;
h. IKU 8 Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi memiliki target sebesar Rp521,40 Triliun dan realisasi Rp584,10 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 112,03 persen dan menjadi 110 persen setelah dinormalisasi atau predikat Istimewa; dan
i. IKU 9 Indeks Reformasi Birokrasi memiliki target 76, 20 dan realisasi 78,13, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 102,53 persen atau predikat Istimewa.

**3.** Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja yang meningkat di sebagian besar indikator kinerja utama dibandingkan realisasi tahun 2024. Berikut ini merupakan rincian persentase pertumbuhan realisasi kinerja tahun 2025 dan tahun 2024.

a. IKU 1 Nilai PMA dan PMDN mengalami peningkatan sebesar 12,66 persen dibandingkan capaian nilai realisasi tahun 2024;
b. IKU 2 Nilai PMA/PMDN sektor sekunder mengalami peningkatan sebesar 8,26 persen dibandingkan capaian nilai realisasi tahun 2024;
c. IKU 3 Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan sebesar 12,42 persen dibandingkan capaian nilai realisasi tahun 2024;
d. IKU 4 Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan mengalami peningkatan sebesar 28,32 persen dibandingkan capaian nilai realisasi tahun 2024;
e. IKU 5 Nilai PMA berorientasi ekspor mengalami penurunan sebesar 17,50 persen dibandingkan capaian nilai realisasi tahun 2024;
f. IKU 6 Nilai PMDN berorientasi ekspor mengalami peningkatan sebesar 3,74 persen dibandingkan capaian nilai realisasi tahun 2024;
g. IKU 7 Kontribusi realisasi investasi luar Jawa mengalami penurunan sebesar 1,72 persen dibandingkan capaian nilai realisasi tahun 2024;
h. IKU 8 Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi mengalami peningkatan sebesar 43,23 persen dibandingkan capaian nilai realisasi tahun 2024; dan
i. IKU 9 Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan sebesar 2,64 persen dibandingkan capaian nilai realisasi tahun 2024.

**4.** Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja yang baik jika dibandingkan dengan target RPJMN 2025-2029.

a. IKU 1 Nilai PMA dan PMDN memiliki target sebesar Rp1.905,60 Triliun dan realisasi sebesar Rp1.931,20 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 101,34 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2029 sebesar Rp3.414,80 capaian kinerja tahun 2025 sebesar 56,55 persen.
b. IKU 2 Nilai PMA/PMDN sektor sekunder memiliki target sebesar Rp855,95 Triliun dan realisasi sebesar Rp780,90 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 91,23 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2029 sebesar Rp1.718,30 capaian kinerja tahun 2025 sebesar 45,44 persen.

c. IKU 3 Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki target sebesar 48,30 persen dan realisasi 53,38 persen, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 110,51 persen dan menjadi 110 persen setelah dinormalisasi. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2029 sebesar 49,7 persen capaian kinerja tahun 2025 sebesar 107,44 persen.
d. IKU 4 Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan memiliki target sebesar Rp307,10 Triliun dan realisasi sebesar Rp445,78 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 145,16 persen dan menjadi 110 persen setelah dinormalisasi. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2029 sebesar Rp507,2 capaian kinerja tahun 2025 sebesar 87,89 persen.
e. IKU 5 Nilai PMA berorientasi ekspor memiliki target sebesar Rp171,60 Triliun dan realisasi Rp135,80 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 79,14 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2029 sebesar Rp367,4 capaian kinerja tahun 2025 sebesar 36,96 persen.
f. IKU 6 Nilai PMDN berorientasi ekspor memiliki target sebesar Rp60,40 Triliun dan realisasi Rp58,32 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 96,56 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2029 sebesar Rp126,4 capaian kinerja tahun 2025 sebesar 46,14 persen.
g. IKU 7 Kontribusi realisasi investasi luar Jawa memiliki target sebesar 52,10 persen dan realisasi sebesar 51,33 persen, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 98,51 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2029 sebesar 53,2 persen capaian kinerja tahun 2025 sebesar 96,43 persen.
h. IKU 8 Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi memiliki target sebesar Rp521,40 Triliun dan realisasi Rp584,10 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 112,03 persen dan menjadi 110 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2029 sebesar Rp779,3 capaian kinerja tahun 2025 sebesar 74,95 persen.

## 5. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja yang baik terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

a. Indikator nilai realisasi PMA dan PMDN memiliki capaian sebesar 101,34 persen; dan
b. Indikator nilai realisasi PMA dan PMDN sektor sekunder memiliki capaian sebesar 91,23 persen.

## 6. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki pagu anggaran TA 2025 sebesar Rp879.611.122.000, setelah dilakukan pemblokiran anggaran, maka pagu efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp862.858.544.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp807.946.726.254. Capaian serapan anggaran pada tahun 2025 sebesar 93,64 persen.

a. IKU 1 Nilai PMA dan PMDN memiliki pagu sebesar Rp1.812.310.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.621.910.710 dengan serapan anggaran sebesar 89,49 persen;
b. IKU 2 Nilai PMA/PMDN sektor sekunder memiliki pagu sebesar Rp273.467.849.300 dan realisasi anggaran sebesar Rp237.527.586.799 dengan serapan anggaran sebesar 86,86 persen;

c. IKU 3 Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki pagu sebesar Rp21.493.452.839 dan realisasi anggaran sebesar Rp20.312.762.025 dengan serapan anggaran sebesar 94,51 persen;
d. IKU 4 Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan memiliki pagu sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp859.259.110 dengan serapan anggaran sebesar 85,93 persen;
e. IKU 5 Nilai PMA berorientasi ekspor memiliki pagu sebesar Rp2.698.188.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp2.412.095.135 dengan serapan anggaran sebesar 89,40 persen;
f. IKU 6 Nilai PMDN berorientasi ekspor memiliki pagu sebesar Rp900.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp800.587.560 dengan serapan anggaran sebesar 88,95 persen;
g. IKU 7 Kontribusi realisasi investasi luar Jawa memiliki pagu sebesar Rp19.605.050.161 dan realisasi anggaran sebesar Rp19.523.373.064 dengan serapan anggaran sebesar 99,58 persen;
h. IKU 8 Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi memiliki pagu sebesar Rp51.442.071.988 dan realisasi anggaran sebesar Rp47.514.391.075 dengan serapan anggaran sebesar 92,36 persen; dan
i. IKU 9 Indeks Reformasi Birokrasi memiliki pagu sebesar Rp490.439.621.712 dan realisasi anggaran sebesar Rp477.374.760.776 dengan serapan anggaran sebesar 97,34 persen.

## 5. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,28 persen pada tahun 2025.

a. IKU 1 Nilai PMA dan PMDN memiliki efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,85 persen;
b. IKU 2 Nilai PMA/PMDN sektor sekunder memiliki efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,37 persen;
c. IKU 3 Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 15,49 persen;
d. IKU 4 Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan memiliki efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 24,07 persen;
e. IKU 5 Nilai PMA berorientasi ekspor memiliki efisiensi penggunaan sumber daya sebesar -10,26 persen;
f. IKU 6 Nilai PMDN berorientasi ekspor memiliki efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,57 persen;
g. IKU 7 Kontribusi realisasi investasi luar Jawa memiliki efisiensi penggunaan sumber daya sebesar -1,07 persen;
h. IKU 8 Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi memiliki efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 17,64 persen; dan
i. IKU 9 Indeks Reformasi Birokrasi memiliki efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,19 persen.

# 5.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, berikut ini merupakan saran perbaikan untuk mendukung peningkatan kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM:

| | |
|---|---|
| **1. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Kebijakan Investasi Secara Nasional dan Daerah** | Memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pengelola kawasan, dan pemangku kepentingan usaha dalam perencanaan, fasilitasi, pengawasan, dan promosi investasi. Langkah ini mencakup harmonisasi kebijakan pusat–daerah, penyelesaian hambatan investasi kawasan dan proyek prioritas, serta pengawalan implementasi kebijakan investasi di daerah agar lebih efektif dan konsisten. |
| **2. Penguatan Perencanaan Investasi Berbasis Data dan Kebutuhan Pasar** | Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal melalui pemanfaatan data realisasi investasi, potensi sektor unggulan, kesiapan lahan/infrastruktur, serta kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Termasuk di dalamnya penajaman peta peluang investasi, pengembangan proyek siap investasi, dan integrasi data rencana ekspor dalam sistem perizinan berusaha untuk mendukung perencanaan investasi yang lebih terarah. |
| **3. Percepatan Realisasi Proyek Investasi Prioritas dan Hilirisasi** | Melaksanakan percepatan *ground breaking* proyek investasi eksisting dan pengembangan proyek hilirisasi baru melalui fasilitasi perizinan, penyediaan insentif, penyelesaian kendala lahan dan infrastruktur, serta pembentukan mekanisme pendampingan proyek strategis secara *end-to-end* hingga tahap konstruksi dan operasi. |

| | |
|---|---|
| **4. Penguatan Promosi Investasi dan Pengembangan Basis Investor** | Mengembangkan strategi promosi investasi yang lebih tersegmentasi dan berbasis sektor prioritas melalui *market sounding*, *clustering* calon investor, forum interaksi rutin dengan investor, serta penguatan promosi proyek hilirisasi dan kawasan pusat pertumbuhan di pasar global. Upaya ini juga didukung pengembangan platform informasi investasi yang lebih interaktif dan mudah diakses investor. |
| **5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Investasi Berbasis Risiko** | Mengoptimalkan sistem OSS dan subsistem pengawasan berbasis risiko melalui integrasi data, peningkatan kualitas LKPM, sosialisasi kewajiban pelaporan, serta penerapan pengawasan terkoordinasi lintas tingkat pemerintahan. Penguatan layanan perizinan dan pengawasan diharapkan meningkatkan kepastian usaha, kepatuhan investor, dan kualitas data realisasi investasi. |
| **6. Penguatan Ekosistem Investasi Daerah dan Sektor Prioritas** | Mendorong peningkatan daya tarik investasi daerah melalui percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, penyediaan energi dan logistik, peningkatan kapasitas SDM daerah, serta pengembangan kawasan industri dan pusat pertumbuhan berbasis potensi unggulan wilayah, khususnya di luar Pulau Jawa. |
| **7. Peningkatan Efektivitas Pembinaan Aparatur Daerah dan Pendampingan Investor** | Melaksanakan pembinaan investasi secara inklusif dan berkelanjutan bagi penanam modal dan aparatur daerah melalui bimbingan teknis regulasi, operasional investasi, dan penyelesaian masalah lapangan. Pembinaan juga mencakup deteksi dini hambatan dan penyimpangan melalui analisis LKPM, pemantauan lapangan, serta respons terhadap pengaduan pelaku usaha. |

| | | |
|---|---|---|
| 8. | **Penguatan Tata Kelola Investasi serta Manajemen Kelembagaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM** | Meningkatkan efektivitas tata kelola investasi melalui penguatan perencanaan, monitoring dan evaluasi, integrasi sistem informasi investasi, serta penguatan koordinasi lintas unit kerja dalam pengembangan kebijakan, perencanaan, dan fasilitasi investasi berorientasi ekspor dan hilirisasi. |
| 9. | **Penguatan Manajemen SDM Berbasis Merit dan Kinerja** | Mengembangkan manajemen talenta kementerian secara terintegrasi melalui pemetaan kompetensi dan kinerja, implementasi *Human Capital Development Plan* (HCDP) dan *Individual Development Plan* (IDP), serta penguatan budaya kerja dan kepemimpinan berbasis merit. Langkah ini bertujuan meningkatkan profesionalisme aparatur dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan investasi nasional. |

# LAMPIRAN


- Pernyataan Telah Direviu
- Perjanjian Kinerja
- Tabel Informasi Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- Daftar Penghargaan

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**
**LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN INVESTASI**
**DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**
**TAHUN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Inspektur

Kukuh Agung Pribadi

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BKPM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Rosan Perkasa Roeslani** |
| Jabatan | : | Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM |

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 30 Desember 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala BKPM

**Rosan Perkasa Roeslani**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BKPM**

| SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang tinggi, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata | 1 | Nilai PMA dan PMDN (Rp Triliun) | 1.905,6 |
| | | 2 | Nilai PMA/PMDN sektor sekunder (Rp Triliun) | 855,95 |
| | | 3 | Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (%) | 48,3 |
| | | 4 | Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan (Rp Triliun) | 307,1 |
| | | 5 | Nilai PMA berorientasi ekspor (Rp Triliun) | 171,6 |
| | | 6 | Nilai PMDN berorientasi ekspor (Rp Triliun) | 60,4 |
| | | 7 | Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (%) | 52,1 |
| 2 | Terwujudnya realisasi penanaman modal bidang hilirisasi untuk mendukung nilai tambah sumber daya alam | 8 | Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi (Rp Triliun) | 521,4 |
| | | 9 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi kelapa sawit (Rp Triliun) | 1,49 |
| | | 10 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi kelapa (Rp Triliun) | 0,39 |
| | | 11 | Nilai realisasi PMA/PMDNhilirisasi rumput laut (Rp Triliun) | 0,51 |
| | | 12 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi garam (Rp Triliun) | 7,38 |
| | | 13 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi ikan TCT (Rp Triliun) | 0,6 |
| | | 14 | Nilai realisasi PMA/PMDNhilirisasi tilapia (Rp Triliun) | 0,45 |
| | | 15 | Nilai realisasi PMA/PMDNhilirisasi udang (Rp Triliun) | 0,4 |
| | | 16 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi minyak bumi (Rp Triliun) | 34,45 |

| SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET |
|---|---|---|---|---|
| | | 17 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi gas bumi (Rp Triliun) | 20,23 |
| | | 18 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi nikel (Rp Triliun) | 44,1 |
| | | 19 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi bauksit (Rp Triliun) | 12,05 |
| | | 20 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi tembaga (Rp Triliun) | 45,93 |
| | | 21 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi timah (Rp Triliun) | 0,51 |
| | | 22 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi besi baja (Rp Triliun) | 10,17 |
| | | 23 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi pasir silika (Rp Triliun) | 1,42 |
| 3 | Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima | 24 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (indeks) | 80 |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Penanaman Modal dan Hilirisasi | 272.638.673.000 |
| 2 | Dukungan Manajemen | 409.241.612.000 |
| **Total Anggaran Tahun 2025** | | **681.880.285.000** |

Jakarta, 30 Desember 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala BKPM

**Rosan Perkasa Roeslani**

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BKPM

(REVISI 1)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Rosan Perkasa Roeslani** |
| Jabatan | : | Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM |

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 12 November 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

**Rosan Perkasa Roeslani**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BKPM**

(REVISI 1)

| TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan | 1 | Nilai PMA dan PMDN (Rp Triliun) | 1.905,60 |
| 2 | Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang tinggi, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata | 2 | Nilai PMA/PMDN sektor sekunder (Rp Triliun) | 855,95 |
| | | 3 | Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (%) | 48,30 |
| | | 4 | Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan (Rp Triliun) | 307,10 |
| | | 5 | Nilai PMA berorientasi ekspor (Rp Triliun) | 171,60 |
| | | 6 | Nilai PMDN berorientasi ekspor (Rp Triliun) | 60,40 |
| | | 7 | Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (%) | 52,10 |
| | | 8 | Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi (Rp Triliun) | 521,40 |
| 3 | Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima | 9 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (indeks) | 76,20 |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Penanaman Modal dan Hilirisasi | 398.583.284.000 |
| 2 | Dukungan Manajemen | 481.027.838.000 |
| **Total Anggaran Tahun 2025** | | **879.611.122.000** |

Jakarta, 12 November 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

**Rosan Perkasa Roeslani**

# Tabel Informasi Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025

| No | Uraian | Belanja | | | Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| | **KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL** | **862.858.544.000** | **807.946.726.254** | **93.64** | | | |
| | **Tujuan:**<br>Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Tujuan:** | | | | | | |
| | - Nilai PMA dan PMDN (Rp T) | | | | 1.905.60 | 1.931.20 | 101.34 |
| | | | | | | | |
| 1 | **Sasaran Strategis 1:**<br>Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata | **381.830.706.000** | **338.811.436.653** | **88.73** | | | |
| | **Indikator Kinerja Sasaran Strategis:** | | | | | | |
| | - Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Rp T) | | | | 855.90 | 780.9 | 91.24 |
| | - Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi (Rp T) | | | | 521.40 | 584.1 | 112.03 |
| | - Persentase Realisasi PMDN termasuk UMKM (%) | | | | 48.30 | 53.4 | 110.56 |
| | - Nilai PMA Berorientasi Ekspor (Rp T) | | | | 171.60 | 135.8 | 79.14 |
| | - Nilai PMDN Berorientasi Ekspor (Rp T) | | | | 60.40 | 58.3 | 96.52 |
| | - Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan (Rp T) | | | | 307.10 | 445.8 | 145.16 |
| | - Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa (%) | | | | 52.10 | 51.3 | 98.46 |
| | | | | | | | |
| | **Program 1:**<br>**Penanaman Modal dan Hilirisasi** | **381.830.706.000** | **338.811.436.653** | **88.73** | | | |
| | | | | | | | |
| | **Sasaran Program 1:**<br>Meningkatnya kualitas Perencanaan Umum dan Perencanaan Strategis Penanaman Modal serta Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Program:** | | | | | | |
| | - Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan (Indeks) | | | | 3.40 | 3.57 | 105.00 |
| | - Indeks Kualitas Perencanaan Arah Kebijakan Penanaman Modal (Indeks) | **6.541.498.000** | **5.798.252.515** | **88.64** | 3.40 | 3.64 | 107.06 |
| | - Indeks Kualitas Penyusunan Potensi/Peluang Penanaman Modal Sektoral (Indeks) | | | | 3.40 | 3.62 | 106.47 |
| | **Sasaran Program 2:**<br>Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal untuk Mendukung Peningkatan Iklim Penanaman Modal | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Program:** | | | | | | |
| | - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal (Indeks) | | | | 3.40 | 3.55 | 104.41 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 1:**<br>Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur | **658.038.000** | **612.735.191** | **93.12** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur | 262.896.000 | 250.517.399 | 95.29 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur (Indeks) | | | | 3.40 | 3.48 | 102.35 |
| | - Indeks Kualitas Potensi/Peluang Penanaman Modal Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur (Indeks) | | | | 3.40 | 3.5 | 102.94 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan) | 6.784.000 | 6.784.000 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis BKPM 2025-2029 | 173.962.000 | 167.004.399 | 96.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 3. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (Rekomendasi Kebijakan) | 82.150.000 | 76.729.000 | 93.40 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | **Sasaran Kegiatan 2:**<br>Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal Bidang SDA dan Industri Manufaktur | 395.142.000 | 362.217.792 | 91.67 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang SDA dan Industri Manufaktur | | | | 3.40 | 3.45 | 101.47 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Percepatan Rencana Proyek Strategis Sektor Sumber Daya Alam (Badan Usaha) | 265.631.000 | 242.872.914 | 91.43 | 3.00 | 5.00 | 166.67 |
| | 2. Percepatan Rencana Proyek di Bidang Industri Manufaktur (Badan Usaha) | 129.511.000 | 119.344.878 | 92.15 | 3.00 | 4.00 | 133.33 |

| No | Uraian | Belanja | | | Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 2:**<br>Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan | **3.322.083.000** | **2.891.355.395** | **87.03** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan Bidang Jasa dan Kawasan | 2.322.083.000 | 1.983.446.285 | 85.42 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan (Indeks) | | | | 3.40 | 3.53 | 103.82 |
| | - Indeks Kualitas Potensi/Peluang Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan (Indeks) | | | | 3.40 | 3.69 | 108.53 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Investment Project Ready to Offer (IPRO) Bidang Jasa dan Kawasan (Rekomendasi Kebijakan) | 1.000.000.000 | 825.380.000 | 82.54 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan (Rekomendasi Kebijakan) (SP-SABA) | 1.322.083.000 | 1.158.066.285 | 87.59 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | **Sasaran Kegiatan 2:**<br>Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan | 1.000.000.000 | 907.909.110 | 90.79 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan (Indeks) | | | | 3.40 | 3.61 | 106.18 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Percepatan Rencana Proyek Strategis di Bidang Jasa dan Kawasan (Badan Usaha) | 1.000.000.000 | 907.909.110 | 90.79 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 3:**<br>Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | **254.577.000** | **198.750.842** | **78.07** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1**<br>Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | 254.577.000 | 198.750.842 | 78.07 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | | | | 3.40 | 3.69 | 108.53 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Percepatan Penyelesaian Masalah Strategis di KEK (Badan Usaha) | 254.577.000 | 198.750.842 | 78.07 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 4:**<br>Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur | **1.194.325.000** | **1.111.815.027** | **93.09** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan Bidang Infrastruktur | 194.325.000 | 178.085.083 | 91.64 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur (Indeks) | | | | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
| | - Indeks Kualitas Penyusunan Potensi/Peluang Penanaman Modal Bidang Infrastruktur (Indeks) | | | | 3.40 | 3.55 | 104.41 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur (Rekomendasi Kebijakan) | 1.100.000 | 1.054.898 | 95.90 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2. Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Infrastruktur (Rekomendasi Kebijakan) (SP- | 193.225.000 | 177.030.185 | 91.62 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | **Sasaran Kegiatan 2:**<br>Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur | 1.000.000.000 | 933.729.944 | 93.37 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur (Indeks) | | | | 3.40 | 3.49 | 102.65 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Percepatan Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur (Badan Usaha) | 1.000.000.000 | 933.729.944 | 93.37 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 5:**<br>Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta | **112.475.000** | **98.008.500** | **87.14** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) | 112.475.000 | 98.008.500 | 87.14 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan | | | | 3.40 | 3.50 | 102.94 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Percepatan Rencana Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (Badan Usaha) | 112.475.000 | 98.008.500 | 87.14 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |

| No | Uraian | Belanja | | | Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| | **Kegiatan 6:**<br>Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Makro Investasi | **1.000.000.000** | **885.587.560** | **88.56** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Umum dan Perencanaan Strategis Penanaman Modal serta Perencanaan Pengembangan Penanaman | 1.000.000.000 | 885.587.560 | 88.56 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal Bidang Makro Investasi (Indeks) | | | | 3.40 | 3.57 | 105.00 |
| | - Indeks Kualitas Perencanaan Arah Kebijakan Penanaman Modal (Indeks) | | | | 3.40 | 3.64 | 107.06 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Peningkatan Kualitas Investasi Sektor Prioritas (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) | 1.000.000.000 | 885.587.560 | 88.56 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Sasaran Program 3:**<br>Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Penanaman Modal | **5.535.821.000** | **5.524.213.053** | **99.79** | | | |
| | **Indikator Kinerja Program:** | | | | | | |
| | - Persentase Kesepakatan/ Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri yang Disepakati (%) | | | | 100.00 | 130.00 | 130.00 |
| | - Persentase Kesepakatan/ Perjanjian Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal yang telah Ditindaklanjuti (%) | | | | 75.00 | 75.00 | 100.00 |
| | - Persentase DPMPTSP dan K/L yang Berkategori Baik dalam Penilaian Kinerja (%) | | | | 75.00 | 94.74 | 126.32 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 1:**<br>Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal | **249.250.000** | **249.161.520** | **99.96** | | | |
| | **Sasaran Kegaiatan 1:**<br>Meningkatnya implementasi kerja sama pelaksanaan berusaha di bidang penanaman modal | 249.250.000 | 249.161.520 | 99.96 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Pemerintah Daerah dan Kementerian/ Lembaga yang telah Melaksanakan Rekomendasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan | | | | 60.00 | 100.00 | 166.67 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta | 249.250.000 | 249.161.520 | 99.96 | 38.00 | 38.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 2:**<br>Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal | **1.520.593.000** | **1.517.436.875** | **99.79** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal | 1.520.593.000 | 1.517.436.875 | 99.79 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Kerja Sama Penanaman Modal dengan Mitra Kerja Sama dari Dalam dan Luar Negeri yang Disepakati (%) | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | - Persentase Kesepakatan/Perjanjian/Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal yang telah Ditindaklanjuti | | | | 75.00 | 75.00 | 100.00 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Kerja sama penanaman modal dengan dunia usaha dalam dan luar negeri (Kesepakatan) | - | - | | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
| | 2. Hasil Perundingan Kerja Sama Penanaman Modal Bilateral (Kesepakatan) | 1.520.593.000 | 1.517.436.875 | 99.79 | 19.00 | 19.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 3:**<br>Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal | **3.765.978.000** | **3.757.614.658** | **99.78** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal | 3.765.978.000 | 3.757.614.658 | 99.78 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal yang Disepakati (%) | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | - Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal yang telah Ditindaklanjuti (%) | | | | 75.00 | 75.00 | 100.00 |
| | - Persentase Minat Pelaku Usaha Indonesia yang Melakukan Kegiatan Investasi ke Luar Negeri (*Outward Investment*) (%) | | | | 64.50 | 46.00 | 71.32 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Konsultasi Publik Bahan Posisi Pertemuan Kerja Sama Regional dan Multilateral (Rekomendasi Kebijakan) (SP-SABA) | 2.000.000 | 2.000.000 | 100.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00 |
| | 2. Hasil Perundingan Kerja Sama Penanaman Modal Regional dan Multilateral (Kesepakatan) | 635.181.000 | 631.066.209 | 99.35 | 21.00 | 21.00 | 100.00 |
| | 3. Penguatan Kesepakatan dan Implementasi Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal (Rekomendasi | 2.507.948.000 | 2.504.213.449 | 99.85 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 4. Penyelenggaraan Forum Fasilitasi *Outward Investment* (Forum) | 620.849.000 | 620.335.000 | 99.92 | 1.00 | 2.00 | 200.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | Uraian | Belanja | | | Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| | **Sasaran Program 4:**<br>Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal | **88.575.005.000** | **84.747.694.090** | **95.68** | | | |
| | **Indikator Kinerja Program:** | | | | | | |
| | - Nilai Rencana Penanaman Modal (Rp T) | | | | 3.343.16 | 4.094.30 | 122.47 |
| | - Persentase Investor Potensial yang Memperoleh Nomor Induk Berusaha dan/atau Nomor Kegiatan Usaha (%) | | | | 50.00 | 50.37 | 100.74 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 1:**<br>Promosi Wilayah Amerika dan Eropa | **18.950.130.000** | **18.553.585.231** | **97.91** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Terwujudnya Kualitas Promosi yang Efektif di Wilayah Amerika dan Eropa | 18.950.130.000 | 18.553.585.231 | 97.91 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan 1:** | | | | | | |
| | - Nilai Rencana Penanaman Modal di Wilayah Amerika dan Eropa (Rp T) | | | | 274.70 | 384.70 | 140.04 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Amerika dan Eropa (Promosi) | 12.190.130.000 | 11.793.585.231 | 96.75 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Promosi Penanaman Modal dalam Forum Internasional di Wilayah Amerika dan Eropa (Kegiatan) | 6.760.000.000 | 6.760.000.000 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 3. Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional IKN di Wilayah Amerika dan Eropa (Kegiatan) | - | - | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 2:**<br>Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika | **5.161.923.000** | **4.648.648.294** | **90.06** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1**<br>Terwujudnya Kualitas Promosi yang Efektif di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika | 5.161.923.000 | 4.648.648.294 | 90.06 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Nilai Rencana Penanaman Modal di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (Rp T) | | | | 588.40 | 1.011.20 | 171.86 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan | 5.161.923.000 | 4.648.648.294 | 90.06 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Promosi penanaman modal dalam Forum Internasional di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika (Kegiatan) | | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3. Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika | | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 3:**<br>Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik | **2.988.757.000** | **2.771.353.003** | **92.73** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Terwujudnya Kualitas Promosi yang Efektif di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik | 2.988.757.000 | 2.771.353.003 | 92.73 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | Nilai Rencana Penanaman Modal di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik (Rp T) | | | | 695.30 | 705.40 | 101.45 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan | 2.954.757.000 | 2.737.353.003 | 92.64 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik | 34.000.000 | 34.000.000 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 4:**<br>Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal | **61.474.195.000** | **58.774.107.562** | **95.61** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Terwujudnya Kualitas Promosi yang Efektif di Dalam Negeri | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | Nilai Rencana Penanaman Modal dari Promosi Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp T) | | | | 1.784.80 | 1.993.00 | 111.67 |
| | **Sasaran Kegiatan 2:**<br>Tersedianya Strategi Promosi Penanaman Modal yang Berkualitas | 61.474.195.000 | 58.774.107.562 | 95.61 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Investor Potensial yang Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau Nomor Kegiatan Usaha (NKU) (Investor) | | | | 110.00 | 344.00 | 312.73 |
| | - Indeks Kualitas Strategi Promosi Penanaman Modal (Indeks) | | | | 3.60 | 3.60 | 100.00 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. IIPC (Indonesian Investment Promotion Center) (Promosi) | 34.402.042.000 | 33.653.970.942 | 97.83 | 110.00 | 310.00 | 281.82 |
| | 2. Bahan Informasi Potensi Penanaman Modal (Layanan) | 14.470.376.000 | 14.433.577.369 | 99.75 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 3. Regional Investment Forum (RIF) (SP SABA) | 2.205.000.000 | 1.883.554.716 | 85.42 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 4. Analisis Negara Target dan Negara Pesaing (Rekomendasi Kebijakan) | 396.777.000 | 220.482.317 | 55.57 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |

| No | Uraian | Belanja | | | Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| | 5. IIPC (Indonesian Investment Promotion Center) (SP SABA) | 10.000.000.000 | 8.582.522.218 | 85.83 | 34.00 | 34.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Sasaran Program 5:**<br>Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif | **22.236.383.000** | **22.121.347.477** | **99.48** | | | |
| | **Indikator Kinerja Program:** | | | | | | |
| | - Persentase Capaian Realisasi Investasi berdasarkan LKPM yang telah Diverifikasi (%) | | | | 90.00 | 91.17 | 101.30 |
| | - Persentase Pelaksanaan Pengawasan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berusaha Berbasis Risiko (%) | | | | 90.00 | 90.00 | 100.00 |
| | - Persentase Fasilitasi Perusahaan yang dapat Terselesaikan Permasalahannya (%) | | | | 90.00 | 94.86 | 105.40 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 1:**<br>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I | **3.106.549.000** | **3.065.314.250** | **98.67** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif di Wilayah I | 3.106.549.000 | 3.065.314.250 | 98.67 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Capaian Realisasi Investasi di Wilayah I berdasarkan LKPM yang telah Diverifikasi (%) | | | | 90.00 | 93.28 | 103.64 |
| | - Persentase Pelaksanaan Pengawasan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berusaha Berbasis Risiko di Wilayah I (%) | | | | 90.00 | 100.00 | 111.11 |
| | - Persentase Fasilitasi Perusahaan yang dapat Terselesaikan Permasalahannya di Wilayah I (%) | | | | 90.00 | 112.50 | 125.00 |
| | - Persentase Fasilitasi Badan Usaha Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat Diselesaikan Permasalahannya (%) | | | | 90.00 | 100.00 | 111.11 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah I (Layanan) | 331.756.000 | 331.753.216 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi (Badan Usaha) (SP-SABA( | 1.000.000.000 | 963.721.577 | 96.37 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| | 3. Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah I (Badan Usaha) | 38.556.000 | 38.467.125 | 99.77 | 14.00 | 14.00 | 100.00 |
| | 4. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah I (Badan Usaha) | 386.237.000 | 385.765.023 | 99.88 | 16.00 | 18.00 | 112.50 |
| | 5. Fasilitasi dan Evaluasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek PSN (Badan Usaha) | 1.350.000.000 | 1.345.607.309 | 99.67 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 2:**<br>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II | **6.350.664.000** | **6.306.901.156** | **99.31** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif di Wilayah III | 6.350.664.000 | 6.306.901.156 | 99.31 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Capaian Realisasi Investasi di Wilayah II berdasarkan LKPM yang telah Diverifikasi (%) | | | | 90.00 | 199.55 | 221.72 |
| | - Persentase Pelaksanaan Pengawasan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berusaha Berbasis Risiko di Wilayah II (%) | | | | 90.00 | 83.97 | 93.30 |
| | - Persentase Fasilitasi Perusahaan yang dapat Terselesaikan Permasalahannya di Wilayah II (%) | | | | 90.00 | 91.90 | 102.11 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah II (Layanan) | 371.055.000 | 371.054.635 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Pengembangan Realisasi Investasi di Wilayah- wilayah Tertentu (Badan Usaha) (SP-SABA) | 4.816.250.000 | 4.814.620.780 | 99.97 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| | 3. Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah II (Badan Usaha) | 68.040.000 | 67.012.155 | 98.49 | 15.00 | 15.00 | 100.00 |
| | 4. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman di Modal Wilayah II (Badan Usaha) | 1.095.319.000 | 1.054.213.586 | 96.25 | 26.00 | 26.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 3:**<br>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III | **6.103.465.000** | **6.082.059.485** | **99.65** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif di Wilayah III | 6.103.465.000 | 6.082.059.485 | 99.65 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Capaian Realisasi Investasi berdasarkan LKPM yang telah Diverifikasi di Wilayah III (%) | | | | 90.00 | 104.60 | 116.22 |
| | - Persentase Pelaksanaan Pengawasan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berbasis Risiko di Wilayah III (%) | | | | 90.00 | 100.00 | 111.11 |
| | - Persentase Fasilitasi Perusahaan yang dapat Terselesaikan Permasalahannya di Wilayah III (%) | | | | 90.00 | 119.04 | 132.27 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah III (Layanan) | 177.792.000 | 177.791.875 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 4. Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah III (Badan Usaha) | 60.398.000 | 57.834.589 | 95.76 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| | 5. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah III (Badan Usaha) | 4.865.275.000 | 4.859.386.409 | 99.88 | 21.00 | 25.00 | 119.05 |
| | 5. Eksekusi Proyek Wilayah Barat yang Terkendala Untuk Percepatan Realisasi Investasi (SP SABA) | 1.000.000.000 | 987.046.612 | 98.70 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |

| No | Uraian | Belanja | | | Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| | **Kegiatan 4:**<br>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV | **1.708.448.000** | **1.705.391.372** | **99.82** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif di Wilayah IV | 1.708.448.000 | 1.705.391.372 | 99.82 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Capaian Realisasi Investasi di Wilayah IV berdasarkan LKPM yang telah Diverifikasi (%) | | | | 90.00 | 97.76 | 108.62 |
| | - Persentase Proyek yang Dipantau Perkembangan Realisasinya pada 38 Provinsi dalam rangka Dekonsentrasi (%) | | | | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - Persentase Pelaksanaan Pengawasan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berusaha Berbasis Risiko di Wilayah IV (%) | | | | 90.00 | 99.90 | 111.00 |
| | - Persentase Fasilitasi Perusahaan yang dapat Terselesaikan Permasalahannya di Wilayah IV (%) | | | | 90.00 | 95.22 | 105.80 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah IV (Layanan) | 1.055.018.000 | 1.054.533.338 | 99.95 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah IV (Badan Usaha) | 134.369.000 | 133.799.340 | 99.58 | 35.00 | 22.00 | 62.86 |
| | 3. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah IV (Badan Usaha) | 519.061.000 | 517.058.694 | 99.61 | 21.00 | 21.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 5:**<br>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V | **4.967.257.000** | **4.961.681.214** | **99.89** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif di Wilayah V | 4.967.257.000 | 4.961.681.214 | 99.89 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Capaian Realisasi Investasi di Wilayah V berdasarkan LKPM yang telah Diverifikasi (%) | | | | 90.00 | 63.79 | 70.88 |
| | - Persentase Pelaksanaan Pengawasan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berusaha Berbasis Risiko di Wilayah V (%) | | | | 90.00 | 90.00 | 100.00 |
| | - Persentase Fasilitasi Perusahaan yang dapat Terselesaikan Permasalahannya di Wilayah V (%) | | | | 90.00 | 90.00 | 100.00 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah V (Layanan) | 30.248.000 | 29.707.000 | 98.21 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Fasilitasi, Evaluasi dan Pembinaan terhadap Pelaksanaan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dan Dana Dekonsentrasi | 106.850.000 | 106.841.040 | 99.99 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 3. Satgas Percepatan Investasi (Layanan) | 3.836.043.000 | 3.835.021.856 | 99.97 | 3.00 | 4.00 | 133.33 |
| | 4. Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah V (Badan Usaha) | 889.211.000 | 888.391.559 | 99.91 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| | 5. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah V (Badan Usaha) | 104.905.000 | 101.719.759 | 96.96 | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Sasaran Program 6:**<br>Meningkatnya Kualitas Hilirisasi Investasi Strategis | **52.780.660.000** | **48.654.224.560** | **92.18** | | | |
| | **Indikator Kinerja Program:** | | | | | | |
| | - Persentase Rencana Aksi Strategi dan Tata Kelola di Bidang Hilirisasi yang Ditindaklanjuti (%) | | | | 70.00 | 72.00 | 102.86 |
| | **Sasaran Program 7:**<br>Meningkatnya Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Investasi Strategis | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Program:** | | | | | | |
| | - Persentase Capaian Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Investasi Strategis (%) | | | | 60.00 | 112.20 | 187.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 1:**<br>Pengembangan Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Investasi strategis | **920.360.000** | **905.897.787** | **98.43** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Kualitas Susunan Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Investasi Strategis | 920.360.000 | 905.897.787 | 98.43 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Rencana Aksi Strategi dan Tata Kelola Bidang Hilirisasi yang Ditindaklanjuti (%) | | | | 70.00 | 72.00 | 102.86 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Tata Kelola di bidang hilirisasi investasi strategis (SP SABA) | 920.360.000 | 905.897.787 | 98.43 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |

| No | Uraian | Belanja | | | Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| | **Kegiatan 2:**<br>Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi | **6.453.990.000** | **6.352.644.484** | **98.43** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Investasi Strategis Bidang Minyak dan Gas Bumi | 6.453.990.000 | 6.352.644.484 | 98.43 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Investasi Strategis Bidang Minyak dan Gas Bumi (Rp T) | | | | 6.39 | 6.39 | 100.00 |
| | - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Minyak Bumi (Rp T) | | | | 34.45 | 41.73 | 121.13 |
| | - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Gas Bumi (Rp T) | | | | 20.23 | 18.34 | 90.66 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi (Rekomendasi Kebijakan) (SP-SABA) | 500.000.000 | 473.929.767 | 94.79 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Rekomendasi Kebijakan berupa Proposal Bisnis Investasi Hilirisasi Komoditas Minyak Bumi (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) | 2.976.995.000 | 2.956.194.013 | 99.30 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 3. Rekomendasi Kebijakan berupa Proposal Bisnis Investasi Hilirisasi Komoditas Gas Bumi (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) | 2.976.995.000 | 2.922.520.704 | 98.17 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 3:**<br>Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Mineral dan Batu Bara | **18.861.970.000** | **18.311.948.067** | **97.08** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis bidang mineral dan batu bara | 18.861.970.000 | 18.311.948.067 | 97.08 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Investasi Strategis Bidang Mineral dan Batu Bara (Rp T) | | | | 95.26 | 373.20 | 391.77 |
| | - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Nikel (Rp T) | | | | 44.10 | 185.32 | 420.23 |
| | - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Tembaga (Rp T) | | | | 45.93 | 65.80 | 143.26 |
| | - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Bauksit (Rp T) | | | | 11.78 | 53.15 | 451.19 |
| | - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Timah (Rp T) | | | | 0.51 | 11.29 | 2.213.73 |
| | - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Pasir Silika (Rp T) | | | | 1.42 | 5.07 | 357.04 |
| | - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Industri Logam Dasar Besi dan Baja (Rp T) | | | | 10.17 | 39.21 | 385.55 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Bidang Mineral dan Batu Bara (Rekomendasi Kebijakan) (SP-SABA) | 500.000.000 | 477.880.428 | 95.58 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Bidang Pasir Silika (Rekomendasi Kebijakan) (SP-SABA) | 500.000.000 | 347.242.423 | 69.45 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 3. Rekomendasi Kebijakan berupa Proposal Bisnis Investasi di Komoditas Nikel (Rekomendasi Kebijakan) (SP-SABA) | 2.976.995.000 | 2.921.497.400 | 98.14 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 4. Rekomendasi Kebijakan berupa Proposal Bisnis Investasi di Komoditas Tembaga (Rekomendasi Kebijakan) (SP-SABA) | 2.976.995.000 | 2.938.157.684 | 98.70 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 5. Rekomendasi Kebijakan berupa Proposal Bisnis Investasi di Komoditas Bauksit (Rekomendasi Kebijakan) (SP-SABA) | 2.976.995.000 | 2.915.499.630 | 97.93 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 6. Rekomendasi Kebijakan berupa Proposal Bisnis Investasi di Komoditas Timah (Rekomendasi Kebijakan) (SP-SABA) | 2.976.995.000 | 2.922.559.893 | 98.17 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 7. Rekomendasi Kebijakan berupa Proposal Bisnis Investasi di Komoditas Pasir Silika (Rekomendasi Kebijakan) (SP-SABA) | 2.976.995.000 | 2.891.670.419 | 97.13 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 8. Rekomendasi Kebijakan berupa Proposal Bisnis Investasi di Komoditas Besi Baja (Rekomendasi Kebijakan) (SP-SABA) | 2.976.995.000 | 2.897.440.190 | 97.33 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 4:**<br>Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Perikanan dan Kelautan | **15.384.977.000** | **12.233.017.051** | **79.51** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Investasi Strategis Bidang Perikanan dan Kelautan | 15.384.977.000 | 12.233.017.051 | 79.51 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Investasi Strategis Bidang Perikanan dan Kelautan (Rp T) | | | | 1.01 | 6.43 | 636.63 |
| | - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Rumput Laut (Rp T) | | | | 0.51 | 0.32 | 62.75 |
| | - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Garam (Rp T) | | | | 7.38 | 3.82 | 51.76 |
| | - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Ikan TCT (Rp T) | | | | 0.60 | 1.86 | 310.00 |
| | - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Tilapia (Rp T) | | | | 0.45 | 0.03 | 6.22 |
| | - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Udang (Rp T) | | | | 0.40 | 0.31 | 77.50 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Rencana Aksi Nasional Hilirisasi di Bidang Perikanan dan Kelautan (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) | 500.000.000 | 492.532.541 | 98.51 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Rekomendasi Kebijakan berupa Proposal Bisnis Investasi Hilirisasi Komoditas Ikan TCT (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) | 2.976.997.000 | 2.976.137.700 | 99.97 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 3. Rekomendasi Kebijakan berupa Proposal Bisnis Investasi Hilirisasi Komoditas Rumput Laut (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) | 2.976.995.000 | 2.968.897.078 | 99.73 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 4. Rekomendasi Kebijakan berupa Proposal Bisnis Investasi Hilirisasi Komoditas Garam (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) | 2.976.995.000 | 2.927.319.295 | 98.33 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 5. Rekomendasi Kebijakan berupa Proposal Bisnis Investasi Hilirisasi Komoditas Ikan Tilapia (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) | 2.976.995.000 | 1.830.994.437 | 61.50 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 6. Rekomendasi Kebijakan berupa Proposal Bisnis Investasi Hilirisasi Komoditas Udang (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) | 2.976.995.000 | 1.037.136.000 | 34.84 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |

| No | Uraian | Belanja | | | Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 5:**<br>Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Perkebunan dan Kehutanan | **11.159.363.000** | **10.850.717.171** | **97.23** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Investasi Strategis Bidang Perkebunan dan Kehutanan | 11.159.363.000 | 10.850.717.171 | 97.23 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Investasi Strategis Bidang Perkebunan dan Kehutanan (Rp T) | | | | 30.37 | 144.42 | 475.54 |
| | - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa Sawit (Rp T) | | | | 1.49 | 62.76 | 4.212.08 |
| | - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa (Rp T) | | | | 0.39 | 1.77 | 453.85 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan,dan Kehutanan (Rekomendasi | 743.218.000 | 705.772.400 | 94.96 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Minyak dan Gas Bumi (Rekomendasi Kebijakan) | 735.031.000 | 729.443.705 | 99.24 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 3. Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Mineral dan Batubara (Rekomendasi Kebijakan) | 733.666.000 | 708.806.170 | 96.61 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 4. Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan (Badan Usaha) | 440.332.000 | 412.305.383 | 93.64 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| | 5. Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi (Badan Usaha) | 595.006.000 | 574.744.295 | 96.59 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| | 6. Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara (Badan Usaha) | 458.120.000 | 422.015.948 | 92.12 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| | 7. Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Perkebunan dan Kehutanan (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) | 500.000.000 | 453.582.660 | 90.72 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 8. Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Kelapa Sawit (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) | 500.000.000 | 491.592.915 | 98.32 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 9. Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Kelapa (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) | 500.000.000 | 488.832.002 | 97.77 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 10. Rekomendasi Kebijakan berupa Proposal Bisnis Investasi Hilirisasi Komoditas Kelapa Sawit (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) | 2.976.995.000 | 2.937.975.216 | 98.69 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 11. Rekomendasi Kebijakan berupa Proposal Bisnis Investasi Hilirisasi Komoditas Kelapa (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) | 2.976.995.000 | 2.925.646.477 | 98.28 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Sasaran Program 8:**<br>Meningkatnya Tata Kelola Deregulasi, Pemberdayaan Usaha, dan Pengembangan Potensi Daerah Bidang Penanaman Modal | **8.167.446.000** | **8.110.024.224** | **99.30** | | | |
| | **Indikator Kinerja Program:** | | | | | | |
| | - Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti (%) | | | | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
| | - Persentase Peningkatan Kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM (%) | | | | 5.00 | 5.35 | 107.00 |
| | - Persentase Peningkatan Pemanfaatan Profil Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah (%) | | | | 10.00 | 19.00 | 190.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 1:**<br>Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal | **2.685.707.000** | **2.670.812.285** | **99.45** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Kualitas Kebijakan dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal | 2.685.707.000 | 2.670.812.285 | 99.45 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Rekomendasi Peningkatan Daya Saing Investasi yang Ditindaklanjuti (%) | | | | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
| | - Persentase Rekomendasi Kebijakan Regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Pusat dan di Daerah yang Ditindaklanjuti (%) | | | | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
| | - Persentase Rekomendasi terkait Sinkronisasi Kebijakan Investasi yang Ditindaklanjuti (%) | | | | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Peningkatan Daya Saing Investasi (Rekomendasi Kebijakan) | 706.366.000 | 705.544.148 | 99.88 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Harmonisasi Regulasi Terkait Perizinan Berusaha di Tingkat Pusat dan Daerah (Rekomendasi Kebijakan) | 1.843.742.000 | 1.838.898.137 | 99.74 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 3. Sinkronisasi Kebijakan Investasi (Rekomendasi Kebijakan) | 135.599.000 | 126.370.000 | 93.19 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |

| No | Uraian | Belanja | | | Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| | **Kegiatan 2:**<br>Pemberdayaan Usaha Nasional | **3.099.538.000** | **3.069.083.765** | **99.02** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar PMA/PMDN yang Difasilitasi | 3.099.538.000 | 3.069.083.765 | 99.02 | 25.00 | 20.70 | 82.80 |
| | **Sasaran Kegiatan 2:**<br>Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Kemitraan antara PMA/PMDN dengan UMKM | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Pelaku UMKM yang telah Dilakukan Penguatan Kapasitas untuk Mendukung Rantai Pasok Usaha Besar (UB)(%) | | | | 100.00 | 104.00 | 104.00 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam Rantai Pasok (UMKM) | 600.749.000 | 590.777.720 | 98.34 | 500.00 | 519.00 | 103.80 |
| | 2. Pemetaan Database Perusahaan PMA/PMDN Yang Wajib Bermitra Dan Pelaku UMKM Di Daerah Yang Siap Dimitrakan (SP SABA) | 499.937.000 | 497.779.881 | 99.57 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 3. Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Nasional (UMKM) (SP-SABA) | 1.998.852.000 | 1.980.526.164 | 99.08 | 630.00 | 630.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 3:**<br>Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah | **2.382.201.000** | **2.370.128.174** | **99.49** | | | |
| | **Sasaran Kegaiatan 1:**<br>Meningkatnya Kualitas Potensi Penanaman Modal dan Hilirisasi di Daerah | 2.382.201.000 | 2.370.128.174 | 99.49 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Daerah yang Data Potensi Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Termutakhirkan Sesuai Kriteria (%) | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Fasilitasi Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah (Daerah(Provinsi/Kabupaten/Kota)) | 887.651.000 | 883.950.335 | 99.58 | 38.00 | 38.00 | 100.00 |
| | 2. Pengemasan Potensi Investasi di Daerah Realisasi Investasi Rendah (SP SABA) - 3 Daerah (Prov/Kab/Kota) | 1.494.550.000 | 1.486.177.839 | 99.44 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Sasaran Program 9:**<br>Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Berusaha yang Optimal | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Program:** | | | | | | |
| | - Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) yang Diterbitkan melalui Layanan *Online Single Submission* (OSS) (%) | | | | 15.00 | 15.00 | 100.00 |
| | - Persentase Permohonan Badan Usaha yang Mendapatkan Persetujuan Pemberian Fasilitas Berusaha (Insentif Kepabeanan dan Insentif | **40.878.878.000** | **38.708.705.042** | **94.69** | 100.00 | 90.00 | 90.00 |
| | **Sasaran Program 10:**<br>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Program:** | | | | | | |
| | - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal di PTSP Pusat (Indeks) | | | | 3.55 | 3.53 | 99.44 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 1:**<br>Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri | **5.308.381.000** | **4.807.480.133** | **90.56** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Efektivitas dan Kemudahan Perizinan Berusaha Sektor Industri dalam Mendukung Realisasi Penanaman Modal | 5.308.381.000 | 4.807.480.133 | 90.56 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Peningkatan Nomor Kegiatan Usaha (NKU) Sektor Industri yang Diterbitkan Melalui Layanan Online Single Submission (OSS) | | | | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| | - Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Perizinan Berusaha Sektor Industri (%) | | | | 88.00 | 88.38 | 100.43 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha Sektor Industri (Badan Usaha) | 746.472.000 | 695.333.534 | 93.15 | 900.00 | 1.583.00 | 175.89 |
| | 2. Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha Sektor Industri (Badan Usaha) (SP-SABA) | 4.561.909.000 | 4.112.146.599 | 90.14 | 1.013.00 | 1.461.00 | 144.23 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 2:**<br>Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri | **1.390.826.000** | **1.082.397.902** | **77.82** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Efektivitas dan Kemudahan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri | 1.390.826.000 | 1.082.397.902 | 77.82 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Nomor Kegiatan Usaha (NKU) Sektor Non Industri yang Diterbitkan Melalui Layanan Online | | | | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri (Badan Usaha) | 1.390.826.000 | 1.082.397.902 | 77.82 | 1.300.00 | 3.062.00 | 235.54 |

| No | Uraian | Belanja | | | Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 3:**<br>Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Berusaha | **518.423.000** | **507.005.899** | **97.80** | | | |
| | **Sasaran kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Efektivitas dan Harmonisasi Pelayanan Fasilitas Berusaha | 518.423.000 | 507.005.899 | 97.80 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Usulan Pemberian Fasilitas Berusaha (Insentif Kepabeanan dan Insentif Perpajakan) (%) | | | | 90.00 | 90.00 | 100.00 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Fasilitas Berusaha terkait Masterlist (Badan Usaha) | 402.757.000 | 392.903.899 | 97.55 | 50.00 | 404.00 | 808.00 |
| | 2. Fasilitas Berusaha terkait Tax Allowance (Badan Usaha) | 42.816.000 | 41.775.000 | 97.57 | 10.00 | 19.00 | 190.00 |
| | 3. Fasilitas Berusaha terkait Tax Holiday (Badan Usaha) | 72.850.000 | 72.327.000 | 99.28 | 10.00 | 92.00 | 920.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 4:**<br>Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat | **1.000.000.000** | **939.153.878** | **93.92** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | 1.000.000.000 | 939.153.878 | 93.92 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Peningkatan Partisipasi Pelaku Usaha dalam Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada PTSP Pusat (%) | | | | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Peningkatan Mutu Pelayanan PTSP Pusat (Laporan) | 1.000.000.000 | 939.153.878 | 93.92 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 5:**<br>Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | **24.161.248.000** | **23.246.708.355** | **96.21** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Layanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 24.161.248.000 | 23.246.708.355 | 96.21 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Pelaku Usaha yang Diberikan Layanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (%) | | | | 75.00 | 75.00 | 100.00 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Layanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Orang) | 9.161.248.000 | 9.134.406.922 | 99.71 | 400.000.00 | 732.559.00 | 183.14 |
| | 2. Layanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Orang) (SP-SABA) | 15.000.000.000 | 14.112.301.433 | 94.08 | | | |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 6:**<br>Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha | **8.500.000.000** | **8.125.958.875** | **95.60** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Kepatuhan Pelaksanaan Berusaha K/L dan Pemerintah Daerah | 8.500.000.000 | 8.125.958.875 | 95.60 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Jumlah pemerintah daerah yg ditingkatkan kinerjanya | | | | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah (Laporan) | 8.500.000.000 | 8.125.958.875 | 95.60 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Sasaran Program 11:**<br>Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Teknologi Informasi Penanaman Modal | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Program:** | | | | | | |
| | - Persentase Penyelesaian Program Strategis Peta Jalan Teknologi Informasi Penanaman Modal (%) | **638.142.853.000** | **594.282.265.293** | **93.13** | 59.00 | 37.28 | 63.19 |
| | **Sasaran Program 12:**<br>Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi Penanaman Modal | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Program:** | | | | | | |
| | - Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Teknologi Informasi (Indeks) | | | | 3.41 (skala 4) | 3.46 (skala 4) | 101.46 |
| | | | | | | | |

| No | Uraian | Belanja | | | Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| | **Kegiatan 1:**<br>Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | **80.720.139.000** | **53.062.968.819** | **65.74** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 80.720.139.000 | 53.062.968.819 | 65.74 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Ketersediaan Layanan Sistem OSS RBA (%) | | | | 95.00 | 100.00 | 105.26 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Pemeliharaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) (Sistem Informasi) | 49.562.961.000 | 49.535.293.114 | 99.94 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Pemeliharaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) (Sistem Informasi) (SP-SABA) | 31.157.178.000 | 3.527.675.705 | 11.32 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 2:**<br>Pengelolaan Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan | **70.487.006.000** | **66.304.224.831** | **94.07** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan | 70.487.006.000 | 66.304.224.831 | 94.07 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Ketersediaan Aplikasi Website Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam Menjaga Layanan dari Downtime kurang dari 1 Persen | | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - Persentase Ketersediaan Jaringan Teknologi Informasi untuk Mendukung Kegiatan Operasional dan Kegiatan Pelayanan Perizinan | | | | 99.50 | 99.90 | 100.40 |
| | - Indeks kepuasan ketersediaan layanan teknologi informasi penanaman modal | | | | 3.60 | 3.57 | 99.17 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Website Penanaman Modal (Layanan) | 713.541.000 | 709.777.760 | 99.47 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Pemeliharaan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS (Sistem Informasi) | 42.647.800.000 | 40.472.092.282 | 94.90 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 3. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (SP SABA) | 8.985.531.000 | 7.816.150.299 | 86.99 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 4. Pemeliharaan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS (SP SABA) | 6.908.345.000 | 6.543.081.500 | 94.71 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 5. Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi (SP SABA) | 11.231.789.000 | 10.763.122.990 | 95.83 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 3:**<br>Pengelolaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal | **5.907.870.000** | **5.779.782.042** | **97.83** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal | 5.907.870.000 | 5.779.782.042 | 97.83 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | Indeks Pembangunan Statistik Sektoral (Indeks) | | | | 2.50 | 2.28 | 91.20 |
| | **Sasaran Kegiatan 2:**<br>Meningkatnya Kualitas Layanan Data dan Informasi Penanaman Modal | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi (Indeks) | | | | 3.40 | 3.42 | 100.59 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal (Sistem Informasi) | 3.543.329.000 | 3.474.455.289 | 98.06 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal (Sistem Informasi) (SP-SABA) | 2.364.541.000 | 2.305.326.753 | 97.50 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| 2 | **Sasaran Strategis 2:**<br>Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima | **481.027.838.000** | **469.135.289.601** | **97.53** | | | |
| | **Indikator Kinerja Sasaran Strategis:** | | | | | | |
| | - Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Nilai) | | | | 76.20 | 78.13 | 102.53 |
| | | | | | | | |
| | **<u>Program 2:</u>**<br>**Program Dukungan Manajemen** | **481.027.838.000** | **469.135.289.601** | **97.53** | | | |
| | | | | | | | |
| | **Sasaran Program 1:**<br>Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel dan Transparan | **470.780.847.000** | **460.445.194.763** | **97.80** | | | |
| | **Indikator Kinerja Program:** | | | | | | |
| | - Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level) | | | | 3.67 | 3.41 | 92.92 |
| | - Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Opini BPK) | | | | 4 (WTP) | 4 (WTP) | 100.00 |
| | - Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Nilai) | | | | 76,78 (BB) | 77,10 (BB) | 100.42 |
| | - Nilai Kinerja Anggaran (NKA) | | | | 84.36 | 92.56 | 109.72 |

| No | Uraian | Belanja | | | Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| | - Indeks Reformasi Hukum (Indeks) | | | | 90.00 (skala 100) | 96.10 (skala 100) | 106.78 |
| | - Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Indeks) | | | | 2.70 (skala 4) | 3.70 (skala 4) | 137.03 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 1:**<br>Pengawasan/Pemeriksaan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan BKPM | **541.663.000** | **540.328.596** | **99.75** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Efektifitas Layanan Audit Internal | 541.663.000 | 540.328.596 | 99.75 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Nilai Internal Audit Capability Model (Nilai) | | | | 3.06 | 3.05 | 99.67 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Layanan Audit Internal (Layanan) | 541.663.000 | 540.328.596 | 99.75 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 2:**<br>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman Modal | **445.231.112.000** | **436.138.599.107** | **97.96** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Kelembagaan dan Keuangan Penanaman Modal | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Indeks Pengelolaan Aset (Indeks) | | | | 3.69 | 3.69 | 100.00 |
| | - Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Secara baik Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan (%) | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | - Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (Nilai) | 445.231.112.000 | 436.138.599.107 | 97.96 | 72.97 | 77.73 | 106.52 |
| | - Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks) | | | | 50.00 | 64.79 | 129.58 |
| | **Sasaran Kegiatan 2:**<br>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kelembagaan dan Keuangan Penanaman Modal | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keuangan (Indeks) | | | | 3.51 | 3.53 | 100.57 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Layanan BMN (Layanan) | 9.690.000 | 9.396.000 | 96.97 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Layanan Umum (Layanan) | 838.337.000 | 793.113.905 | 94.61 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 3. Layanan Perkantoran (Layanan) | 414.670.216.000 | 406.182.658.390 | 97.95 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 4. Layanan Prasarana Internal (m²) | 4.859.190.000 | 4.681.753.535 | 96.35 | 161.00 | 295.08 | 183.28 |
| | 5. Layanan Manajemen SDM (Layanan) | 197.446.000 | 189.115.625 | 95.78 | 302.00 | 302.00 | 100.00 |
| | 6. Layanan Manajemen Keuangan (Layanan) | 543.797.000 | 497.544.051 | 91.49 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 7. Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen) | 356.070.000 | 338.725.175 | 95.13 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 8. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (Unit) | 49.792.000 | 47.731.500 | 95.86 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 7. Layanan Prasarana Internal (m²) (SP-SABA) | 23.706.574.000 | 23.398.560.926 | 98.70 | 182.00 | 182.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 3:**<br>Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran | **948.301.000** | **944.268.491** | **99.57** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Kinerja Organisasi | 948.301.000 | 944.268.491 | 99.57 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Nilai Rata-Rata LHE AKIP Internal (Nilai) | | | | 76.63 | 77.10 | 100.61 |
| | - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) (Nilai) | | | | 78.95 | 90.84 | 115.06 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | 285.320.000 | 282.555.733 | 99.03 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen) | 662.981.000 | 661.712.758 | 99.81 | 8.00 | 8.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |

| No | Uraian | Belanja | | | Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| | **Kegiatan 4 :**<br>Penyempurnaan Produk Hukum Penanaman Modal dan Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal | **990.847.000** | **960.984.620** | **96.99** | | | |
| | **Sasaran Kegaiatan 1:**<br>Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum Penanaman Modal | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan dan Layanan Hukum (Indeks) | 990.847.000 | 960.984.620 | 96.99 | 3.55 | 3.70 | 104.23 |
| | **Sasaran Kegiatan 2:**<br>Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Advokasi Hukum Penanaman Modal | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Terselenggaranya Pelayanan Advokasi Hukum di Bidang Penanaman Modal (%) | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Layanan Hukum (Layanan) | 195.733.000 | 193.663.659 | 98.94 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Layanan Bantuan Hukum (Layanan) | 795.114.000 | 767.320.961 | 96.50 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 5:**<br>Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat | **23.068.924.000** | **21.861.013.949** | **94.76** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Kualitas Layanan Keprotokolan, Kehumasan dan Ketatausahaan Pimpinan | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keprotokolan, Kehumasan dan Ketatausahaan Pimpinan (Indeks) | | | | 3.56 | 3.70 | 103.93 |
| | **Sasaran Kegiatan 2:**<br>Meningkatnya Persepsi dan Akses Informasi Publik Melalui Pengelolaan Informasi yang Terbuka | 23.068.924.000 | 21.861.013.949 | 94.76 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Opini Negatif Dibanding Total Pemberitaan Tentang Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/BKPM pada Media (%) | | | | 12.00 | 9.49 | 79.08 |
| | - Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai) | | | | 95.90 | 84.41 | 88.02 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Layanan Protokoler (Layanan) | 18.206.449.000 | 17.173.574.106 | 94.33 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan) | 4.862.475.000 | 4.687.439.843 | 96.40 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Sasaran Program 2:**<br>Terwujudnya Organisasi Pemerintah yang Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran serta Birokrasi yang Dinamis, Lincah, dan | **10.246.991.000** | **8.690.094.838** | **84.81** | | | |
| | **Indikator Kinerja Program:** | | | | | | |
| | - Nilai Evaluasi Kelembagaan (Nilai) | | | | 89.00 | 88.09 | 98.98 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 6:**<br>Penatakelolaan Sumber Daya Manusia dan Organisasi | **2.000.000.000** | **1.736.043.942** | **86.80** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Melalui Evaluasi dan Penataan Organisasi Pemerintah yang Tepat Fungsi, Tepat Proses, | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) (%) | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | - Nilai Penerapan Penyesuaian Sistem Kerja (Nilai) | 2.000.000.000 | 1.736.043.942 | 86.80 | 3.00 | 2.00 | 66.67 |
| | **Sasaran Kegiatan 2:**<br>Meningkatnya Kualitas Layanan Sumber Daya Manusia Berbasis Meritokrasi | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Indeks Kepuasan Layanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi (Indeks) | | | | 3.50 | 3.70 | 105.71 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen) (SP-SABA) | 1.000.000.000 | 780.195.322 | 78.02 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Dokumen) (SP-SABA) | 1.000.000.000 | 955.848.620 | 95.58 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |

| No | Uraian | Belanja | | | Capaian Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| | **Sasaran Program 3:**<br>Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Berakhlak dan Profesional | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Program:** | | | | | | |
| | - Nilai Sistem Merit (Nilai) | | | | 285.00 | 285.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 7:**<br>Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal | **7.000.000.000** | **5.710.711.340** | **81.58** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Penanaman Modal | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Indeks Kepuasan Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penanaman Modal (Indeks) | 7.000.000.000 | 5.710.711.340 | 81.58 | 3.00 | 3.30 | 110.00 |
| | **Sasaran Kegiatan 2:**<br>Meningkatnya Implementasi dan Efektifitas Pembinaan Jabatan Fungsional Penanaman Modal | | | | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti (%) | | | | 75.00 | 75.75 | 101.00 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Layanan Standarisasi Profesi dan Sumber Daya Manusia Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (SP-SABA) | 2.000.000.000 | 1.289.442.600 | 64.47 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | 2. Layanan Kebijakan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (Layanan) (SP-SABA) | 5.000.000.000 | 4.421.268.740 | 88.43 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | **Kegiatan 8:**<br>Pengembangan Sumber Daya Manusia | **1.246.991.000** | **1.243.339.556** | **99.71** | | | |
| | **Sasaran Kegiatan 1:**<br>Meningkatnya Kualitas Aparatur Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Aparatur Daerah Bidang Penanaman Modal dan Hilirisasi | 1.246.991.000 | 1.243.339.556 | 99.71 | | | |
| | **Indikator Kinerja Kegiatan:** | | | | | | |
| | - Persentase ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Struktural dan Teknis | | | | 90.00 | 404.00 | 448.89 |
| | - Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penanaman Modal dan Hilirisasi di Pusat dan Daerah yang Lulus | | | | 90.00 | 113.00 | 125.56 |
| | **Rincian Output:** | | | | | | |
| | 1. Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 635.028.000 | 634.283.852 | 99.88 | 27.00 | 109.00 | 403.70 |
| | 2. Diklat Bidang Penanaman Modal Internal dan Eksternal (Orang) | 611.963.000 | 609.055.704 | 99.52 | 324.00 | 365.00 | 112.65 |

# BEBERAPA PENGHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2025

## 1. Kementerian Terbaik dalam Pemanfaatan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Adaptif (*Adaptive Distance Learning*)

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meraih Anugerah Pembelajaran Jarak Jauh Adaptif (*Adaptive Distance Learning*) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai apresiasi atas inovasi dalam pengembangan pembelajaran digital yang fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan peserta yang hadir melalui pemanfaatan *Learning Management System* (LMS) Investment Learning Center. Penghargaan ini diberikan dalam ajang Anugerah Data dan Teknologi Informasi Pendidikan 2025, sekaligus bersamaan dengan Rapat Koordinasi Data dan Teknologi Informasi Pendidikan, pada tanggal 15 Desember 2025 di Jakarta, dan diterima secara langsung oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Capaian ini mencerminkan komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mendorong transformasi digital serta penguatan kualitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal dan hilirisasi.

## 2. Juara III Kategori Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara Kelompok II di Anugerah Reksa Bandha

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil meraih Juara III Kategori Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara Kelompok II dalam Acara Anugerah Reksa Bandha Tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam pengelolaan aset negara yang akuntabel dan transparan. Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan, Chairul, yang mewakili Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama. Capaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam memperkuat tata kelola keuangan dan aset negara sebagai fondasi pendukung kinerja kelembagaan yang profesional dan berintegritas.

## 3. Kementerian Teraktif Mengamplifikasi Narasi Tunggal Pada Media Sosial

KOMDIGI

SERTIFIKAT

PENGHARGAAN KEPADA:

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

KEMENTERIAN TERAKTIF MENGAMPLIFIKASI NARASI TUNGGAL PADA MEDIA SOSIAL

PERIODE JANUARI S.D. MARET 2025

Jakarta, 20 Mei 2025
Ketua Pelaksana Bakohumas selaku
Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan

Marroli J. Indarto

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meraih penghargaan sebagai Kementerian Teraktif Mengamplifikasi Narasi Tunggal Pada Media Sosial. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi dalam menyampaikan informasi yang selaras dan konstruktif kepada publik.

LAPORAN KINERJA 2025

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

#Investasi Tumbuh Indonesia Maju